



BUPATI LUWU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024**





BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 411).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah rencana pembangunan daerah provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Luwu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Luwu.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
22. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati;
 - b. tujuan, sasaran, dan strategi;
 - c. arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah;

- d. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana daerah dan pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun yakni Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembanguna dan Program Perangkat;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
- b. dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
- c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten tetangga.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah, visi pembangunan jangka menengah kabupaten, visi pembangunan jangka menengah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan perangkat daerah serta Peraturan Daerah Lainnya yang berimplementasi terhadap dokumen RPJMD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Luwu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI LUWU



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Agustus 2019

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.04.132.19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sampai dengan Tahun 2024. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Luwu, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta mendorong peran aktif masyarakat. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ini, kami ucapkan terima kasih.

Belopa, Agustus 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang.....	I - 1
	1.2 Dasar Hukum.....	I - 2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I - 6
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	I - 9
	1.5 Sistematika Penulisan	I - 10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-34
	2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-81
	2.4 Aspek Daya Saing	II-184
	2.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II-188
	2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	II-192
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-26
	3.3 Kerangka Pendanaan	III-36
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.2 Isu Strategis	IV-45
	4.3 Permasalahan dan Isu Strategis Kajian TPB Berdasarkan KLHS	IV-76

BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V- 1
	5.1. Visi	V- 1
	5.2. Misi	V- 3
	5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD, RPJPD	V-10
	5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD, RPJMD Provinsi	V-15
	5.5. Keterkaitan RPJPN, RPJPD dan RPJMD.....	V-18
	5.6. Tujuan dan Sasaran	V-18
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
	PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI - 1
	6.1 Strategi.....	VI - 1
	6.2 Arah Kebijakan	VI - 16
	6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI - 27
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	
	PERANGKAT DAERAH	VII - 1
	7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII - 1
	7.2 Program Perangkat Daerah.....	VII - 13
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	
	DAERAH.....	VIII - 1
	8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	VIII - 1
	8.2 Indikator Kinerja Kunci.....	VIII - 2
	8.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal.....	VIII -28
	8.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VIII-33
BAB IX	PENUTUP	IX - 1
	9.1 Pedoman Transisi.....	IX - 1
	9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Tahun 2017	II-2
Tabel 2.2.	Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Ketinggiannya	II-4
Tabel 2.3.	Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu	II-19
Tabel 2.4.	Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu	II-19
Tabel 2.5.	Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu	II-21
Tabel 2.6.	Proyeksi Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Luwu	II-24
Tabel 2.7.	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu	II-26
Tabel 2.8.	Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu	II-28
Tabel 2.9.	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018	II-30
Tabel 2.10.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-31
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	II-32
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-34
Tabel 2.13.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018	II-36
Tabel 2.14.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Luwu	II-37
Tabel 2.15.	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018	II-40
Tabel 2.16.	Perkembangan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2014-2017	II-42
Tabel 2.17.	Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2016-2017	II-45
Tabel 2.18.	Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	II-47
Tabel 2.19.	Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018	II-47
Tabel 2.20.	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2018	II-49

Tabel 2.21.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu	II-51
Tabel 2.22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.....	II-54
Tabel 2.23.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2017	II-55
Tabel 2.24.	Tabel Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu, 2017	II-55
Tabel 2.25.	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2018.....	II-57
Tabel 2.26.	PDB per Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2018.....	II-57
Tabel 2.27.	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Tahun 2014 - 2018.....	II-58
Tabel 2.28.	Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja, Tahun 2014-2018.....	II-59
Tabel 2.29.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2014-2018.....	II-62
Tabel 2.30.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	II-64
Tabel 2.31.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014-2018.....	II-65
Tabel 2.32.	Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2014-2018	II-66
Tabel 2.33.	Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2014-2018	II-68
Tabel 2.34.	Produksi Pertanian Pangan dan Palawija 2014 – 2018	II-72
Tabel 2.35.	Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015-2017	II-74
Tabel 2.36.	Grafik Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2014 - 2017.....	II-82
Tabel 2.37.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018	II-94
Tabel 2.38.	Jumlah Tenaga Kesehatan/Medis Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2017	II-118
Tabel 2.39.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.....	II-119

Tabel 2.40.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018	II-125
Tabel 2.41.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018	II-129
Tabel 2.42.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial Tahun 2014-2018.....	II-131
Tabel 2.43.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018	II-136
Tabel 2.44.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018	II-139
Tabel 2.45.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanahan Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018	II-140
Tabel 2.46.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018	II-142
Tabel 2.47.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2017	II-144
Tabel 2.48.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2014-2018.....	II-145
Tabel 2.49.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018.....	II-146
Tabel 2.50.	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2014-2018.....	II-153
Tabel 2.51.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018	II-154
Tabel 2.52.	Capaian Indikator urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2017.....	II-156
Tabel 2.53.	Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014-2017	II-157

Tabel 2.54.	Kondisi Investasi Berskala Nasional Tahun 2014-2018	II-158
Tabel 2.55.	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2014-2018	II-158
Tabel 2.56.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2014-2018.....	II-159
Tabel 2.57.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2014-2018	II-159
Tabel 2.58.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2014- 2018	II-160
Tabel 2.59.	Capaian Indikator urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014- 2017	II-160
Tabel 2.60.	Jumlah prestasi olahraga Tahun 2013 – 2017.....	II-161
Tabel 2.61.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018.....	II-162
Tabel 2.62.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018	II-163
Tabel 2.63.	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2018	II-164
Tabel 2.64.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018.....	II-165
Tabel 2.65.	Data dan Informasi Kearsipan Daerah	II-166
Tabel 2.66.	Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2014-2018	II-166
Tabel 2.67.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018..	II-167
Tabel 2.68.	Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2018.....	II-171
Tabel 2.69.	PAD Sektor Pariwisata Tahun 2014 – 2018	II-171
Tabel 2.70.	Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Luwu, Tahun 2014 – 2018.	II-171
Tabel 2.71.	Persentase Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan dan perkebunan terhadap PDRB Tahun 2014-2016	II-175
Tabel 2.72.	Produktivitas padi lokal per Hektare Tahun 2014-2018	II-176
Tabel 2.73.	Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2014-2018	II-176
Tabel 2.74.	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Luwu Tahun 2014 -2017 ...	II-177
Tabel 2.75.	Capaian Indikator Layanan Urusan Transmigrasi Tahun 2014- 2017	II-177

Tabel 2.76.	Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan.....	II-178
Tabel 2.77.	Badan Pengelola Keuangan Daerah Opini BPK.....	II-179
Tabel 2.78.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	II-179
Tabel 2.79.	Persentase Program yang Tidak Terlaksana Kabupaten Luwu	II-180
Tabel 2.80.	Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.....	II-180
Tabel 2.81.	Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Luwu.....	II-181
Tabel 2.82.	Persentase Belanja Tidak Langsung	II-181
Tabel 2.83.	Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu	II-182
Tabel 2.84.	Penetapan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.....	II-182
Tabel 2.85.	Data dan Informasi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2018	II-182
Tabel 2.86.	Angka Kiminalitas di Kabupaten Luwu Periode Tahun 2014- 2016	II-186
Tabel 2.87.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Luwu	II-188
Tabel 2.88.	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan	II-189
Tabel 2.89.	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	II-189
Tabel 2.90.	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	II-190
Tabel 2.91.	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	II-191
Tabel 2.92.	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	II-191
Tabel 2.93.	Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Urusan Sosial ...	II-192
Tabel 2.94.	Capaian Target Indikator TPB/SDGS Kabupaten Luwu Tahun 2015-2018	II-194
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.....	III-3
Tabel 3.2.	Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.....	III-4

Tabel 3.3.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018 ..	III-5
Tabel 3.4.	Realisasi PAD dari Pajak Daerah Tahun 2015-2018	III-7
Tabel 3.5.	Realisasi PAD dari Retribusi Daerah Tahun 2015-2018	III-8
Tabel 3.6.	Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2014-2018	III-9
Tabel 3.7.	Realisasi PAD dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2015-2018	III-9
Tabel 3.8.	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Tahun 2014- 2018	III-11
Tabel 3.9.	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2014-2018 .	III-12
Tabel 3.10.	Struktur Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2014-2018	III-13
Tabel 3.11.	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2014-2018	III-16
Tabel 3.12.	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu	III-18
Tabel 3.13.	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2014-2018	III-20
Tabel 3.14.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah	III-23
Tabel 3.15.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018	III-26
Tabel 3.16.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018	III-31
Tabel 3.17.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Tahun 2016-2018	III-32
Tabel 3.18.	Analisis terhadap Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2015-2018.....	III-33
Tabel 3.19.	Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2014-2018.....	III-34
Tabel 3.20.	Komposisi Penutup Defesit Riil Anggaran Tahun 2016-2018 ...	III-35
Tabel 3.21.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Luwu .	III-36
Tabel 3.22.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2018.....	III-36
Tabel 3.23.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020- 2024.....	III-39
Tabel 3.24.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	III-41

Tabel 3.25.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	III-42
Tabel 4.1.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah” Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah”	IV-7
Tabel 4.2.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas Belum Merata	IV-12
Tabel 4.3.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah” Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Terjangkau Secara Merata Seluruh Lapisan Masyarakat”	IV-14
Tabel 4.4.	Identifikasi Permasalahan dan akar Masalah Masih Rendahnya Pendapatan Masyarakat	IV-17
Tabel 4.5.	Identifikasi Permasalahan dan akar Masalah Produktifitas dan Nilai tambah Produk Pertanian Belum Maksimal	IV-18
Tabel 4.6.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah Pengamalan Nilai-Nilai Agama Perlu ditingkatkan	IV-20
Tabel 4.7.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah Masih Tingginya Angka Kemiskinan Di Perdesaan	IV-23
Tabel 4.8.	Indikator Perkembangan Investasi	IV-24
Tabel 4.9.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah Rendahnya Nilai Investasi	IV-24
Tabel 4.10.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pembangunan	IV-26
Tabel 4.11.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	IV-28
Tabel 4.12.	Kejadian Bencana Di Kabupaten Luwu	IV-29
Tabel 4.13.	Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah Resiko yang Ditimbulkan Akibat Bencana Masih Tinggi	IV-31
Tabel 4.14.	Persandingan Substansi Utama RPJMD Kabupaten Wajo (2018-2023), Kota Palopo (2018-2023) dan Kabupaten Luwu Utara (2016-2021)	IV-59
Tabel 4.15.	Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Luwu	IV-70

Tabel 4.16.	Jumlah Penduduk, Tempat Ibadah dan Pendakwah Menurut Kecamatan	IV-74
Tabel 4.17.	Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan	IV-76
Tabel 4.18.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu	IV-77
Tabel 4.19.	Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB	IV-77
Tabel 4.20.	Isu dan Sasaran Strategis Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-81
Tabel 5.1.	Keterkaitan Antara Misi dengan Pokok Visi	V-9
Tabel 5.2.	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024	V-10
Tabel 5.3.	Rumusan Tujuan Indikator serta Target Pembangunan	V-20
Tabel 5.4.	Keterkaitan Antara Misi , Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024	V-28
Tabel 6.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu 2019-2024	VI-2
Tabel 6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu 2019-2024.....	VI-20
Tabel 6.3.	Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif	VI-28
Tabel 7.1.	Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Luwu 2019-2024.....	VII-2
Tabel 7.2.	Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu 2019-2024	VII-3
Tabel 7.3.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 2019-2024	VII-5
Tabel 7.4.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu 2019-2024	VII-10
Tabel 7.5.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.....	VII-12

Tabel 7.6. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023	VII-15
Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024	VIII-1
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024	VIII-4
Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Stadar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024	VIII-30
Tabel 8.4. Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024	VIII-34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.....	I-7
Gambar 1.2.	Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	I-9
Gambar 2.1.	Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu	II-3
Gambar 2.2.	Grafik Jenis Tanah di Kabupaten Luwu.....	II-5
Gambar 2.3.	Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan dengan intensitas dan Macam penggunaan Lahan	II-17
Gambar 2.4.	Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2017.....	II-20
Gambar 2.5.	Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu	II-23
Gambar 2.6.	Grafik Status Daya Dukung Ketersediaan Air Kabupaten Luwu Tahun 2017	II-25
Gambar 2.7.	Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu	II-27
Gambar 2.8.	Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu	II-29
Gambar 2.9.	Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2017.....	II-33
Gambar 2.10.	Grafik Perkembangan Gini Ratio Tahun 2015-2018.....	II-43
Gambar 2.11.	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2018	II-43
Gambar 2.12.	Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2014-2018	II-48
Gambar 2.13.	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2014-2018.....	II-50
Gambar 2.14.	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2014-2018.....	II-52
Gambar 2.15.	Grafik Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2014-2018	II-53
Gambar 2.16.	Garfik Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018.....	II-64

Gambar 2.17. Grafik Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2014-2017	II-70
Gambar 2.18. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2014 – 2017	II-71
Gambar 2.19. Grafik Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2014 - 2017.....	II-73
Gambar 2.20. Grafik Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2014 – 2017	II-76
Gambar 2.21. Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2014 – 2017	II-77
Gambar 2.22. Grafik Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2014 - 2017	II-78
Gambar 2.23. Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2014 – 2017	II-79
Gambar 2.24. Grafik Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2014 – 2017	II-80
Gambar 2.25. Grafik Perkembangan APS PAUD Tahun 2014-2018.....	II-86
Gambar 2.26. Grafik Perkembangan APS Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014-2018.....	II-87
Gambar 2.27. Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2014-2018.....	II-90
Gambar 2.28. Grafik Perkembangan Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018.....	II-91
Gambar 2.29. Grafik Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2014-2018.....	II-92
Gambar 2.30. Grafik Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2014 -2018.....	II-123
Gambar 2.31. Grafik Perbandingan IPG dan IDG Kabupaten Luwu Dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2013-2017...	II-138
Gambar 2.32. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014-2018.....	II-149
Gambar 2.33. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-150
Gambar 2.34. Grafik Perkembangan Akseptor KB Tahun 2014-2018.....	II-151

Gambar 2.35. Grafik Perkembangan Akseptor KB yang menggunakan MKJP Tahun 2014-2018	II-152
Gambar 2.36. Grafik Perkembangan Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2014-2018	II-153
Gambar 2.37. Grafik Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2014-2017	II-185
Gambar 2.38. Grafik Persentase Penduduk Kabupaten Luwu Usia 15 Tahun ke atas menurut pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Tahun 2015-2016	II-187
Gambar 3.1. Grafik Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014-2018	III-4
Gambar 3.2. Grafik Proporsi Komponen PAD terhadap PAD Tahun 2014-2018.....	III-6
Gambar 3.3. Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014-2018.....	III-11
Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2014-2018.....	III-14
Gambar 4.1. Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu	IV-4
Gambar 4.2. Grafik Rata-rata Pertumbuhan PAD beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan	IV-6
Gambar 4.3. Grafik Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017	IV-6
Gambar 4.4. Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017.....	IV-8
Gambar 4.5. Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu, Provinsi Selatan dan Nasional, Tahun 2014-2018	IV-10
Gambar 4.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017.....	IV-11

Gambar 4.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017	IV-16
Gambar 4.8.	Grafik Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017	IV-22
Gambar 4.9.	Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar	IV-79
Gambar 4.10.	Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar	IV-79
Gambar 4.11.	Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar	IV-80
Gambar 4.12.	Jumlah Indikator Dengan Data Belum Tersedia Pada Setiap Pilar.....	IV-81
Gambar 5.1.	Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi	V-2
Gambar 5.2.	Keselarasan Visi RPJPD dengan Visi RPJMD	V-13
Gambar 5.3.	Keselarasan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu	V-14
Gambar 5.4.	Keselarasan Visi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024	V-16
Gambar 5.5.	Keselarasan Misi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024	V-17
Gambar 5.6.	Keterkaitan RPJPN, RPJPD dan RPJMD	V-18
Gambar 5.7.	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	V-19
Gambar 6.1.	Skema Keterkaitan dan POKJA Pelaksanaan RPJMD	VI-15
Gambar 6.2.	Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024	VI-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang masing-masing diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3), RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan telah dilantiknnya **Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd.** dan **Syukur Bijak, SE** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bakti Tahun 2019-2024 pada tanggal 15 Februari 2019, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD dengan peraturan daerah sebagai pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk menghasilkan kebijakan yang selaras dengan aspek tata ruang, penyusunan RPJMD diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Adapun, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, maka perumusan RPJMD telah terintegrasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan

kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Peresiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD ini diharapkan benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005–2025. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, dengan memaksimalkan peran seluruh *stakeholders* melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, dan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) selama periode RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024 adalah landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan konstitusional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sementara landasan operasionalnya didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender (PGU) Dalam Pembangunan Kabupaten Luwu;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1); dan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

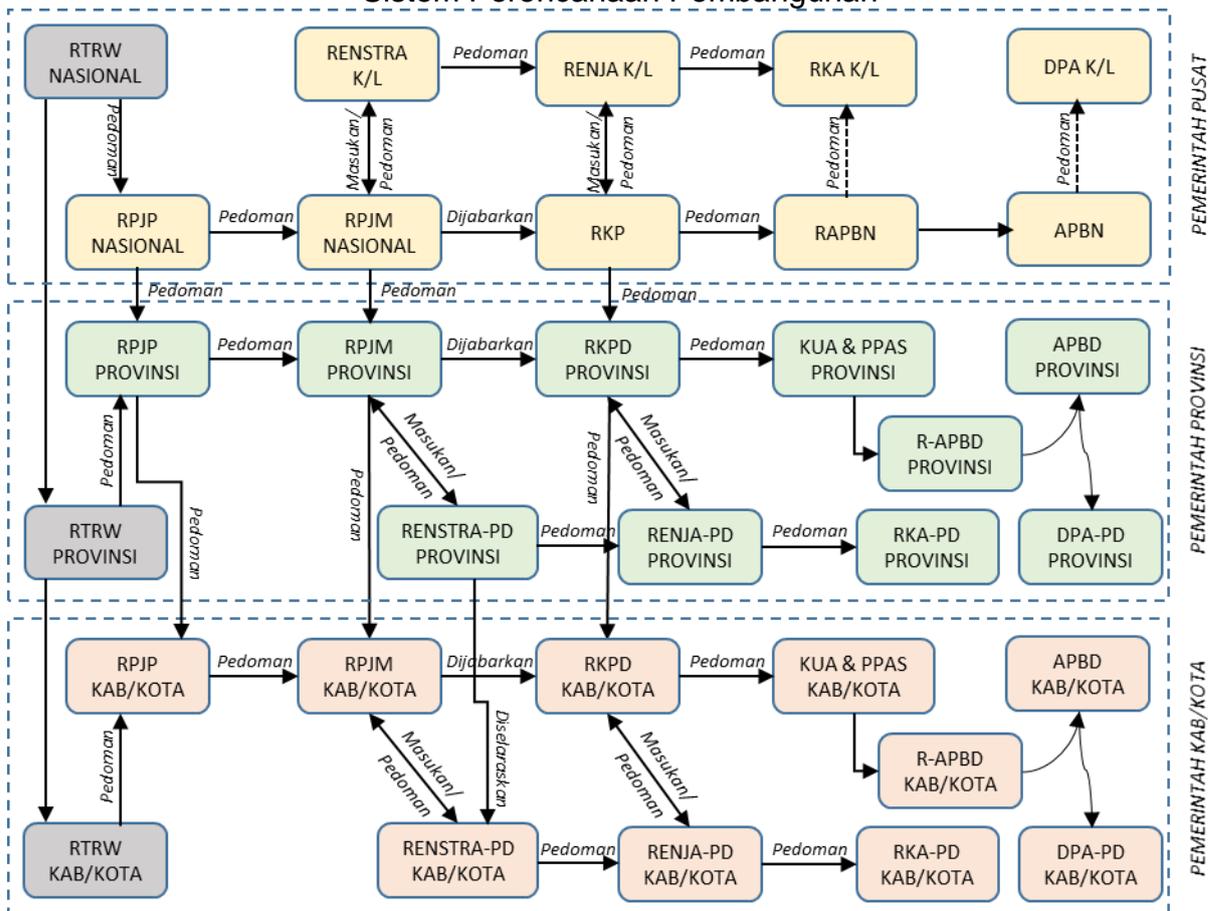
Dokumen RPJMD sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yaitu: RPJPN (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), RPJMN Tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), RPJPD Kabupaten Luwu tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011), dan RTRW Kabupaten Luwu tahun 2011- 2031 (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011). Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Oleh karena itu, kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karenanya, penyusunan RPJMD harus selaras dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota berpedoman pada RPJPN, RPJMN, dan RPJPD serta memperhatikan RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota sekitar. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

Sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Penyusunan dokumen perencanaan sesuai bagan alur pada Gambar 1.1. di atas menunjukkan keterkaitan sebagai berikut:

➤ RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Luwu

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019-2024, juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Luwu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 beserta arah pembangunannya.

➤ RPJMD dengan RTRW Kabupaten Luwu

Penyusunan RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dalam Renstra-PD dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

➤ RPJMD dengan Renstra-PD

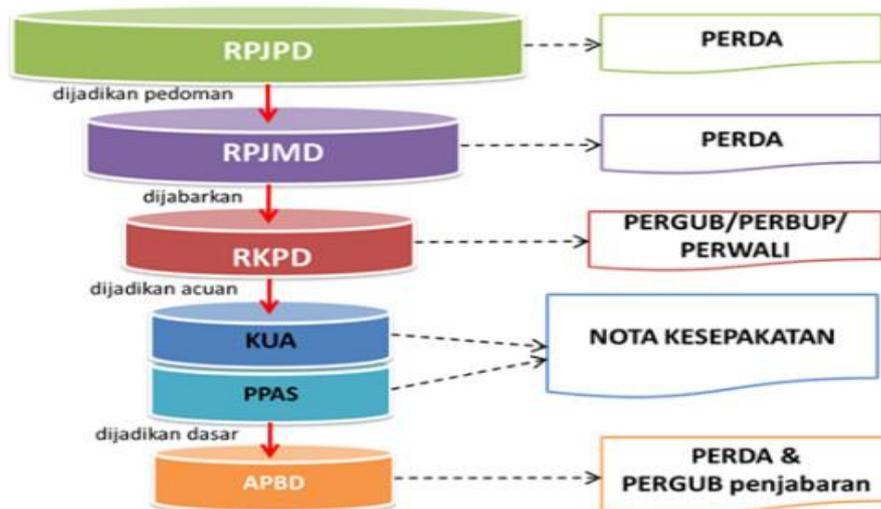
RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu.

➤ RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

Rencana pembangunan tidak bermakna apa-apa jika tidak dianggarkan dalam rencana anggaran. Keterkaitan dokumen rencana pembangunan dan anggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2.
 Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Bagan alur di atas menunjukkan bagaimana dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang saling terkait hingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran. RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dilaksanakan melalui RPJMD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah, dan selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan melalui RKPD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk menjembatani penyusunan APBD yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka disepakati terlebih dahulu KUA dan PPAS yang disusun dengan berpedoman pada RKPD. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sejajar dan saling berhubungan dengan APBD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga, evaluasi R-APBD merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menguji kesesuaian R-APBD dengan KUA dan PPAS, RKPD dan RPJMD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka

menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan daerah. Disamping itu, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah untuk menyediakan dokumen daerah yang akan dijadikan sebagai:

1. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra-PD berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMD serta peningkatan kinerja pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
2. Instrumen penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program pembangunan daerah.
4. Instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
5. Pedoman bagi *stakeholder* dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
6. Dasar bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Luwu berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan struktur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi umum daerah sebagai pijakan awal perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMD yang meliputi: aspek geografi (terkait dengan karakteristik daerah secara administratif maupun alamiah, potensi, bencana, lingkungan hidup) dan demografi (gambaran statistik penduduk). Selain itu juga dijelaskan analisis umum kondisi pembangunan daerah yang dijabarkan kedalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dilengkapi pula dengan hasil evaluasi terhadap RPJMD periode yang lalu dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah sehingga menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat diketahui kemampuan mendanai seluruh program pemerintah daerah, baik untuk kebutuhan belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun pembiayaan daerah mulai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih yang akan dirumuskan dalam Bab VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PRGORAM PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dari RPJMD karena menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi pembangunan, dalam bab ini dirumuskan permasalahan pembangunan daerah maupun permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Analisis bab ini dilengkapi pula dengan isu-isu strategis daerah sebagai hasil dari telaahan terhadap kebijakan pembangunan baik di tingkat daerah, regional, nasional, dan internasional.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program bupati dan wakil bupati terpilih, yang tertuju kepada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJPD. Setiap tujuan diberikan penjelasan ringkas dan setiap sasaran ditentukan kepada tujuan mana yang akan dicapai. Masing-masing tujuan dan sasaran diikuti dengan indikator dan target capaian yang terukur setiap tahun hingga akhir masa jabatan bupati.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif tentang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien melalui strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan. Bab ini dilengkapi dengan arsitektur pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD hingga program pembangunan daerah.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan kerangka pendanaan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Selanjutnya, digambarkan bagaimana urusan pemerintah dilaksanakan seluruh perangkat daerah melalui program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada bagian ini disajikan pula pagu indikatif program, indikator program, dan target kinerja program sampai dengan akhir periode perencanaan pada setiap bidang urusan pemerintahan berdasarkan pagu anggaran setiap tahunnya pada periode tahun 2020-2024.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai target kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah selama lima tahun ke depan.

BAB IX : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan harapan agar segenap pihak dapat berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Luwu, disertai dengan penjelasan mengenai kaidah-kaidah bagaimana melaksanakan RPJMD dan pedoman transisi saat masa jabatan kepala daerah atau perodesasi RPJMD berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah penting dikemukakan sebagai landasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi serta aspek-aspek pembangunan daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat, daya saing dan pelayanan umum.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pemahaman tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam serta kependudukan suatu daerah dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang beribukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2016. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km², merupakan kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km² atau

15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² atau 8,66% dan 247,13 km² atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16%.

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Luwu Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131,00	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,50	5,12
5	Belopa	Tampungia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,10
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,80
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,60	3,15
18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
JUMLAH			207	20	3.000,25	100

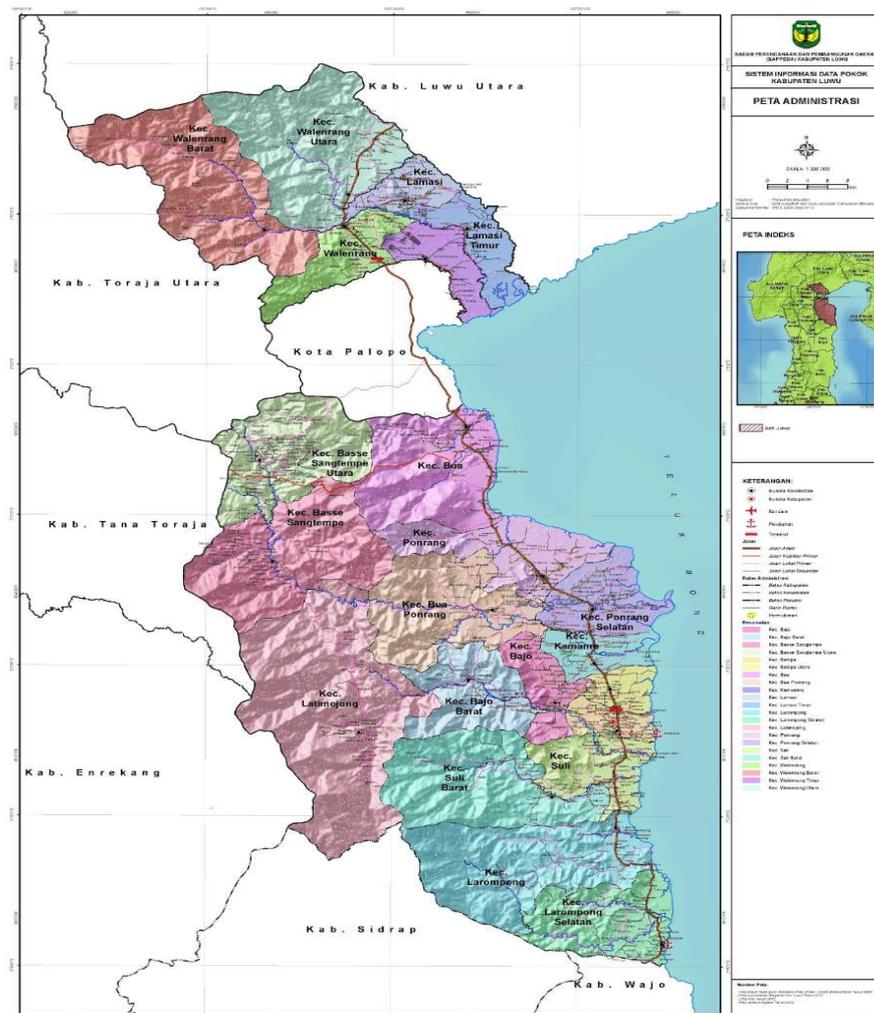
Sumber: BPS Kabupaten Luwu

Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3'45" - 3°37'30" LS dan 119°15" - 121°43'11" BB. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada Tahun 1999 wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan

UU Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Luwu berubah Kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari ibu kota Provinsi yakni Makassar sekitar 300 km.

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, memiliki garis pantai sepanjang 139,92 km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99%serta wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan Taddatta, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun.

Gambar 2.1.
Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu



Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2019

2.1.2. Topografi

Kondisi topografis Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58%, ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m(dpl) sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62%. Topografi wilayah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Tofografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Ketinggiannya

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500-1000 m (dpl)	1000 m (dpl)
1	Larompong	1.807,54	3.944,92	9.479,15	3.728,15	3.563,43
2	Larompong Selatan	2.776,64	4.760,38	4.636,21	926,09	-
3	Suli	4.080,06	3.057,23	1.034,03	-	-
4	Suli Barat	121,38	3.338,78	3.806,05	3.939,32	4.143,98
5	Belopa	4.716,05	1.207,83	-	-	-
6	Kamanre	4.975,49	265,37	-	-	-
7	Belopa Utara	3.471,66	-	-	-	-
8	Bajo	1.896,63	2.311,73	2.642,47	-	-
9	Bajo Barat	316,83	-	2.268,42	2.468,06	234,15
10	Bassesangtempe	-	-	9.601,02	12.130,84	8.366,58
11	Latimojong	-	-	6.524,25	8.964,08	31.285,45
12	Bassesangtempe Utara	-	5.306,79	-	-	-
13	Bupon	1.969,25	5.306,79	7.440,40	3.547,47	-
14	Ponrang	5.864,46	1.716,70	1.348,64	1.779,23	-
15	Ponrang Selatan	9.996,12	-	-	-	-
16	Bua	6.105,67	4.274,99	4.445,76	5.573,21	-
17	Walenrang	-	4.310,23	1.943,32	2.144,70	1.060,15
18	Walenrang Timur	4.086,96	2.277,59	-	-	-
19	Lamasi	913,66	3.017,60	287,80	-	-
20	Walenrang Utara	-	8.012,55	10.300,64	6.701,78	960,23
21	Walerang Barat	-	-	322,93	3.125,62	21.261,67
22	Lamasi Timur	5.162,26	600,61	-	-	-

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik, 2019

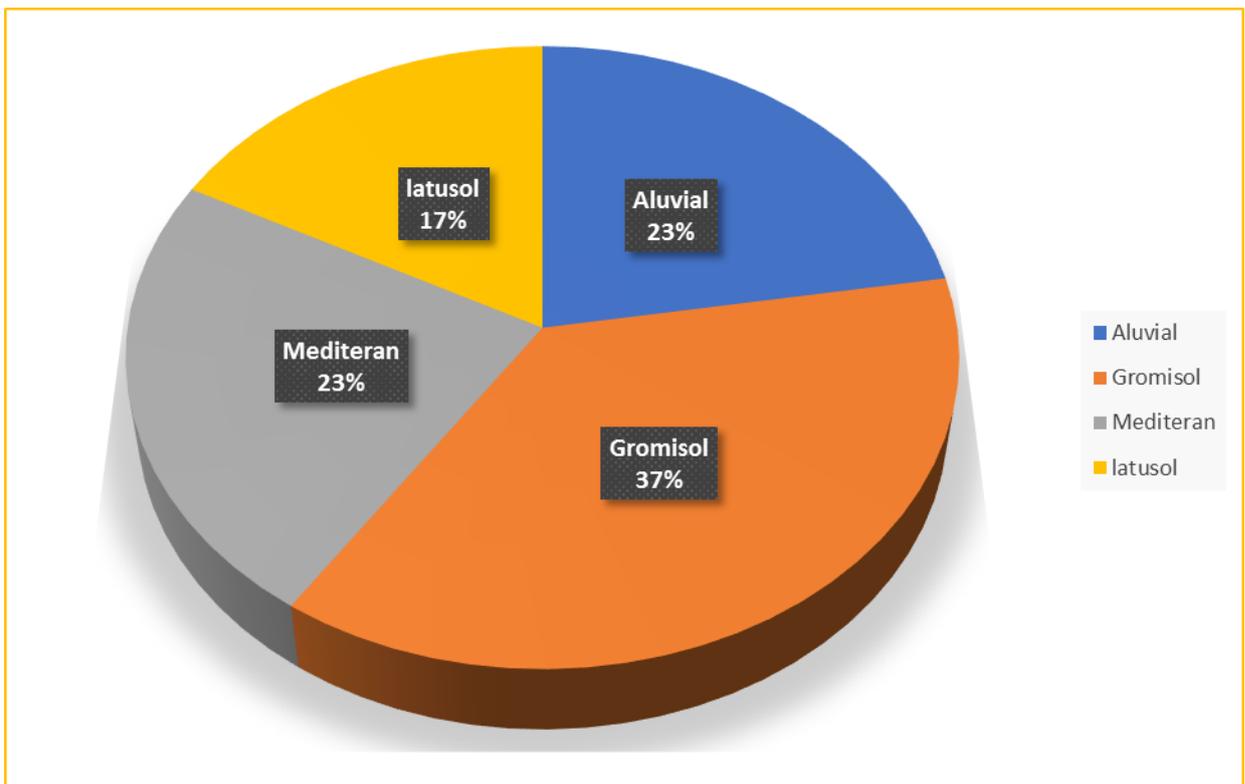
Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh sangat besar dalam pemanfaatan lahan Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu 0-8%

sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha, 15-25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40% sebesar 197.690,77 Ha. Rincian kemiringan lahan berdasarkan Kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut (data RKPD 2019 tabel 2.3 halaman II-5).

2.1.3. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podsolik dengan luasan 66.526,79 ha.

Gambar 2.2.
Grafik Jenis Tanah di Kabupaten Luwu



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di

Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo.

Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, TEMBAGA yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, BESIMANGANIS dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu:

- Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) terdapat di Kecamatan Latimojong.
- Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang Timur.
- Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
- Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli Barat.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

2.1.4. Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat ke arah timur atau ke wilayah Teluk Bone. Kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan

Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 - 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

2.1.5. Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 2000 - 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,60C - 31,60C. Pada musim kemarau dan antara 250C - 280C pada musim penghujan. Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan oktober sampai bulan maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan april sampai dengan bulan september. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata curah hujan selama tahun 2012 berkisar 203,14 mm per bulan.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2012 berkisar dari 22,17°C sampai dengan 32,03°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Bessesangtempe, Bessesangtempe Utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 22,17 °C sampai dengan 30°C sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 21 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksinya menurun.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2015 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Luwu 52,01% digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/ kebun/ ladang/ huma, tambak, kolam/ tebat/ empang, sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2015 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 300.025Ha, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 31.048.10 Ha. Dari 300.025Ha lahan pertanian tersebut, 38.429. Ha diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan lahan bukan sawah atau 230.547Ha.

Pada wilayah pesisir terdapat terumbu karang dengan kedalaman antara 10-15 meter, namun arealnya sedikit berkurang akibat terjadinya perubahan iklim. Untuk itu kegiatan mitigasi mulai dilakukan dengan transplansi karang di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone. Penggunaan lahan pada wilayah ini adalah untuk areal budidaya rumput laut. Kemudian pada wilayah peralihan terdapat ekosistem mangrove yang merupakan peralihan atau gabungan antara ekosistem darat dan laut dimana terdapat habitat berbagai jenis burung, primata, reptil dan berbagai jenis habitat lainnya. Kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut adalah budidaya tambak dengan luas areal pada tahun 2012 tercatat sekitar 10.041,40 Ha.

Pada wilayah pegunungan peruntukan penggunaan lahan lebih banyak digunakan sebagai kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Dalam KBK terdapat sebagian kecil areal persawahan

terasering, dan hamparan tempat memelihara hewan ternak (sapi, Kerbau, kambing dll).

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW) berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.

Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. Adapun potensi pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kawasan lindung tersebar di 19 kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 Ha diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resepan air terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 Ha.
3. Kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan pantai; dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e,

Bua, Lamasi dan Makawa. Dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15meter.

4. Kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di Kecamatan Bua; kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di Kecamatan Suli; kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bubun Lamu terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Benteng Tajajok terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Awa'tondong terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Pantilang terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan Kamanre; kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di Kecamatan Bupon; kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan Suli Barat; dan kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
5. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.
6. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7Ha.
7. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738Ha.
 - b. kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 Ha.
 - c. kawasan perkebunan terdiri dari kawasan pengembangan Tanaman Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Kelapa dengan luas

kurang lebih 4.711 Ha tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; kawasan pengembangan Tanaman Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Bastem dan Latimojong; kawasan pengembangan Tanaman Lada dengan luas kurang lebih 321 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem; kawasan pengembangan tanaman sagu dengan luas kurang lebih 1.462 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan Kawasan perkebunan komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 Ha.

- d. kawasan peternakan terdapat di setiap wilayah kecamatan.
8. Kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Teluk Bone meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli;
 - b. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri atas rumput laut di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Bandeng di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi; dan
 - c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.

9. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua.
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, berada di Teluk Bone Utara.
10. Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :
 - a. Kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;
 - b. Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
 - c. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur.
11. Kawasan peruntukan pemukiman terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terdiri dari kurang lebih 4.464 Ha tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi;

- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari atas kurang lebih 2.773 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan Belopa dan Belopa Utara.

12. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
- b. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;
- c. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
- d. Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
- e. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
- f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang; dan
- g. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Selain potensi pengembangan wilayah yang telah disebutkan di atas masih dapat dilakukan beberapa terobosan pemanfaatan kawasan namun demikian diperlukan kajian komprehensif lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Didalam menyusun suatu perencanaan, aspek rawan bencana perlu diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain:

- a. Tanah longsor (*landslide*) merupakan salah satu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat;
- b. Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari biasanya/normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta mengancam keselamatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
- c. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi adapun kawasan rawan abrasi di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
- d. Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan bencana angin kencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan Walenrang Utara.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan kondisi hutan atau tutupan vegetasi permanen dapat berfungsi mengikat tanah selain menahan laju aliran (*run-off*) sehingga dapat mengurangi tanah longsor, banjir maupun abrasi pantai; Perencanaan bangunan teknik sipil dapat diarahkan untuk mengurangi beban alami, seperti tekanan aliran; Penggunaan lahan seperti pemukiman, persawahan ataupun pembangunan embung seharusnya diaplikasikan menyesuaikan kondisi alam sehingga dapat dicapai keseimbangan alam yang berkualitas, dan yang terpenting adalah penataan hukum mengenai lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Untuk dapat mewujudkan program tersebut, maka dipandang perlu untuk menilai kerawanan bencana tiap-tiap kecamatan.

2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bio ekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap

karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung (supporting).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Kajian daya dukung Kabupaten Luwu menyajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada

kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Gambar 2.3.
Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan dengan intensitas dan Macam penggunaan Lahan

KELAS KEMAMPUAN LAHAN	INTENSITAS DAN PILIHAN PENGGUNAAN MENINGKAT									
	CAGAR ALAM/ HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PENGEMBALAN TERBATAS	PENGEMBALAN SEDANG	PENGEMBALAN INTENSIP	GARAPAN TERBATAS	GARAPAN SEDANG	GARAPAN INTENSIP	GARAPAN SANGAT INTENSIP	
HAMBATAN/ANCAMAN MENINGKAT. KESESUAIAN DAN PILIHAN PENGGUNAAN BERTURUN ↓	I									
	II									
	III									
	IV									
	V									
	VI									
	VII									
	VIII									

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki risiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam,

drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktivitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah/ tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Hasilnya adalah sebesar 2,16% luas lahan kelas II, 0,19% luas lahan kelas III, 23,18% luas lahan kelas V, 72,81 % luas lahan kelas VI, dan 1,66% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai sokum yang sangat dangkal.

Tabel 2.3.
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	6.598,23	2,16
III	586,68	0,19
V	70.722,59	23,18
VI	222.178,74	72,81
VIII	5.057,54	1,66

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Sebaran kelas kemampuan lahan setiap kecamatan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.
Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu

Kecamatan	Kelas				
	II	III	V	VI	VIII
BAJO	653,32		2.458,58	2.785,86	
BAJO BARAT	365,61		1.416,53	8.867,36	
BASSESANGTEMPE				48.830,69	
BELOPA	141,01		2.547,92	549,86	
BELOPA UTARA			3.095,57		
BUA	1.430,98		4.626,72	12.791,90	85,74
BUAPONRANG	1.058,52		3.345,38	11.212,46	180,42
KAMANRE			4.756,22		489,35
LAMASI			3.907,47		351,68
LAMASI TIMUR			6.556,58		
LAROMPONG		426,90	2.437,83	21.725,78	
LAROMPONG SELATAN	2.254,84	159,78	820,24	6.383,72	
LATIMOJONG				34.170,87	
PONRANG	85,56		6.970,57	3.981,83	
PONRANG SELATAN			9.761,45		
SULI	432,33		4.599,79	3.010,36	
SULI BARAT			743,81	18.289,71	
WALENRANG			2.781,23	1.479,65	51,92
WALENRANG BARAT			80,13	30.762,24	
WALENRANG TIMUR			6.601,84	93,85	
WALENRANG UTARA	176,07		3.214,72	17.242,58	3.898,43
Total	6.598,23	586,68	70.722,59	222.178,74	5.057,54

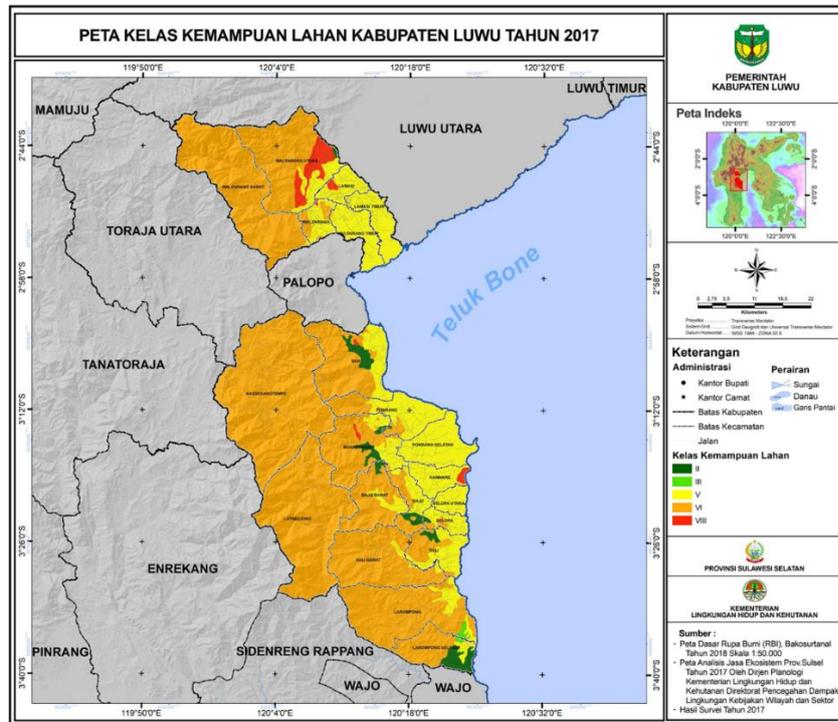
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Luwu umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air, terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat, hanya cocok untuk tanaman permanen atau dihutankan. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas, daerah yang tidak sesuai dengan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Basesangtempe (48.830,69 ha), Kecamatan Latimojong (34.170,87 ha), Kecamatan Walenrang Barat (30.762,24 ha) dan beberapa kecamatan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah

yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal.

Gambar 2.4.
Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2017



Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

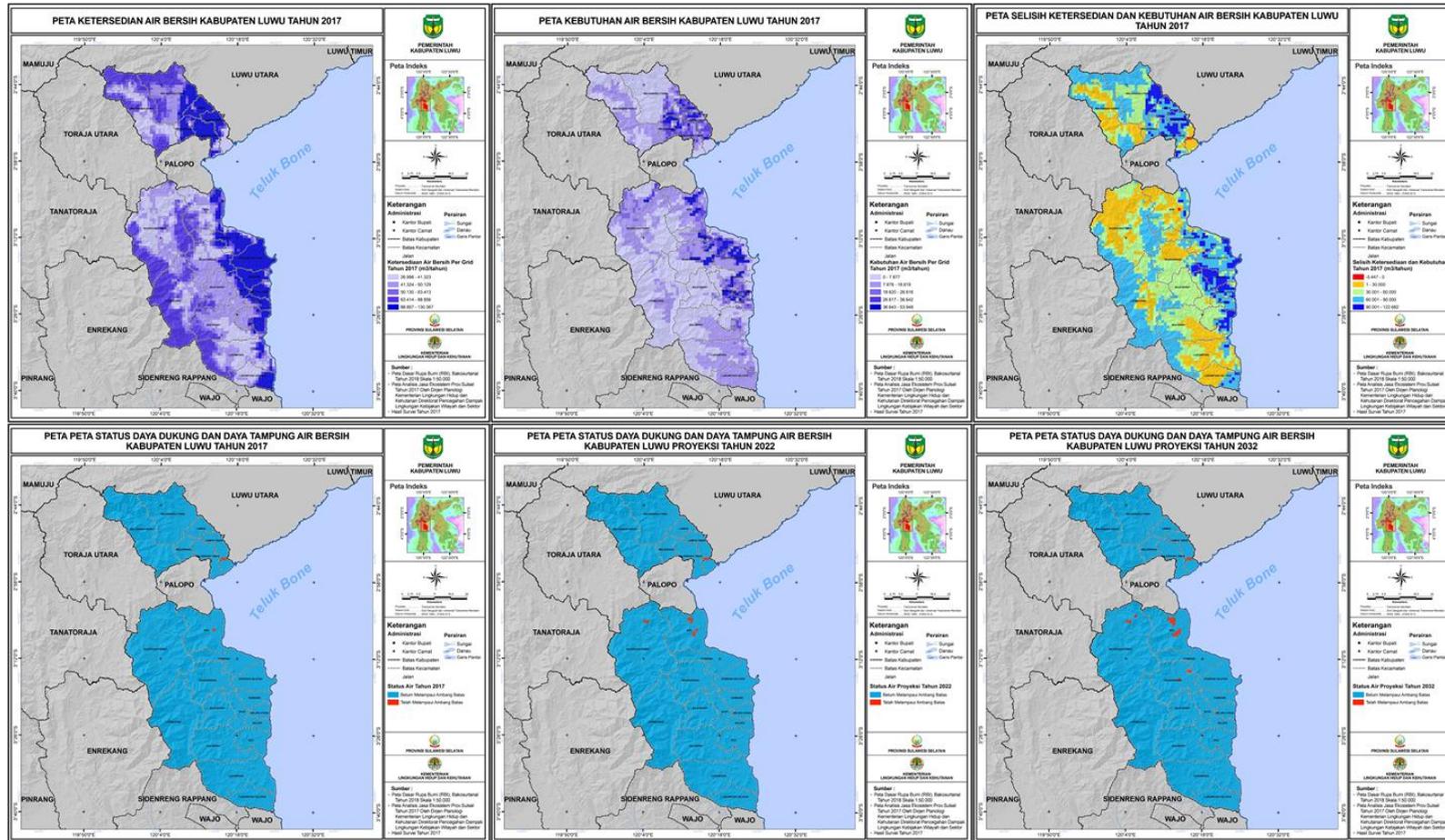
Tabel 2.5.
Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih
di Kabupaten Luwu

Kecamatan	Status Air Tahun 2017 (m ³ /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
BAJO	6.951.306,55	1.002.820,71	5.948.485,84
BAJO BARAT	7.818.874,17	170.558,30	7.648.315,88
BASSESANGTEMPE	32.564.862,62	5.272.984,55	27.291.878,07
BELOPA	5.227.987,77	983.365,85	4.244.621,92
BELOPA UTARA	5.365.864,11	1.027.169,13	4.338.694,98
BUA	15.450.151,80	3.720.772,77	11.729.379,03
BUAPONRANG	13.472.313,49	2.457.519,45	11.014.794,04
KAMANRE	9.040.440,19	1.219.569,39	7.820.870,80
LAMASI	8.376.108,13	1.890.821,91	6.485.286,22
LAMASI TIMUR	8.264.462,71	2.146.957,74	6.117.504,97
LAROMPONG	18.103.380,17	3.072.078,35	15.031.301,82
LAROMPONG SELATAN	9.308.859,54	2.077.731,84	7.231.127,70
LATIMOJONG	28.519.566,67	1.191.640,32	27.327.926,35
PONRANG	13.125.524,42	3.119.581,64	10.005.942,79
PONRANG SELATAN	14.353.214,09	2.606.116,43	11.747.097,66
SULI	8.032.471,92	787.384,94	7.245.086,99
SULI BARAT	13.802.335,39	1.610.218,31	12.192.117,09
WALENRANG	6.145.939,95	1.899.296,12	4.246.643,84
WALENRANG BARAT	24.252.097,57	3.037.823,46	21.214.274,11
WALENRANG TIMUR	10.142.069,02	2.159.490,02	7.982.579,00
WALENRANG UTARA	24.126.249,87	1.502.679,45	22.623.570,42
Total	282.444.080,16	42.956.580,63	239.487.499,53

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Luwu sebesar 282.444.080,16 m³/tahun, sementara kebutuhan sebesar 42.956.580,63 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 239.487.499,53 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Latimojong (27.327.926,79 m³/Tahun), dan Bessesangtempe (27.291.878,07 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Belopa (4.244.621,92 m³/tahun).

Gambar 2.5.
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu



Adapun proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Luwu untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel 6.5. Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2022, 2027 dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1- 2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 2022, 2027 dan 2032 kebutuhan air di Kabupaten Luwu masing-masing 44.862.628,11 m³/tahun, 46.864.325,96 m³/tahun, 48.966.962,83 m³/tahun.

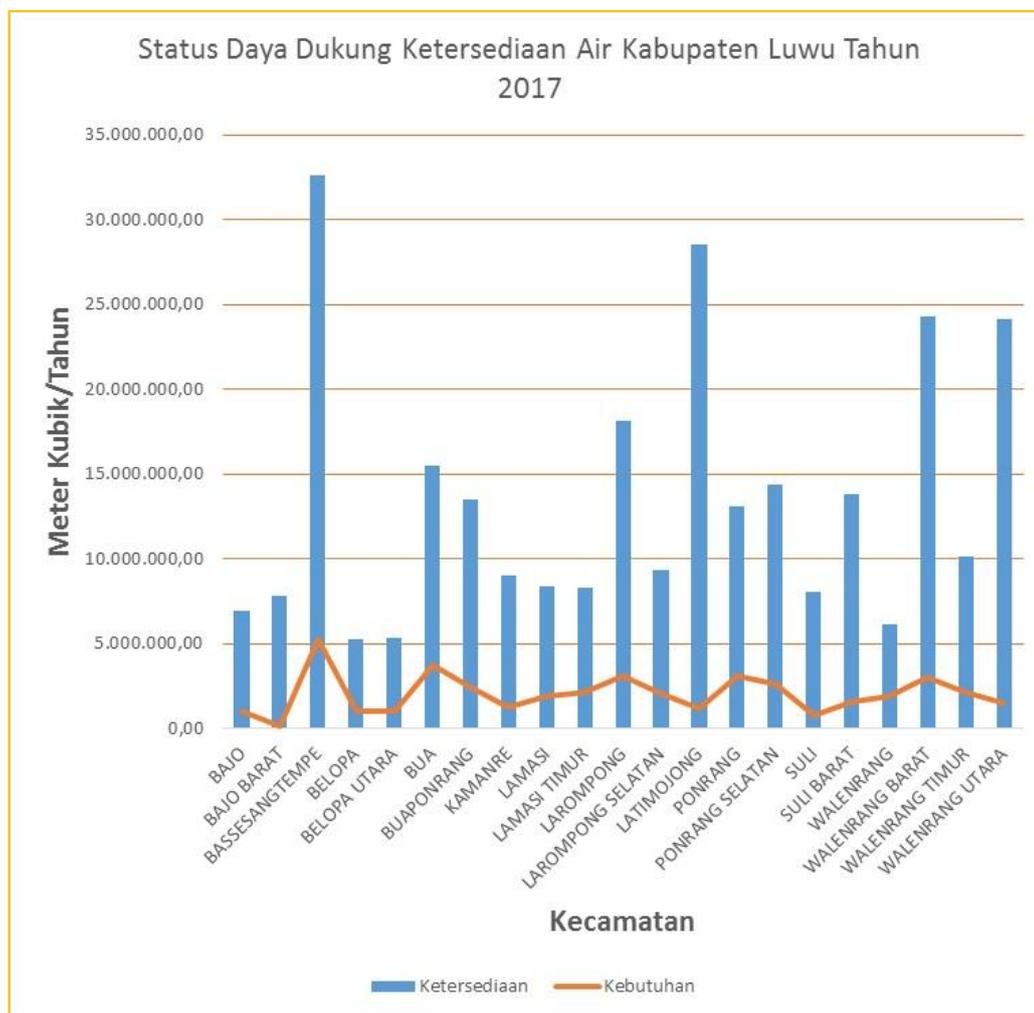
Tabel 2.6.
Proyeksi Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Luwu

Kecamatan	Volume Status Air (m ³ /tahun)				
	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
BAJO	6.951.306,55	1.002.820,71	1.059.852,40	1.120.127,56	1.183.830,64
BAJO BARAT	7.818.874,17	170.558,30	181.482,66	193.106,74	205.475,35
BASSESANGTEMPE	32.564.862,62	5.272.984,55	5.595.140,56	5.936.978,87	6.299.702,00
BELOPA	5.227.987,77	983.365,85	1.060.732,26	1.144.185,48	1.234.204,40
BELOPA UTARA	5.365.864,11	1.027.169,13	1.103.884,46	1.186.329,37	1.274.931,77
BUA	15.450.151,80	3.720.772,77	3.970.854,81	4.237.745,46	4.522.574,48
BUAPONRANG	13.472.313,49	2.457.519,45	2.529.769,94	2.604.144,57	2.680.705,80
KAMANRE	9.040.440,19	1.219.569,39	1.262.141,44	1.306.199,58	1.351.795,67
LAMASI	8.376.108,13	1.890.821,91	1.945.154,09	2.001.047,49	2.058.546,98
LAMASI TIMUR	8.264.462,71	2.146.957,74	2.204.754,45	2.264.107,07	2.325.057,48
LAROMPONG	18.103.380,17	3.072.078,35	3.221.598,78	3.378.396,50	3.542.825,68
LAROMPONG SELATAN	9.308.859,54	2.077.731,84	2.126.659,79	2.176.739,94	2.227.999,41
LATIMOJONG	28.519.566,67	1.191.640,32	1.221.651,72	1.252.418,95	1.283.961,05
PONRANG	13.125.524,42	3.119.581,64	3.218.518,68	3.320.593,49	3.425.905,59
PONRANG SELATAN	14.353.214,09	2.606.116,43	2.682.949,01	2.762.046,75	2.843.476,43
SULI	8.032.471,92	787.384,94	808.155,37	829.473,72	851.354,42
SULI BARAT	13.802.335,39	1.610.218,31	1.684.094,34	1.761.359,77	1.842.170,10
WALENRANG	6.145.939,95	1.899.296,12	2.001.234,16	2.108.643,37	2.221.817,39
WALENRANG BARAT	24.252.097,57	3.037.823,46	3.165.187,03	3.297.890,44	3.436.157,56
WALENRANG TIMUR	10.142.069,02	2.159.490,02	2.275.595,71	2.397.943,87	2.526.870,12
WALENRANG UTARA	24.126.249,87	1.502.679,45	1.543.216,43	1.584.846,96	1.627.600,53
Total	282.444.080,16	42.956.580,63	44.862.628,11	46.864.325,96	48.966.962,83

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah melebihi ketersediaan airnya pada tahun 2022, 2027 dan 2032.

Gambar 2.6.
Grafik Status Daya Dukung Ketersediaan Air Kabupaten Luwu Tahun 2017



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu sebesar 1.203.352.091,24 Kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 346.630.791,00 Kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 856.721.300,24 Kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Bessesangtempe (117.228.559,41 Kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Walenrang (6.467.389,88 Kkal/tahun).

Tabel 2.7.
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan
di Kabupaten Luwu

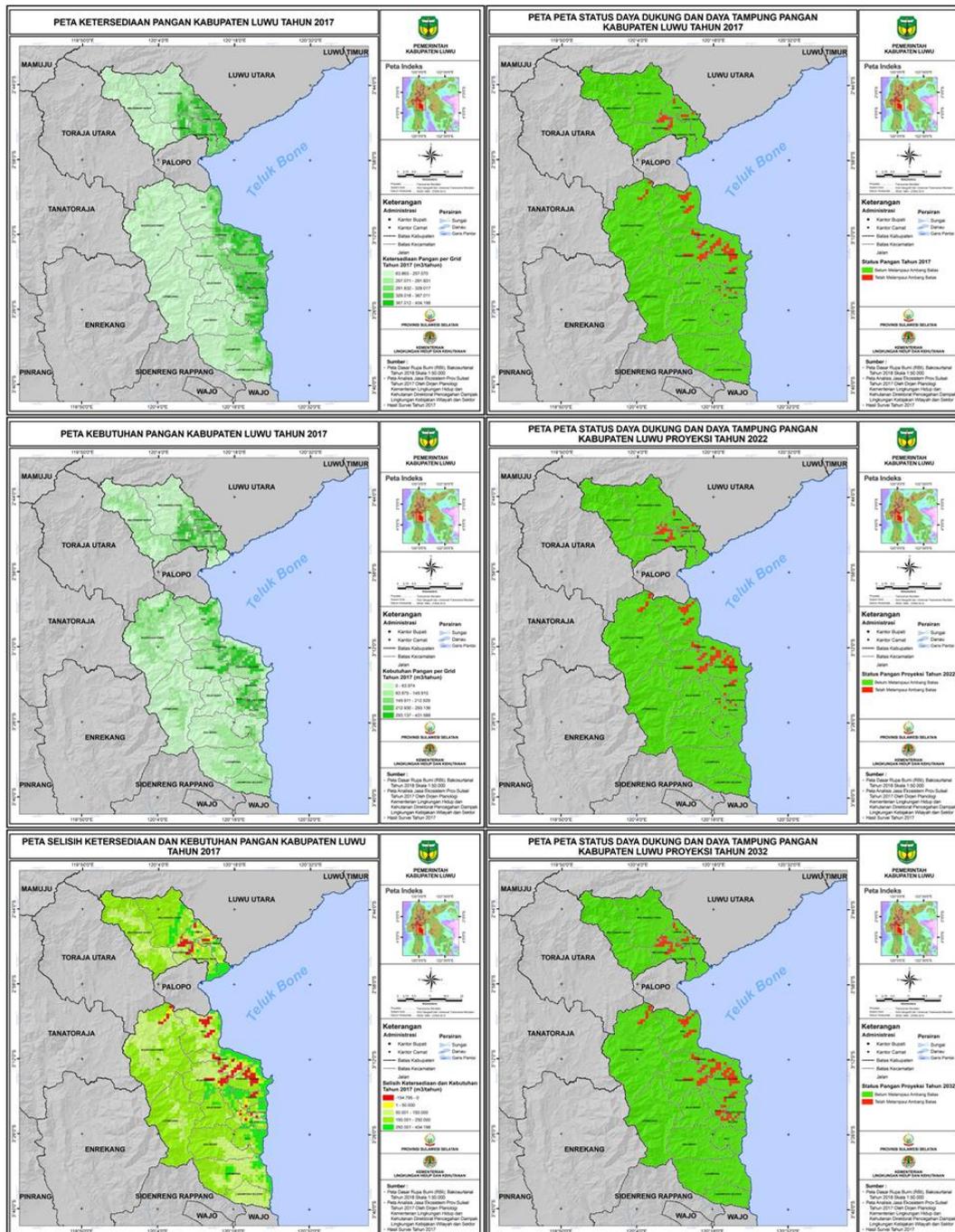
Kecamatan	Status Pangan Tahun 2017 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
BAJO	28.517.758,82	8.022.565,68	20.495.193,14
BAJO BARAT	39.646.127,66	1.364.466,36	38.281.661,30
BASSESANGTEMPE	160.818.915,09	43.590.355,68	117.228.559,41
BELOPA	19.690.891,21	7.866.926,76	11.823.964,45
BELOPA UTARA	20.108.023,15	8.236.449,84	11.871.573,31
BUA	72.686.857,84	29.766.182,16	42.920.675,68
BUAPONRANG	60.763.028,07	19.660.155,60	41.102.872,47
KAMANRE	29.502.384,22	9.756.555,12	19.745.829,10
LAMASI	25.263.159,59	15.126.575,28	10.136.584,31
LAMASI TIMUR	37.499.838,31	17.175.661,92	20.324.176,39
LAROMPONG	91.913.730,18	24.696.936,60	67.216.793,58
LAROMPONG SELATAN	37.874.125,30	16.621.854,72	21.252.270,58
LATIMOJONG	114.964.312,00	9.533.122,56	105.431.189,44
PONRANG	53.828.613,72	24.956.653,08	28.871.960,64
PONRANG SELATAN	49.021.087,24	20.848.931,40	28.172.155,84
SULI	36.288.862,24	6.299.079,48	29.989.782,76
SULI BARAT	67.732.203,42	12.881.746,44	54.850.456,98
WALENRANG	21.661.758,80	15.194.368,92	6.467.389,88
WALENRANG BARAT	108.835.867,70	25.734.847,68	83.101.020,02
WALENRANG TIMUR	36.595.244,04	17.275.920,12	19.319.323,92
WALENRANG UTARA	90.139.302,63	12.021.435,60	78.117.867,03
Total	1.203.352.091,24	346.630.791,00	856.721.300,24

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Ketersediaan pangan dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, mata pencarian, dan ketinggian tempat. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan

keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Gambar 2.7.
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Adapun proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Luwu untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8.
Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Luwu

Kecamatan	Volume Status Pangan (kkal/tahun)				
	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
BAJO	28.517.758,82	8.022.565,68	8.478.819,22	8.961.020,49	9.470.645,16
BAJO BARAT	39.646.127,66	1.364.466,36	1.451.861,28	1.544.853,91	1.643.802,77
BASSESANGTEMPE	160.818.915,09	43.590.355,68	46.253.533,43	49.079.419,55	52.077.954,80
BELOPA	19.690.891,21	7.866.926,76	8.485.858,07	9.153.483,87	9.873.635,21
BELOPA UTARA	20.108.023,15	8.236.449,84	8.851.598,75	9.512.690,79	10.223.157,25
BUA	72.686.857,84	29.766.182,16	31.766.838,49	33.901.963,72	36.180.595,82
BUAPONRANG	60.763.028,07	19.660.155,60	20.238.159,50	20.833.156,58	21.445.646,44
KAMANRE	29.502.384,22	9.756.555,12	10.097.131,54	10.449.596,62	10.814.365,36
LAMASI	25.263.159,59	15.126.575,28	15.561.232,75	16.008.379,96	16.468.375,81
LAMASI TIMUR	37.499.838,31	17.175.661,92	17.638.035,63	18.112.856,58	18.600.459,84
LAROMPONG	91.913.730,18	24.696.936,60	25.898.955,68	27.159.477,97	28.481.350,85
LAROMPONG SELATAN	37.874.125,30	16.621.854,72	17.013.278,35	17.413.919,51	17.823.995,27
LATIMOJONG	114.964.312,00	9.533.122,56	9.773.213,73	10.019.351,58	10.271.688,40
PONRANG	53.828.613,72	24.956.653,08	25.748.149,40	26.564.747,91	27.407.244,70
PONRANG SELATAN	49.021.087,24	20.848.931,40	21.463.592,11	22.096.374,03	22.747.811,40
SULI	36.288.862,24	6.299.079,48	6.465.242,99	6.635.789,74	6.810.835,34
SULI BARAT	67.732.203,42	12.881.746,44	13.472.754,70	14.090.878,14	14.737.360,77
WALENRANG	21.661.758,80	15.194.368,92	16.009.873,26	16.869.146,94	17.774.539,11
WALENRANG BARAT	108.835.867,70	25.734.847,68	26.813.805,08	27.937.998,78	29.109.325,34
WALENRANG TIMUR	36.595.244,04	17.275.920,12	18.204.765,71	19.183.550,99	20.214.960,98
WALENRANG UTARA	90.139.302,63	12.021.435,60	12.345.731,47	12.678.775,69	13.020.804,27
Total	1.203.352.091,24	346.630.791,00	362.032.431,18	378.207.433,34	395.198.554,88

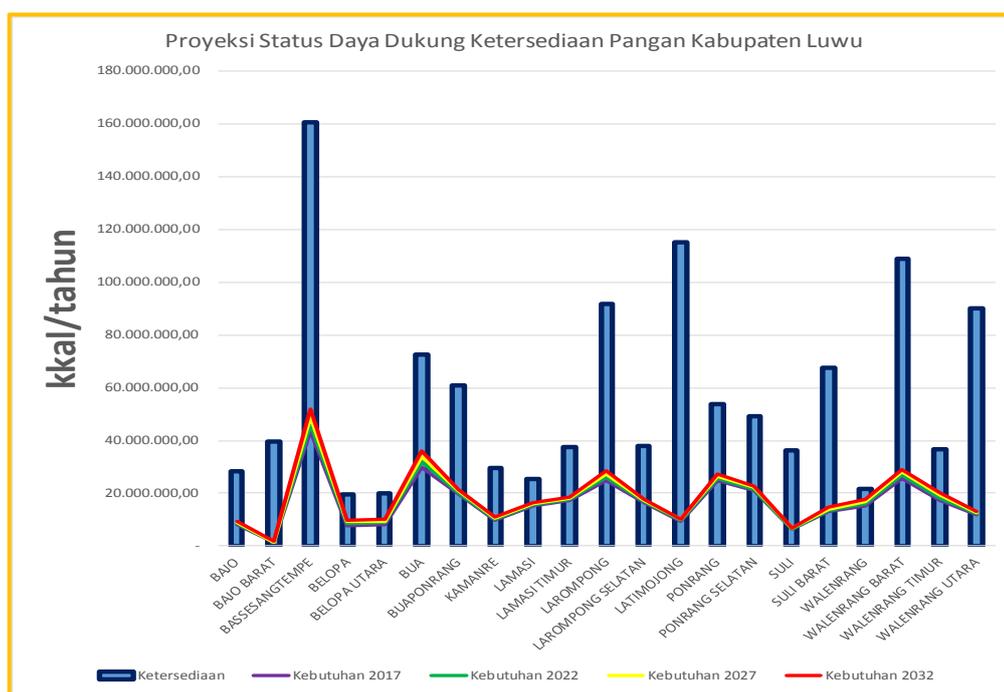
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 2022, 2027, dan 2032. Hal ini sudah cukup bagus dalam menetapkan masalah pangan yang juga menjadi tanggung jawab unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari di kabupaten Luwu dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing kelompok dapat berbeda-beda pada setiap rumah tangga sesuai sumber pangan yang tersedia. Secara nasional bahan pangan dikelompokkan sebagai berikut: (1) Padi-padian: beras, jagung, sorgum dan terigu (2) Umbi-umbian: ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lainnya (3) Pangan hewani: ikan, daging, susu dan telur (4) Minyak dan lemak: minyak kelapa, minyak sawit (minyak goreng, minyak jagung, margarin) (5) Buah/biji berminyak: kelapa, kemiri, jambu mete dan cokelat (6) Kacang-kacangan: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang lainnya (7) Gula: gula pasir, gula merah (8)

Sayur dan buah: semua jenis sayuran dan buah-buahan yang biasa dikonsumsi (9)
 Lain-lain: teh, kopi, sirup, rempah-rempah, makanan dan minuman jadi.

Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi aparatur, lembaga swasta dan masyarakat lainnya, perlu ada gerakan-gerakan yang mampu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu cara untuk memotivasi kelompok tani, lembaga pedesaan (Koperasi Tani, KUD, dan sebagainya) dan aparatur pelayanan agar lebih efektif berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani, adalah dengan penyelenggaraan perlombaan ketahanan pangan. Perlembagaan ini telah diyakini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi petani secara aktif agar petani mau dan mampu meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Gambar 2.8.
 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019

2.1.10. Demografi

Penjelasan mengenai aspek demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi. Analisis kependudukan dapat dilakukan secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, usia, agama, dan lain-lain.

Penduduk Kabupaten Luwu menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data BPS, Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,49%, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,88%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 0,96%. Jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 347.096 jiwa, meningkat menjadi 356.305 jiwa pada tahun 2017 dan diproyeksikan menjadi 359.209 pada tahun 2018. Kepadatan penduduk pada tahun 2014 adalah 116 jiwa/km², meningkat menjadi 119 jiwa/km² pada tahun 2017. Rasio jenis kelamin adalah 96,34 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki.

Tabel 2.9.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Sex Ratio
1	2014	347.096	0,96	116	96,34
2	2015	350.218	0,90	117	96,34
3	2016	353.277	0,87	118	96,34
4	2017	356.305	0,86	119	96,34
5	2018	359.209	0,82	120	96,20

Sumber: BPS Tahun 2018.

Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik. Pada tahun 2017, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu 35.321 jiwa atau sebesar 9,91%, diikuti Kecamatan Ponrang dengan jumlah penduduk dan jumlah 27.264 jiwa 7,65% dan Kecamatan Ponrang Selatan yaitu 24.648 jiwa atau 6,92%. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Latimojong dengan jumlah 5.603 jiwa atau 1,57%, diikuti Kecamatan

Bassesangtempe dengan jumlah penduduk 7.182 jiwa atau 2,02%, dan Kecamatan Suli Barat dengan jumlah penduduk 9.188 jiwa atau 2,58%.

Tabel 2.10.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Larompong	20.525	225,25	91
2	Larompong Selatan	16.150	131	123
3	Suli	19.032	81,75	233
4	Suli Barat	9.188	153,5	60
5	Belopa	17.378	59,26	293
6	Kamanre	11.827	52,44	226
7	Belopa Utara	16.904	34,73	487
8	Bajo	15.838	68,52	231
9	Bajo Barat	10.557	66,3	159
10	Bassesangtempe	7.182	178,12	40
11	Latimojong	5.603	467,75	12
12	Basse sangtempe Utara	8.449	122,88	69
13	Bupon	14.506	182,67	79
14	Ponrang	27.264	107,09	255
15	Ponrang Selatan	24.648	99,98	247
16	Bua	35.321	204,01	173
17	Walentrang	19.235	94,6	203
18	Walentrang Timur	15.582	63,65	245
19	Lamasi	20.885	42,2	495
20	Walentrang Utara	18.304	259,77	70
21	Walentrang Barat	9.531	247,13	39
22	Lamasi Timur	12.396	57,65	215
JUMLAH		356.305	3.000,25	126

Sumber :BPS Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu adalah 126 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Lamasi dengan tingkat kepadatan 495 jiwa/km², diikuti Kecamatan Belopa Utara dengan tingkat kepadatan 487 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Latimojong yaitu 12 jiwa/km², diikuti Kecamatan Walentrang Barat dengan kepadatan 39 jiwa/km².

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2017 lebih banyak

dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 174.829 jiwa atau 49,07%, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 181.476 jiwa atau 50,93%.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Penduduk		Rasio Jenis Kelamin
					Laki-Laki	Perempuan	
1	Larompong	10.243	10.282	20.525	49,90	50,10	99,62
2	Larompong Selatan	7.912	8.238	16.150	48,99	51,01	96,04
3	Suli	9.044	9.988	19.032	47,52	52,48	90,55
4	Suli Barat	4.625	4.563	9.188	50,34	49,66	101,36
5	Belopa	8.117	9.261	17.378	46,71	53,29	87,65
6	Kamanre	5.645	6.182	11.827	47,73	52,27	91,31
7	Belopa Utara	8.230	8.674	16.904	48,69	51,31	94,88
8	Bajo	7.461	8.377	15.838	47,11	52,89	89,07
9	Bajo Barat	5.241	5.316	10.557	49,64	50,36	98,59
10	Bassesangtempe	3.658	3.524	7.182	50,93	49,07	103,80
11	Latomojong	2.882	2.721	5.603	51,44	48,56	105,92
12	Bassesangtempe Utara	4.415	4.034	8.449	52,25	47,75	109,44
13	Bupon	7.186	7.320	14.506	49,54	50,46	98,17
14	Ponrang	13.545	13.719	27.264	49,68	50,32	98,73
15	Ponrang Selatan	11.828	12.820	24.648	47,99	52,01	92,26
16	Bua	17.027	18.294	35.321	48,21	51,79	93,07
17	Walentrang	9.496	9.739	19.235	49,37	50,63	97,50
18	Walentrang Timur	7.707	7.875	15.582	49,46	50,54	97,87
19	Lamasi	10.338	10.547	20.885	49,50	50,50	98,02
20	Walentrang Utara	9.157	9.147	18.304	50,03	49,97	100,11
21	Walentrang Barat	4.982	4.549	9.531	52,27	47,73	109,52
22	Lamasi Timur	6.090	6.306	12.396	49,13	50,87	96,57
JUMLAH		174.829	181.476	356.305	49,07	50,93	96,34

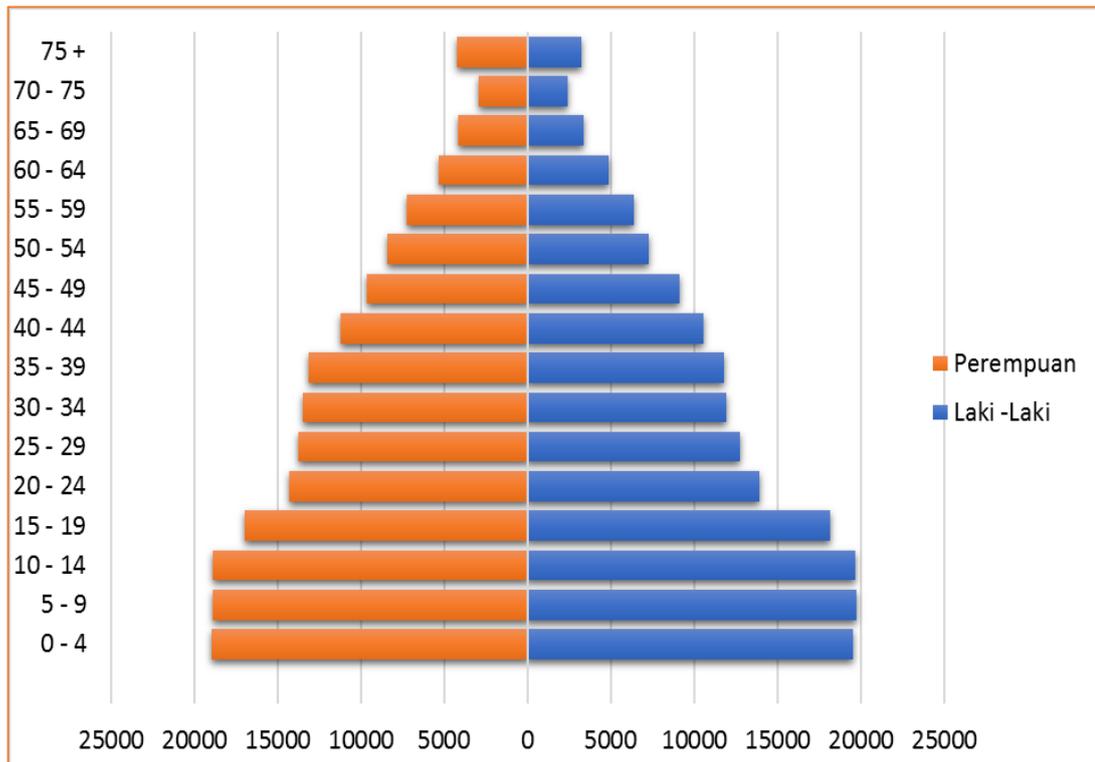
Sumber : BPS Tahun 2019.

Dalam analisis demografi, terdapat suatu analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini.

Kabupaten Luwu sudah memasuki periode bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) berjumlah 220.258 jiwa atau sebesar 61,83% pada tahun 2017. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Luwu jumlahnya adalah 115.658 jiwa atau 32,47% dari seluruh

penduduk, sementara penduduk usia pensiun (usia 65 tahun ke atas) totalnya mencapai 20.305 jiwa atau 5,70%. Jika kelompok usia tidak produktif ini ditambahkan, maka proporsi penduduk berusia tidak produktif mencapai 135.963 atau 38,17%. Hal ini merupakan keuntungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.

Gambar 2.9.
Piramida Penduduk Kabupaten Luwu
Tahun 2017



Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, jumlah penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 2017 adalah 374.512 jiwa, dimana 322.586 jiwa atau 86,14% memeluk agama Islam. Seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu penduduknya mayoritas beragama Islam. Penduduk dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah beragama Kristen Protestan dan Katolik, masing-masing sebesar 12,74% dan 1,11%. Komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Kabupaten Luwu.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut Menurut Kecamatan
Tahun 2017

No	Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Larompong	21.250	21	1	0	0	3
2	Larompong Selatan	17.776	212	9	0	0	
3	Suli	21.065	122	81	0	0	
4	Suli Barat	10.400	0	1	0	0	
5	Belopa	17.610	45	15	0	0	1
6	Kamanre	12.391	104	20	0	0	1
7	Belopa Utara	17.864	83	24	0	0	
8	Bajo	15.871	149	57	0	0	
9	Bajo Barat	10.285	104	0	1	0	
10	Basse sangtempe	5.649	419	8	0	0	
11	Latimojong	5.611	479	37	0	0	
12	Bassesangtempe Utara	3.645	4263	36	0	0	
13	Bupon	14.465	574	53	1	0	
14	Ponrang	21.269	5851	732	0	1	
15	Ponrang Selatan	25.257	268	240	0	0	1
16	Bua	29.799	1329	233	26	6	5
17	Walenrang	14.021	4713	430	14	0	
18	Walenrang Timur	11.463	6615	261	1	0	
19	Lamasi	17.050	5069	493	0	0	
20	Walenrang Utara	19.624	1125	253	1	0	
21	Walenrang Barat	3.895	6062	790	0	0	
22	Lamasi Timur	6.321	7699	379	0	0	
JUMLAH		322.586	47.706	4.153	45	7	15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan jumlah penduduk antara data BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun yang sama disebabkan berbedanya metode pengukuran.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang dicapai. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari berbagai aspek yaitu pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Kabupaten Luwu tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PRDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

PDRB Kabupaten Luwu menurut harga konstan tahun 2010, mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018). Pada tahun 2014, PDRB Harga Konstan Kabupaten Luwu sebesar Rp.6,93 triliun, meningkat menjadi 9,16 triliun pada tahun 2018 atau meningkat rata-rata 555,28 miliar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.13.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2018

No	Sektor	Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp (Juta)	%								
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.527.361,38	50,87	3.756.046,50	50,50	4.046.082,70	50,43	4.264.683,65	49,78	4.565.057,37	49,86
2	Pertambangan dan Penggalian	159.186,92	2,30	168.828,18	2,27	184.040,15	2,29	200.405,63	2,34	212.832,25	2,32
3	Industri Pengolahan	316.153,28	4,56	330.204,24	4,44	359.808,82	4,48	387.109,02	4,52	414.029,69	4,52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.191,39	0,13	8.525,49	0,11	10.071,35	0,13	10.665,96	0,12	11.465,23	0,13
5	Pengadaan Air	1.174,39	0,02	1.180,97	0,02	1.299,31	0,02	1.409,30	0,02	1.498,17	0,02
6	Konstruksi	613.476,87	8,85	646.042,60	8,69	676.594,18	8,43	710.449,84	8,29	756.961,10	8,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	790.692,05	11,40	864.502,94	11,62	943.159,48	11,76	1.004.947,83	11,73	1.080.044,47	11,80
8	Transportasi & Pergudangan	55.447,08	0,80	59.148,67	0,80	61.940,17	0,77	65.729,95	0,77	74.812,93	0,82
9	Penyedia Akomodasi & Makan Minum	50.810,72	0,73	54.009,32	0,73	58.204,63	0,73	61.503,23	0,72	68.400,93	0,75
10	Informasi dan Komunikasi	190.166,15	2,74	218.104,06	2,93	237.426,13	2,96	258.048,77	3,01	281.678,76	3,08
11	Jasa Keuangan	94.572,47	1,36	104.324,17	1,40	120.237,17	1,50	126.827,09	1,48	130.796,48	1,43
12	Real Estate	423.913,20	6,11	452.540,63	6,08	484.981,60	6,04	517.080,06	6,04	541.090,64	5,91
13	Jasa Perusahaan	1.600,31	0,02	1.787,12	0,02	1.950,38	0,02	2.190,99	0,03	2.366,02	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	324.429,73	4,68	344.659,11	4,63	372.232,58	4,64	389.601,42	4,55	398.372,15	4,35
15	Jasa Pendidikan	224.787,37	3,24	255.285,20	3,43	279.759,58	3,49	302.253,45	3,53	329.739,56	3,60
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	132.445,83	1,91	151.697,39	2,04	163.388,19	2,04	240.345,76	2,81	258.375,11	2,82
17	Jasa Lainnya	18.620,61	0,27	20.530,70	0,28	22.188,83	0,28	24.620,06	0,29	27.635,18	0,30
PDRB Kabupaten Luwu		6.934.029,75	100,00	7.437.417,29	100,00	8.023.365,25	100,00	8.567.872,01	100,00	9.155.156,04	100,00

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019

Tabel 2.14.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Luwu

No.	Sektor	Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.799.739,96	53,22	5.549.089,89	53,55	6.427.976,41	54,20	6.961.477,14	53,38	7.764.405,57	53,83
2	Pertambangan dan Penggalian	239.215,37	2,65	283.536,66	2,74	327.235,58	2,76	360.783,35	2,77	397.139,70	2,75
3	Industri Pengolahan	382.820,89	4,24	424.857,92	4,10	476.382,65	4,02	541.303,18	4,15	595.411,31	4,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.395,22	0,08	6.467,07	0,06	7.837,67	0,07	10.497,68	0,08	11.517,68	0,08
5	Pengadaan Air	1.376,85	0,02	1.435,14	0,01	1.632,00	0,01	1.795,71	0,01	1.957,79	0,01
6	Konstruksi	778.921,51	8,64	857.867,73	8,28	949.108,43	8,00	1.061.449,09	8,14	1.169.557,59	8,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	925.692,34	10,26	1.059.224,95	10,22	1.183.399,75	9,98	1.287.757,58	9,87	1.408.161,21	9,76
8	Transportasi & Pergudangan	69.793,81	0,77	87.595,08	0,85	97.561,94	0,82	103.920,66	0,80	121.371,48	0,84
9	Penyedia Akomodasi & Makan Minum	64.373,20	0,71	71.997,92	0,69	81.588,66	0,69	87.648,80	0,67	101.042,60	0,70
10	Informasi dan Komunikasi	203.686,24	2,26	228.538,39	2,21	250.042,59	2,11	273.551,68	2,10	301.954,61	2,09
11	Jasa Keuangan	123.999,50	1,37	143.177,66	1,38	169.799,51	1,43	187.172,09	1,44	201.938,08	1,40
12	Real Estate	538.735,65	5,97	606.198,60	5,85	692.272,10	5,84	772.577,99	5,92	821.141,84	5,69
13	Jasa Perusahaan	2.078,33	0,02	2.550,08	0,02	2.943,34	0,02	3.372,56	0,03	3.805,06	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	422.502,24	4,68	492.416,89	4,75	550.173,19	4,64	590.172,54	4,53	628.828,80	4,36
15	Jasa Pendidikan	285.944,80	3,17	338.456,27	3,27	400.131,59	3,37	435.431,02	3,34	492.524,42	3,41
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	147.615,81	1,64	179.706,23	1,73	208.189,65	1,76	324.656,80	2,49	358.493,16	2,49
17	Jasa Lainnya	24.505,46	0,27	29.398,14	0,28	34.384,12	0,29	38.251,91	0,29	45.204,88	0,31
PDRB Luwu		9.018.397,18	100,00	10.362.514,62	100,00	11.860.659,18	100,00	13.041.819,78	100,00	14.424.455,78	100,00

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, jenis barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami perubahan. Selain itu elastisitas permintaan barang dan jasa terhadap perubahan pendapatan masyarakat juga berbeda-beda. Perubahan tersebut selanjutnya mempengaruhi kontribusi sektoral terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Perubahan kontribusi sektoral terhadap PDRB inilah yang sering disebut sebagai pergeseran struktur perekonomian.

Perubahan permintaan masyarakat serta perbedaan elastisitas permintaan berbagai barang dan jasa merupakan dua alasan utama terjadinya pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah. Karena itu pergeseran struktur perekonomian daerah adalah sebuah keniscayaan bagi daerah-daerah yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan. Secara umum arah pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah akan bergerak dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor industri dalam struktur perekonomiannya, kemudian berlanjut pergeserannya ke arah dominasi sektor jasa ketika kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi atau mapan.

Analisis pergeseran struktur ekonomi daerah, yang tercermin dari pergeseran kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah, setidaknya dapat menjelaskan dua hal yang utama, yakni:

1. Struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor apa saja yang ada di dalam wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian. Gambaran ini sekaligus menjelaskan ciri perekonomian daerah, apakah berciri agraris, industri atau jasa;
2. Analisis struktural dan pergeserannya juga memberikan informasi mengenai sektor-sektor apa saja yang kontribusi terhadap PDRB memiliki trend peningkatan, dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi terhadap PDRB cenderung menurun atau tetap. Dengan analisis ini arah perkembangan perekonomian dapat diprediksi.

Struktur perekonomian atau kontribusi sektoral Kabupaten Luwu dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan struktur perekonomian daerah ini, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Luwu selama periode Tahun 2014-2018 masih bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 s/d 2016 meningkat dari 53,22% menjadi 54,20% namun menurun pada tahun 2017 menjadi 53,38% dan naik kembali menjadi 53,83% pada tahun 2018. Sektor

penyumbang terbesar kedua adalah reparasi mobil dan motor yang mencapai 9,76% pada tahun 2018. Sektor ini secara terus-menerus mengalami penurunan, yaitu dari 10,26% pada tahun 2014. Selanjutnya adalah sektor konstruksi yang pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 8,11%.

Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa terdapat 7 (tujuh) sektor yang memiliki kontribusinya terhadap PDRB daerah mengalami peningkatan yakni: (1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami kenaikan sebesar 0,85 poin; (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kenaikan 0,61 poin; (3) Jasa Pendidikan dengan kenaikan 0,24 poin; (4) Pertambangan dan Penggalian dengan sebesar 0,10 poin; (5) Transportasi dan Pergudangan dengan kenaikan 0,07 poin; (6) Jasa-jasa lainnya dengan kenaikan 0,04 poin; dan (7) Jasa keuangan dengan kenaikan 0,03 poin. Sedangkan kontribusi sektor lainnya terhadap PDRB ada yang mengalami penurunan dan ada yang tidak berubah. Diantara yang kontribusinya menurun paling besar adalah sektor konstruksi dengan penurunan 0,53 poin, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan penurunan 0,50 poin, dan sektor Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial dengan penurunan 0,33 poin.

Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Luwu yang disertai dengan kontribusi yang cenderung meningkat mengisyaratkan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pergeseran struktural Kabupaten Luwu seperti yang diuraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementara sektor lainnya cenderung meningkat kontribusinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun

dengan tahun yang lain. Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 8,13% pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya tumbuh sebesar 7,4% per tahun dalam periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Luwu, maka terdapat 7 (tujuh) sektor ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, masing masing adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 17,46% per tahun, diikuti sektor jasa perusahaan (9,91%), sektor informasi dan komunikasi (9,34%), sektor jasa-jasa lainnya (9,10%), sektor listrik dan gas (9,02%), sektor jasa pendidikan (8,56%), dan sektor pertambangan dan penggalian (8,29%). Melihat kontribusinya yang cukup tinggi terhadap PDRB, maka dapat diidentifikasi sektor mana yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Tabel 2.15.
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2014- 2018

No	Sektor	Tahun					Rerata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	12,32	6,48	7,72	5,40	7,04	7,79
2	Pertambangan dan Penggalian	11,29	6,06	9,01	8,89	6,20	8,29
3	Industri Pengolahan	6,75	4,44	8,97	7,59	6,95	6,94
4	Listrik dan Gas	20,80	-7,24	18,13	5,90	7,49	9,02
5	Pengadaan Air	1,06	0,56	10,02	8,47	6,31	5,28
6	Konstruksi	1,48	5,31	4,73	5,00	6,55	4,61
7	Reparasi Mobil & Motor	6,86	9,33	9,10	6,55	7,47	7,86
8	Transportasi & Pergudangan	8,99	6,68	4,72	6,12	13,82	8,07
9	Penyedia Akomodasi & Makan Minum	3,72	6,30	7,77	5,67	11,22	6,93
10	Informasi dan Komunikasi	5,32	14,69	8,86	8,69	9,16	9,34
11	Jasa Keuangan	4,56	10,31	15,25	5,48	3,13	7,75
12	Real Estate	7,46	6,75	7,17	6,62	4,64	6,53
13	Jasa Perusahaan	8,44	11,67	9,14	12,34	7,99	9,91
14	Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial	2,71	6,24	8,00	4,67	2,25	4,77
15	Jasa Pendidikan	2,51	13,57	9,59	8,04	9,09	8,56
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10,48	14,54	7,71	47,10	7,50	17,46
17	Jasa-Jasa	3,95	10,26	8,08	10,96	12,25	9,10
PDRB Kabupaten Luwu		6,98	7,41	9,06	9,62	7,59	8,13

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi merepresentasikan keadaan perekonomian dimana terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga secara umum. Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang cukup tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian karena menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan barang impor, dengan demikian barang domestik lebih sulit bersaing dengan barang impor.

Secara spasial, berdasarkan data BPS, inflasi tahun 2018 pada Zona Palopo (Kota Palopo, Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja dan Toraja Utara) adalah 4,17% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 3,69%. Sedangkan untuk tahun 2017, inflasi sebesar 3,90%. Inflasi tertinggi pada tahun 2017 adalah pada bulan Juni yang mencapai 1,39% dan bulan Desember yaitu 0,92%. Hal ini diakibatkan pada waktu tersebut kebutuhan konsumsi masyarakat pada bulan puasa dan menjelang tahun baru meningkat. Oleh karena itu, untuk menekan laju inflasi yang berulang setiap tahun tersebut, perlu diimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam merayakan momen tersebut.

2.2.3 PDRB per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya, karena itu PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2014-2018 menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh setiap

penduduk di daerah ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita di daerah ini sebesar Rp.25,98 juta per tahun, meningkat menjadi 40,16 juta per tahun pada tahun 2018.

Tabel 2.16.
Perkembangan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2014-2017

Uraian	PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai PDRB (HB : Rp milyar)	9.018,40	10.362,51	11.860,66	13.041,82	14.424,46
Jumlah penduduk (jiwa)	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
PDRB perkapita (HB: Rp Juta/jiwa)	25,98	29,59	33,57	36,60	40,16

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Tahun 2018.

2.2.4 Indeks Gini

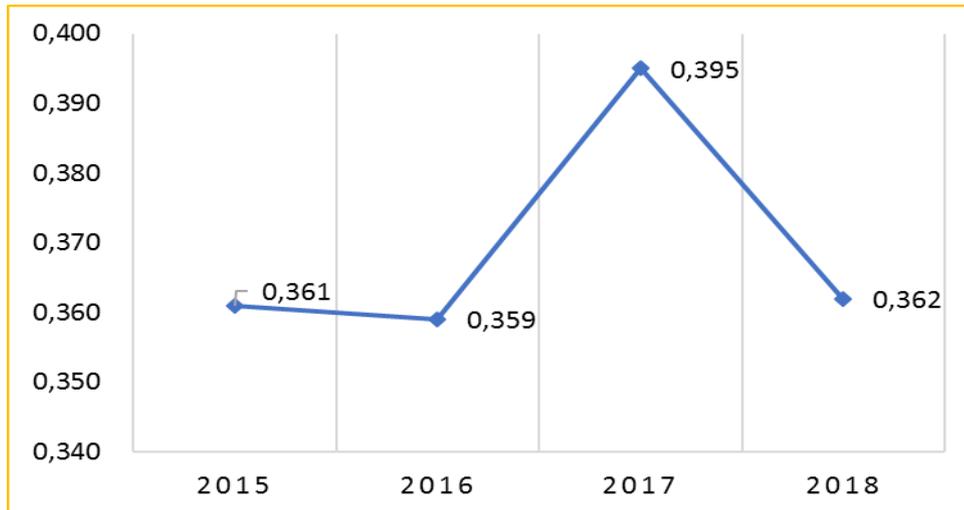
Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini didasarkan pengukuran luas Kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Gini rasio sebagai berikut:

- Gini Rasio < 0,35 : Kategori ketimpangan “rendah”;
- Gini Rasio 0,35 - 0,5 : Kategori ketimpangan “moderat”
- Gini Rasio > 0,5 : Kategori ketimpangan “tinggi”

Nilai Gini rasio Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2018 mengalami fluktuasi, dimana nilai pada tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015 yaitu dari 0,361 menjadi 0,359. Tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,395. Salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan ini adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap US\$ yang berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat karena turunnya harga jual komoditas kakao, cengkeh, merica dan lain-lain yang menjadi mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Luwu. Sedangkan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 0,362 sehubungan

dengan kembali stabilnya nilai tukar rupiah terhadap US\$. Perkembangan gini ratio Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

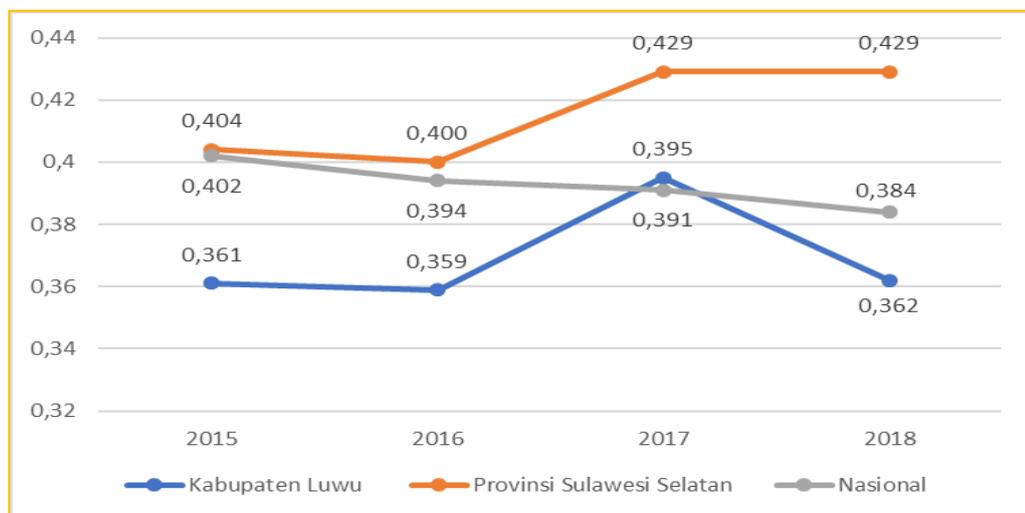
Gambar 2.10.
 Grafik Perkembangan Gini Ratio
 Tahun 2015-2018



Sumber: BPS Tahun 2018

Meskipun ada kecenderungan distribusi pendapatan daerah ini semakin baik, namun berdasarkan nilai Gini Rasio yang dicapai ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini masuk dalam kategori “moderat”.

Gambar 2.11.
 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Luwu
 dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2018



Sumber: BPS Tahun 2019

Dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai Gini rasio Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2017 relatif lebih rendah. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Luwu relatif lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan dan Nasional. yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini semakin membaik.

2.2.5 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia digunakan untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan versi Bank Dunia, pendapatan penduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu (a) kelompok 40% berpendapatan terendah, (b) 40% berpendapatan menengah, dan (c) 20% berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketimpangan rendah: 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan.
- b. Ketimpangan sedang (moderat): 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12 – 17% jumlah pendapatan
- c. Ketimpangan tinggi: 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan.

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai apabila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menikmati lebih dari sama dengan 17% dari total pendapatan yang ada. Tabel berikut menunjukkan persentase pendapatan menurut kelompok penghasilan penduduk versi Bank Dunia

2.2.6 Indeks Ketimpangan Williamson

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah adalah indeks Williamson. Perhitungan indeks Williamson Kabupaten Luwu didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Semakin indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Tidak terdapat data terkait indikator ini karena tidak tersedia data BPS dan tidak dapat dihitung karena tidak tersedia indikator PDRB menurut kecamatan.

2.2.7 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Fenomena ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan penduduk memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah makala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Luwu. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2.17.
Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2016-2017

Wilayah/Daerah	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)
Kab.Luwu	2016	271.804
	2017	281.195
Provinsi Sulsel	2016	270.601
	2017	283.461

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018,Badan Pusat Statistik, 2019

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Misal, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu tahun 2017 adalah sebesar Rp.281.195,00 artinya penduduk Kabupaten Luwu yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan sebesar Rp.281.195,00 dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu berhasil diturunkan dari 50.519 jiwa atau 14,30% pada tahun 2016 menjadi 49.918 jiwa atau 14,01% pada tahun 2017 dan menjadi 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018. Hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk miskin mengalami peningkatan karena penentuan kategori miskin ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi penduduk miskin menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, di antaranya adalah melalui program pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan program-program anti kemiskinan yang sifatnya target sasaran (jaring-jaring pengaman sosial, seperti raskin, PKH, Jamkesmas, dll.). Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap

sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Badan Pusat Statistik (BPS) menyempurnakan metode IPM dengan metode baru pada Tahun 2014.

Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM baru adalah:

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Tabel 2.18.
Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB Per Kpita (PPP US \$)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB Per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-Rata Aritmatik $IPM = \frac{1}{3}(Ikesehatan + IPendidikan + Ipengeluaran) \times 100$		Rata-Rata Geometri $IPM = \sqrt[3]{(Ikesehatan + IPendidikan + Ipengeluaran) \times 100}$	

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik, 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

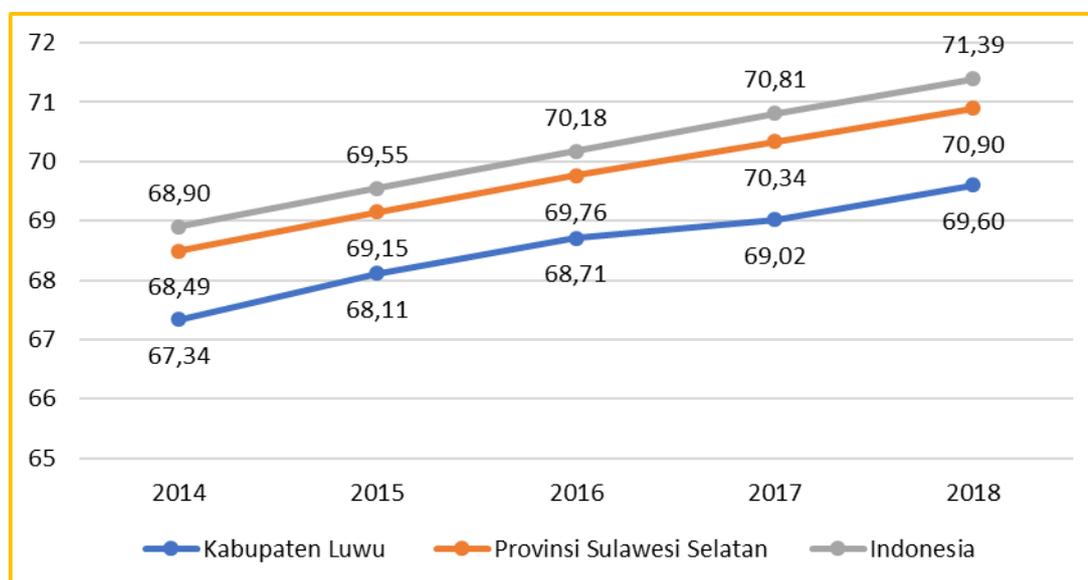
Tabel 2.19.
Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018

Komponen IPM	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,14	69,44	69,52	69,60	69,84
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,87	12,88	13,27	13,28	13,30
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,60	7,74	7,75	7,89	7,97
Paritas Daya Beli (PPP)		9.160,00	9.301,00	9.381,00	9.705,00
IPM	67,34	68,11	68,71	69,02	69,60
Pertumbuhan IPM		0,77	0,60	0,31	0,58
Ranking Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan	9	9	9	9	9

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, 2018

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Gambar 2.12.
Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2014-2018



Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, 2018

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 IPM Kabupaten Luwu adalah 67,34 meningkat menjadi 69,60 pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 2,26 poin.

Namun demikian, IPM Kabupaten Luwu sepanjang periode tahun 2014-2018 masih berada dibawah angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

2.2.9 Angka Melek Huruf

Kemampuan baca masyarakat dapat mempengaruhi kecepatan masyarakat dalam memperoleh informasi, khususnya terkait dengan program-program pembangunan. Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. AMH Kabupaten Luwu selama periode tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 AMH Kabupaten Luwu mencapai 93,22%. Artinya, dari 100 orang penduduk Kabupaten Luwu yang berusia 15 tahun ke atas, 93 hingga 94 orang yang bebas buta huruf. Sehingga masih ada sekitar 6 s/d 7 orang lagi dari 100 orang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang tergolong dalam kategori buta aksara. Hal ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 93,13 dan pada tahun 2017 tidak berubah dari angka pada tahun 2016, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2018

TAHUN	ANGKA MELEK HURUF		
	Laki-laki	Perempuan	TOTAL
2014	n.a	n.a	n.a
2015	95,23	91,32	93,22
2016	94,87	91,54	93,14
2017	94,87	91,53	93,14
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: Data Diolah, BPS Tahun 2015-2018.

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum AMH semakin meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, AMH

perempuan lebih rendah dari AMH laki-laki. Bahkan AMH perempuan mengalami fluktuasi, dimana terjadi peningkatan jumlah pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 dan menurun kembali pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan buta huruf di Kabupaten Luwu kurang maksimal dilakukan terhadap penduduk perempuan.

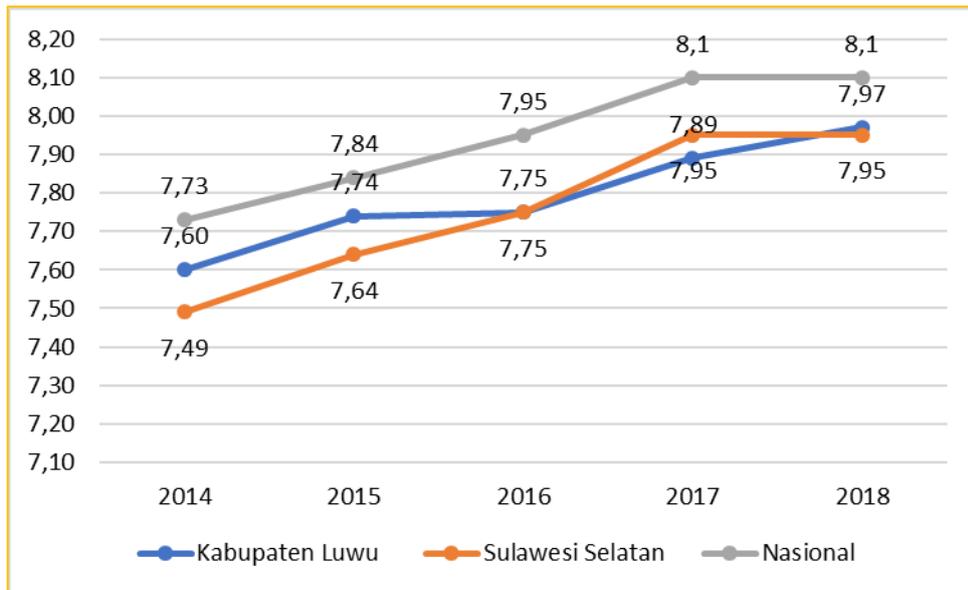
2.2.10 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah penduduk di daerah ini sebesar 7,60 tahun, kemudian meningkat menjadi 7,97 tahun pada tahun 2018. Hal ini berarti bahwa saat ini penduduk Kabupaten Luwu memiliki pendidikan formal baru setara dengan duduk dibangku kelas dua SMP. Dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata yang pada tahun 2018 mencapai 7,95 tahun, menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu relatif lebih tinggi dengan capaian pendidikan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya, meskipun pada tahun 2017 sempat di bawah Sulawesi Selatan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Nasional, RLS Kabupaten Luwu selalu di bawah angka nasional, yang pada tahun 2018 mencapai 8,10 tahun.

Gambar 2.13.

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu
Dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2014-2018



Sumber: Data Diolah, BPS Tahun 2015-2018

Persoalan RLS ini perlu mendapat perhatian semua pihak, mengingat keberhasilan dunia pendidikan merupakan salah satu amant konstitusi yang harus diwujudkan.

2.2.11 Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi capaian angka harapan hidup penduduk di suatu wilayah, maka derajat kesehatan penduduk di daerah tersebut juga tinggi.

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai menjadi 69,84 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2018 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 69,84 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Luwu ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi

masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan, meskipun angka kelangsungan hidup bayi belum pernah mencapai 100%.

Tabel 2.21.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu

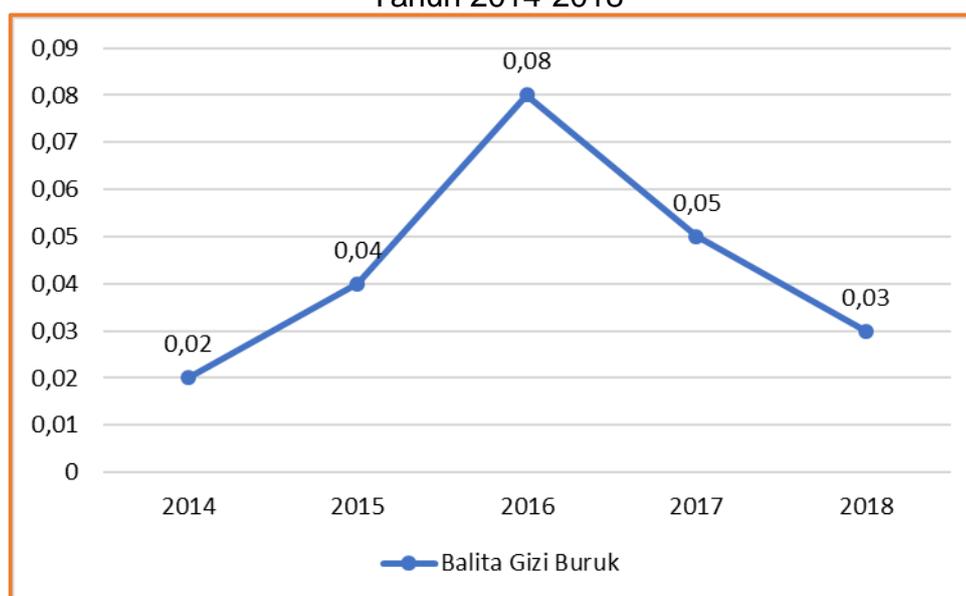
No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	99,06	99,21	99,19	98,87	98,93
2	Angka usia Harapan Hidup (Tahun)	69,14	69,44	69,52	69,60	69,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2018

2.2.12 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di suatu wilayah. Balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, balita gizi buruk sebesar 0,02%, meningkat menjadi 0,04% pada tahun 2015 dan menjadi 0,08% pada tahun 2016. Angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 0,05% pada tahun 2017, kemudian menurun menjadi 0,03% pada tahun 2018.

Gambar 2.14.
Persentase Balita Gizi Buruk
Tahun 2014-2018



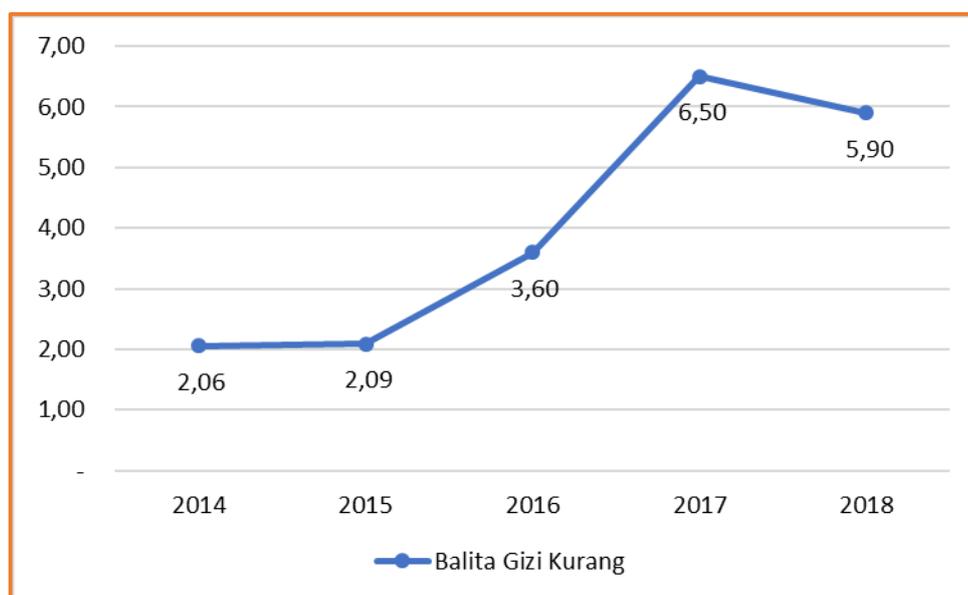
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2018

Peningkatan persentase balita gizi buruk pada tahun 2015 dan tahun 2016 dari tahun sebelumnya disebabkan pendataan yang lebih baik setelah adanya kebijakan untuk melakukan pendataan kepada seluruh desa, yang sebelumnya hanya pasif menunggu laporan. Sedangkan penurunan persentase pada tahun 2017 dan 2018 adalah akibat adanya perbaikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Luwu.

2.2.13 Persentase Balita Gizi Kurang

Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi vital tubuh. Persentase balita gizi kurang di Kabupaten Luwu tahun 2014-2018 cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 sebesar 2,06% meningkat menjadi 6,50% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut menurun menjadi 5,90%. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Luwu masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang.

Gambar 2.15.
Grafik Persentase Balita Gizi Kurang
Tahun 2014-2018



2.2.14 Cakupan desa siaga aktif

Suatu kelurahan/desa dikatakan sebagai kelurahan/desa siaga aktif jika memenuhi indikator sebagai berikut:

1. penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (Yankesdas) setiap hari;
2. penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
3. melaksanakan Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM);
4. penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan;
5. penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana; dan
6. masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Luwu sejak tahun 2014 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tumbuh kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini merupakan suatu keberhasilan daerah di dalam menyelenggarakan urusan kesehatan. Namun demikian, seyogyanya pencapaian ini lebih dimaknai sebagai pendorong untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu.

2.2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja. Dengan demikian semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk dapat meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2014-2018, terlihat bahwa TPAK di daerah ini mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014, sebesar 62,50%, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 62 hingga 63 orang termasuk dalam golongan angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2015 menurun menjadi 60,78 dan selanjutnya meningkat hingga mencapai 64,89% pada tahun 2018.

Tabel 2.22.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja 15 tahun Keatas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2014	231.606	144.760	62,50
2015	234.992	142.839	60,78
2016	n.a	n.a	n.a
2017	241.127	155.978	64,69
2018	258.371	188.371	64,89

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2018

Peningkatan TPAK periode tahun 2016-2018 dipengaruhi antara lain oleh adanya dana desa yang menyebabkan penduduk desa/penduduk lokal yang tadinya bukan termasuk golongan angkatan kerja menjadi golongan angkatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana desa.

2.2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat meningkat.

Seiring dengan meningkatnya TPAK, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu periode 2016-2018 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten Luwu adalah sebesar 7,86%, menurun menjadi 4,47% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Luwu semakin meningkat tetapi didukung dengan adanya lapangan pekerjaan yang memadai.

Tabel 2.23.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2014-2017

No	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,20	60,78		64,69	64,89
	Bekerja	137.441	131.615		148.516	151.284
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,10	7,86		4,78	4,47
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	231,606	234,992		241,127	158.363

Sumber: Disnakertrans Kab.Luwu, 2019

Selama periode 2014 sampai dengan 2018 jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu cenderung meningkat. Pada tahun 2014, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu ada sebanyak 144.760 jiwa, pada tahun 2018 menjadi sebanyak 258.371 jiwa.

Tabel 2.24.
Tabel Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Luwu, 2017

No	INDIKATOR	Laki-Laki	Perempuan
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	97,746	59,232
	Bekerja	93.091	55,524
2	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	3.655	3.807
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	116,110	125,017

Sumber: *Disnakertrans Kab.Luwu, 2019*

Tabel di atas menunjukkan bahwa TPAK penduduk laki-laki lebih besar dari TPAK penduduk perempuan, yang artinya lebih banyak penduduk laki-laki yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk perempuan memiliki TPAK yang lebih rendah dikarenakan banyak perempuan yang lebih mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja atau mencari pekerjaan.

Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan pada 2015 tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di kabupaten Luwu sebanyak 7,86%.

Selain hal di atas, permasalahan lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kabupaten Luwu adalah:

1. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di kabupaten Luwu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
2. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan;

3. Masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
4. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
5. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan
6. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga / perusahaan, dan pekerja).

2.2.17 Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 rasio penduduk bekerja di daerah ini adalah 94,94%, meningkat menjadi 95,53% pada tahun 2018. Meningkatnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.

Tabel 2.25.
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Uraian		
		Penduduk yang bekerja	Angkatan kerja	Rasio penduduk yang bekerja
1	2014	137.441	144.760	94,94
2	2015	131.615	142.839	92,14
3	2016	n.a	n.a	n.a
4	2017	148.516	155.978	95,22
5	2018	151.284	158.363	95,53

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2018

2.2.18 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

PDRB per tenaga kerja merupakan indikator yang merepresentasikan produktivitas tenaga kerja. PDRB per tenaga kerja yang diukur dari rasio antara PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk bekerja merupakan besarnya nilai tambah berdasarkan harga berlaku yang diciptakan oleh setiap penduduk bekerja selama satu tahun. Indikator ini sekaligus menggambarkan besar pendapatan yang diterima setiap satu penduduk bekerja sesuai harga berlaku pada tahun analisa. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.26.
PDB per Tenaga Kerja
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produk Domestik Bruto (PDRB) (Rp Juta)	6.934.029,75	7.437.417,27	n.a	8.567.872,02	9.075.000,00
2	Jumlah tenaga kerja	137.441	131.615	n.a	148.516	151.284
PDB per tenaga kerja (Rp Juta)		50,45	56,51	n.a	57,69	59,99

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2018

2.2.19 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, merupakan Persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, berarti semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia disuatu daerah.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, selama kurun waktu 2014-2018, penduduk bekerja mengalami fluktuasi sedangkan penduduk usia kerja 15 tahun keatas menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia di daerah ini berjumlah 231.606 jiwa,meningkat menjadi 258.371 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan untuk penduduk bekerja, menurun dari 137.441 jiwa pada tahun 2014 menjadi 131.615 jiwa pada

tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2017 meningkat menjadi 148.516 jiwa dan menurun kembali menjadi 144.859 jiwa pada tahun 2018.

Fluktuasi jumlah penduduk bekerja dan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas tersebut berpengaruh terhadap rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2014 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas adalah sebesar 59,34%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia, sebanyak 59 hingga 60 orang merupakan penduduk bekerja. Selanjutnya pada tahun 2018 rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas menurun menjadi 56,07% yang berarti hanya 56 orang hingga 57 orang penduduk di Kabupaten Luwu yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Uraian tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini mengalami penyempitan, karena itu sejumlah kebijakan diperlukan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja.

Tabel 2.27.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kesempatan kerja	137.441	131.615	n.a	148.516	144.859
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	231.606	234.992	n.a	241.127	258.371
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas		59,34	56,01	n.a	61,59	56,07

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Sulawesi Selatan, 2014-2018.

Untuk meningkatkan kesempatan kerja, berbagai upaya dapat dilakukan di Kabupaten Luwu mengingat potensi untuk pengembangan industri besar sangat memungkinkan untuk direalisasikan di masa datang.

2.2.20 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, diukur dengan membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator bertujuan untuk melihat proporsi

penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Pengertian proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbeda dengan dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, bahwa Penduduk yang bekerja secara Informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non - pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Tabel 2.28.

Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja, Tahun 2014-2018

No	Status Pekerjaan	Proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Tenaga Kerja Formal	33,90	24,84	n.a	24,09	25,39
1	Buruh/Karyawan/Pegawai	31,81	20,35	n.a	22,08	22,77
2	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,09	4,49	n.a	2,01	2,61
B	Tenaga Kerja Informal	66,10	75,16	n.a	75,91	74,62
1	Berusaha Sendiri (BS)	21,24	27,26	n.a	23,07	22,76
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	19,47	21,06	n.a	24,11	21,88
3	Pekerja bebas (PB)	3,66	2,49	n.a	3,65	6,15
4	Pekerja keluarga/tidak dibayar (PK)	21,73	24,35	n.a	25,08	23,83
C	Total Penduduk Bekerja	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00
D	Berusaha Sendiri + Pek Bebas + Pek Keluarga	46,63	54,10	n.a	51,80	52,74

Sumber: Keadaan angkatan kerja Sulawesi Selatan, 2014-2018

Perkembangan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu baik berstatus berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja, serta perkembangan proporsi penduduk bekerja sebagai tenagakerja formal dan informal disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, terlihat bahwa proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu dengan status berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja selama kurun waktu 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, proporsi tersebut sebesar 46,63% dan meningkat menjadi 54,10% pada tahun

2015. Tetapi kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 51,80% dan meningkat lagi menjadi 52,74% pada tahun 2018. Secara keseluruhan, proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai tenaga kerja informal juga mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari 66,10% menjadi 75,91%, tetapi menurun menjadi 74,62% pada tahun 2018. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal di daerah ini relatif kecil yakni hanya 25,39% dari total Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu pada 2018.

2.2.21 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Indikator keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I merupakan tolok ukur kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Berbeda dengan indikator kemiskinan yang digunakan BPS yaitu kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Tahapan keluarga sejahtera didasarkan pada faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, yang terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I. Adapun pengertian dari tahapan keluarga sejahtera yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan .
2. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*sociopsychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (development needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi dari media.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan social kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan social, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, social psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan data perkembangan jumlah keluarga menurut tahapan keluarga Sejahtera di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2014-2018, menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra-sejahtera (KPS) mengalami penurunan dari 16.475 keluarga pada tahun 2014 menjadi 15.014 keluarga tahun 2018, meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2016 yaitu 19.361 keluarga. Dalam periode yang sama Keluarga Sejahtera I (KS-I) mengalami penurunan dari 25.076 keluarga pada tahun 2014 menjadi 23.209 keluarga pada tahun 2018. Dengan adanya penurunan jumlah KPS dan KS-1, menyebabkan jumlah golongan keluarga miskin di Kabupaten Luwu mengalami penurunan dari 50,39% pada tahun 2014 menjadi 44,45% pada tahun 2018.

Tabel 2.29.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Keluarga Sejahtera I	Jumlah Keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	
2014	16.475	25.076	82.457	41.551	50,39%
2015	19.361	17.889	80.232	37.250	46,43%
2016	18.213	17.437	80.700	35.650	44,18%
2017	17.780	17.072	80.992	34.852	43,03%
2018	15.014	23.209	85.994	38.223	44,45%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Meskipun jumlah keluarga KPS mengalami penurunan, tetapi jumlah keluarga KS-I meningkat cukup signifikan yang mengindikasikan bahwa adanya keluarga dari kelompok sejahtera yang menjadi KS-I. Peningkatan tertinggi terhadap jumlah keluarga KS-I adalah pada tahun 2017 yaitu dari 16.972 keluarga menjadi 46.071 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan status sosial keluarga yang sangat drastis di Kabupaten Luwu akibat adanya perubahan kebijakan nasional terhadap keluarga miskin.

2.2.22 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pelaksanaan survey terhadap IKM didasarkan pada prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Terdapat beberapa perangkat daerah yang melaksanakan survey IKM pada tahun 2018, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, RSUD Batara Guru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan survey tersebut, pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP diperoleh angka IKM sebesar 87,01.

2.2.23 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan

Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah.

PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Dengan kata lain persentase PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Luwu selama periode 2014-2017, memperlihatkan bahwa realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tetapi pada tahun 2018 sedikit menurun dibanding tahun 2017. Pada tahun 2014 pendapatan Kabupaten Luwu yang bersumber dari PAD sebesar Rp63,95miliar, meningkat menjadi Rp109,17miliar pada tahun 2017, dan menjadi 106.87 miliar pada tahun 2018, yang berarti selama periode 2014-2018 penerimaan PAD Kabupaten Luwu tumbuh sekitar 18,81% per tahun. Nilai pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan total pendapatan daerah yang hanya tumbuh sekitar 9,88% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini menyebabkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memiliki trend peningkatan, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari 8,45% menjadi 8,08%.

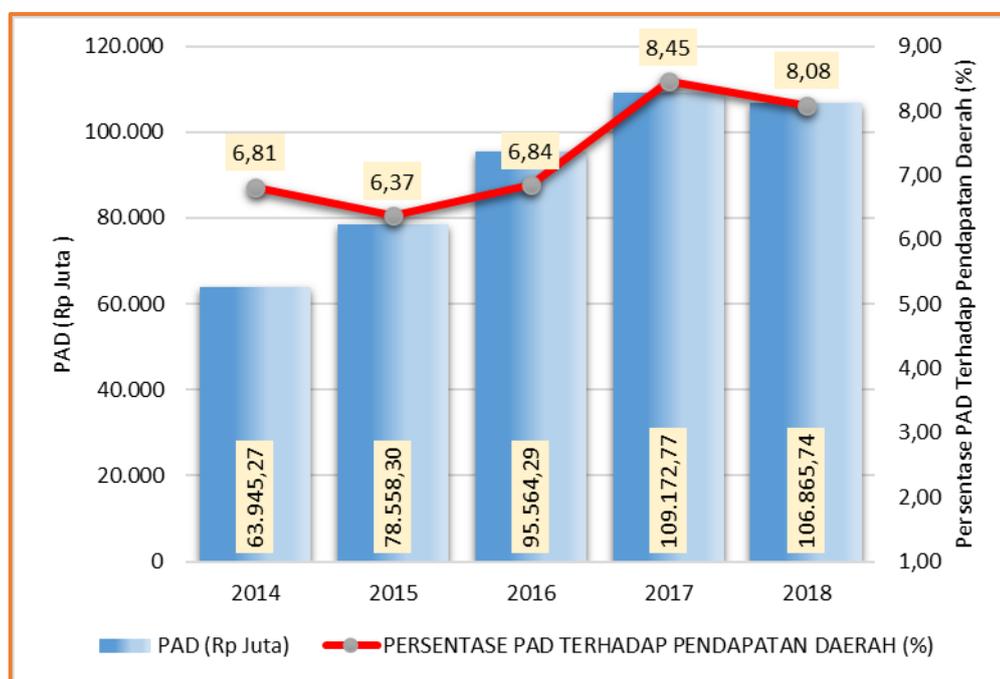
Tabel 2.30.
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
PAD (Rp Juta)	63.945,27	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74
Pendapatan Daerah (Rp Juta)	938.957,90	1.233.809,15	1.397.284,61	1.292.583,08	1.323.121,88
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,81	6,37	6,84	8,45	8,08

Sumber : BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang stagnan pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Luwu terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya) masih sangat tinggi, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2018 tidak semakin membaik. Hal ini harus menjadi perhatian untuk secara maksimal menggali potensi PAD sesuai kewenangan daerah, agar kemandirian daerah semakin meningkat dan pembiayaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat semakin besar.

Gambar 2.16.
Garfik Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018



Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019.

2.2.24 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini BPK yakni (1) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*); (2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*); (3) Tidak wajar (*adversed opinion*) dan (4) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).

2.2.25 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkandengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasikonsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakinberagam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya.

Tabel 2.31.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2018

No	Kelompok Pangan	Perkembangan Skor PPH				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	na	25.0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian		1.7	1.7	1.7	1.5
3	Pangan Hewani		23.3	24.0	24.1	23.4
4	Minyak dan Lemak		5.0	5.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak		0.3	0.3	0.2	0.2
6	Kacang-kacangan		4.8	5.2	5.8	5.8
7	Gula		1.9	2.1	2.0	1.9
8	Sayur dan Buah		23.2	24.1	24.0	23.5
9	Lain-lain		0.0	0.0	0.0	0.0
Total Skor PPH			85,2	87,4	87,8	86,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2018

Skor PPH Kabupaten Luwu selama periode tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2014 skor PPH di daerah ini sebesar 85,2 poin, meningkat menjadi 87,8 pada tahun 2017 yang berarti kualitas pangan masyarakat semakin baik dalam artian baik dari jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangannya. Akan tetapi pada tahun 2018 turun 1,5 point menjadi 86,3 poin.

2.2.26 Penguatan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Dasar hukum penguatan cadangan pangan telah diamanatkan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Tabel 2.32.
Penguatan Cadangan Pangan
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah cadangan pangan kabupaten (ton)	19,00	26,66	32,00	44,68	44,68
2	Target cadangan pangan kabupaten (ton)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penguatan cadangan pangan (%)	19,00	26,66	32,00	44,68	44,68

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2017

Penguatan cadangan pangan diukur dari jumlah cadangan pangan kabupaten per 100 ton yang dinyatakan dalam persen. Penguatan cadangan pangan Kabupaten Luwu meningkat dari 19,00% pada tahun 2014 menjadi 44,68% pada tahun 2018. Hal ini berarti selama kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Luwu menyediakan cadangan pangan yang terus meningkat, dari 19 ton menjadi 44,68 ton pada tahun 2018.

2.2.27 Penanganan daerah rawan pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Target penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu lebih diutamakan pada daerah rawan pangan kronis dan daerah rawan pangan transien. Daerah rawan pangan kronis adalah daerah yang mengalami keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh ketersediaan SDA dan keterbatasan kemampuan SDM sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Sedangkan rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

Penanganan rawan pangan di Kabupaten Luwu dilakukan dengan dua bentuk, pertama upaya pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis dan daerah rawan pangan transien. Adapun upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami rawan pangan;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan pengolahan pangan;

3. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pakarangan;
4. Penyaluran bantuan kepada keluarga yang mengalami kerawanan pangan kronis dan trasien;
5. Pemberian bantuan medis dan makanan tambahan pada keluarga yang memiliki balita gizi buruk
6. Dll.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, aspek kerawanan pangan didasarkan pada 3 pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan, dan akses pangan. Ketersediaan pangan ditunjukkan oleh rasio ketersediaan beras dengan kebutuhan beras. Semakin tinggi rasio, semakin tinggi tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Pemanfaatan pangan ditunjukkan oleh persentase jumlah bayi gizi kurang terhadap jumlah bayi yang ditimbang. Tingginya jumlah bayi yang menderita gizi kurang menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan di suatu wilayah masih rendah. Sedangkan akses pangan ditunjukkan oleh rasio antar jumlah KPS dengan jumlah KS-I. Semakin besar jumlah KPS dibandingkan dengan KS, maka akses pangan di suatu wilayah semakin rendah.

Perkembangan penanganan rawan pangan di Kabupaten Luwu selama kurun waktu tahun 2014 - 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan beras (ton)	199.420	189.2190	185.846	173.492	170.205
2	kebutuhan beras (ton)	56.250	56.756	57.252	57.743	58.213
Rasio Ketersediaan Pangan		354,52	333,39	324,61	300,46	292,38
Skor Ketersediaan Pangan		1	1	1	1	1
3	n gizi kurang < -2 SD (orang)	417	444	620	1.318	2.316
4	n balita yang dikumpulkan PSG (orang)	4.935	5.374	9.401	19.607	16.626
Nilai preferensi energi		9,55	8,45	8,26	6,60	13,93
Skor Preferensi Energi		1	1	1	1	1
5	Keluarga pra-sejahtera	16.475	16.928	17.640	17.072	16.922
6	Keluarga Sejahtera Satu	25.076	26.115	16.972	46.071	47.164
Nilai		69	72	58	105	107
Kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera satu		3	3	3	3	3
Penanganan daerah rawan pangan		5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 stagnan pada skor 5, belum bergerak untuk mencapai skor ideal yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 43 Tahun 2010 yaitu 3. Hal ini disebabkan antara lain: masih tingginya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Luwu terutama pada Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Untuk mencapai skor ideal tersebut, hal yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu antara lain adalah meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan secara serius.

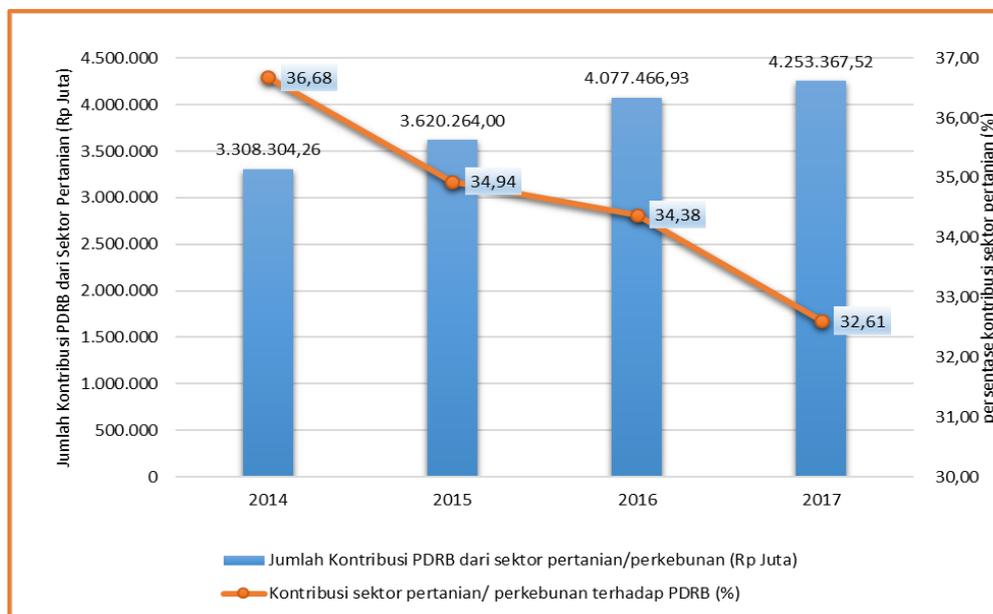
Pada Tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI telah mengembangkan metode dalam penyelenggaraan Sistem Keaspadaan Pangan dan Gizi dengan melakukan beberapa perubahan indikator untuk mengukur situasi pangan dan gizi di suatu wilayah yaitu:

1. Pengukuran ketersediaan pangan yang sebelumnya menggunakan indikator rasio ketersediaan beras dengan kebutuhan beras, diubah dengan indikator luas tanam dan luas puso padi.
2. Pengukuran pemanfaatan pangan yang sebelumnya menggunakan indikator persentase jumlah bayi gizi kurang terhadap jumlah bayi yang ditimbang diubah dengan indikator angka balita ditimbang terkoreksi, angka balita naik berat badan, balita yang tidak naik berat badannya dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah.
3. Pengukuran akses pangan yang sebelumnya menggunakan indikator rasio antar jumlah KPS dengan jumlah KS-I, diubah dengan indikator harga beras.

2.2.28 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian. Berikut ini disajikan grafik kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Luwu.

Gambar 2.17.
Grafik Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2014-2017



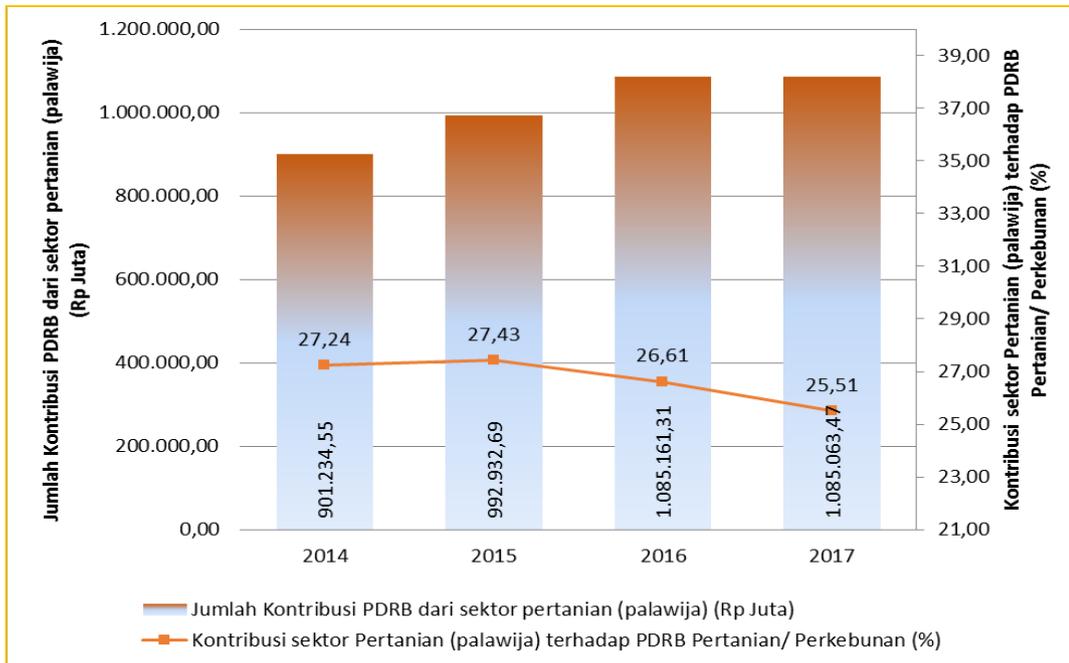
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Luwu yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/perkebunan sebesar Rp3,31triliun, meningkat menjadi Rp4,25 triliun pada tahun 2017. Demikian juga dalam hal kontribusinya terhadap PDRB harga berlaku Kabupaten Luwu, yang menunjukkan penurunan dari 36,68% menjadi 32,61%.

2.2.29 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya. Berikut ini disajikan grafik kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRP pertanian/perkebunan Kabupaten Luwu.

Gambar 2.18.
Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2014 – 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2014-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian (pangan dan palawija) sebesar Rp901,23 miliar meningkat menjadi Rp1,09 triliun pada tahun 2017. Meskipun nilainya terus meningkat, namun kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,43%, meningkat dari tahun 2014 yaitu 27,24%. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 26,61% dan 25,51%. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) kurang berkembang di Kabupaten Luwu.

2.2.30 Produksi Sektor Pertanian

Kabupaten Luwu memiliki potensi untuk pengembangan komoditi pangan dan palawija karena didukung dengan sumber daya lahan yang cukup luas. Namun demikian, perkembangan produksi di sektor ini kurang menggembirakan, mengingat produksinya yang tidak bertumbuh, bahkan cenderung menurun. Penurunan produksi sektor pertanian di Kabupaten Luwu antara lain disebabkan:

1. Harga komoditi yang tidak menentu/tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga masyarakat beralih kepada jenis tanaman lain.
2. Kurang maksimalnya peran institusi yang mengemban tugas dalam peningkatan produksi di sektor pertanian.

Tabel 2.34.
Produksi Pertanian Pangan dan Palawija
Tahun 2014-2016

No	Uraian	Jumlah Produksi (ton)		
		2014	2015	2016
1	Padi	335.640,00	308.380,00	312.382,00
2	Jagung	23.300,00	10.406,00	34.126,40
3	Ubi Kayu	5.554,00	1.895,00	1.946,60
4	Ubi Jalar	4.961,00	1.370,00	889,90
5	Kacang Tanah	253,00	48,00	59,20
6	Kacang Kedelai	1.238,00	263,00	16,40
7	Kacang Hijau	196,00	50,00	34,40

Sumber: BPS, Statistik Tanaman Pangan, Tahun 2016

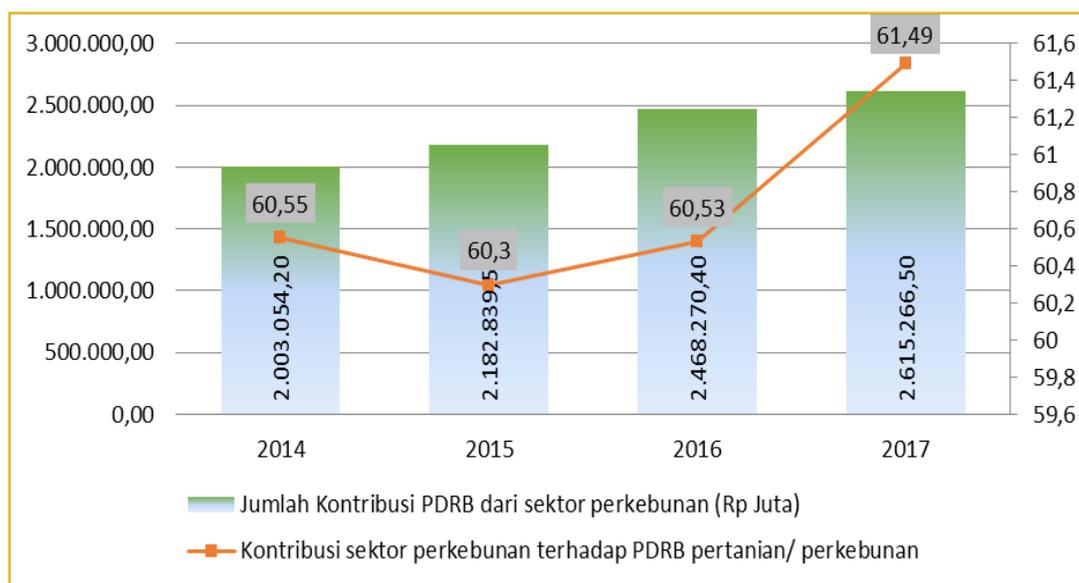
2.2.31 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2014-2017 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp.2,00 triliun, meningkat menjadi Rp2,62 triliun pada tahun 2017. Sektor perkebunan merupakan sektor pertanian yang

sangat penting di Kabupaten Luwu karena memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian. Meskipun demikian, kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Luwu mengalami stagnasi pada tahun 2014-2016, bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang tidak berkembang. Pada tahun 2014 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 60,55%, sedangkan pada tahun 2016 menurun sedikit menjadi 60,53%, tetapi kemudian meningkat kembali menjadi 61,49% pada tahun 2017.

Gambar 2.19.
Grafik Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2014- 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

Meskipun terjadi penurunan, kinerja pertumbuhan sektor perkebunan masih lebih baik dari sektor sektor-pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

2.2.32 Produksi sektor Perkebunan

Kabupaten Luwu merupakan sentra utama beberapa komoditi perkebunan, baik kelompok komoditi perkebunan tahunan, maupun komoditi perkebunan yang bersifat musiman. Pada kelompok komoditi perkebunan tahunan, daerah ini memiliki potensi produksi yang cukup besar untuk komoditi seperti : Kelapa, kakao, cengkeh,

jambu mete dan aren. Kabupaten Luwu adalah merupakan sentra utama berbagai komoditi perkebunan di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, produksi cengkeh di Kabupaten Luwu memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi Sulawesi Selatan yaitu mencapai 44,48%, demikian halnya kakao, dengan kontribusi sebesar 19,15%.

Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan tahun di Kabupaten Luwu, tahun 2015-2017 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.35.
Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2015-2017

No	Uraian	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ton)		
		2015	2016	2017
1	Kelapa Dalam	3.735,23	3.793,00	3.764,00
2	Kelapa Hibrida	204,04	197,00	181,00
3	Kopi Robusta	449,72	342,00	400,00
4	Kopi Arabika	1.851,20	1.852,00	1.955,00
5	Cengkeh	9.006,35	7.856,00	6.976,00
6	Kakao	27.000,00	28.989,00	24.262,00
7	Pala	21.788,00	28,00	28,00
8	Lada	321,79	399,00	299,00
9	Kapuk	4,98	4,00	4,00
10	Kemiri	68,90	70,00	79,00
11	Jambu Mente	353,09	350,00	352,00
12	Kelapa Sawit	1.677,50	3.763,00	480,00
13	Sagu	687,62	876,00	876,00
14	Aren	149,06	172,00	172,00
15	Pinang	8,78	6,00	5,00
16	Tembakau		15,00	15,00

Sumber: BPS, Kabupaten Dalam Angka, Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi sebagian besar komoditi perkebunan dalam kurun waktu tahun 2015-2017 meningkat, mengalami fluktuasi, bahkan ada yang menurun secara drastis. Komoditi yang meningkat produksinya secara terus menerus adalah kopi arabika dan kemiri. Komoditi yang mengalami fluktuasi adalah kelapa dalam, kopi robusta, kakao, lada, jambu mente, dan kelapa sawit. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan produksi adalah kelapa hibrida, cengkeh, dan pinang. Kondisi yang demikian ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Luwu di masa depan, mengingat salah satu

isu utama Kabupaten Luwu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi potensi sektor perkebunan.

2.2.33 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani“. Keberadaan organisasi non formal ini memiliki peran penting tidak hanya dalam peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi juga memberi pengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk pada indikator PDRB daerah. Pengaruh keberadaan kelompok tani terhadap perekonomian daerah, terkait fungsi kelompok tani yang diemban yakni: (1) sebagai wadah belajar, dengan fungsi ini pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota kelompok dapat berkembang lebih cepat; (2) sebagai wadah kerjasama, melalui kerjasama petani dapat meningkatkan efisiensi produksinya serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (3) sebagai unit produksi; usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Pengukuran kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB selain tidak disediakan oleh BPS, indikator ini juga sulit untuk diukur, karena dasar pembentukan kelompok tani bervariasi, diantaranya berdasarkan hamparan lahan, kelompok tani berdasarkan komoditi yang diusahakan, atau berdasarkan tempat tinggal petani. Keberadaan kelompok-kelompok tani tersebut banyak diantaranya tumpang tindih, sehingga estimasi produksinya menurut lokasi dan menurut komoditi sulit dilakukan. Sifat acak produksi kelompok tani ini menyulitkan untuk mengukur kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB di Kabupaten Luwu. Namun demikian, mengingat strategisnya peran kelompok tani dalam peningkatan kesejahteraan petani, perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengukur seberapa besar dampak pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mempengaruhi kesejahteraan petani.

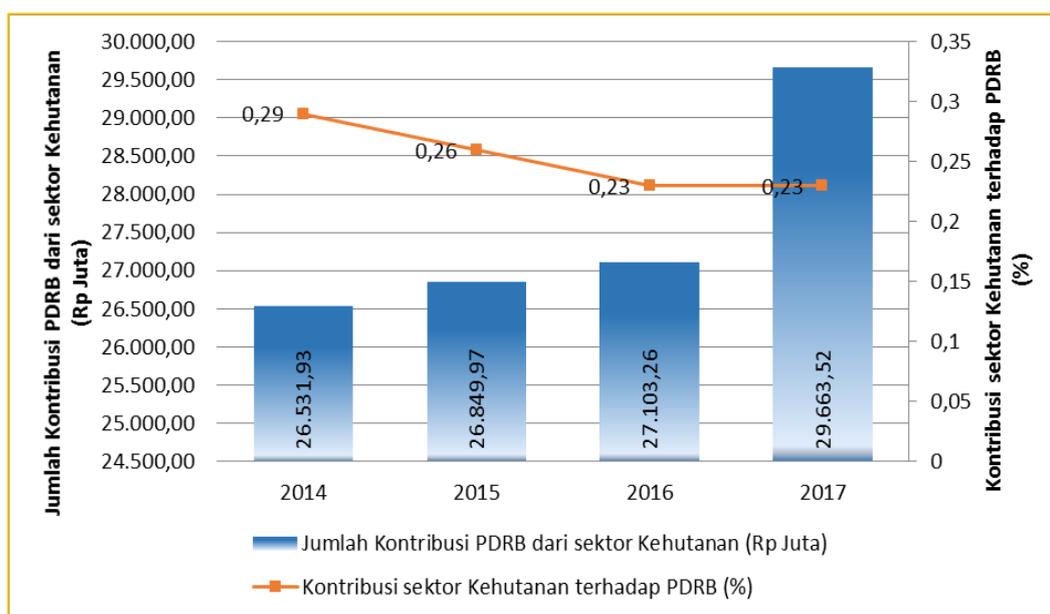
2.2.34 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Berdasarkan data BPS Tahun 2018, luas kawasan hutan di Kabupaten Luwu adalah 108.437,53 Ha, dan sekitar 23.144,22 Ha atau 21,34% merupakan kawasan

hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Berbagai potensi ekonomi dari kawasan kehutanan di daerah ini diantaranya hutan rakyat dengan berbagai potensi kayu, jasa lingkungan seperti air terjun, dan hutan wisata. Selain itu kawasan hutan di daerah ini juga menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, lebah madu dan lainnya.

Data PDRB Harga berlaku Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2014- 2017 sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tambah sektor kehutanan meningkat rata-rata 3,86% per tahun. Pada tahun 2014 nilai tambah yang diciptakan sektor ini sekitar 26,53miliar dan meningkat menjadi 29,66miliar pada tahun 2017. Namun demikian, kontribusi sektor kehutan terhadap total PDRB harga berlaku Kabupaten Luwu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 sebesar 0,29%, menurun menjadi 0,23% pada tahun tahun 2017.

Gambar 2.20.
Grafik Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Tahun 2014- 2017



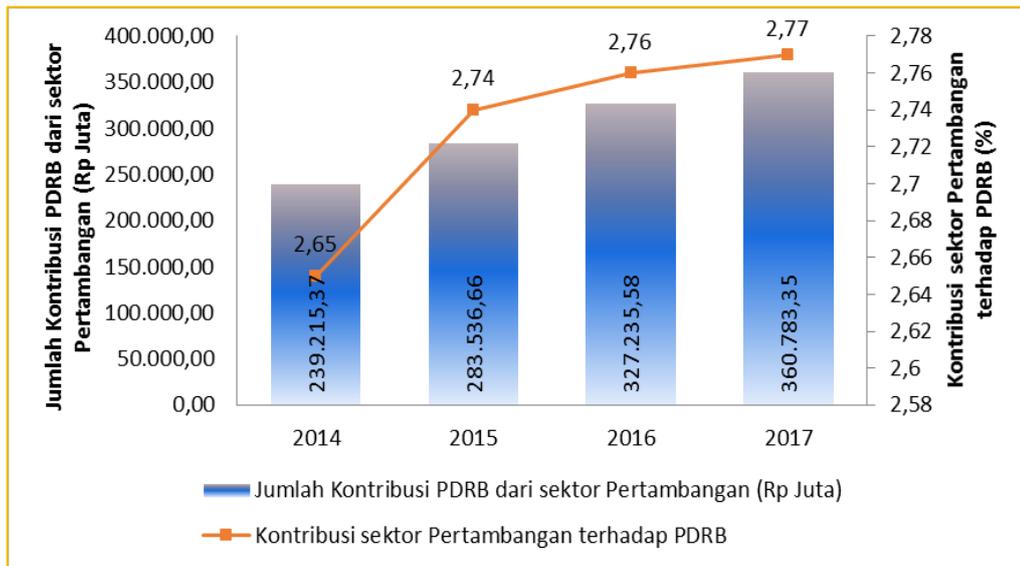
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

2.2.35 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Sektor pertambangan Kabupaten Luwu memiliki potensi yang cukup besar dan beragam. Potensi pertambangan di daerah ini terdiri sejumlah potensi mineral logam dan bukan logam. Potensi mineral logam diantaranya seperti potensi emas, Tembaga, Zeng, Mangan dan endapan besi. Selain itu daerah juga memiliki potensi

batu bara dan berbagai mineral non logam seperti Batu gamping, Marmer, Dolomit, Kuarsa, Batu Sabak dan Basal, Batu tempel (ornamen stone) dari jenis riolit dan tufa hijau, yang tersebar di beberapa wilayah. Adapun komoditas yang telah diusahakan diantaranya seperti bijih besi, mangan, pasir, sirtu, tanah timbun, batu gamping dan lainnya. Berbagai potensi tambang yang ada di daerah ini telah berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di Kabupaten Luwu.

Gambar 2.21.
 Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
 Tahun 2014 - 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

Selama kurun waktur 2014-2017, nilai PDRB sektor pertambangan di Kabupaten Luwu memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Nilai PDRB sektor pertambangan menurut harga berlaku di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah sebesar Rp239,22miliar meningkat menjadi Rp.360,78 miliar pada tahun 2017. Dengan kinerja pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh rata-rata 14,73% per tahun menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku Kabupaten Luwu adalah sebesar 2,65% meningkat menjadi 2,77% tahun 2017.

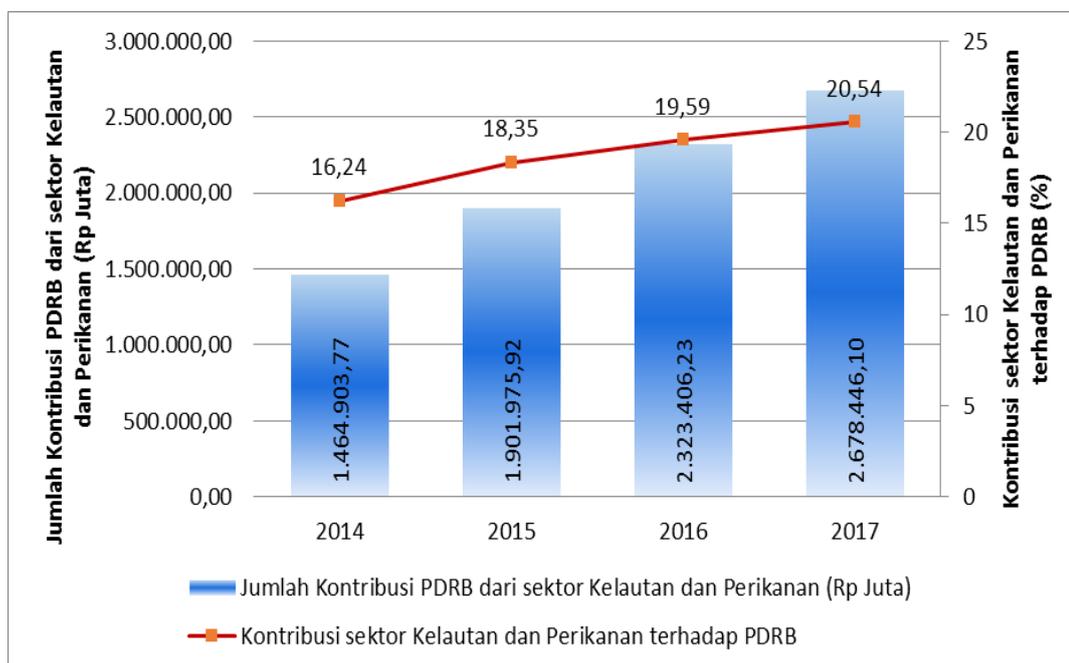
2.2.36 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Luwu memiliki garis pantai sepanjang 139,92 Km sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan kelautan dan perikanan, seperti potensi penangkapan ikan, budidaya laut dan air payau. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Luwu. Pada tahun 2014 nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp1.46 trilliun, meningkat menjadi Rp2,69 trilliun pada tahun 2017.

Kinerja pertumbuhan sektor ini dalam lima tahun terakhir juga relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Luwu. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sektor ini berkontribusi sebesar 16,24 terhadap PDRB, kemudian meningkat menjadi 20,54% pada tahun 2017.

Gambar 2.22.

Grafik Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2014 - 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

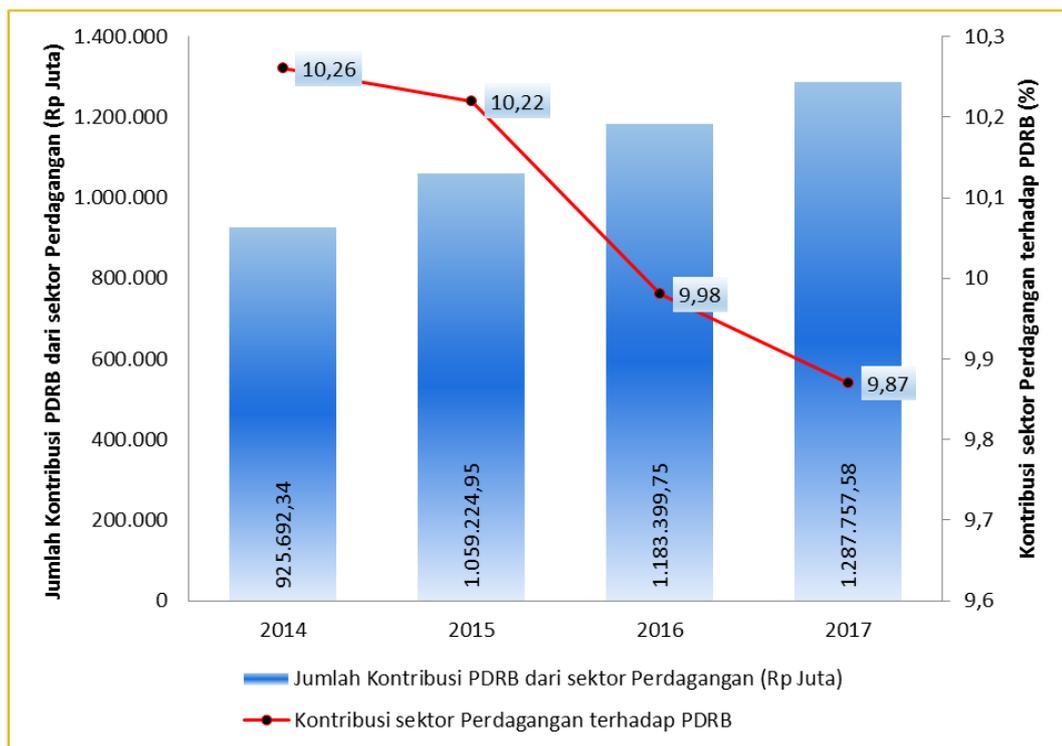
2.2.37 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Luwu diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Luwu menurut harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Luwu, tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp925,69 miliar dan meningkat menjadi Rp1,29 triliun pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,66% per tahun. Namun demikian, kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah terus menurun dalam lima tahun terakhir, merosot dari 10,26% tahun 2014 menjadi sekitar 9,87% tahun 2017.

Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang terus menurun menggambarkan bahwa pertumbuhan PDRB riil sektor ini terus menurun akibat menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.23.
Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2014 - 2017



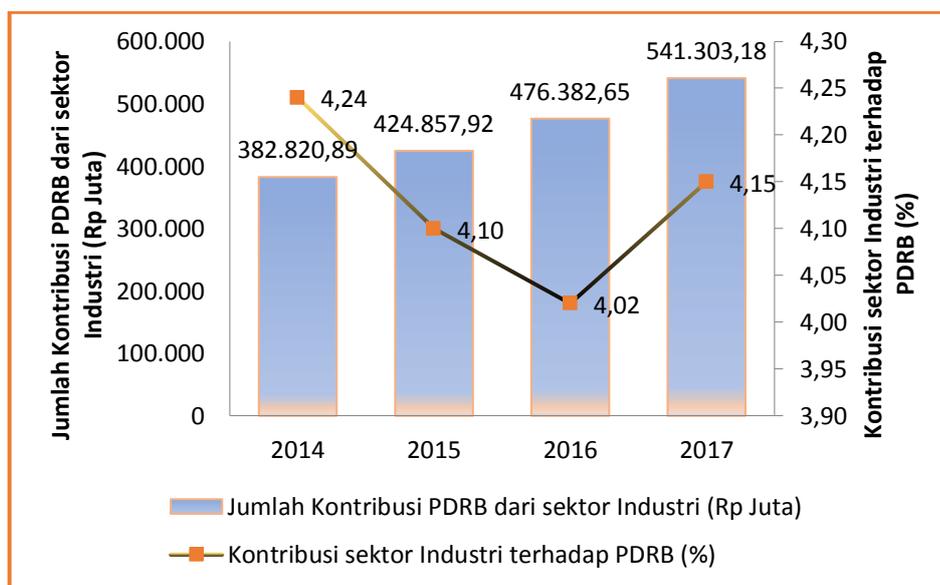
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

2.2.38 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Terdapat industri kecil dan industri rumah tangga yang beragam dan tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten Luwu, dengan kontribusi sejumlah Rp382,82 milyar

pada tahun 2014. Pertumbuhan nilai tambah sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Luwu rata-rata sebesar 12,25% per tahun dan pada tahun 2017 nilainya mencapai Rp541,30 milyar. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu pada periode tahun 2014-2018 cenderung stagnan dan menurun, yaitu dari 4,24% pada tahun 2014 menjadi 4,15% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri belum begitu berkembang di Kabupaten Luwu.

Gambar 2.24.
Grafik Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Tahun 2014 - 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

2.2.39 Pertumbuhan Industri

Kabupaten memiliki sejumlah industri, yaitu industri pengilangan migas, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, barang dari kulit dan alas kaki, kayu, barang dan gabus, barang dari anyaman bambu, rotan dan sejenisnya, kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri barang logam, dll. Perkembangan industri di Kabupaten Luwu berdasarkan besarnya nilai produksi seluruh unit usaha industri periode tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2014 mencapai 7,49%, meningkat menjadi 8,51% pada tahun 2016, namun menurun menjadi 6,09% pada tahun 2017.

Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Luwu di masa depan mengingat sektor industri merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Terbukanya kesempatan kerja akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan menumbuhkan perekonomian suatu wilayah.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparaturnya hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan layanan oleh pemerintah oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak terkait pelayanan dasar.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang. Untuk melihat sejauh mana capaian penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing sektor.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harus dijadikan prioritas. Selain itu, dengan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan akan lebih memiliki

kesejahteraan yang lebih baik. Mengingat peran pendidikan yang sangat penting, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal harus selalu ditingkatkan. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan semula.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Jumlah siswa jenjang TK/ RA/TPA (orang)	4.669	5.383	5.465	6.336	7.484
	Jumlah anak usia 4-6 tahun (orang)	19.643	22.876	22.993	19.254	21.294
	APS PAUD (%)	23,76	23,53	23,76	32,91	35,15
1.2.	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (orang)	50.100	48.224	47.900	46.960	46.287
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	47.049	47.131	47.226	47.358	47.451
	APS SD / MI (%)	106,48	102,32	101,43	99,16	97,55
1.3.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (orang)	23.563	24.257	23.239	23.162	22.883
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.371	23.404	23.647	23.685	23.727
	APS SMP / MTs (%)	100,82	103,64	98,27	97,79	96,44
1.4.	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA (orang)	10.670	11.406	12.370	13.855	15.561

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	APS SMA/SMK/MA (%)	50,94	53,18	57,22	63,56	70,12
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
2.1.	SD/MI/Paket A					
	Jumlah murid SD/MI/Paket A	50.141	48.257	47.964	47.070	46.397
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	47.049	47.131	47.226	47.358	47.451
	APK	106,57	102,39	102,39	102,39	97,78
2.2.	SMP/MTs/Paket B					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B (orang)	23.799	24.395	23.521	23.522	23.328
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.371	23.404	23.647	23.685	23.727
	APK (%)	101,83	104,23	99,47	99,31	98,32
2.3.	SMA/SMK/MA/Paket C					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C (orang)	10.670	11.406	12.370	13.855	15.561
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	APK (%)	55,02	54,84	58,89	67,66	74,85
3.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
3.1.	SD/MI/Paket A					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/PAKET A	46.247	45.543	45.522	45.231	45.472
	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	47.049	47.131	47.226	47.358	47.451
	APM	98,30	96,63	96,39	95,51	95,83
3.2.	SMP/MTs/Paket B					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/PAKET B	20.101	18.882	18.918	18.967	19.361
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	23.371	23.404	23.647	23.687	23.727
	APM	86,01	80,68	80,00	80,07	81,60
3.2.	SMA/SMK/MA/Paket C					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ PaketC	11.526	11.762	12.733	14.750	15.561
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	APM SMA/SMK/Paket C	55,02	54,84	58,89	67,77	74,85
4.	Angka Kelulusan					
4.1.	SD/MI					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	8.187	8.194	8.043	8.235	7.723
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	8.267	8.489	8.398	8.263	7.893
	Angka Kelulusan SD/MI	99,03	96,52	95,77	99,66	97,85

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
4.2.	SMP/MTs					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6.729	6.926	7.345	7.305	7.348
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	7.179	7.231	7.393	7.761	7.670
	Angka Kelulusan SMP/MTs	93,73	95,78	99,35	94,12	95,80
4.3.	SMA/SMK/MA					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	3.411	4.370	4.530	4.939	5.173
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	3.447	4.417	4.639		
	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	98,96	98,94	97,65		
5.	Angka Melanjutkan (AM)					
7.1.	SD/MI ke SMP/MTs					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	8.187	8.194	8.043	8.235	7.723
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP/ Mts	7.596	7.821	7.711	7.735	7.352
	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	95,44	95,45	95,87	93,93	95,29
7.2.	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6.729	6.926	7.345	7.305	7.348
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA	5.734	6.602	6.820	6.905	6.998
	AM SMP/MTs keSMA/SMK/ MA	85,21	95,32	92,85	94,52	95,24
6.	Fasilitas Pendidikan					
6.1.	SD/MI					
	Jumlah ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	554	522	574	574	536
	Jumlah seluruh ruang kelas SD/MI	2.093	2.220	2.289	2.293	2.243
	Persentase	26,47	23,51	25,08	25,03	23,90
6.2.	SMP/MTs					
	Jumlah ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik					
	Jumlah seluruh ruang kelas SMP/MTs	838	963	895	900	952
	Persentase					
6.3.	SMA/SMK/MA					
	Jumlah ruang kelas SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	369	378	426	451	567
	Jumlah seluruh ruang kelas SMA/ SMK/MA	467	486	621	631	633
	Persentase	79,01	77,78	68,60	71,47	89,57
7.	Ketersediaan Sekolah					
7.1.	Pendidikan Dasar					
	Jumlah Sekolah	440	453	454	456	467
	Jumlah penduduk kelompok usia (7 s/d 12 tahun) + (13 sd/ 15 tahun)	70.420	70.702	70.873	71.043	71.178
	Rasio	62,48	64,07	64,06	64,19	65,61
7.2.	Pendidikan Menengah					
	Jumlah Gedung Sekolah	62	64	67	68	68

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah penduduk kelompok usia (16 - 18 tahun)	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	Rasio	29,60	29,84	30,99	31,19	30,64
8.	Rasio Guru / Murid					
8.1.	Pendidikan Dasar					
	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	5.837	6.892	6.093	6.115	5.952
	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	75.357	71.787	72.139	70.122	69.200
	Rasio	774,58	960,06	844,62	872,05	860,12
8.3.	Pendidikan Menengah					
	Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)	1.465	1.487	1.675	1.308	1.330
	Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)	10.670	11.406	12.370	13.855	15.561
	Rasio	1.373,01	1.303,70	1.354,08	944,06	854,70
9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)					
	Jumlah penduduk berusia >15 Tahun melek huruf se Kabupaten Luwu	Na	Na	353.574	348.693	352.059
	Jumlah seluruh penduduk yang berusia>15 Tahun	Na	Na	357.920	352.979	356.305
	Persentase	Na	Na	98,78	98,78	98,80
10.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV					
	Jumlah guru berijazahberkualifikasi S1 dan D.IV	5.309	5.745	6.440	4.881	5.181
	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	7.415	7.279	7.768	6.115	5.952
	Persentase	71,60	78,93	82,90	79,82	87,05
11.	Pendidikan Non Formal					
	Paket A	41	33	64	40	110
	Paket B	236	138	282	360	445
	Paket C	856	356	363	895	1.050
	Jumlah	1.133	527	709	1.295	1.605

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan perkembangan pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Luwu sebagai berikut.

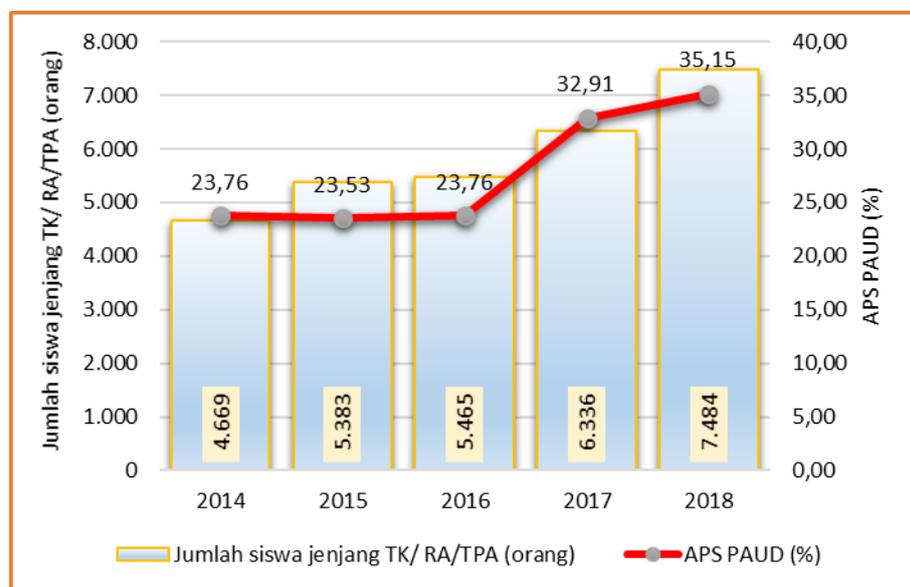
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD) 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD. yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

Berdasarkan Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 jumlah peserta didik PAUD di Kabupaten Luwu berjumlah 4.469 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sebesar 24,76%, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 7.484 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sebesar 58,58%.

Gambar 2.25.
Grafik Perkembangan APS PAUD
Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

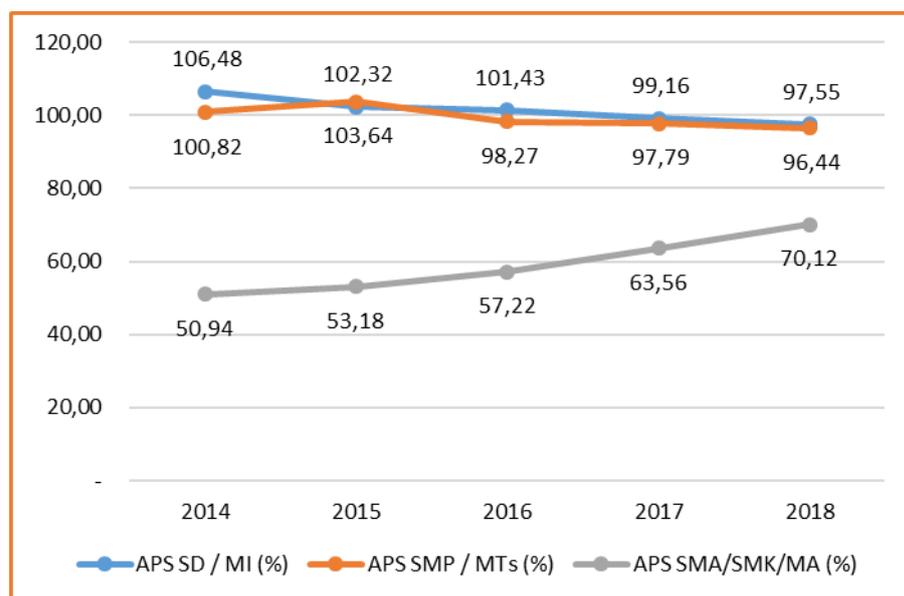
Jika melihat dari data tersebut jumlah peserta didik untuk PAUD di Kabupaten Luwu terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan masyarakat semakin ter-edukasi untuk menyekolahkan anaknya di tingkatan

pra-sekolah, tentunya peningkatan ini adalah disebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya di jenjang pra-sekolah dan tersedianya sarana prasarana pendidikan pra sekolah secara inklusif yang difasilitasi oleh pemerintah.

Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2014 jumlah peserta didik SD/MI di Kabupaten Luwu berjumlah 50.100 orang atau 106,48% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang berjumlah 47.049 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peserta didik SD/MI yang memiliki usia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Pada tahun 2018, jumlah peserta didik SD/MI menjadi 46.287 orang atau 97,55% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang mencapai 47.451 orang. Penurunan angka partisipasi sekolah pendidikan SD/MI disebabkan adanya pembatasan usia masuk sekolah, dimana usia calon siswa yang hendak memasuki pendidikan SD/MI harus mencapai 7 tahun atau lebih.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2014 jumlah peserta didik berjumlah 23.563 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 100,82%, kemudian pada tahun 2018 peserta didik berjumlah 22.883 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 96,44%.

Gambar 2.26.
Grafik Perkembangan APS Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah pada periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah peserta didik adalah 10.670 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 16-19 tahun adalah 20.948 orang, sehingga APS sebesar 50,94%. Kondisi ini membaik pada tahun 2018 dengan APS menjadi 70,12% dimana peserta didik meningkat menjadi 15.561 orang, sedangkan jumlah penduduk pada usia yang sama mencapai 22.191 orang.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah APK. APK mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya.

APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan dasar cenderung menurun, sedangkan untuk pendidikan menengah meningkat. Untuk jenjang pendidikan SD/MTs terjadi penurunan drastis dari 106,57 pada tahun 2014 menjadi 97,78 pada tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi penurunan dari 101,83% daya serap partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurun menjadi 98,32%. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dari 55,02% pada tahun 2014 menjadi 74,85% pada tahun 2018.

Ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut semakin menurun setiap tahunnya pada jenjang pendidikan dasar.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa

atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM sebagai salah satu indikator dalam layanan hak dasar masyarakat dibidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai usia sekolah. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 98,30% tetapi kemudian menurun menjadi 95,83% di tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 86,01% di tahun 2014, kemudian menurun menjadi 81,60% di tahun 2018. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terjadi peningkatan yaitu dari 55,02% pada tahun 2014 menjadi 74,85% pada tahun 2018.

d. Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2014-2018

Angka Putus Sekolah dimaknai sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Diinterpretasikan bahwa semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

e. Angka Kelulusan

Pelaksanaan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran merupakan implementasi dari fungsi manajemen. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai

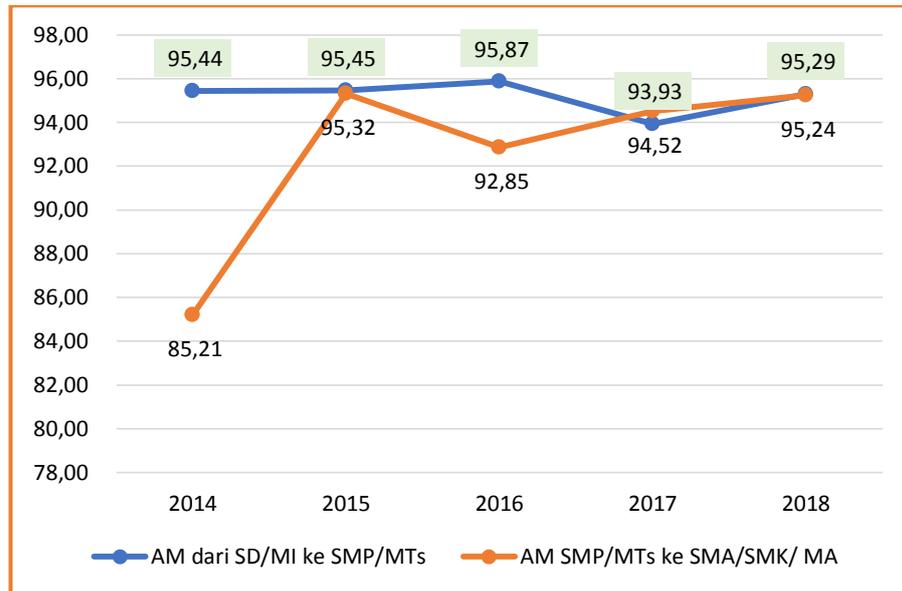
bentuk akuntabilitas yang indikator outputnya adalah Angka Kelulusan (AL). Oleh karena itu angka kelulusan ini menggambarkan capaian atas keberhasilan satuan pendidikan menamatkan sejumlah peserta didik atas ketuntasan kriteria dan standar nilai yang ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD mengalami fluktuasi. Tahun 2014 angka kelulusan jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 99,03% dan menjadi 97,85% di tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 99,36%, tetapi menurun menjadi 95,80% pada tahun 2018. Namun demikian, angka kelulusan pada tahun 2018 ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 93,73%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA menurun dari 98,96% pada tahun 2014 menjadi 97,66% pada tahun 2016.

f. Angka Melanjutkan Sekolah (AM)

AM digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulus dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP mengalami fluktuasi dan cenderung menurun yaitu dari 95,44% pada tahun 2014 menjadi 95,29% pada tahun 2018. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke SMA cenderung meningkat, yaitu dari 85,21% pada tahun 2014 menjadi 95,24% pada tahun 2018.

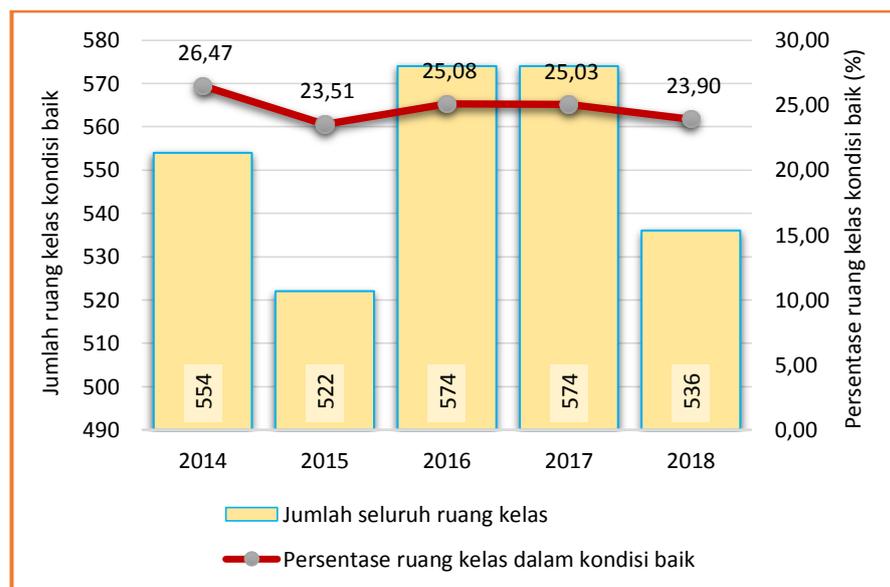
Gambar 2.27.
Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2014-2018



g. Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.36 tergambar bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari 26,47% menjadi 23,90%.

Gambar 2.28.
Grafik Perkembangan Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat mengalami peningkatan dari 79,01% pada tahun 2014 menjadi 89,57% pada tahun 2018.

h. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Ratio ketersediaan sekolah perjumlah penduduk rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah sekolah pada satuan pendidikan per wilayah dengan jumlah rentang usia peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan siswa pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi kenyamanan belajar akibat terbatasnya ruang semakin tidak memadai.

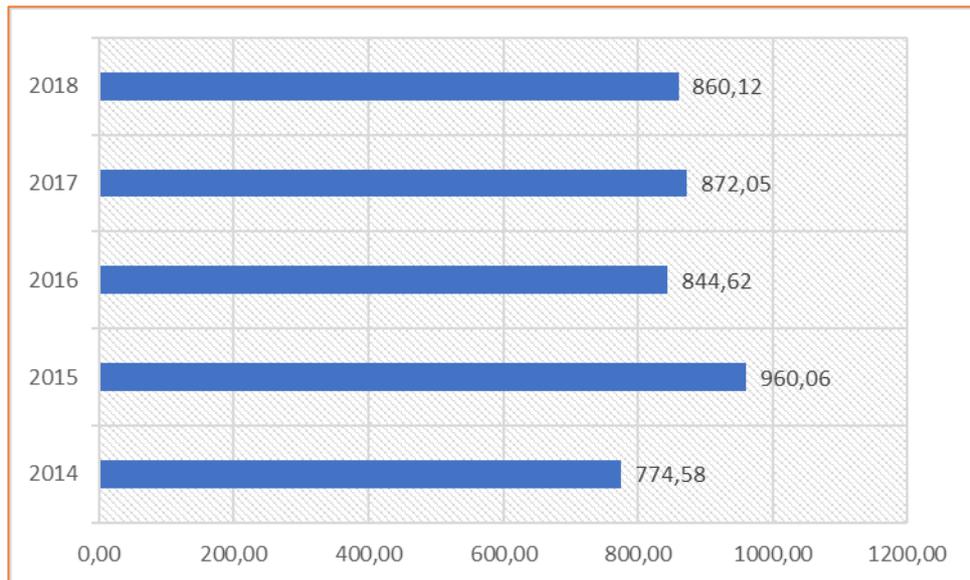
Dari data pada Tabel 2.36 dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasar semakin meningkat. Pada tahun 2014 adalah sebesar 62,48 yang berarti bahwa tersedia 62 sampai dengan 63 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar. Angka ini meningkat menjadi 65,61 pada tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan menengah juga mengalami peningkatan, dari 29,60 pada tahun 2014 menjadi 30,64 pada tahun 2018.

i. Rasio Guru/Murid

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada suatu tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Berdasarkan data pada Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar semakin meningkat, dari 774,58 pada tahun 2014 menjadi 860,12 pada tahun 2018. Ini berarti setiap 10.000 murid pendidikan dasar di Kabupaten Luwu, tersedia sejumlah 860 sampai dengan 861 orang guru. Sedangkan untuk pendidikan menengah mengalami penurunan dari 1.373,01 pada tahun 2014 menjadi 854,70 pada tahun 2018.

Gambar 2.29.
Grafik Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid
Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

j. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan program keaksaraan fungsional yang membimbing masyarakat untuk berkemampuan menguasai keterampilan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan trend yang signifikan meningkat tiap tahunnya hingga jika melihat data tabel yang ada di bawah menunjukkan angka melek huruf sudah hampir mencapai angka 100%.

Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatkan Indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya.

k. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh

melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Satndar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu pada tahun 2016-2018 cenderung stagnan, yaitu hanya meningkat 0,02 poin, dari 98,78 pada tahun 2016 menjadi 98,80 pada tahun 2018. Hal yang perlu ditekankan pada masa mendatang adalah meningkatkan keberdayaan para guru yang telah memenuhi kualifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

I. Pendidikan Non Formal

Berdasarkan data pada Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik non formal mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018, yaitu dari 527 orang menjadi 1.605 orang. Peningkatan tertinggi adalah pada Paket C yaitu dari 356 orang pada tahun 2015 menjadi 1.050 orang pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial

dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, imunisasi dan penolong kelahiran.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesehatan Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Puskesmas dan Puskesmas Pembantu					
	Jumlah Puskesmas	21	22	22	22	22
	Jumlah Puskesmas Pembantu	103	105	105	105	110
	Jumlah seluruh kecamatan	21	22	22	22	22
	Jumlah desa / kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan Puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Puskesmas Pembantu	45,37	46,26	46,26	46,26	48,46
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Tahun) pada 1 tahun tertentu.	60	52	54	75	68
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355
	Angka Kematian Bayi (AKB)	0,0094	0,0079	0,0081	0,0113	0,0107
	AKHB (1-AKB)	0,9906	0,9921	0,9919	0,9887	0,9893
3.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 Tahun) pada 1 tahun tertentu.	64	56	62	82	69
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355
	Rasio	9,98	8,54	9,39	12,43	10,86
4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Bulan) pada 1 tahun tertentu.	46	41	40	47	48
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355
	Rasio	7,17	6,29	6,06	7,12	7,55
5.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal	9	11	7	7	6

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Thn					
	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.353
	AKI	140,30	167,80	106,01	106,08	94,40
6.	Jumlah Posyandu dan Balita					
	Jumlah Posyandu	365	365	365	416	418
	Jumlah Balita	21.186	21.186	17.103	18.866	18.522
	Rasio per satuan balita	0,0172	0,0172	0,0213	0,0221	0,0226
7.	Puskesmas, Poliklinik dan Pustu					
	Jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu	209	218	218	218	224
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio per satuan penduduk	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
8.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk					
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	2	2	2
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI/Swasta	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	2	2	2
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	1:347.096	1:350.2187	1:176.638	1:182.652	1:179.604
9.	Dokter					
	Jumlah Dokter	35	36	32	47	48
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio per satuan penduduk	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
10.	Tenaga Medis					
	Jumlah Tenaga Medis	35	36	32	47	48
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
11.	Komplikasi kebidanan yang ditangani					
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	793	610	954	1.112	1.048
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.467	1.162	1.451	1.451	1.476
	Cakupan	54,06	52,50	65,75	76,64	71,00
12.	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan					
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.413	6.585	6.585	6.528	6.326

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	7.002	7.392	6.925	6.925	7.046
	Cakupan	91,59	89,00	95,01	94,27	89,78
13.	Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)					
	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	216	225	220	219	199
	Jumlah Desa/Kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan	95,15	99,12	96,92	96,48	87,67
14.	Balita Gizi Buruk mendapat perawatan					
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja	5	9	13	9	5
	Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	5	9	13	9	5
	Cakupan	100	100	100	100	100
15.	Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak					
	Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun	6.659	6.643	7.047	6.817	6.475
	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	6.366	6.551	6.531	6.272	6.272
	Persentase	104,6	101,4	107,9	109,0	103,2
16.	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani					
	Jumlah penderita Pneumonia balita	183	102	101	121	116
	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani	183	102	101	121	116
	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.	1.110	1.091	1.092	1.166	1.104
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100	100,00
17.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA					
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	317	286	324	320	300
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	494	533	537	602	690
	Cakupan	64,17	53,66	60,34	53,16	43,48
18.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	370	489	489	592	637
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	0,11	0,14	0,14	0,17	0,18
19.	Tingkat kematian karena tuberkulosis(per 100.000 penduduk)					
	Jumlah pasien TB yang meninggal	11	8	29	19	n.a.
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	0,003	0,002	0,008	0,005	n.a

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
20.	Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS					
	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	370	488	489	592	637
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	494	533	537	602	690
	Persentase	58,20	74,90	91,56	91,06	98,34
21.	Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS					
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	190	198	208	206	232
	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	238	325	287	324	334
	Persentase	79,83	60,92	72,47	63,58	69,46
22.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD					
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	30	41	60	67	14
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	30	41	60	67	14
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23.	Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida					
	Banyaknya balita yang pada malam sebelum survey tidur menggunakan kelambu	262	Tidak ada pembagian kelambu			
	Jumlah balita	35.198				
	Persentase Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0,74	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
24.	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi					
	Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	10	10	5	31	19
	Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	0,003	0,003	0,001	0,009	0,005
25.	Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin					
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	121.491	129.275	123.085	119.972	127.985
	Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten	158.789	166.575	153.088	184.734	188.121
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Cakupan kunjungan bayi					
	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.243	6.452	7.393	6.355	6.776
	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Cakupan	97,32	98,44	111,96	96,30	106,62
27.	Kunjungan Ibu hamil K4					
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	6.259	6.564	6.457	6.412	6.270
	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	7.335	7.744	7.254	7.254	7.380
	Cakupan	85,33	84,76	89,01	88,39	84,96
28.	Pelayanan nifas					
	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.279	6.368	6.480	6.482	6.336
	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7.002	7.392	6.925	6.925	7.046
	Cakupan	89,67	86,15	93,57	93,60	89,92
29.	Neonatus dengan komplikasi yang ditangani					
	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	237	171	389	534	586
	Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	1.000	1.408	989	989	1.006
	Cakupan	23,70	12,14	39,33	53,99	58,25
30.	Pelayanan anak balita					
	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	9.498	12.482	16.786	18.881	20.457
	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	29.306	28.809	28.809	30.754	29.132
	Cakupan	32,41	43,33	58,27	61,39	70,22
31.	Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat					
	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	9.411		5.759	6.910	6.508
	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	8.054		5.759	7.378	7.248
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	116,85		100,0	93,66	89,79
32.	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam					
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	6	6	4	3	3
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	4	4	3	3	3
	Persentase	66,7	66,7	75,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Tahun 2019.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan perkembangan pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Luwu sebagai berikut.

a. Cakupan Puskesmas

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 75 Tahun 2014 tentang persyaratan Puskesmas pada Pasal 9, dijelaskan bahwa pada setiap kecamatan minimal harus memiliki satu puskesmas, dan dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas yang dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dana aksesibilitas. Sementara berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan. Sehingga dalam hal ini tidak ada penetapan rasio jumlah penduduk perpuskesmas, mengingat kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah berbeda-beda termasuk luas wilayah pada kabupaten/kota tersebut serta mempertimbangkan ketersediaan SDM kesehatan sesuai kompetensi pada PMK Nomor 75 Tahun 2014.

Jika melihat Tabel 2.37, jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu sudah cukup memadai sebab jumlah puskesmas telah sama dengan jumlah kecamatan sehingga telah memenuhi PMK. Pemerintah Kabupaten Luwu ke depan akan fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas di setiap kecamatan agar dapat dicapai peningkatan kualitas layanan puskesmas.

Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta penempatan Pejabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan menurut Permenkes 75 Tahun 2014. Permasalahan terkait capaian indikator kinerja:

- 1) Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan Jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan;
- 2) Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas;
- 3) Penempatan pejabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi menurut Permenkes 75 Tahun 2014;

Dari data Tabel 2.37 tersebut dapat diketahui bahwa cakupan puskesmas di Kabupaten Luwu telah mencapai 100% artinya bahwa jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu telah sama banyak atau telah mengcover semua jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu, kedepannya pemerintah akan lebih meningkatkan lagi kualitas sarana prasarana dan pelayanan puskesmas di Kabupaten Luwu sehingga bukan hanya cukup dari segi kuantitas namun juga cukup dari segi kualitas.

Cakupan puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa di Kabupaten Luwu masih rendah, hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan dasar di wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian dari pemerintah khususnya bagi daerah terisolir. Dari data yang ada dapat diketahui cakupan puskesmas pembantu dari tahun ketahun pertumbuhan jumlahnya kurang signifikan. Pada tahun 2014 jumlah puskesmas pembantu dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Luwu adalah sebesar 45,37%, kemudian angka tersebut meningkat 3,09% menjadi 48,46 di tahun 2018. Pemerintah akan berfokus untuk menambah jaringan puskesmas pembantu sehingga setiap desa yang terdapat di Kabupaten Luwu dapat tercover dengan baik.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Bayi

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan

Berdasarkan Tabel 2.37 di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu sebab angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2014 adalah sebesar 99,06%, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 99,21%, tahun 2016 menurun menjadi 99,19,% tahun 2017 menurun lagi menjadi sebesar 98,87% dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi sebesar 98,93%. Walaupun keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu tetapi terjadi fluktuasi angka kelangsungan hidup bayi dengan kecenderungan menurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan kelahiran hingga di masa yang akan datang diharapkan angka kelangsungan hidup bayi dapat mencapai angka 100%.

c. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan Tabel 2.37, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dengan angka rasio sebesar 9,98, selanjutnya naik menjadi 12,43 pada tahun 2017 dan kemudian turun menjadi 10,86 pada tahun 2018.

Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

Kasus kematian Balita dari tahun 2014 sampai 2018 di Kabupaten Luwu berfluktuasi. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Pheмония, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit.

d. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan Tabel 2.37, pada tahun 2014 hingga 2018 Cakupan Kematian Neonatus masih fluktuatif, hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Dapat dilihat terjadi pada tahun 2014-2016 terjadi penurunan rasio angka kematian neonatal dengan angka berturut-turut yakni 7,17, 6,29, dan 6,06, kemudian meningkat di tahun 2017 dan 2018 dengan masing-masing angka rasio yakni 7,12 dan 7,56.

Kematian neonatal dari tahun 2014 hingga 2018 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

e. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 167,8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus kematian ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah 140,3 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2016 meningkat menjadi 167,8, kemudian menurun menjadi 106,02 pada tahun 2016, selanjutnya jumlah kematian ibu menurun menjadi 94,40 per 100.000 pada tahun 2018.

Capaian penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran dikarenakan makin maksimalnya deteksi dini risiko bagi ibu hamil dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan baik kualitas pelayanan dari sisi tenaga medis maupun sisi pelayanan sarana dan prasarana, kedepan pemerintah berkomitmen untuk semakin meningkatkan hal tersebut.

f. Jumlah Posyandu dan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan

berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan Tabel 2.37, terlihat bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Luwu relatif meningkat. Pada tahun 2014 jumlah posyandu sebanyak 365 unit, meningkat menjadi 418 unit pada tahun 2018. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2014 sebanyak 21.186 jiwa, menurun pada tahun 2018 sebanyak 18.522 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2014 adalah 0,172 dan meningkat menjadi 0,0226 per 1000 balita pada tahun 2018. Permasalahan dalam fungsi pelayanan posyandu diantaranya:

- a. Masyarakat tidak membawa balitanya kembali ke Posyandu setelah imunisasi dasarnya lengkap;
- b. Pelayanan posyandu kurang inovatif;

- c. Keterlibatan lintas sektor (Tim Pokjanel Posyandu) kurang maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

g. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Berdasarkan Tabel 2.37, dapat dilihat bahwa jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdiri Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah sarana pelayanan kesehatan di daerah ini adalah 209 dan meningkat menjadi 224 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan tersebut tidak menyebabkan meningkatnya rasio per satuan penduduk yang stagnan pada angka 0,00006.

h. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; oleh karena itu, peningkatan terhadap mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit merupakan hak rakyat yang harus terus menerus memperoleh perhatian pemerintah.

Dari data tersebut pada Tabel 2.37 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa semenjak bertambahnya jumlah Rumah Sakit di tahun 2016 rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari sebelumnya 1 unit Rumah Sakit harus melayani hingga 300.000 lebih penduduk pada tahun 2016 menjadi 1 rumah sakit melayani sekitar 150.000 lebih penduduk. Disamping jumlah, mutu layanan merupakan hal yang penting juga untuk diperhatikan pada masa-masa mendatang.

i. Dokter

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 7.484 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter umum dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat diketahui bahwa rasio dokter terhadap jumlah penduduk stagnan pada angka 0,0001, tetapi apabila dilihat dari perbandingan antara dokter dan penduduk terdapat peningkatan dari sebelumnya di tahun 2014 setiap dokter harus melayani sebanyak 9.915 penduduk menjadi sebanyak 7.483 penduduk di tahun 2018.

j. Tenaga Medis

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Pemenuhan Rasio tenaga kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini karena adanya upaya yang dilakukan untuk pemenuhan tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat dan daerah. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Khususnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sangat kurang seperti tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga Farmasi, dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis). Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan rawan bencana serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di daerah tersebut selalu berusaha untuk pindah ke daerah perkotaan dengan berbagai macam alasan yang mereka ajukan.

Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan

dengan melakukan penugasan khusus namun beberapa daerah tetap kosong peminat untuk bertugas didaerah tersebut.

Berdasarkan data pada Tabel 2.37, jumlah tenaga medis di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 35 orang dan pada tahun 2018 menjadi 48 orang. Jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami fluktuasi.

k. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Berdasarkan data pada Tabel 2.37 dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2014 sebesar 54,06% telah berhasil ditingkatkan menjadi 71,00% pada tahun 2018. Hal ini berarti masih terdapat 30,00% yang tidak tertangani. Kondisi ini disebabkan tenaga kesehatan tidak melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB Pasca Persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan Bayi Baru Lahir.

I. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis pada tahun 2014 sebesar 91,59 berarti ada sekitar 09,00 yang tidak tertangani, sedangkan di 2015 sebesar 89,00 ada sekitar 11,00 yang ditangani oleh bidan swasta di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 95,01 berarti ada sekitar 04,99 yang ditangani oleh Non Kesehatan, cakupan pertolongan persalinan pada tahun 2017 sebesar 94,27 dan ada sekitar 06,00 yang ditangani oleh bukan dari tim medis non kesehatan, sedangkan di tahun 2018 ada sekitar 89,78 sehingga yang ditangani oleh tenaga Non medis sebesar 10,00.

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat diketahui bahwa cakupan pertolongan persalinan yang ditangani tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan mengalami fluktuasi dan terjadi penurunan dari sebelumnya di tahun 2014 sebesar 91,59% menjadi 89,78% di tahun 2018.

m. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) selama 5 (Lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat dilihat bahwacakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2014 mencapai 95,15%, tetapi menurun menjadi 87,67% pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwaupaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum maksimal dalam rangka mencapai dan mempertahankan status imunisasi masyarakat yang lengkap sehingga kualitas kesehatan masyarakat belum mengalami peningkatan yang maksimal.

n. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Luwu dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Luwu yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah merespon dengan cepat setiap kejadian gizi buruk di masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain:

- 1) Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan outputter bentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih ditingkat Puskesmas maupun RS;
- 2) Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;
- 3) Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
- 4) Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas.

Adapun kendala yang ditemukan adalah:

- 1) Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sectoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifactor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tetapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air Bersih (Intervensi Sensitif dan Spesifik);
- 2) Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat

Provinsi banyak yang sudah berpindah tugas (mobilitas tinggi) sehingga upaya penanganan kasus gizi buruk menjadi tidak optimal;

- 3) Banyak orang tua penderita gizi buruk menolak saat anaknya dirujuk untuk intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk melalui rawat inap.

Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air bersih dll (Intervensi Sensitif dan Spesifik). Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat Provinsi banyak yang sudah berpindah Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS;
- 2) Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;
- 3) Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
- 4) Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas.

o. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus dipertahankan di atas 100%. Hal ini antara lain didukung oleh upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan. Pelaksanaan imunisasi campak pada kelompok sasaran di Kabupaten Luwu, masih menemukan beberapa kendala antara lain:

- 1) Adanya kelompok-kelompok penolakan terhadap imunisasi;
- 2) Usaha (berita) anti vaksin semakin gencar.

Salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan bayi adalah imunisasi, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di Sulsel tahun 2017 sebesar 100,17%.

Dari data tersebut pada Tabel 2.37 dapat diketahui bahwa capaian imunisasi campak di Kabupaten Luwu dari tahun 2014-2018 telah melampaui angka

100% hal ini menggambarkan fokus pemerintah yang senantiasa peduli pada kesehatan anak dengan menggalakkan program imunisasi. Diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan.

p. Cakupan Balita Pheumonia Yang Ditangani

Dari data tersebut pada Tabel 2.37 dapat diketahui bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani dari tahun 2014 s.d tahun 2018 selalu berada di angka 100% artinya pemerintah telah melaksanakan respon yang cepat terhadap kasus pneumonia yang terjadi pada balita, hal ini perlu dipertahankan di masa depan mengingat generasi muda adalah merupakan investasi masa depan yang harus dijaga.

q. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu memperkirakan bahwa penderita baru TBC TBA (+) pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu dari 494 pada tahun 2014 menjadi 690 pada tahun 2018. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi tetapi secara keseluruhan sepanjang periode ini mengalami penurunan, dari 64,17% pada tahun 2014 menjadi 43,48% pada tahun 2018.

Untuk mencegah terjadinya kasus baru, tentunya diperlukan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam upaya penemuan dan penanganan pasien TBC dibutuhkan strategi yang tepat yaitu strategi DOTS. Pengobatan TBC yang diberikan di fasilitas kesehatan DOTS dilakukan secara gratis oleh pemerintah dengan pendampingan yang dilakukan oleh PMO selama 6 bulan masa pengobatan hingga tuntas. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

- 1) Data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta masih ada yang belum masuk dalam system pelaporan program TBC;
- 2) Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan

yang tepat sesuai standar ISTC.

r. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013-2018. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan kesehatan dan dilaporkan di program terus meningkat

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat diketahui bahwa persentase tingkat prevalensi tuberkulosis terus meningkat dari sebelumnya di tahun 2014 angka prevalensi sebesar 0,11 menjadi 0,18 di tahun 2018. Kondisi ini menggambarkan kemampuan layanan kesehatan untuk mendeteksi pengidap tuberkulosis semakin baik, sehingga diharapkan dengan penemuan lebih dini penyebaran tuberkulosis dapat dicegah.

s. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Laporan kematian yang masuk tidak semua penyebab utamanya adalah Tuberkulosis. Berdasarkan data pada Tabel 2.37, angka kematian pada penderita TBC dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan, 0,003% menjadi 0,002%, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,008% dan kembali menurun menjadi 0,005% pada tahun 2017. Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi antara tahun 2013-2017:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC.
- 2) Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.
- 3) Pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.

t. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi jumlah kasus TBC menggambarkan banyaknya kasus TBC yang terjangkau oleh program. Berdasarkan data pada Tabel 2.37 dapat dilihat bahwa periode tahun 2014-2017 persentase proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami peningkatan yaitu 0,003% menjadi 0,005%.

u. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Pada tahun 2014 jumlah pasien baru tuberkulosis paru BTA mencapai 494 kasus dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 sedangkan jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan juga mengalami peningkatan, dari 370 pasien pada tahun 2014 menjadi 637 pasien pada tahun 2018.

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, juga diketahui bahwa persentase proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS semakin meningkat dari sebelumnya sebesar 58,20% di tahun 2014 menjadi 98,34% di tahun 2018. Peningkatan jumlah pendeteksian kasus ini memudahkan upaya dan program yang dilaksanakan untuk mengeliminasi penyakit tuberkulosis.

v. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Berdasarkan data pada Tabel 2.37, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2014 yaitu 30 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 30 kasus. Pada tahun 2015 jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani mengalami kenaikan dari tahun 2014 dengan jumlah temuan 41 kasus. Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2016 sebanyak 60 kasus. Dan mengalami penurunan yaitu 14 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah penderita dan penanganannya sebesar 67 kasus. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Luwu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mencapai 100%, karena jumlah penderita DBD yang ditemukan disuatu wilayah seluruhnya dapat ditangani sesuai standar/SOP. Hal ini dapat tercapai karena penanganan penderita DBD dapat langsung dilakukan oleh rumah sakit (RS) dan puskesmas yang

ada. Kesadaran dari masyarakat untuk segera membawa penderita sedini mungkin ke RS atau puskesmas sangat berperan dalam penanganan berdasarkan standar/SOP yang ada.

w. Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit malaria adalah dengan cara meningkatkan persentase penggunaan kelambu berinsektisida pada keluarga yang memiliki balita, sehingga ukuran persentase proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida dapat tercapai.

Dari data yang terdapat pada Tabel 2.37, diketahui pada tahun 2014 persentase anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah sebesar 0,74%, kemudian pada tahun tahun berikutnya tidak ada lagi balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida. Hal ini disebabkan pemerintah menganggap pola hidup masyarakat sudah cukup sehat dan ketersediaan jaringan listrik sudah cukup memadai sehingga risiko malaria bisa diperkecil, kemudian kejadian malarial di Kabupaten Luwu sudah tidak ada lagi atau sudah dianggap bebas malaria.

x. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi

Penemuan kasus HIV/AIDS secara akurat dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan basis data penderita HIV/AIDS yang akurat akan memudahkan untuk mengatur pola kebijakan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa persentase prevalensi HIV/AIDS dari total populasi bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yakni pada tahun 2014 angka prevalensi sebesar 0,003 kemudian meningkat menjadi 0,005 pada tahun 2018. Peningkatan ini didorong oleh semakin baiknya pelayanan kesehatan dalam men-surveillance dan menemukan penderita HIV/AIDS.

y. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Pelayanan rujukan antara lain meliputi Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, Rehabilitasi medis, Penunjang diagnostic seperti pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan

elektromedik, Tindakan medis kecil dan sedang. Operasi sedang dan besar, Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan, Pelayanan KB seperti pelayanan pasca persalinan/keguguran, Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit, Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, Pelayanan darah dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada ruang perawatan kelas III. Diterapkannya sistem rujukan online oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untuk Pasien, hal ini menimbulkan adanya batasan masyarakat untuk memilih Rumah Sakit karena sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Ketersediaan RS Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan sistem rujukan berjenjang, akhirnya pasien dirujuk ke RS Khusus dengan fasilitas yang tidak memadai.

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Kabupaten Luwu telah mencapai angka 100% sejak tahun 2014 s.d tahun 2018. Hal ini menggambarkan Kabupaten Luwu telah menjalankan amanah undang-undang terkait dengan penjaminan kesehatan masyarakat miskin dan pemerintah Kabupaten Luwu telah mengalokasikan belanja daerah untuk membiayai program KIS/JKN.

z. Cakupan kunjungan bayi

Berdasarkan data pada Tabel 2.37, jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu yaitu pada tahun 2014 jumlah kunjungan sebanyak 97,32% dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 106,00%.

Keterlibatan Lintas Sektor dalam pelayanan Posyandu dirasakan belum maksimal. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas, pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu. Berdasarkan data capaian dari tahun 2014 sampai 2018, cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan dasar pada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai usia satu tahun. Oleh karena itu, perlu dukungan dan keterlibatan

masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada anak bayi khususnya peran kader dan PKK dalam Pelayanan kesehatan anak bayi saat permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Keterlibatan lintas sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal;
- 2) Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas;
- 3) Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu

aa. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai persalinannya. Berdasarkan data pada Tabel 2.37, dapat dilihat bahwa Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 tahun 2014 sebesar 85,33% berarti ada sekitar 14,27% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Tahun 2015 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 84,76%, ada sekitar 15,24% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, Tahun 2016 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 89,01%, ada sekitar 10,99% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, tahun 2017 cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 88,39%, ada sekitar 11,61% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Pada tahun 2018 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 84,96%, ada sekitar 15,14% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) masih berfungsi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas/kesenjangan antar wilayah yang variasinya cukup besar, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (*missed opportunity*). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini menyebabkan ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester ke -1 (0-12 Minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (.12-24 Minggu), dan 2 kali pada

trimester ke-3 (> 24 minggu sampai dengan kelahirannya). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut diatas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) adalah :

- 1) Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan
- 2) Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai persalinannya

bb. Cakupan Pelayanan Nifas

Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan serta ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau. Berdasarkan data pada Tabel 2.37, Cakupan pelayanan nifas tahun 2014 sebesar 89,07% masih ada sekitar 10,93% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas. Meskipun mengalami fluktuasi, cakupan pelayanan nifas pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 89,92%, yang berarti bahwa masih ada sekitar 10,08% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas. Berdasarkan data tersebut terjadi fluktuasi cakupan pelayanan nifas dari tahun 2014 sampai dengan 2018 oleh tenaga kesehatan walaupun masih ada ibu nifas yang belum memperoleh pelayanan nifas. Hal ini disebabkan masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sehingga ibu nifas tidak terpantau oleh nakes dan tidak memperoleh pelayanan nifas yang seharusnya. Secara umum penyebab yang mempengaruhi cakupan kunjungan nifas yaitu:

- 1) Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan;
- 2) Ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau.

cc. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat diketahui persentase cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014 jumlahnya adalah 23,70% kemudian terus meningkat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2018 telah mencapai angka 58,25%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan semakin baik sehingga mampu untuk melayani lebih banyak jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada.

dd. Cakupan pelayanan anak balita

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat diketahui persentase cakupan pelayanan anak balita yang ditangani terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014 jumlahnya adalah 32,41% kemudian terus meningkat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2018 telah mencapai 70,22%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan semakin baik sehingga mampu untuk melayani lebih banyak anak balita.

ee. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Dari data tersebut pada Tabel 2.37, dapat diketahui persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2014 jumlahnya adalah 116,8% kemudian terus meningkat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2018 telah mencapai angka 89,79%. Menyikapi hal ini pemerintah kedepannya akan meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan dengan menangi sekolah-sekolaha terutama pada jenjang pendidikan dasar untuk memaksimalkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

ff. Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis dan Kecamatan

Tersedianya tenaga kesehatan/medis yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan kesehata. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut disajikan tabel jumlah tenaga kesehatan/medis menurut jenis dan kecamatan.

Tabel 2.38.
Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis dan Kecamatan, Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tenaga Kesehatan								
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Ahli	Apoteker	Bidan	Perawat	Kader Posyandu	Dukun Bersalin	Lainnya
1.	Larompong	2	0	-	1	4	11	89	30	-
2.	Larompong Selatan	1	1	-	2	6	9	74	22	-
3.	Suli	1	1	-	0	4	8	190	15	-
4.	Suli Barat	1	0	-	0	1	5	140	8	-
5.	Belopa	1	0	-	1	5	15	130	9	-
6.	Kamanre	0	0	-	1	5	15	184	9	-
7.	Belopa Utara	1	1	-	1	4	6	90	8	-
8.	Bajo	1	1	-	1	4	9	150	12	-
9.	Bajo Barat	1	0	-	1	5	3	144	8	-
10.	Bassesangtempe	1	1	-	0	1	9	84	12	-
11.	Latimojong	1	1	-	0	1	7	144	11	-
12.	Bassesangtempe Utara	1	1	-	0	1	8	0	12	-
13.	Bupon	1	1	-	0	7	6	154	10	-
14.	Ponrang	1	1	-	1	7	12	171	10	-
15.	Ponrang Selatan	1	0	-	1	7	8	222	13	-
16.	Bua	2	0	-	1	14	28	308	15	-
17.	Walentrang	1	0	-	0	11	12	230	9	-
18.	Walentrang Timur	0	1	-	0	8	5	101	8	-
19.	Lamasi	0	1	-	1	7	14	169	10	-
20.	Walentrang Utara	1	0	-	0	11	12	77	11	-
21.	Walentrang Barat	1	1	-	0	3	9	104	6	-
22.	Lamasi Timur	1	1	-	1	9	10	126	9	-
Jumlah		21	13	0	13	125	221	3.081	257	0

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2018

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan kabupaten/kota adalah Sumber Daya Air (SDA), air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Data dan informasi penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Data dan Informasi
Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sumber Daya Air (SDA)					
1.1.	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik					
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	1.358	1.618	2.268	2.797	3.225
	Luas irigasi kabupaten (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Persentase (%)	15,25	18,17	25,47	31,41	36,33
1.2.	Rasio Jaringan Irigasi					
	Jaringan primer	1.250	1.750	5.000	4.435	5.337
	Jaringan Sekunder	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Jaringan Tersier	NA	NA	NA	NA	NA
	Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)	NA	NA	NA	NA	NA
	Luas lahan budidaya	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio Jaringan Irigasi	14,04%	19,65%	56,15%	49,81%	59,94%
2.	Air Minum					
2.1	Penduduk berakses Air Minum					
	Penduduk berakses air minum	68.759	140.087	166.040	249.415	287.367
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	19,81	40,00	47,00	70,00	80,00
2.2	Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan					
	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	154.710	141.883	147.337	140.463	169.601
	Persentase	44,57	40,51	41,71	39,42	47,22
3.	Air Limbah					
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	40,12	71,00	76,00	75,45	
4.	Jalan					
4.1.	Panjang Jalan di Kabupaten Luwu					
	Jalan kabupaten (Km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Jalan Propinsi (Km)	32	32	32	32	79
	Jalan Nasional (Km)	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
	Total Panjang Jalan (Km)	2.196,95	2.289,57	2.460,46	2.591,52	2.735,89
4.2.	Jalan Kabupaten Menurut Kondisi					
	Kondisi Baik	330,91	385,5	424,81	533,48	538,02
	Kondisi Sedang	463,65	512,25	480,41	50,75	73,42
	Kondisi Rusak Ringan	545,5	570,4	614,95	1.048,68	1.063,09
	Kondisi Rusak Berat	709,39	673,92	792,79	811,11	866,86
	Rasio panjang jalan kondisi baik	0,15	0,17	0,17	0,21	0,21
	Panjang jalan kondisi mantap (km)	794,56	897,75	905,22	584,23	611,44
	Panjang jalan seluruhnya (km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	0,36	0,39	0,37	0,23	0,24
4.3.	Panjang jalan dengan jumlah penduduk					
	Jumlah panjang jalan (km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	0,00591	0,00612	0,00655	0,00686	0,00707
4.4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)					
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	330,91	385,5	424,81	533,48	538,02
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Persentase	16,15	18,00	18,37	21,83	21,17
4.5.	Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)					
	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km)	NA	NA	NA	1.380	1.380
	Persentase	-	-	-	56,46	54,30
5.	Penataan Ruang					
5.1	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah					
	Luas ruang terbuka hijau (ha)	NA	1,00	1,00	9,15	10,20
	Luas wilayah ber HPL/HGB	NA	NA	NA	4,15	6,20
	Rasio	NA	NA	NA	13,30	16,40
5.2	Bangunan ber- IMB per satuan bangunan					
	Jumlah bangunan ber – IMB	75,02	90,00	91,00	93,00	93,00
	Jumlah bangunan	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu, Tahun 2019.

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Luwu.

a. Sumber Daya Air (SDA)

1) Penyediaan air baku dan irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

2) Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Luas irigasi Kabupaten Luwu Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami penambahan luas 8,904 sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik dari selama periode tahun 2014-2018 secara terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 1.358 Ha atau 15,25%, meningkat menjadi 3.225 Ha atau 36,33% pada tahun 2018.

3) Rasio Jaringan Irigasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target “*overstock pangan*” dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Luwu dengan luas areal Daerah Irigasi jaringan primer mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang signifikan, dari 1.250 km pada tahun 2014 menjadi 5.337 km pada tahun 2018. Sedangkan jaringan sekunder tidak mengalami penambahan.

b. Air Minum

1) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada tahun 2014, persentase penduduk terhadap akses air bersih/air minum di Kabupaten Luwu adalah sebesar 19,81%. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 80,00% pada tahun 2018.

2) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Persesaan

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah 154.710 jiwa, tetapi kemudian menurun menjadi 169.601 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, meskipun mengalami fluktuasi tetapi secara keseluruhan kondisi pada tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 44,57% menjadi 47,22%.

c. Air Limbah

Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Oleh karena itu, air limbah harus dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau *septic tank*. Air limbah yang telah diolah dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Air limbah, terutama limbah perkotaan, dapat tercampur dengan berbagai kotoran seperti feses maupun urin.

Untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat air limbah khususnya diperkotaan, pemerintah Kabupaten Luwu melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi setiap rumah tangga. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah sebesar 40,12%, kemudian mengalami peningkatan secara terus menerus hingga mencapai 75,45% pada tahun 2017.

d. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

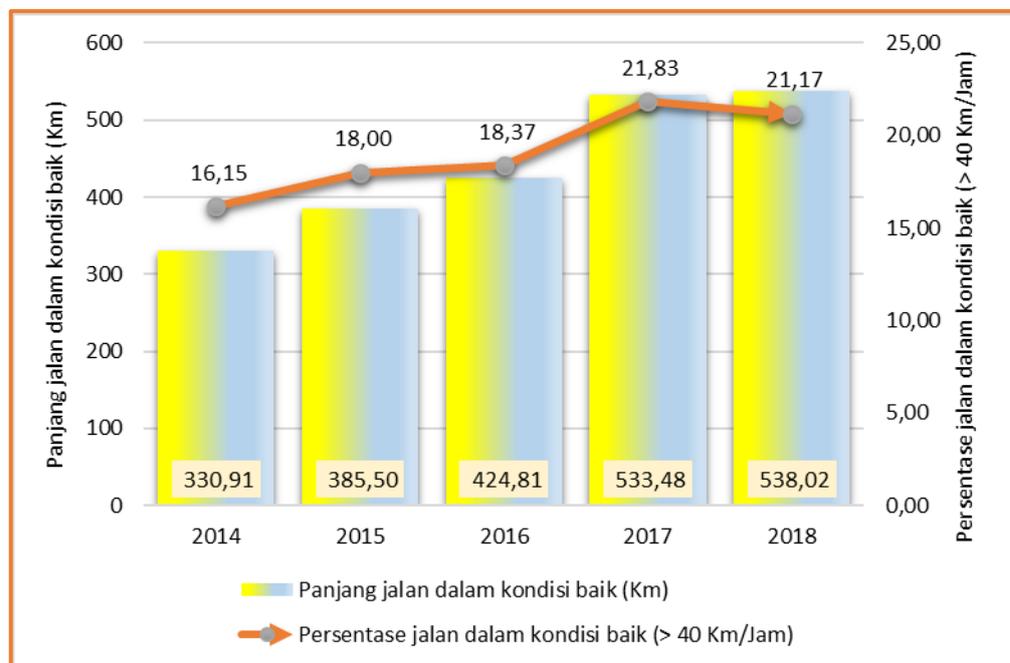
Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan

nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI).

Jalan raya yang melintas di wilayah Luwu pada tahun 2018 adalah 2.735,89 Km, yang terdiri dari jalan negara 115,50 Km, jalan provinsi sepanjang 79 Km dan jalan kabupaten 2.541,39 Km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2018, jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu adalah 538,02Km atau 21,17% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dalam kondisi sedang adalah 73,42Km atau 2,89%, rusak ringan sepanjang 1.063.09,21Km atau 41,83%, dan kondisi rusak berat sepanjang 866,86 km atau 34,11%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 16,15%, keadaan pada tahun 2018 sudah menunjukkan adanya peningkatan. Namun tidak demikian halnya dengan proporsi jalan dalam kondisi mantab, yang justru mengalami penurunan dari 0,36 menjadi 0,24.

Gambar 2.30.
Grafik Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2014 -2018



Secara umum, jalan di Kabupaten Luwu yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m tahun 2017 adalah 1,380 km atau 56,46%. Kondisi tersebut tidak berubah pada tahun 2018,

sedangkan panjang jalan mengalami peningkatan, sehingga persentase jalan yang memiliki drainase menurun menjadi 54,30

e. Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jumlah jembatan di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sejumlah 13 buah, tahun 2016 bertambah 7 buah dan tahun 2017 bertambah lagi 8 buah sehingga secara keseluruhan berjumlah 28 buah.

f. Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 telah meningkat secara signifikan dari 1,00 Ha menjadi 10,20 Ha. Rasio Bangunan ber-IMB persatuan Bangunan juga mengalami pertumbuhan dari 75,02% pada tahun 2014 menjadi 93,00 pada tahun 2018.

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan).

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perumahan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Terkait dengan pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Luwu periode 2014-2018, dapat disajikan data sebagai berikut.

Tabel 2.40.
Data dan Informasi
Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rumah Layak Huni					
	Jumlah rumah layak huni	NA	67.773	68.313	69,313	72,868
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	NA	0,196	0,196	0,196	0,204
2.	Permukiman Layak Huni					
	Luas permukiman layak huni (ha)	7.119,95	7.119,55	7.119,95	7.119,55	7.030,64
	Luas wilayah permukiman (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	Rasio	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
3.	Permukiman yang Tertata					
	Luas area permukiman tertata (ha)	NA	NA	NA	0,3	2,57
	Luas area permukiman keseluruhan (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Persentase	NA	NA	NA	0,000046	0,000359
4.	Lingkungan Pemukiman Kumuh					
	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	117,45	117,45	117,45	117,45	206,36
	Luas wilayah (ha)	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25
	Persentase	0,0391	0,0391	0,0391	0,0391	0,0688
5.	Luasan permukiman kumuh di perkotaan					
	Luasan permukiman kumuh kota yang tertangani (Ha)	NA	8	8	8	
	Luas permukiman kumuh Kota (Ha)	NA	117,45	117,45	117,45	
	Persentase	NA	0,06	0,06	0,06	
6.	Rumah tangga kumuh perkotaan					
	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	NA	NA	NA	1.328	1.339
	Jumlah seluruh rumah	NA	117,45	117,45	80.663	83.511
	Proporsi	NA	NA	NA	0,0164	0,0164

Sumber : Dinas Perkimtan Tahun 2019

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Luwu.

a. Rasio Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kriteria permukiman tidak layak huni antara lain : luasan lantai bangunan paling rendah 36m² paling tinggi 45m², bahan lantai, dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni, tidak memenuhi MCK.

Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga yang layak huni menempati rumah layak huni sebanyak 69.313 RT. Adapun pada tahun 2018, 72,868 RT tergolong layak huni. Terjadinya penurunan rasio rumah layak huni disebabkan peningkatan jumlah rumah layak huni tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Walau pun yang mendapat penanganan rumah yang luasnya <45 m², semakin bertambah menjadi rumah layak huni, namun rasio rumah layak huni mengalami peningkatan yang sejak tahun 2017 dengan rasio 0,196 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 0.204.

Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan

pembiayaan perumahan dan tidak adanya kesediaan data terkait jumlah rumah layak huni di KabupatenLuwu.

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni dari tahun pertama ke tahun mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni pada tahun 2014 menjadi 0,98%. Sedangkan Tahun 2018 menjadi 0,97% Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas areal permukiman tidak seiring dengan peningkatan kualitas rumah layak huni. Perbandingan Permukiman Layak Huni dengan Luas wilayah Permukiman tidak sebanding dengan rasio permukiman layak huni.

c. Persentase permukiman yang tertata

Permukimanadalah tempat bermukim masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tertata adalah Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Permukiman di Kabupaten Luwu secara umum belum dilakukan penataan dalam rangka meningkatkan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi bahwa sampai dengan tahun 2018, luas area permukiman yang tertata baru mencapai 2,57 Ha dari 7.237

d. Lingkungan Permukiman Kumuh

Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu periode 2014-2018 belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan data pada Tabel 2.40 dapat dilihat bahwa luas permukiman kumuh di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 adalah 206,38 Ha, meningkat dari kondisi pada tahun 2014 yaitu seluas 117,75 Ha.

e. Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan

Luasan permukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan tahun 2015 8 ha dan tahun 2017 menjadi 8 ha begitupun dengan Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan juga tidak mengalami peningkatan.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Berdasarkan data diatas, maka OPD yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan penataanbangunandan lingkukungan di kawasan strategi Kabupaten serta lintas daerah kabupaten kota.
- b. Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani.
- c. Kurangnya sediaan Air bersihTerhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat

Penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaanpembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertibanmasyarakat sangat berkaitan erat denganaspeksosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapatpertentangan dalam kehidupanbermasyarakat,tetapimasihdapatditolerir. Kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)					
	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat				1.850	
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio				0,52	
2.	Penegakan PERDA					
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA					
	Jumlah Pelanggaran PERDA	0,46	0,56	0,67	0,71	
	Persentase					
3.	Pelayanan Bencana Kebakaran					
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	3	3	4	4	6
	Jumlah Personil Pemadam Kebakaran	98	98	98	98	98
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Cakupan	0,000864	0,000857	0,001132	0,001122	0,001669
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					
	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 jam setelah pengaduan)	30	30	30	30	30
	Jumlah Kejadian Kebakaran	20	30	8	13	16
	Tingkat waktu tanggap (menit)	15	15	15	15	15

Sumber: - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu, Tahun 2019
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.

a. Penegakan Perda

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Secara keseluruhan sikap

masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masih cukup baik.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*response time*)

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa tingkat waktu tanggap (*response time*) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah memenuhi standar mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 yakni dengan waktu tanggap sebanyak 15 menit, hal ini menggambarkan manajemen penanggulangan kebakaran di Kabupaten Luwu sudah cukup baik.

Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:

1. Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan.

6. Sosial

Pelayanan dan pemberdayaan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan kabupaten/kota bidang urusan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Sub Urusan Pemberdayaan Sosial
 - a. Pemberdayaansosial KAT.
 - b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
 - d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
 - b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota
5. Penanganan Bencana
 - a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
 - b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
6. Pemeliharaan keamanan makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan sosial periode tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pelayanan Sosial					
	Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehab) yang terbina	9	8	10	9	
	Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	-	-	40,00	-	
	Persentase Penyandang Cacat Fisik, Mental dan Lanjut Usia yang menerima Jaminan Sosial	66,00	66,00	66,00	57,00	57,00
	Jumlah Kejadian Bencana (kali)	11	10	12	17	
	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Korban Bencana selama masa tanggap darurat (jiwa)	3	-	-	5	
	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan	11,00	-	-	22,00	

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	sarana prasarana tanggap darurat					
	Jumlah Sarana dan Prasana Tanggap Darurat	6	6	10	10	10
2.	Bantuan Sosial					
	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	3.442	4.684	9.936	23.771	40.514
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	4.684	9.253	10.000	198.922	206.215
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	73,48	50,62	99,36	11,95	19,65
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial					
	Jumlah PMKS yang tertangani	26.591	562	8	6.376	40.529
	Jumlah PMKS yang ada	31.550	18.278	17.632	22.220	206.215
	Persentase	84,28%	3,07%	0,04%	28,69%	19,65%
4.	PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar					
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	100	149	250	270	23.620
	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	4.684	9.253	10.000	198.922	206.215
	Persentase	2,13	1,61	2,50	0,14	11,45
5.	Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya					
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	200	2.165	875	1.160	300
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	2.000	2.500	1.000	50.413	50.413
	Persentase	10	86,6	87,5	2,30	0,60
6.	Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial					
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	8	8	8	8	8
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	8	8	8	8	8
	Persentase	100	100	100	100	100
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial					
	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	0	0	0	0	0
	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana	0	0	0	0	0

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	pelayanan kesos skala					
	Persentase					
8.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat					
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	79	480	1.318	978	186
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	79	480	1.318	978	186
	Persentase	100	100	100	100	100
9.	Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap					
	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	25	148	396	197	6
	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	79	480	1.318	978	186
	Persentase	31,65	30,83	30,04	20,14	3,23
10.	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial					
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	100	100	150	150	150
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	228	228	228	228	228
	Persentase	43,86	43,86	65,79	65,79	65,79

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan sosial di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.

Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Luwu. PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan

didayagunakan untuk mencegah, menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PMKS di Kabupaten Luwu melonjak tajam sejak tahun 2017. Hal ini diakibatkan adanya perubahan format dalam penentuan warga masyarakat sebagai PMKS. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengupayakan penyesuaian data, agar dapat dilakukan penanganan PMKS sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:

- a. Masih tingginya jumlah PMKS
- b. Minimnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial
- c. Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1. Tenaga Kerja

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas, pemerintah Kabupaten Luwu secara terus-menerus melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai data tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu telah diuraikan pada bagian terdahulu. Sedangkan data terkait dengan:

- a. Sengketa pengusaha-pekerja per tahun
- b. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
- c. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
- d. Keselamatan dan perlindungan
- e. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
- f. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
- g. Besaran Pemeriksaan Perusahaan
- h. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
- i. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
- j. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
- k. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
- l. Rasio lulusan S1/S2/S3

belum dapat disajikan secara lengkap mengingat minimnya kesempatan kerja di sektor industri di Kabupaten Luwu masih sangat terbatas. Namun demikian, dari hasil monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan antara lain adalah:

- a. Masih minimnya partisipasi Angkatan Kerja;
- b. Masih kurangnya hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja;
- c. Masih kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam pemberdayaan dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu. Meningkatkan ketahanan keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan pernikahan mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang *family friendly* dan responsif gender, khususnya untuk memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam

pembangunan bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah					
	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah				3.821	4.143
	Jumlah Pekerja Perempuan				113.419	187.605
	Persentase				3,37	2,21
2.	Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD					
	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	3	3
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	35	35	35	35	35
	Proporsi	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta					
	Pekerja perempuan di lembaga swasta					
	Jumlah pekerja perempuan				113.419	187.605
	Persentase	10,66	12,22	10,2	4,74	
4.	Rasio KDRT					
	Rasio KDRT	0,001	0,001	0,009%	0,001	
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100	100	100	100	
	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak			1	44	
	Peyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	110	92	10	15	
5.	Jumlah tenaga kerja dibawah umur					
	Pekerja anak usia 5-14 tahun					
	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x					
	Persentase					
6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan					
	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan					
	Jumlah angkatan kerja perempuan					
	Persentase					

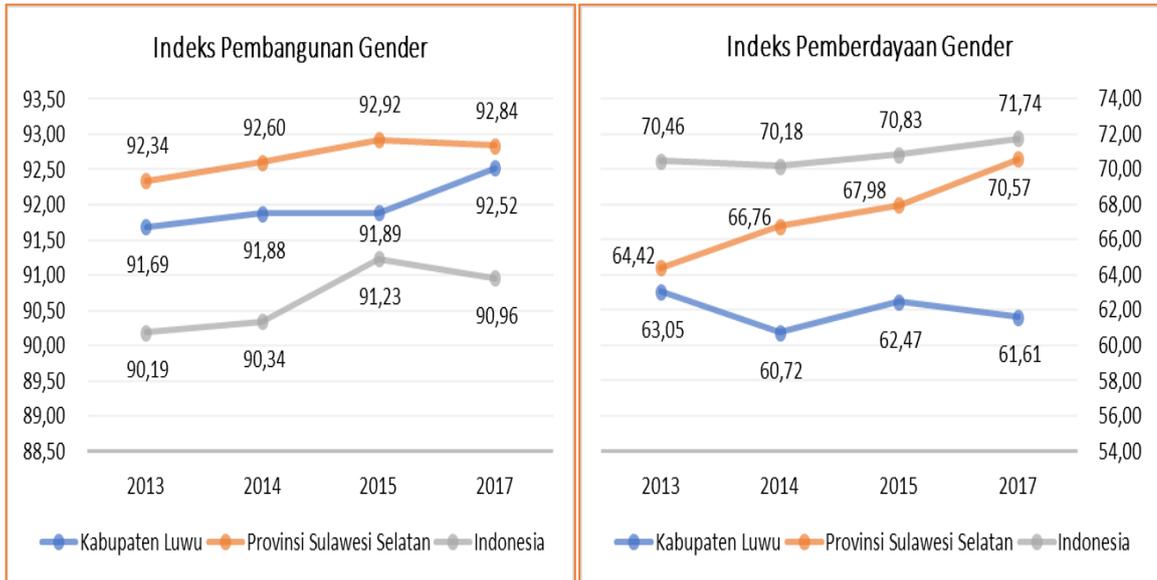
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu					
	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu				12	30
	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu				12	30
	Cakupan (%)				100	100
8.	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit					
	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu					
	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu					
	Cakupan					
9.	Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.					
	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos					
	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos					
	Cakupan					
10.	Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak					
	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak					8
	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan					8
	Cakupan (%)					100
11.	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum					
	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum				8	17
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum				25	31
	Cakupan (%)				32,00	54,84
12.	Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan					
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan				1	3
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT				33	48
	Cakupan (%)				3,03	6,25

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
13.	Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan					
	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya					3
	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial					3
	Cakupan (%)					100
14.	APM perempuan/laki-laki di SD					
	APM-SD Perempuan					23.033
	APM-SD Laki Laki					23.584
	Rasio					97,66
15.	APM perempuan/laki-laki di SMP					
	APM-SMP Perempuan					
	APM-SMP Laki Laki					
	Rasio					
16.	APM perempuan/laki-laki di SMA					
	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun					
	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun					
	Rasio					
17.	APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi					
	Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun					
	Jumlah anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun					
	Rasio					
18.	Angka Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun					
	AMH15-24 perempuan					
	AMH15-24 laki-laki					
19.	Perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian					
	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor pertanian					138
	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian					76
	Kontribusi (%)					35,51
20.	Indeks Pembangunan Gender	91,88	91,89		92,52	
21.	Indeks Pemberdayaan Gender	60,72	62,47		61,61	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Secara umum pemberdayaan perempuan di Kabupaten Luwu masih perlu terus ditingkatkan, mengingat IPG dan IDG daerah ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat diharapkan meningkatkan perannya masing-masing.

Gambar 2.31.
Grafik Perbandingan IPG dan IDG Kabupaten Luwu
Dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2013-2017



Sumber: Data diolah, BPS, Tahun 2018 (data Tahun 2016 tidak tersedia)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Luwu masih sangat rendah, jauh di bawah angka provinsi. Oleh sebab itu perlu mendapat perhatian serius di masa-masa mendatang. Permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:

- a. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- b. Banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- c. Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
- d. Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan.

3. Pangan

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan

sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan pangan periode tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Desa Mandiri Pangan	-	70,93	71,81	73,57	73,57
2.	Ketersediaan pangan utama					
	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	229.845.229	208.905.465	218.867.796	212.930.862	223.291.313
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Ketersediaan pangan utama	66.219	59.650	61.954	59.761	62.162
3.	Ketersediaan energi dan protein perkapita					
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	68	68	69	69	69
	Ketersediaan energi (ka/kapita/hari)	3.279	3.306	3.327	3.322	3.294
4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan					
	Pencapaian skor pola pangan harapan	-	85,2	87,4	87,8	86,3
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (persen)	100	100	100	100	100
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	19,00	26,66	32,00	44,68	44,68

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan Rendahnya ketersediaan pangan pada beberapa komoditi pangan. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

- a. Masih tingginya tingkat ketergantungan energi dan protein (79.80 Kg/kapita/tahun);
- b. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang ;
- c. Inflasi bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim); dan
- d. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

4. Pertanian

Permasalahan pertanian erat kaitannya dengan surat atau buktikepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Luwuselaluberusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hakatas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namunkemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lainyang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau buktikepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannyayang terbatas.

Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan pertanian periode tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas lahan bersertifikat					
	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	6	Na	4	11	26
	Jumlah Luas Wilayah (ha)	76.476	-	15.666	13303	144.864
	Persentase	0,0078	-	0,0255	0,0827	0,0179
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					
	Jumlah Kasus yang diselesaikan	Na	Na	1	1	3
	Jumlah kasus yang terdaftar		4	2	3	3
	Penyelesaian kasus tanah Negara			50,00	33,33	100,00
3.	Penyelesaian izin lokasi					
	Jumlah Ijin Lokasi	11	7	3	4	6
	Permohonan Ijin Lokasi	11	7	3	4	6
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahanbersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan.Indikator pertanian ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasisebagai kepastian dalam kepemilikan. Data di atas menunjukkan bahwa luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Luwu masih sangat rendah.

5. Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup telah semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Upaya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dapat dipastikan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan secara sungguh-sungguh. Uraian Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup periode tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota				Ada	Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rensana Pembangunan kab/Kota				Ada	Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah bupaten/kota				Ada	Ada
4.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Na	Na	Na	26,5	-
5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	-	94	87	90	89
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Na	Na	Na	Na	Na
6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten					
	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	21	8	10	41	40

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani					
	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	21	1	36	57	102
	Persentase	100,00		27,78	71,93	39,22
7.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat					
	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten	-	-	-	2	-
8.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup					
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	1	Ada	-
9.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten					
	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	-	-		1	2
	total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	-	-		1	2
	Persentase	Na	Na	Na	100,00	100,00
10.	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	75,01	76,03	80,50	83,75	
11.	Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R	24,99	23,70	19,50	16,27	
12.	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	75,01	76,03	80,50	83,75	
13.	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (%)	75,01	76,03	80,50	83,75	
14.	Nilai Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	65,00	67,00	71,00	83,00	
15.	Persentase Izin Pengolahan Sampah oleh Swasta yang diterbitkan	Tidak ada izin yang dikeluarkan sehubungan belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan Pemkab mengenai pengolahan sampah				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Permasalahan utama Kabupaten Luwu di bidang lingkungan adalah penanganan sampah dan pengawasan terhadap perizinan yang terkait dengan PPLH dan PUU LH. Berbagai indikator yang terkait dengan penanganan sampah sebagaimana terlihat pada tabel di atas rata-rata masih di bawah 84%, sedangkan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten masih

sebesar 39,22% dari izin yang ada. Beberapa permasalahan permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

- a. Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air (cemar sedang/metode *storet*);
- b. Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara;
- c. Masih kurangnya indeks tutupan hutan melalui acuan tutupan vegetasi.
- d. Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 2.47.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penduduk ber-KTP					
	Jumlah penduduk yang ber-KTP	179.770	165.466	203.081	211.958	229.974
	Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah	247.063	247.420	252.943	256.791	261.879
	Rasio	0,73	0,67	0,80	0,83	0,88
2.	Penduduk ber-KK					
	Jumlah penduduk ber-KK	86.895	91.735	90.604	92.364	92.997
	Jumlah penduduk yang telah menikah	147.111	148.336	146.284	148.346	150.482
	Rasio	0,59	0,62	0,62	0,62	0,62
3.	Bayi ber-Akte Kelahiran					
	Jumlah bayi yang ber-akte kelahiran	3.585	4.326	4.234	4.576	5.851
	Jumlah bayi	5.325	6.964	6.979	6.390	7.196
	Rasio	0,67	0,62	0,61	0,72	0,81
4.	Pasangan ber-Akte Nikah					
	Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah	13.632	14.186	15.768	18.073	22.402
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	144.290	151.076	152.452	154.871	153.080
	Rasio	0,09	0,09	0,10	0,12	0,15
5.	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP)					
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	179.770	165.466	203.081	211.958	229.974
	Jumlah penduduk wajib KTP	247.063	247.420	252.943	256.791	261.879
	Cakupan	72,76	66,88	80,29	82,54	87,82
8.	Penerbitan Akte Kelahiran					
	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	3.585	4.326	4.234	4.576	5.851
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	5.325	6.964	6.979	6.390	7.196
	Cakupan	67,32	62,12	60,67	71,61	81,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2019

Dari berbagai data yang tersaji pada tabel di atas, terlihat bahwa hanya rasio Pasangan ber-Akte Nikah yang masih rendah, yaitu 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus akte pernikahannya masih perlu terus diupayakan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Data dan Informasi Penyelenggaraan
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik					
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	195	195	198	198	198
	Jumlah seluruh pemerintahan desa	207	207	207	207	207
	Cakupan	94,20	94,20	95,65	95,65	95,65
2.	Kelompok Binaan LPM					
	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Na	Na	Na	Na	Na
	Jumlah LPM	207	207	207	207	207
	Rata-rata	-	-	-	-	-
3.	Kelompok Binaan PKK					
	Jumlah Kelompok Binaan PKK	Na	Na	Na	Na	Na

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah PKK	229	229	229	229	229
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	-
4.	LSM Aktif					
	Jumlah LSM aktif	1	1	9	12	12
	Jumlah LSM	48	48	56	59	59
	Persentase	2,08	2,08	16,07	20,34	20,34
5.	LPM Berprestasi					
	Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
	Jumlah LPM	207	207	207	207	207
	Persentase	0	0	0	0	0
6.	PKK Aktif					
	Jumlah PKK aktif	229	229	229	229	229
	Jumlah PKK	229	229	229	229	229
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
7.	PKK Aktif					
	Jumlah posyandu aktif	Na	417	417	417	417
	Jumlah posyandu	Na	417	417	417	417
	Persentase posyandu aktif	Na	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Jumlah LSM aktif di perdesaan pada tahun 2018 baru mencapai 20,34%. Hal ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk perdesaan kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi perhatian dan sebagai input untuk perumusan kebijakan di masa depan, mengingat potensi perdesaan di Kabupaten Luwu untuk berkembang sangat besar.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesiamerdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warganegara asing kecuali anggota korps diplomatik negarasahabat beserta keluarganya. Kehadiran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya menekan laju

pertumbuhan penduduk, dengan antara lain menggunakan strategi pembinaan keluarga berencana.

Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana periode tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.49.
Data dan Informasi Penyelenggaraan
Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,96	0,90	0,87	0,86	0,82
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,61	2,67	2,83	2,86	2,96
3.	Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk Penduduk					
	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB			3	3	3
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah semua perangkat daerah	33	33	34	34	34
	Jumlah sektor yang menyetujui pemanfaatan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4
	Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan Informasi yang melakukan pendidikan kependudukan	3	3	3	3	3
	Jumlah Kampung KB	-	-	1	23	59
	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	-	8,82	8,82	8,82
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan induk pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-
4.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,0	2,9	2,8	2,7	2,4
5.	Akseptor KB					
	Jumlah Akseptor KB	47.284	42.401	42.615	38.615	38.755
	Jumlah Pasangan Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Ratio	88,72	82,85	84,11	76,13	76,22

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun					
	Jumlah Peserta KB Aktif	35.164	34.560	32.415	32.575	33.029
	Jumlah Pasangan Usia Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Angka (%)	65,98	67,53	63,98	64,22	64,96
7.	Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun					
	Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun	2.949	1.158	1.000	609	500
	Jumlah Pasangan Usia Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Cakupan	5,53	2,26	1,97	1,20	0,98
8.	Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)					
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.321	6.583	7.096	7.882	7.624
	Jumlah Pasangan Usia Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Cakupan	11,86	12,86	14,01	15,54	14,99
9.	Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
	Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP	6.829	7.390	7.301	7.840	8.564
	Jumlah Akseptor KB	47.284	42.401	42.615	38.615	38.755
	Persentase	14,44	17,43	17,13	20,30	22,10
10.	Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi					
	Jumlah Pasangan Usia Subur yang masih menggunakan kontrasepsi	35.164	34.560	32.415	32.575	33.029
	Jumlah Akseptor KB	47.284	42.401	42.615	38.615	38.755
	Persentase	74,37	81,51	76,06	84,36	85,23
11.	Anggota Bina Keluarga Balita					
	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	2.321	3.051	4.556	4.438	4.015
	Jmlah Anggota Kelompok BKB	3.275	4.896	8.134	7.672	6.455
	Cakupan	70,87	62,32	56,01	57,85	62,20
12.	Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB					
	Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	461	771	2.144	2.217	1.947
	Jmlah Anggota Kelompok BKR	1.961	2.875	4.429	4.358	3.785
	Cakupan	23,51	26,82	48,41	50,87	51,44
13.	Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB					
	Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	258	469	1.792	1.746	1.271
	Jmlah Anggota Kelompok BKL	1.679	2.962	4.246	4.175	3.567
	Cakupan (%)	15,37	15,83	42,20	41,82	35,63
14.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan					
	Jumlah PPKS	2	2	2	2	2
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Persentase	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
15.	Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa					
	Jumlah PIK R/M	25	25	25	25	34
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Cakupan	113,64	113,64	113,64	113,64	154,55
16.	PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan					

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk					
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	37	49	48	47	47
	Jumlah PKB/PLKB	37	49	48	47	47
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS					
	Cakupan					
18.	Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan					
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	227	227	227	227	227
	Jumlah desa/kelurahan	227	227	227	227	227
	Rasio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat					
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	21.750	21.713	33.707	36.500	32.676
	Perkiraan Permintaan Masyarakat	21.500	20.650	30.643	31.577	26.095
	Cakupan	101,16	105,15	110,00	115,59	125,22
20.	Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan					
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	21	21	42	42	42
	Jumlah Faskes dan jejaring	84	84	85	96	96
	Persentase	25,00	25,00	49,41	43,75	43,75
21.	Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa					
	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	82.457	80.232	80.700	80.992	85.994
	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	82.573	83.412	84.171	84.673	85.915
	Cakupan	99,86	96,19	95,88	95,65	100,09
22.	Tahapan Keluarga Sejahtera					
	Keluarga Pra Sejahtera	16.475	19.361	18.213	17.780	15.014
	Keluarga Sejahtera I	25.076	17.889	17.437	17.072	23.209
	Keluarga Sejahtera II	40.906	42.982	45.050	46.140	47.771
	Total Keluarga	82.457	80.232	80.700	80.992	85.994
23.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	50,39	46,43	44,18	43,03	44,45

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu, Tahun 2019

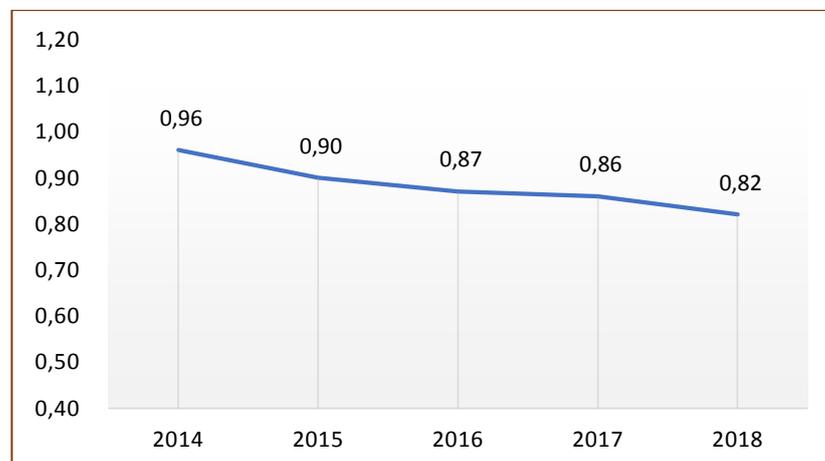
Berdasarkan tabel di atas, berikut ini diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang banyak dan berkualitas membuat daerah tersebut memiliki modal manusia. Namun, tidak selalu banyaknya penduduk sejalan dengan kualitas pembangunan daerah, dan justru berpotensi mendatangkan masalah baru ketika jumlah penduduk yang banyak diikuti dengan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus bisa dikendalikan untuk mengantisipasi masalah sosial di masa depan.

Sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2014, penduduk Kabupaten Luwu naik 0,96% dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara konsisten menurun meski cenderung lambat menjadi 0,82% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Luwu.

Gambar 2.32.
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2014-2018

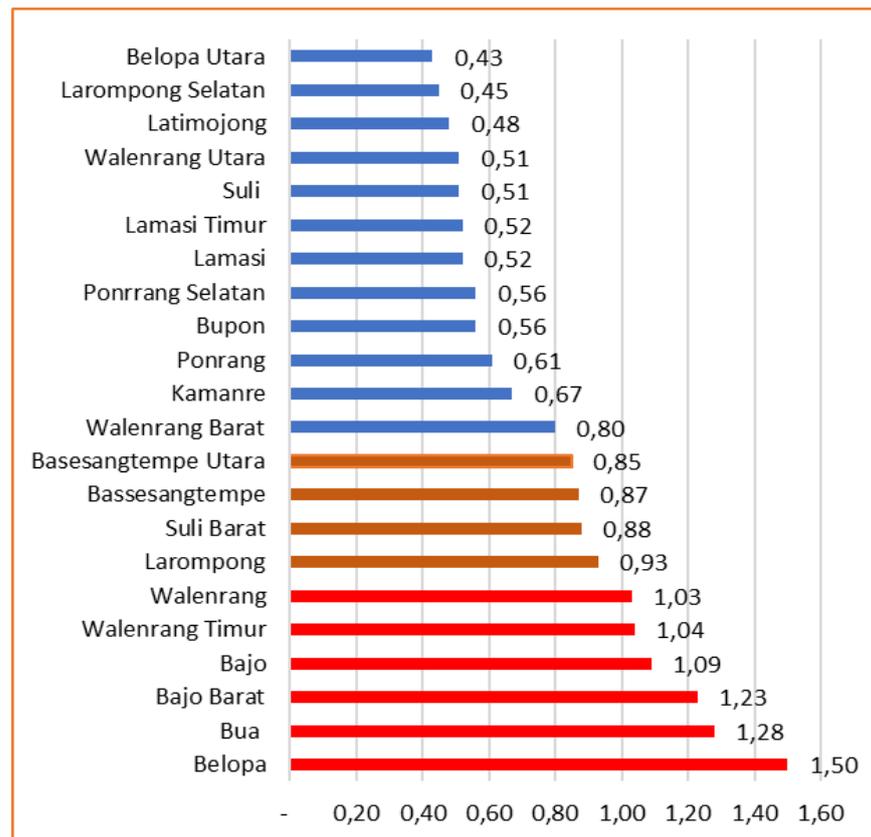


Sumber: BPS, Tahun 2018.

Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, pada tahun 2017 terdapat 10 kecamatan dengan LPP di atas rata-rata Kabupaten Luwu, bahkan terdapat 6 kecamatan dengan LPP di atas 1% yaitu Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Bajo, Kecamatan Walenrang Timur, dan Kecamatan Walenrang. Tingginya pertumbuhan

penduduk di Kecamatan Belopa adalah karena sebagai daerah perkotaan merupakan tujuan migrasi penduduk dari pedesaan serta pembangunan perumahan yang lebih berkembang di Kecamatan Belopa dibanding Kecamatan Belopa Utara.

Gambar 2.33.
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017



Sumber: BPS, Tahun 2018.

b. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah madura. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sekitar 0,59% (2013 – 2016) dan rata-rata jumlah anak tiap keluarga yang diukur melalui TFR sebesar 2,3 atau rata-rata keluarga memiliki lebih dari dua anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan Pemerintah adalah dua anak lebih baik.

Hal Ini yang harus menjadi perhatian, dan terus diupayakan untuk diturunkan, agar tiap keluarga juga Pemerintah daerah di Luwu memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk, membangun keluarga maupun

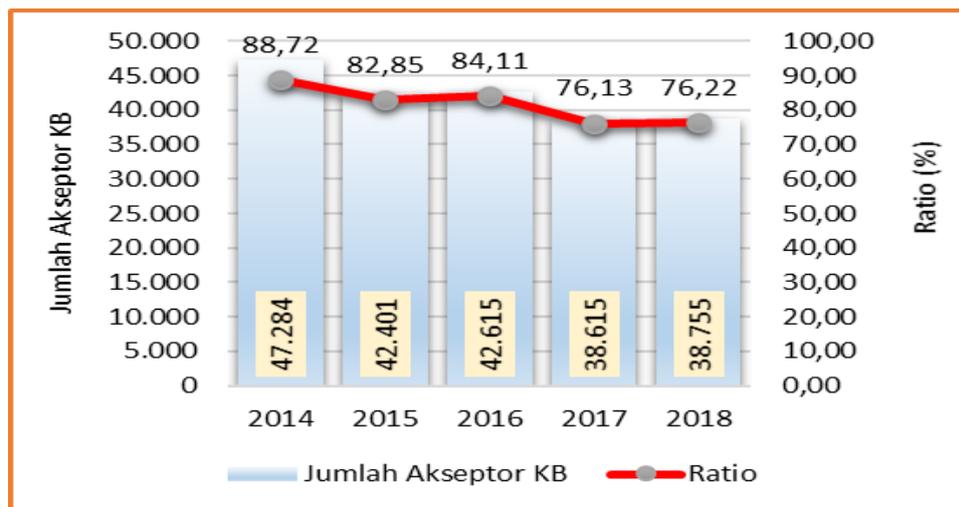
sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sehingga generasi penerus yang tumbuh dan berkembang ini memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih baik.

c. Rasio Akseptor KB

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Rasio Akseptor KB. Rasio akseptor KB digunakan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor KB) menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan pengendalian jumlah penduduk.

Gambar 2.34.
Grafik Perkembangan Akseptor KB
Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Tahun 2019

d. Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Akseptor KB yang menggunakan MKJP di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 meningkat secara signifikan, dari sejumlah 6.829 akseptor atau 14,44% pada tahun 2014 menjadi 8.564 akseptor atau 22,10% pada tahun 2018.

Gambar 2.35.
Grafik Perkembangan Akseptor KB yang menggunakan MKJP Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Tahun 2019

e. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 baru mencapai 74,37%, dan pada tahun 2018 dapat ditingkatkan menjadi 85,23%.

Gambar 2.36.
Grafik Perkembangan Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Tahun 2019

f. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Perkembangan PKS dan KS I di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 secara terus-menerus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 mencapai 41.551 keluarga, berhasil diturunkan menjadi 38.223 keluarga pada tahun 2018.

Tabel 2.50.
Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Uraian		
		Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Jumlah Keluarga Sejahtera I	Jumlah Keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
1	2014	41.551	82.457	41.551
2	2015	37.250	37.250	37.250
3	2016	35.650	35.650	35.650
4	2017	34.852	34.852	34.852
5	2018	38.223	38.223	38.223

Sumber: Dinas PP,PA&KB Kab.Luwu

g. Keluarga Pra Sejahtera

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga. Persentase Keluarga

PraSejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2016 disajikan pada tabel berikut.

9. Perhubungan

Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan; rambu-rambu lalu lintas; alat pemberi isyarat lalu lintas; dan fasilitas penerangan jalan.

Pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penumpang Angkutan Umum					
	Jumlah penumpang Angkutan Umum	390.118	396.457	476.639	499.782	346.014
	Jumlah penumpang Pesawat udara	2.035	830	8.301	44.825	65.041
	Total Jumlah Penumpang	392.153	397.287	484.840	544.607	411.055
2.	Ijin Trayek					
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	366	402	528	430	470
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	0,0011	0,0011	0,0015	0,0012	0,0013
3.	Jumlah Uji kir angkutan umum	1.845	1.975	1.989	1.884	1.878
4.	Pelabuhan Laut/Terminal Bis					
	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal bis	2	2	2	1	1
	Jumlah	3	3	3	2	2
5.	Layanan Angkutan Darat					
	Jumlah angkutan darat	26.366	31.062	34.968	37.795	41.124
	Jumlah penumpang angkutan darat	390.118	396.457	476.539	499.782	511.328
	Persentase	6,76	7,83	7,34	7,56	8,04
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum					
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	112	100	215	897	1.037
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Jumlah angkutan umum	1.957	2.075	2.204	2.781	2.915
	Persentase	5,70	4,80	9,70	32,20	35,60
7.	Pemasangan Rambu-rambu					
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	2	81	157	223	332
	Jumlah rambu-rambu yang	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	seharusnya tersedia					
	Persentase	0,09	3,52	6,83	9,70	14,43
8.	Panjang jalan per jumlah					
	Panjang Jalan (Km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Jumlah Kendaraan	26.366	31.062	34.968	37.795	41.124
	Rasio	0,0777	0,0690	0,0661	0,0647	0,0618
9.	Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum					
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	390.118	396.457	476.539	499.782	346.014
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	195	221	301	386	204
10.	Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal					
	Jumlah Orang	392.153	397.287	484.840	544.607	411.055
	Jumlah Barang (kg)	196,35	221,9	312,01	426,25	518,6
11.	Layanan Urusan Perhubungan					
	Angkutan Darat	1.957	1.975	1.200	2.781	
	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	1.845	1.975	1.600	1.884	
	Traffic Light	2	1	4	-	
	Warning Light	-	8	10	-	
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	25	25	5	2.200/2.781	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

10. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Luwu terus berjalan. Layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektronik telah banyak dinikmati oleh masyarakat.

Secara umum, persentase dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 masyarakat yang menggunakan jaringan komunikasi secara simultan sama. Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Tabel 2.52.
Capaian Indikator urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Server yang dikelola	-	-	-	1
Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	-	-	-	1

Indikator	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	-	-	-	-
Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	-	-	-	-
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	-	-	-	-
Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Ya	Ya	Ya	Ya
Persentase Website OPD	-	-	20	40

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 masih belum maksimal. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat urgensi bidang ini dalam kehidupan global di masa ini.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Struktur ekonomi Luwu ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Tabel 2.53.

Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Koperasi Aktif					
	Jumlah Koperasi	413	412	413	413	424
	Jumlah Koperasi Aktif	206	201	206	127	187
	Persentase	49,82	48,81	49,95	30,71	44,10
2.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	Jumlah UMKM	18.000	18.080	18.117	18.183	18.406
	Jumlah UMKM Aktif	17.597	16.290	15.399	15.637	15.921
	Persentase	97,76	90,10	85,00	86,00	86,50
	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif					
	Persentase UKM BPR/LKM Aktif					
3.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	15	18	18	18	18

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 masih sangat rendah, tidak mencapai 50% dari jumlah koperasi yang ada. Sementara itu, jumlah UMKM pada periode tahun 2014-2018 terus mengalami perkembangan, meskipun keaktifannya mengalami fluktuasi. Secara umum, UMKM aktif pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat..

12. Penanaman Modal

Iklim investasi di Luwu menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Luwu yang strategis menempatkan Luwu menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Luwu.

Tabel 2.54.
Kondisi Investasi Berskala Nasional
Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	7	7	7	7	7
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	2	2	2	2	2
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel	10	13	14	14	14
Lama Proses perizinan	1-3 hari	1-3 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	3	3	4	4
Jumlah/ Macam Pajak	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
Jumlah/ Macam Retribusi	3	3	3	3	3
Presentase indeks kepuasan masyarakat			73,66		87,01

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Luwu

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu telah berupaya melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan investasi, antara lain dengan menetapkan regulasi, meningkatkan pelayanan dan kemudahan pengurusan perizinan.

Tabel 2.55.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2014-2018

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2014	Jumlah investor	NA	NA	NA
2015	Jumlah investor	17	1	18
2016	Jumlah investor	17	2	19
2017	Jumlah investor	12	0	12
2018	Jumlah investor	13	0	13

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Luwu

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu investor yang melakukan investasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Luwu di masa depan mengingat investasi adalah salah satu faktor pendukung dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

Tabel 2.56.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2014-2018

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2014	NA	NA	NA	NA
2015	18	567.969.000.000	18	567.969.000.000
2016	19	30.447.341.000	19	30.447.341.000
2017	12	22.388.700.000	12	22.388.700.000
2018	13	16.689.711.214	13	16.689.711.214

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Luwu

Realisasi investasi di Kabupaten Luwu menurun secara signifikan selama periode tahun 2014-2018. Pada tahun 2015, nilai investasi di Kabupaten Luwu mencapai Rp567,97 milyar, dengan jumlah investor 18 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2018 investasi yang direalisasikan oleh 13 perusahaan hanya mencapai 16,69 milyar. Mengingat potensi Kabupaten Luwu yang sangat besar untuk investasi di sektor industri berskala besar, maka upaya-upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Kabupaten Luwu perlu dikedepankan. Investasi merupakan penggerak utama perekonomian daerah di masa kini.

Tabel 2.57.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	NA	493	284	263	264

2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	NA	18	19	12	13
3	Rasio daya serap tenaga kerja	NA	27:1	15:01	22:01	20:01

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Luwu

Rasio daya serap tenaga kerja oleh PMA/PMDN selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan angka yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2014 adalah 27 per perusahaan, menurun menjadi 20 per perusahaan pada tahun 2018. Sementara itu, berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.58.

Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2014-2018

No		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi PMDN (Rp. Juta)	NA	569.969	30.447,34	22.388,70	16.689,71
2	Prosentase Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN	NA	17,71	56,96	30,44	16,88

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Luwu

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraanhidupdan tingkatkesehatannya.

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Tabel 2.59.

Capaian Indikator urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda	5	20	25	
Jumlah kegiatan kepemudaan	2	4	6	7
Jumlah kegiatan olahraga	6	6	5	6

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Olahraga	24	15	15	
Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif (%)	30	32	40	50
Cakupan Pembinaan Olahraga		2	2	5
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	4	4	4	7
Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	30	40	50	50
Jumlah Cabor Prestasi setiap Tahun	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	22	22	22	22
Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	1	2	1	1

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Luwu

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan keolahragaan di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2014-2018 cenderung stagnan. Komponen yang mengalami peningkatan adalah organisasi olahraga yang aktif dan cakup wasit yang bersertifikasi. Sedangkan jumlah prestasi olah raga pada tahun 2018 yang hanya mencapai 11 prestasi, jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 57 prestasi.

Tabel 2.60.
Jumlah prestasi olahraga Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.	53	53	57	13	11

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu 2018

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

- a. Masih rendahnya kualitas pemuda;
- b. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya;
- c. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di daerah; dan
- d. Masih rendahnya kualitas atlit.

14. Kebudayaan

Kedatuan Luwu adalah kerajaan Bugis tertua, pada tahun 1889, Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang

tertera dalam epik La Galigo, sebuah karya orang suku bugis. Namun begitu, La Galigo tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai teks sejarah karena dipenuhi dengan mitos, maka keberadaan kerajaan-kerajaan ini dipertanyakan. Pusat kerajaan ini terletak di Malangkeyang kini menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu juga disebutkan dalam kitab Kakawin Nagarakretagama, teks pada abad ke-14 sebagai daerah di bawah pengaruh kerajaan Majapahit bersama Lombok Mirah (Lombok), Bantayan (Bantaeng) dan Udamakatraya (Kepulauan Talaud) dan pulau-pulau disekitarnya pada periode Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M). tetapi bukti sejarah penaklukan kerajaan luwu oleh majapahit melainkan perkawinan kerajaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Luwu ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Luwu seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Budaya Luwu sangat strategis untuk diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat di era kini.

Penyusunan tabel capaian indikator seni budaya dengan merujuk tatacara pengolahan sumber data dan informasi kondisi umum daerah.

Tabel 2.61.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	6	6	
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	3	4	
3.	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah					
4.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi					
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	-	-	4	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
- b. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah dan;
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan asset budaya.

15. Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kabupaten” Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Luwu, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.62.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku “kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku “kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Informasi Komunikasi, Statistki & Persandian Kabupaten Luwu 2018

16. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan:

- a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini dapat dilihat perkembangan pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018.

Tabel 2.63.
Persentase Perangkat Daerah
Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah					
2	Jumlah total perangkat daerah					
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah					

Dinas Informasi Komunikasi, Statistik & Persandian Kabupaten Luwu 2018

Penyelenggaraan urusan persandian belum begitu maksimal di Kabupaten Luwu. Tidak adanya perangkat daerah yang khusus menangani urusan persandian menyebabkan kurang diperoleh data-data terkait dengan kinerja persandian selama periode tahun 2014-2018.

17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar disekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidkandan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Perpustakaan merupakan perantara masyarakat. oleh karena itu, perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat, kadang-kadang dalam sejarah negara. Dengan demikian, sejarah perpustakaan di Luwu tidak terlepas dari sejarah Indonesia.

Berikut ini ditampilkan data terkait data dan informasi pelaksanaan urusan bidang perpustakaan di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018.

Tabel 2.64.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan
Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pengunjung Perpustakaan					
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	26.818	27.395	30.157	31.685	25.789
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	1.255.366	1.447.533	1.769.251	1.859.205	1.879.815
	Total	1.282.184	1.474.928	1.799.408	1.890.890	1.905.604
	Jumlah Rata-Rata Pengunjung per Bulan (orang)	2..235	2.283	2.513	2.640	2.149
2.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	44.789	45.830	47.674	48.912	49.746
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk					
	Jumlah Perpustakaan	506	513	520	525	525
	jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	0,00146	0,00146	0,00147	0,00147	0,00146
4.	Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang)					
	Jumlah putakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	3	3	3	3
	jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	3
	Jumlah	6	6	6	6	6
5.	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelola	111	111	-	2	
6.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Berprestasi	-	1	1	1	
7.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	2	2	2	2	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sebesar 26.818 orang menjadi 31.685 orang di tahun 2017. Demikian juga dengan jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah yang terus bertambah dari tahun 2014 sebesar 44.789 judul buku menjadi 48.912 judul buku pada tahun 2017.

18. Kearsipan

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang

sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor.

Tabel 2.65.
Data dan Informasi Kearsipan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	-	-	-	-
Jumlah Arsip daerah yang dikelola	7 OPD	7 OPD	7 OPD	9 OPD
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	3	3	3	7
Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	7	7	7	13

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Luwu

Penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 semakin membaik, terlihat dari meningkatnya sarana kearsipan daerah sebagaimana terlihat pada tabel di atas dan persentase perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku.

Tabel 2.66.
Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	7 OPD	9 OPD	11 OPD	17 OPD	20 OPD
2	jumlah perangkat daerah	51 OPD	51 OPD	51 OPD	57 OPD	57 OPD
3	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	13,7%	17,6%	21,5%	29,8%	35,08%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu, Tahun 2018

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pemerintahan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan.

1. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan dan kelautan merupakan aset penting yang dimiliki oleh Indonesia. demikian juga dengan Kabupaten Luwu. Sumberdaya perikanan dengan kekayaan hayatinya akan memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, tentunya dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang

benar. Upaya pengembangan kawasan pantai terutama untuk wisata bahari, wisata pantai, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil kelautan. Pengembangan kawasan perikanan baik tangkap, budidaya maupun bahari dilaksanakan dengan pendekatan minapolitan, komoditas utama yang dikembangkan adalah rumput laut, ikan bandeng dan kekerangan.

Kabupaten Luwu memiliki potensi perikanan tangkap maupun budidaya yang potensial dan telah dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian dan perikanan.

Dalam rangka perumusan kebijakan, data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan periode tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produksi Perikanan					
	Produksi perikanan (ton)	652.314,80	667.410,50	537.487,00	648.650,33	628.748,61
	Target Daerah (Ton)	567.964,00	597.741,00	624.845,00	655.427,00	687.531,00
	Persentase Produksi Perikanan	114,85	111,66	86,02	98,97	91,45
2.	Konsumsi Ikan					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	47,85	48,05	50,32	52,00	53,04
	Target Daerah (Kg)	47,85	48,81	49,29	49,79	49,79
	Konsumsi ikan	100,00	98,44	102,09	104,44	106,53
3.	Cakupan bina kelompok nelayan					
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n (kelompok)	69	41	32	15	8
	Jumlah kelompok nelayan	105	187	204	224	232
	Cakupan bina kelompok nelayan	65,71	58,82	69,61	70,09	71,12
	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	7,03	11,98	11,00	10,83	10,68
	Bantuan Alat Tangkap	68	50	33	15	
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan					
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	840,00	1.496,00	1.632,00	1.792,00	1.856,00
	Jumlah produksi ikan di daerah	11.949,29	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17.379,30
	Produksi perikanan kelompok nelayan	7,03	11,98	11,00	10,83	10,68
5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman					
	Jumlah tangkapan ikan	11.949,29	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17.379,30
	80% dari tangkapan maksimum lestari	-	-	-	-	-
	Proporsi tangkapan ikan yang	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	berada dalam batasan biologis yang aman					
6.	Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial					
	Kawasan lindung perairan	-	-	-	-	-
	Total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-
7.	Nilai Tukar Nelayan					
	Indeks yang diterima nelayan					
	Indeks yang dibayar nelayan					
	Nilai tukar nelayan	106,43	107,12	103,48	104,36	104,45

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.

a. Produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung.

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dianalogikan dengan produksi Perikanan Tangkap di laut, dimana kelompok ini kontribusinya terhadap produksi perikanan total juga semakin menurun.

b. Konsumsi Ikan

Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung berbagai macam zat nutrisi. Ikan menurut perairan tempat hidupnya terdiri dari ikan air tawar dan ikan laut. Keduanya adalah makanan sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan tubuh. Sebagai bahan pangan, ikan merupakan sumber protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat baik dan prospektif. Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan produk lainnya adalah kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahannya untuk dicerna.

Peningkatan ini merupakan wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan terhadap perkembangan otak. Ibu yang mengonsumsi ikan

secara teratur selama masa kehamilan, mempunyai anak yang memiliki skor tes inteligensi yang lebih tinggi dibanding dengan teman sebayanya yang lain. Selain itu, orang tua yang telah mengonsumsi ikan dalam waktu lama mempunyai risiko yang lebih rendah mengalami penurunan fungsi kognitif.

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran;
2. Menurunnya potensi ikan lemuru di perairan;
3. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan;
4. Tingginya tingkat abrasi pantai;

2. Pariwisata

Secara geografis, Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu di sebelah Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang di sebelah Barat, dan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Uniknya, wilayah kabupaten Luwu terbagi dua yang dipisahkan oleh Kota Palopo, sebuah daerah otonom. Dari kondisi geografis tersebut, ada beragam destinasi wisata yang menarik di kunjungi di Luwu. Seperti wisata alam, tempat bersejarah, tempat nongkrong, tempat hunting foto, hingga spot wisata *instagramable* kekinian. Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Luwu cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah.

Terdapat beberapa objek wisata yang tahun ini di intervensi Pemkab Luwu untuk dibuatkan fasilitas dasar, yaitu berupa tempat peristirahatan (gazebo) untuk para pengunjung dan menyiapkan pula tempat wudhu, toilet dan ruang ganti baju, maupun gapura atau pintu gerbang. Objek wisata yang mendapatkan perhatian

dari Pemkab Luwu diantaranya, pengembangan destinasi air terjun Desa Riwang Selatan. Berupa pembukaan jalan pariwisata dan pembuatan MCK dengan memanfaatkan alokasi DAU. Sementara untuk pembuatan gazebo dialokasikan untuk objek wisata air terjun sarassa sebanyak 2 unit, objek wisata pantai hutan mangrove Desa Temboe, objek wisata air terjun Siteba Kecamatan Walenrang utara, objek wisata sungai Pakkalolo Kecamatan Bua sebanyak 2 unit.

Dinas Pariwisata akan membangun area parkir objek wisata Buntu Matabing Kecamatan Larompong, pembuatan gapura air terjun Sarassa Kecamatan Latimojong, pembangunan gapura objek wisata pantai hutan mangrove, pembangunan gapura objek wisata bahari Buntu Matabing, gapura objek wisata Air Terjun Sarassa Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong, pembuatan MCK objek wisata pantai hutan mangrove Desa Temboe, MCK di objek wisata Siteba Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara, MCK Objek Wisata Permandian Alam Pakalolo Kecamatan Bua.

Potensi pariwisata di kabupaten Luwu sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisata yang cukup meningkat dari Tahun 2015 yaitu sebanyak 11.117 orang orang meningkat di Tahun 2017 menjadi sebanyak 12.477 orang dan Tahun 2018 meningkat menjadi 12.573 orang.

Tabel 2.68.
Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018
Kunjungan Wisata Domestik	11.117	10.700	12.477	12.573
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	333	180	224	311

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Hal ini tentu tidak terlepas dari program pemerintah kabupaten Luwu yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata .

Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan pariwisata merupakan penyumbang terbesar dalam pemasokan pendapatan terutama dalam hal perekonomian masyarakat dan negara. Sekarang kegiatan pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat kota sampai pada masyarakat

desa. Kegiatan pariwisata yang dilakukan masyarakat dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat

Tabel 2.69.
PAD Sektor Pariwisata Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	PAD sektor pariwisata (Rp)	50.000.000	50.160.000	50.350.000	50.160.000	149.975.000
2	Total PAD (Juta Rp)	63.945,27	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74
3	PAD Sektor Pariwisata (%)	0,08	0,06	0,05	0,05	0,14

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2019

PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 meningkat cukup signifikan. Namun demikian, perlu terus dikembangkan mengingat Kabupaten Luwu memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 2.70.
Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Luwu, Tahun 2014 –2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	10	10	10	10	10
Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	27	27	27	27	27
Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	12	12	12	12	12
Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	2	2	2	2	2
Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar	3	3	3	3	3
Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	-	-	-	2	2
Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	-	-	-	-	-
Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	1	1	1	1	3
Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	1	1	1	1	1
Jumlah Objek wisata yang dikelola oleh Swasta	-	-	-	2	3

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Kabupaten Luwu memiliki daya tarik dan sumber daya wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata unggulan daerah, yaitu:

a. Wisata Tirta

Wisata tirta adalah obyek wisata dengan obyek utama dapat berupa laut, pantai dan sungai. Dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan

Teluk Bone, Kabupaten Luwu memiliki banyak potensi wisata tirta terutama pantai berpasir dan hutan bakau.

b. Wisata Alam

Objek wisata alam adalah objek wisata yang berbasis pada alam, baik panorama alam, kondisi alam, keunikan alam dan bentukan alam.

c. Wisata Sejarah

Obyek wisata sejarah di Kabupaten Luwu berupa peninggalan sejarah zaman kerajaan sampai peninggalan zaman Belanda. Obyek wisata sejarah yang beragam ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan.

d. Wisata Seni

Obyek wisata seni adalah segala bentuk kesenian yang dapat dinikmati dan dapat dijadikan obyek dan daya tarik wisata berupa ; seni suara, seni tari, seni kreasi, seni gerak dan seni drama, yaitu tari Paja'ga, tari Langkankuajang, dan seni kreasi.

e. Agrowisata

Agrowisata adalah wisata yang berkaitan dengan kegiatan pertanian berupa perkebunan, peternakan, perikanan dan persawahan.

- 1) Kawasan Agrowisata Latimojong
- 2) Hutan Penelitian dan Wisata Kayu Lara Temboe

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Luwu merupakan kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat Kabupaten Luwu yang berperan dalam menjawab isu-isu pokok pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu. KPP berperan strategis karena keunikan lokasi maupun tingginya intensitas kunjungan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Luwu menjadi pemain utama dalam hal pembinaan dan pengembangan KPP serta ikut bertanggung jawab dalam merencanakan dan mendukung pengembangannya.

Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas jalur jalan utama dan sumber daya tarik wisata unggulan yang membentuk tema produk wisata kawasan, maka Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Luwu terdiri dari 4 (empat) kawasan wisata dengan tema produk dan uraian sebagai berikut:

a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Selatan

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata selatan menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata Tirta, wisata alam (air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi:

- 1) Kecamatan Belopa
- 2) Kecamatan Belopa Utara
- 3) Kecamatan Larompong
- 4) Kecamatan Larompong Selatan
- 5) Kecamatan Suli
- 6) Kecamatan Suli Barat
- 7) Kecamatan Bajo
- 8) Kecamatan Kamanre

b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Tengah

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Tengah menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata Tirta, wisata alam (air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi :

- 1) Kecamatan Ponrang
- 2) Kecamatan Ponrang Selatan
- 3) Kecamatan Bua
- 4) Kecamatan Bupon.

c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Barat

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Barat menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata alam (air terjun), Agro wisata, budaya dan kehidupan masyarakat dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi :

- 1) Kecamatan Latimojong
- 2) Kecamatan Bajo Barat
- 3) Kecamatan Bastem
- 4) Kecamatan Bastem Utara

d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Utara

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Utara menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata alam (air terjun), Agro wisata, budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi :

- 1) Kecamatan Walenrang
- 2) Kecamatan Walenrang Barat
- 3) Kecamatan Walenrang Timur
- 4) Kecamatan Walenrang Utara
- 5) Kecamatan Lamasi
- 6) Kecamatan Lamasi Timur

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

- a. Kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait;
- b. Lemahnya pemasaran kedalam maupun luar negeri;
- c. Kurangnya kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata;
- d. Lemahnya pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata.

3. Pertanian

Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik. Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Luwu, diantaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Luwu, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah.

Sub kategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya).

Tabel 2.71.

Persentase Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan dan perkebunan terhadap PDRB Tahun 2014-2016

Indikator	2014	2015	2016
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	53,22	53,55	54,24
Produktivitas padi atau bahan pangan lokal lainnya per Hae	-	-	6,83 Ton

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Penentuan komoditas basis dilakukan pada komoditas yang ada di masing-masing sub sektor di Kabupaten Luwu. Dari hasil analisa LQ dan shift share, didapat 15 komoditas unggulan yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu yang dapat dilihat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031, diantara 15 komoditas terpilih dari hasil analisa LQ dan SSA yang sudah dilakukan sebelumnya, yang termasuk komoditas unggulan pertanian adalah komoditas durian, pisang, sawo, kacang panjang, jagung, ubi jalar, kambing/ domba, dan sapi. Selanjutnya dipilih lagi yang paling unggul dan dapat dikembangkan untuk selanjutnya.

Tabel 2.72.

Produktivitas padi lokal per Ha Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	335.640	308.380	312.382	294.586	288.273
2	Luas areal Panen padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	67.472	3.023	69.635	66.234	58.066
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha	4,98	4,89	4,49	4,45	4,97

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Luwu

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya pada tahun 2018 cenderung stagnan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga tahun 2017.

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2014-2018 semakin menurun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73.

Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	172	273	147	118	155
2.	Jumlah kelompok tani	2.045	2.045	1.887	2.109	
3.	Cakupan Bina Kelompok Petani	8,41	13,35	7,79	6,25	7,35

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Luwu

4. Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (*prime mover*) juga dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain.

Tabel 2.74.
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Luwu Tahun 2014 -2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan Industri	7,49	8,09	8,51	6,09
Cakupan bina kelompok pengrajin	15	26	31	35
Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	5	10	15	20

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2018

Melihat data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan industri sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2016 mencapai angka 8,51 namun pada tahun 2017 hanya mencapai 6,09, hal ini tentu berdampak pada angka penyerapan tenaga kerja yang linier dengan kondisi tersebut sehingga hal ini sepatutnya menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun upaya pada sector industry kecil cenderung lebih dari tahun ketahunnya apabila meninjau cakupan bina kelompok pengrajin dan jumlah kemasan yang tercipta di wilayah Kabupaten Luwu dalam empat tahun terakhir.

5. Transmigrasi

Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Luwucenderung tidak berubah selama periode tahun 2014-2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Layanan Urusan Transmigrasi Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Transmigran Swakarsa	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK
Luas Areal Lahan Transmigrasi yang dikelola	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha
Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disiapkan	250 Ha	250 Ha	250 Ha	250 Ha

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu 2018

2.3.4 Fokus Penunjang Urusan

Kinerja layanan penunjang urusan, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusannya pemerintahan daerah. Penunjang Urusan terdiri dari:

1. Perencanaan Pembangunan

Data dan informasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76.
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum
Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

No	URAIAN	SATUAN	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	53,69	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	53,69	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2019

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pemerintah kabupaten Luwu telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011.

b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

RPJMD Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015. Dimana saat ini sedang disusun RPJMD tahun 2019-2024 sebagai pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025, yang diselaraskan dengan RPJPN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu.

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja di bidang keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Opini BPK

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kab. Luwu telah mendapat perbaikan sejak tahun 2014 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mendapat predikat opini WTP.

Tabel 2.77.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Hasil Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

b. Persentase SILPA Terhadap Pendapatan

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu, persentase SILPA dari Total APBD pada tahun 2017 adalah 2,55% dan pada tahun 2018menurun menjadi1,31%.

Tabel 2.78.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Total SILPA (Rp Juta)	74.419,39	153.494,39	61.673,90	34.272,91	17.999,51
2	Total APBD(Rp Juta)	956.235,07	1.305.261,01	1.552.714,50	1.308.621,22	1.369.283,20
3	Persentase SILPA	7,74	11,67	3,95	2,55	1,31

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

c. Persentase Program atau Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Pada tahun 2017 dari sleuruh program yang ditetapkan di Kabupaten Luwu terdapat 1 program atau sebesar 0,20% yang tidak terlaksana kemudian pada tahun 2018 juga terdapat 1 program yang tidak terlaksana dari 496 program yang ditetapkan atau sebesar 0,20%, pada tahun mendatang pemerintah akan berusaha untuk melaksanakan semua program sehingga diharapkan 100% program nantinya dapat terlaksana.

Tabel 2.79.
Persentase Program Yang Tidak TerlaksanaKab. Luwu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	1	2	3	1	1
2	Total Program dalam APBD	567	571	558	493	496
3	Persentase programyang tidak terlaksana	0,18	0,35	0,54	0,20	0,20

Sumber BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

d. Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Luwu

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal wajib dialokasikan sebesar 20% dari APBD. Dengan adanya Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk membangun SDM yang handal. Pemerintah Kab. Luwu telah mengalokasikan anggaran pendidikan melebihi dari amanat peraturan tersebut yaitu pada tahun 2017 telah dialokasikan sebesar 25,76% dan pada tahun 2018 sebesar 26,16%.

Tabel 2.80.
Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Rp Juta)	384.282,57	426.555,14	425.506,84	340.045,57	350.428,69
2	Total APBD (Rp Juta)	956.235,07	1.305.261,01	1.552.714,50	1.308.621,22	1.369.283,20
	Persentase belanja pendidikan (20%)	41,80	36,92	28,58	25,76	26,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

e. Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Luwu

Sesuai yang diatur dalam UU Kesehatan, pada dasarnya Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan minimal 10% dari belanja APBD untuk anggaran kesehatan. Pemerintah Kab. Luwu telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, yaitu pada tahun 2016 belanja kesehatan sudah sebesar 14,2% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 17,18%

Tabel 2.81.
Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (Juta Rp)	118.821,01	129.381,31	200.395,30	177.010,10	194.680,75
2	Total APBD (Juta Rp)	956.235,07	1.305.261,01	1.552.714,50	1.308.621,22	1.369.283,20
3	Persentase belanja kesehatan (10%)	12,92	11,20	13,46	13,41	14,54

Sumber BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

f. Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Luwu

Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 cenderung seimbang. Namun pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang signifikan, dimana belanja langsung mencapai 58,03%.

Tabel 2.82.
Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Belanja tidak Langsung (Rp Juta)	492.272,86	602.813,08	728.180,28	731.112,10	777.190,41
2	Total APBD (Rp Juta)	956.235,07	1.305.261,01	1.552.714,50	1.308.621,22	1.369.283,20
3	Persentase belanja tidak langsung dari total APBD	53,54	52,18	48,91	55,39	58,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

g. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa Kabupaten Luwu

Alokasi belanja bagi hasil Kabupaten Luwu pada tahun 2017 adalah Rp2,59 milyar atau 0,20% dari Total APBD dan pada tahun 2018 Bagi Hasil Kabupaten ke Desa meningkat menjadi Rp2,88 milyar atau 0,22% dari Total APBD yang mencapai Rp1,34 triliun.

Tabel 2.83.
Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	2.452,92	3.788,95	5.061,16	2.586,25	2.881,32
2	Total APBD	956.235,07	1.305.261,01	1.552.714,50	1.308.621,22	1.369.283,20
3	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	0,27	0,33	0,34	0,20	0,22

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

h. Penetapan APBD

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah menyampaikan/mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD / Perubahan APBD untuk mendapat persetujuan DPRD. Pada Pemerintah Kab. Luwu, penetapan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD telah dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 2.84.
Penetapan APBD Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penetapan APBD Pokok	Desember 2013	Desember 2014	November 2015	Desember 2016	Desember 2017
2	Penetapan APBD Perubahan	Agustus 2014	September 2015	September 2016	Oktober 2017	Oktober 2018

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, 2019

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85.
Data dan Informasi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6.221	22.292	16.185	16.345	11.356
2.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural					
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	84	35	101	91	92
	Jumlah Total Jabatan	539	538	591	728	696
	Persentase	15,58	6,51	17,09	12,51	13,21
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	35	34	35	40	40
4.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	3.864	3.804	3.718	2.998	3.071
5.	Pendidikan dan Pelatihan Formal					
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang)	132	92	74	83	45
	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal (orang)	35	1.011	91	92	209
	Jumlah ASN (Orang)	6192	6896	6707	3901	5778
	Persentase	2,13	1,33	1,10	2,13	0,78

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pelayanan penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap PNS untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam

menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan pelatihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Data yang ada pemerintah Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa pelatihan pegawai pada tahun 2018 mencapai 11.356 jam pelajaran. Hal ini merupakan angka terendah sejak tahun 2015.

b. Persentase Pejabat Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan ini terdiri dari empat jenjang:

- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi Jabatan Struktural Eselon IV.
- Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi Jabatan Struktural Eselon III.
- Diklat Kepemimpinan Tingkat II bagi Jabatan Struktural Eselon II

c. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Pada tahun 2017 jumlah jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Kab. Luwu adalah 40 dan pada tahun 2018 menjadi 40 jabatan.

d. Persentase Pejabat Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018.

e. Persentase ASN Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat

tersebut adalah diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut merupakan Diklat Wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tentu. Pada Tahun 2017 jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal adalah 3.901 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 5.778 orang.

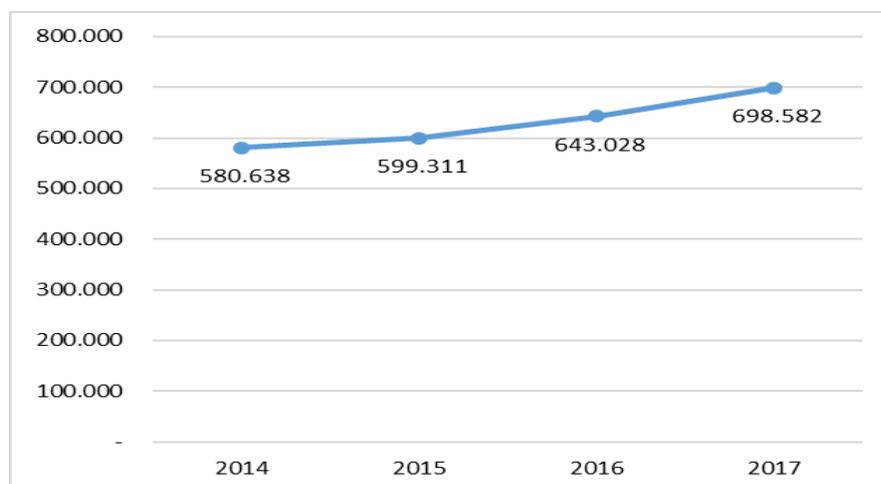
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kekhasan dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah dijelaskan berikut ini sebagai bahan untuk analisis selanjutnya.

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

Pengeluaran konsumsi rumahtangga perkapita di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan selama periode tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 sejumlah Rp580.638 perkapita dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp698.582 perkapita, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,38% per tahun. Pengeluaran konsumsi ini dapat terjadi akibat meningkatnya pemenuhan berbagai jenis kebutuhan rumahtangga. Selain itu peningkatan tersebut juga dapat disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai jenis kebutuhan barang konsumsi rumahtangga yang harus dipenuhi oleh masyarakat

Gambar 2.37.
Grafik Perkembangan Pengeluaran Konsumsi RumahTangga per Kapita Tahun 2014-2017



Sumber :Data diolah, BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2018.

2.4.2 Persentase desa Swasembada terhadap total desa

Jumlah kecamatan yang berstatus swasembada belum mencapai 100%. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2017, kecamatan yang berstatus swasembada hanya 70% dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2016. Kecamatan yang berstatus swasembada pada tahun 2017 telah mencapai 81%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Luwu.

2.4.3 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Dalam berbagai survei tentang daya tarik investor, ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, terorisme, perburuhan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketersediaan data ini juga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong investasi di daerah. Data ini dapat memberikangambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Luwu. Data menunjukkan angka kriminalitas mengalami perubahan secara fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2016 baik dari segi jumlah kejahatan maupun jenis kejahatannya daripada tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.86.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Luwu Periode tahun 2014-2016

No	Jenis	2014	2015	2016
1.	Pengeroyokan	41	22	20
2.	Penghinaan	-	1	1
3.	Surat Palsu	1	2	1
4.	Uang Palsu	-	1	1
5.	Perampasan	6	-	7
6.	Pemeriksaan	1	-	-
7.	Perjudian	21	28	16

No	Jenis	2014	2015	2016
8.	Penculikan	1	-	-
9.	Pembunuhan	4	3	1
10.	Penganiayaan Berat	3	1	1
11.	Penganiayaan Ringan	10	21	8
12.	Pencurian dengan kekerasan	3	3	0
13.	Pencurian dengan Pemberatan	30	37	-
14.	Pencurian Ringan	-	1	1
15.	Pencurian Kendaraan Bermotor	170	114	81
16.	Pencurian Hewan Ternak	2	6	-
17.	Pemerasan dan Pengancaman	1	2	-
18.	Penggelapan	74	55	41
19.	Penipuan	41	19	29
20.	Penadahan	-	-	3
21.	Pengrusakan	5	5	5
22.	Menerima Suap	21	51	59
23.	Narkotik	-	-	-
24.	Aborsi	-	-	1
25.	Ledakan Petasan	1	-	-
26.	Sengketa Tanah	12	5	-
27.	Perzinahan	1	1	-
28.	Kejahatan dengan senjata tajam	13	20	14
29.	Kejahatan dalam rumah tangga	32	24	-
Jumlah		494	422	290

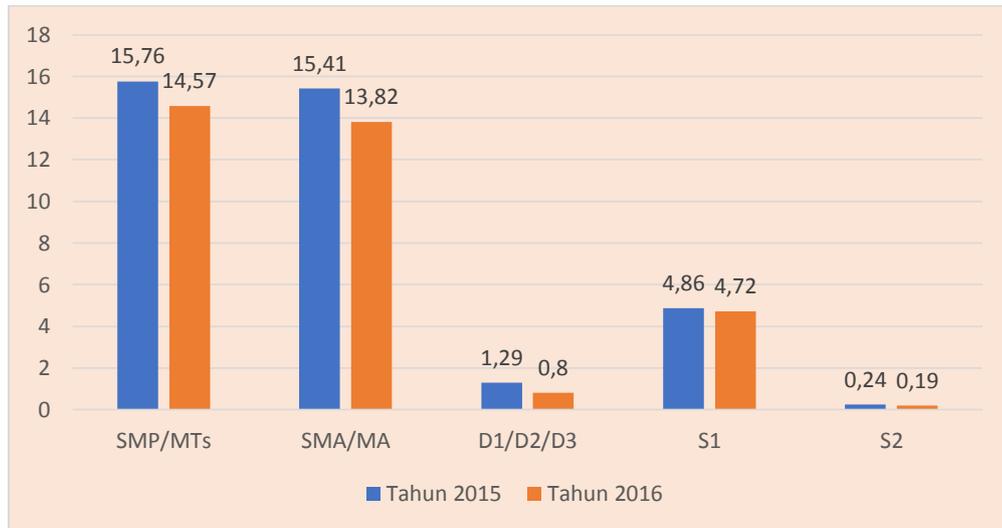
Sumber: Polres Luwu

2.4.4 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Iuluan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga daerah dapat ditopang melalui tingkat pendidikan yang bisa dicapai oleh penduduk di Kabupaten Luwu. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (jazah tertinggi yang dimiliki) merupakan indikator pokok kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Dari grafik berikut ini dapat diketahuikomposisi prosentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah.

Gambar 2.38.

Grafik Persentase Penduduk Kabupaten Luwu Usia 15 Tahun ke atas menurut pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Tahun 2015-2016



Sumber : BPS Kabupaten Luwu

Pada tahun 2015 persentase penduduk dengan tingkat pendidikan D1/D2/D3 sebesar 1,29%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 0,80%. Untuk jenjang D4/S1 pada tahun 2015 sebesar 4,86% dan pada tahun 2016 sebesar 4,72%, sedangkan untuk jenjang S2/S3 persentasenya relatif jauh lebih kecil, yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,24% dan tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,19%. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan persaingan yang semakin ketat. Untuk itu Kabupaten Luwu harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas dan berdaya saing.

2.4.5 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya prosentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 tahun). Sedangkan prosentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.87.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Luwu Tahun 2015 - 2016

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	115.732	115.682	115.688	115.738
2.	Jumlah penduduk usia > 65 tahun	19.231	19.756	20.305	20.888
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) + (2)	134.963	135.438	135.993	136.626
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	213.988	217.839	220.312	222.583
Rasio ketergantungan (3) / (4)		63,07	62,17	61,73	61,38

Sumber: Data diolah, BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2018

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

2.5.1. Bidang Urusan Pendidikan

SPM pada Bidang Urusan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yaitu : (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan (3) Pendidikan Anak usia Dini. Kondisi pencapaian SPM tersebut di Kabupaten Luwu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.88.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Cpaian SPM		Interpretasi
		2017	2018	
1. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	87,79	88,71	Belum tercapai
2. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	79,86	82,73	Belum tercapai

3. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	32,9	58,58	Belum tercapai
---	------	------	-------	----------------

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Luwu seluruhnya belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.5.2. Bidang Urusan Kesehatan

SPM pada Bidang Urusan Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; (2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; (3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; (4) Pelayanan Kesehatan Balita; (5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar; (6) Pelayanan Kesehatan pada usia produktif; (7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut; (8) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). Kondisi pencapaian SPM tersebut di Kabupaten Luwu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.89.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Cpaian SPM		Interpretasi
		2017	2018	
1. Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,39%	84,96%	Belum tercapai
2. Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	94,27%	89,78%	
3. Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,87%	98,93%	
4. Warga negara usia balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Sudah tercapai
5. Warga negara pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	88,39%	84,96%	Belum tercapai
6. Warga Negara Pada Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Sudah tercapai
7. Warga negara pada usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	Sudah tercapai
8. Warga negara pada usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Luwu, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 8 (indikator) SPM pada bidang kesehatan, terdapat 4 indikator yang belum mencapai target, yaitu pelayanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan bagi warga belajar. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.5.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

SPM pada bidang urusan pekerjaan umum terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu : (1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari; (2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Kondisi pencapaian SPM tersebut di Kabupaten Luwu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.90.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Cpaian SPM		Interpretasi
		2017	2018	
1. Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	Sudah tercapai
2. Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	Sudah tercapai
3. Peresentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	60,00%	23,00%	24,00%	Belum tercapai
4. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	49,81%	59,94%	Belum tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 (indikator) SPM pada bidang pekerjaan umum, baru indikator kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang sudah tercapai, sedangkan sisanya belum tercapai. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.5.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

SPM pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 2(dua) jenis pelayanan dasar yaitu : (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota; dan (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/Kota. Kondisi pencapaian SPM tersebut di Kabupaten Luwu untuk tahun 2017-2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.91.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Cpaian SPM		Interpretasi
		2017	2018	
1. Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	NA	NA	Tidak tersedia data
2. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Tidak ada warga yang terkena relokasi		

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Luwu, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator SPM pada bidang perumahan rakyat, terdapat satu indikator yang tidak tersedia data capaian. Sedangkan indikator lainnya tidak ada kejadian yang dimaksudkan. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.5.5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SPM pada Bidang Urusan Trantibunlinmas terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum; (2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana; (3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan (5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kondisi pencapaian SPM tersebut di Kabupaten Luwu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Cpaian SPM		Interpretasi
		2017	2018	
1. Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	Sudah tercapai
2. Warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana	100%	42%	47%	Belum tercapai
3. Warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Sudah tercapai
4. Warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	22%	Belum tercapai

Sumber: Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Luwu, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator SPM pada bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdapat dua indikator yang sudah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan indikator lainnya belum tercapai targetnya. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.5.6. Bidang Urusan Sosial

SPM pada Bidang Urusan Sosial terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; (2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti; (3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan (5). Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Pencapaian target SPM bidang sosial di Kabupaten Luwu pada tahun 2017-2018 sudah baik, terlihat dari tercapainya target-target yang ditetapkan.

Kondisi pencapaian SPM tersebut di Kabupaten Luwu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.93.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Cpaian SPM		Interpretasi
		2017	2018	
1. Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00	100,00	Sudah tercapai
2. Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00	100,00	Sudah tercapai
3. Warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasis sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	-	100%	Sudah tercapai
4. Warga tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	Tidak ada warga	Tidak ada warga	
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100,0	100,00	Sudah tercapai

Sumber: Dnas Sosial Kab. Luwu, 2019

2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan *SDGs* adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan

bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030).Capaian Kabupaten Luwu terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.94.
Capaian, Target Indikator, TPB/SDGs Kabupaten Luwu 2015-2018

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	Dinas Sosial
1.2	Proporsipeserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%						Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12%						Dinas Sosial
1.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 Juta Rumah Tangga						Dinas Sosial
1.5	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%		86,2	93,57	93,57	89,9	Dinas Kesehatan
1.6	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%						Dinas Kesehatan
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%						Dinas Kesehatan
1.8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%		71	76	75,45		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	91,63%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,40%		75,18	75,96	55,26		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
1.11	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.12	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah						Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD	
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab	
1.14	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah								
1.15	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan							Dinas Sosial	
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%						Dinas Kesehatan	
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan							Dinas Ketahanan Pangan,	
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,50%						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita							Dinas Kesehatan	
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita	28%			-			Dinas Kesehatan	
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe							Dinas Kesehatan	
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%			-			Dinas Kesehatan	
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%						Dinas Kesehatan	
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/tahun			81,9	85,2	87,8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perikanan	
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306			167,8 per 100.000 penduduk	106,01 per 100.000 penduduk	106,08 per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh	95%			89,7	86,2	93,57	89,9	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab
	tenaga kesehatan terlatih							
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85%						Dinas Kesehatan
3.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup			1 ;117	1;106	1;80	1;92	Dinas Kesehatan
3.5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup			1; 160	1;165	1;140	1;132	Dinas Kesehatan
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	24		0,0079 per 1000 kelahiran bayi	0,0081 per kelahiran bayi	0,0113 per kelahiran bayi	0,0107 per kelahiran bayi	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95%						Dinas Kesehatan
3.8	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%		0,003 dari total populasi	0,001 dari total populasi	0,009 dari total populasi	0,005 dari total populasi	Dinas Kesehatan
3.9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per100.000 penduduk	245						Dinas Kesehatan
3.10	Kejadian Malaria per 1000 orang							Dinas Kesehatan
3.11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300 Kab/Kota						Dinas Kesehatan
3.12	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksiHepatitis B							Dinas Kesehatan
3.13	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)							Dinas Kesehatan
3.14	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta	34 Provinsi						Dinas Kesehatan
3.15	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisitahap I)	35 Kab/Kota						Dinas Kesehatan
3.16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	5,40%		NA				Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,30%		NA				Dinas Kesehatan
3.18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	15,40%		NA				Dinas Kesehatan
3.19	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri			NA				Dinas Kesehatan
3.20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa kesehatan	280 Kab/Kota		NA				Dinas Kesehatan
3.21	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%		NA				Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab
3.22	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alatkontrasepsi metode modern	66%		NA				Dinas Kesehatan
3.23	Angka prevalensi penggunaanmetode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%.				76,06 tingkat keberlangsungan	84,36 tingkat keberlangsungan	Dinas Kesehatan
3.24	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,50%		NA				Dinas Kesehatan
3.25	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk			100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%						Dinas Kesehatan
3.27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas			NA				Dinas Kesehatan
3.28	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan			1:9.915	1:11.039	1:7.580	1:7.484	Dinas Kesehatan
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat	91,63%		93,60%	98,50%	96,50%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2	Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun	8,8 Tahun		NA				Dinas Pendidikan
4.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1)SD/MI/sederajat; (2)SMP/MTs/sederajat; (3)Rasio Angka Partisipasi Kasar Tinggi	Meningkat		91,39 SD/Sederajat 77,13 SMP/Sederajat	94,50 SD/Sederajat 86,60 SMP/Sederajat	95,51 SD/Sederajat 80,07 SMP/Sederajat		Dinas Pendidikan
4.4	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,10%		NA	98,78%	98,78%	98,80%	Dinas Pendidikan
4.5	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat		NA				Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16 Kebijakan		NA				Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%		100	100%	100%		Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab
5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	Provinsi					Dinas Pendidikan
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	16,60%		8,57 tingkat DPRD Kabupaten	8,57 tingkat DPRD Kabupaten	8,57 tingkat DPRD Kabupaten	8,57 tingkat DPRD Kabupaten	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100%		71,00%	76,00%	75,45%		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2	Kualitas Air Danau	Meningkat		NA				Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat		NA				
6.4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	5,5 Juta Ha		NA				Dinas Kehutanan
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.1	Rasio elektrifikasi	96,60%		NA				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita (%)			7.26	7.88	6.79		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.2	PDB per kapita	50 Juta		29,59	33,57	36,60		
8.3	Persentase tenaga kerja formal			60,78total pekerja seluruh jenis pekerjaan		64,69%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	64,89%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian			60,78total pekerja seluruh jenis pekerjaan		64,69%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	64,89%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%		NA				Dinas Koperasi UKM dan perindustrian
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur			7,871 dari total	0,00%	4,784% dari total	3,892% dari total	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.7	Tingkat setengah pengangguran			NA	NA	NA	NA	
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%		NA				

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%						Dinas Pariwisata
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara	20 Juta (skala nasional)		333 Skala Kabupaten	180 Skala Kabupaten	224 Skala Kabupaten	311 Skala Kabupaten	
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara			11.117	10.700	12.477	12.573	Dinas Pariwisata
8.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja			NA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit							Dinas Koperasi UKM dan perindustrian
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
9.1	Panjang jalur kereta api	3.258 Km		NA				Dinas Perhubungan
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan	275 Unit						Dinas Perhubungan
9.3	Jumlah pelabuhan strategis	24 Pelabuhan (skala nasional)		1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita			NA				Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	4,3% (2015)		NA				
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur			NA				Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri							Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	26%		NA				Dinas Lingkungan Hidup
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara							
10.1	Koefisien Gini	0,36		0,3611	0,3594	0,3593	0,362	BPS
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	BPS
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal							BPS
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14%						BPS
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.1	Persentase pengguna modal di perkotaan	32%		NA				Dinas PMPTSP

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	20 kota sedang (skala nasional)						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	5 Metropolitan (skala nasional)						
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			NA		5 Angin Putting Beliung 25 Longsor 963 Banjir		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30%						
11.6	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%		76,03%	80,50%	83,75%		Dinas Lingkungan Hidup
11.7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah			NA				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	150 Juta Ton		NA				Dinas Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 Ton/Hari		76,03	80,5	83,75		Dinas Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah			NA				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Biennial Update Report (BUR Ke3)		NA				Dinas Lingkungan Hidup
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi			NA				Dinas Perikanan
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan			NA				Dinas Lingkungan Hidup
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan			NA				Dinas Lingkungan Hidup
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman			NA				Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs				OPD
				2015	2016	2017	2018	Penanggung Jawab
	hayati							
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat							
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui							Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.2	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	75%		NA		81,94		Bag Organisasi dan Pendaya Gunaan Aparatur Setda Kab. Luwu
16.3	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	80%		NA	100	100	100	Bag. ...PBJ
16.4	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	16,60%		8,57	8,57	8,57	8,57	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1	Total pendapatan pemerintah PDB sumbernya							Badan Pengelola Keuangan Daerah
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan							Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik		BPS					BPS
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		BPS					BPS
17.5	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi rujukan statistik		BPS					BPS
17.6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)			NA				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
17.7	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website							BPS
17.8	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)		BPS					BPS

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 memberikan pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terdapat dua kata kunci utama dalam memahami keuangan daerah, yaitu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak adalah hak daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan meliputi pungutan pajak, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sementara kewajiban adalah kewajiban daerah untuk membelanjakan uang untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian tersebut, maka dalam setiap periode pemerintahan, analisis keuangan daerah penting untuk dilakukan. Keuangan daerah merupakan motor penggerak percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah meliputi aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu, maka penting untuk menganalisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan Neraca Daerah. Dengan demikian, APBD merupakan cerminan dari analisis keuangan daerah. Untuk itu, substansi mendasar yang dibahas dalam bab ini adalah: (i) Analisis kinerja keuangan daerah lima tahun sebelumnya, (ii) Analisis kebijakan keuangan daerah masa lalu. Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kemampuan fiskal riil dalam mendanai program-program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Guna mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa lalu, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Sesuai ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkaitan dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD serta aspek kondisi neraca daerahnya. Guna melihat kinerja pelaksanaan APBD, tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan akurasi belanjanya. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 secara umum dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

Guna mendorong peningkatan Pendapatan Daerah pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Selama periode 2014-2019 pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dimana arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distrorsi ekonomi baik angka pendek maupun jangka panjang;
- b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberikan peran lebih pada kas umum daerah, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki;
- d. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
- e. Peningkatan koordinasi dengan segenap instansi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik ditingkat Daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Pusat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,88%. Pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2015 sebesar 31,40% sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar (-7,49%), hal ini menunjukkan bahwa terdapat surplus pendapatan daerah dari yang ditargetkan. Capaian target pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014-2018 selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2014	906.515.562.088,00	938.957.904.123,44	103,58	-
2015	1.240.841.616.470,00	1.233.809.148.166,18	99,43	31,40
2016	1.407.134.199.113,00	1.397.284.611.385,39	99,30	13,25
2017	1.283.399.539.380,00	1.292.583.077.131,60	100,72	-7,49
2018	1.340.510.284.241,00	1.323.121.884.246,45	90,38	2,36
Total	6.178.401.201.292,00	6.185.756.625.053,06	100,12	9,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun mengalami

fluktuasi selama periode tahun 2014-2018, secara keseluruhan ketiga sumber pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan. Sumber pendapatan dengan pertumbuhan terbesar adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu rata-rata 14,34%, diikuti PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,16%, dan dana perimbangan yang bertumbuh sebesar 8,61%. Namun demikian, meskipun pertumbuhannya paling kecil, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan kemudian PAD. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.

Tabel 3.2.
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

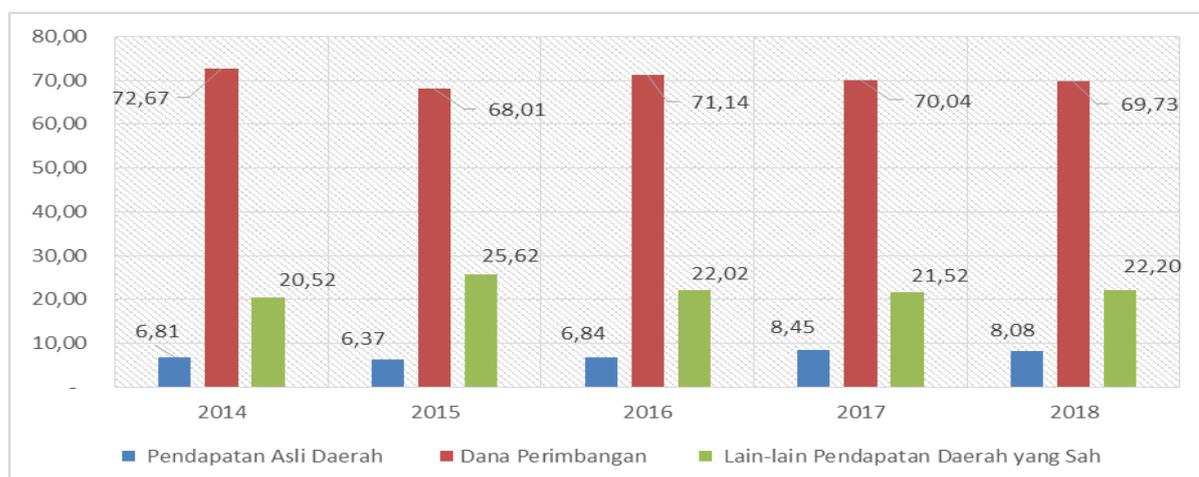
(Dalam jutaan rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	63.945,27	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	14,16
Dana Perimbangan	682.313,62	839.139,30	994.067,31	905.261,28	922.578,72	8,61
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192.699,00	316.111,55	307.653,01	278.149,02	293.677,43	14,34
Total	938.957,90	1.233.809,15	1.397.284,61	1.292.583,08	1.323.121,88	
Pertumbuhan (%)		31,40	13,25	-7,49	2,36	9,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Sepanjang periode tahun 2014-2018, proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1.
Grafik Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun proporsi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan tahun 2015, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,27 poin. Demikian halnya dengan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga mengalami peningkatan sebesar 1,68 poin. Peningkatan proporsi kedua sumber pendapatan tersebut, mengakibatkan proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan dari 72,67% pada tahun 2014 menjadi 69,73% pada tahun 2018 atau turun sebesar 2,94 poin.

Analisis lebih lanjut tentang pendapatan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari 4 (empat) komponen, yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Nilai PAD Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp63,95 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp106,87 miliar pada tahun 2018 atau meningkat sejumlah Rp42,92 miliar. PAD pada tahun 2017 yang mencapai Rp109,17 merupakan jumlah PAD yang paling tinggi selama periode 2014-2018.

Tabel 3.3.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

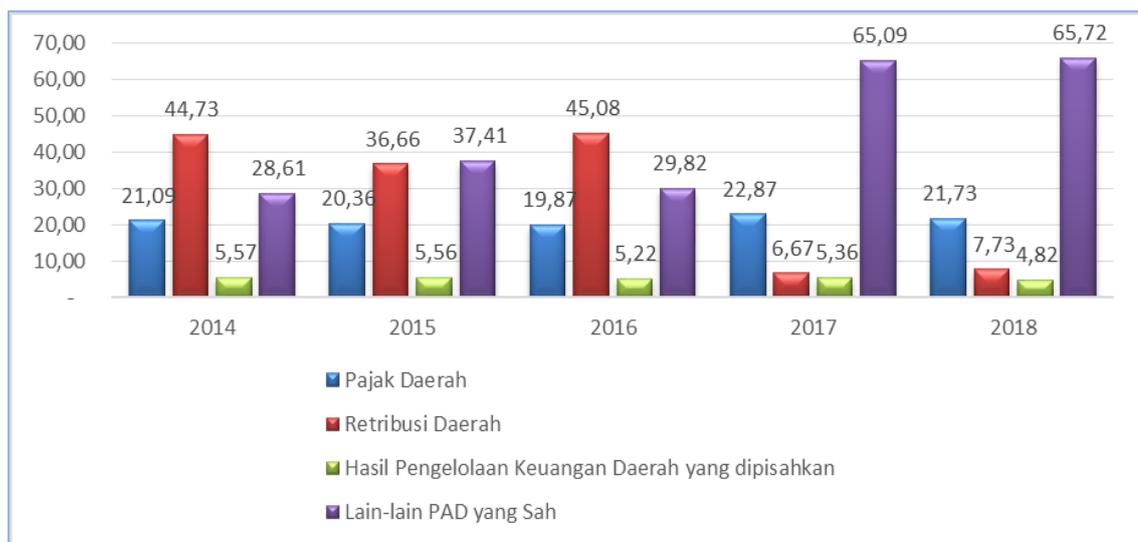
(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah	13.488,09	15.996,58	18.990,36	24.970,80	23.225,73	15,45
Retribusi Daerah	28.600,03	28.799,24	43.080,54	7.281,45	8.262,08	-4,84
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.563,65	4.370,49	4.991,72	5.855,15	5.146,30	10,51
Lain-lain PAD yang Sah	18.293,51	29.391,99	28.501,67	71.065,38	70.231,62	51,45
Total	63.945,27	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	
Pertumbuhan (%)		22,85	21,65	14,24	-2,11	14,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 berdasarkan sumber pendapatan. Apabila dilihat dari proporsi masing-masing komponen terhadap total PAD, terjadi perubahan yang signifikan antara retribusi daerah dengan Lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD pada tahun 2014 dan tahun 2016, dengan kontribusi masing-masing sebesar 44,73% dan 45,08%. Sedangkan pada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018, kontribusi terbesar diberikan oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu masing-masing sebesar 37,41%, 65,09% dan 65,72%. Komponen PAD yang paling rendah kontribusinya selama periode tersebut adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu rata-rata 5,31%. Sedangkan pajak daerah berkontribusi rata-rata sebesar 21,18%. Proporsi komponen PAD terhadap PAD sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2.
Grafik Proporsi Komponen PAD terhadap PAD
Tahun 2014-2018



Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Analisis lebih lanjut tentang PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pajak Daerah

Selama periode tahun 2015-2018, pajak daerah di Kabupaten Luwu berkembang positif dan tumbuh dengan rata-rata sebesar 14,41%, dengan nilai Rp.15.99 miliar pada tahun 2015 meningkat menjadi 23,23 miliar pada

tahun 2018. Total pendapatan daerah dari pajak daerah selama periode tersebut adalah sejumlah 83,13 miliar.

Jenis-jenis Pajak Daerah di Kabupaten Luwu terdiri dari: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 7) Pajak Air Bawah Tanah, 8) Pajak Sarang Burung Walet, 9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selama periode tahun 2015-2018, terdapat 8 komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan, sedangkan sisanya mengalami penurunan yaitu pajak hiburan dan yang lainnya merupakan sumber pajak daerah yang baru ada di tahun 2018 yaitu pajak sarang burung walet. Sumber pajak dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai 174,06%, diikuti pajak air bawah tanah yaitu rata-rata tumbuh sebesar 28,86%, dan pajak reklame yang tumbuh rata-rata 18,81%.

Tabel 3.4.
Realisasi PAD dari Pajak Daerah
Tahun 2015-2018

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
1	Pajak Hotel	92,17	94,25	115,48	107,79	6,04
2	Pajak Restoran	1.468,57	1.975,57	1.959,56	2.065,63	13,04
3	Pajak Hiburan	16,74	15,05	8,75	11,71	(6,05)
4	Pajak Reklame	389,84	535,12	658,85	632,70	18,81
5	Pajak Penerangan Jalan	6.279,35	6.806,00	8.704,67	10.309,06	18,24
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.464,37	3.336,80	3.909,61	3.192,28	11,41
7	Pajak Air Bawah Tanah	9,74	%16,28	%18,15	%19,59	28,86
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	1,90	-
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.995,70	5.389,78	5.552,04	5.401,74	2,73
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	280,11	821,50	4.043,68	1.483,34	174,06
Total		15.996,58	18.990,36	24.970,80	23.225,73	
Pertumbuhan (%)		18,60	18,72	31,49	-6,99	15,45

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Apabila dijumlah berdasarkan nilainya, komponen pajak yang memberikan nilai kontribusi terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu Rp32,10 miliar

atau 38,58% dari total pendapatan dari pajak daerah, diikuti Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai Rp21,34 miliar atau 25,65%, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan nilai Rp12,90 miliar atau 15,51%.

b. Retribusi Daerah

Rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah Kabupaten Luwu yang bersumber dari retribusi daerah selama periode 2014-2018 menunjukkan angka yang menurun yaitu (4,84%). Kondisi ini disebabkan adanya perubahan penatausahaan penerimaan yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelum tahun 2017, pendapatan rumah sakit tersebut dikelompokkan kedalam Retribusi Jasa Umum yang merupakan komponen dari retribusi daerah. Tetapi sejak tahun 2017, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, seluruh rumah sakit dialihkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan demikian, pendapatan RSUD Batara Guru yang selama ini ditatausahakan sebagai retribusi daerah beralih menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Tabel 3.5.
Realisasi PAD dari Retribusi Daerah
Tahun 2015-2018

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Retribusi Jasa Umum	25.912,90	40.107,95	4.303,78	5.038,68	(5,80)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.417,84	1.721,10	2.062,69	2.120,19	14,67
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.468,50	1.251,49	914,98	1.103,21	(7,03)
Total		28.799,24	43.080,54	7.281,45	8.262,08	
Pertumbuhan (%)		0,70	49,59	-83,10	13,47	-4,84

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode tahun 2014-2018, komponen retribusi daerah yang mengalami tumbuh positif adalah retribusi jasa usaha, yaitu sebesar 14,67%, sedangkan komponen lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Apabila dijumlah berdasarkan nilainya, komponen

pajak yang memberikan nilai kontribusi terbesar adalah Retribusi Jasa Umum yaitu Rp75,36 miliar atau 86,21% dari total pendapatan daerah dari retribusi daerah yang mencapai Rp87,42 miliar. Sedangkan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu, dengan nilai Rp4,74 miliar atau 5,42%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Selama periode tahun 2014-2018, komponen PAD ini tumbuh sebesar 10,51% dengan total nilai Rp23,93 miliar, yang diperoleh dari dividen BPD Sulselbar.

Tabel 3.6.
Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2014-2018

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.370,49	4.991,72	5.855,15	5.146,30	10,51
Pertumbuhan (%)	22,64	14,21	17,30	-12,11	

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah meliputi: 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan; 3) jasa giro; 4) pendapatan bunga; 5) tuntutan ganti rugi; 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 7) komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 3.7.
Realisasi PAD dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
1	Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	42,10	197,44	1.103,86	612,20	261,17
2	Hasil pemanfaatan atau	241,50	-	-	-	

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
	pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan					
3	Jasa Giro	5.837,03	5.027,59	3.101,29	2.446,69	(24,43)
4	Pendapatan Bunga		4.516,28	3.306,23	2.444,85	(26,42)
5	Tuntutan Ganti Rugi	1.118,91	1.092,48	559,84	1.142,10	17,63
6	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing					
7	Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah	22.152,44	17.667,88	62.994,15	63.585,78	79,08
Total		29.391,99	28.501,67	71.065,38	70.231,62	
Pertumbuhan (%)		60,67	-3,03	149,34	-1,17	51,45

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Selama periode tahun 2015-2018, PAD dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, secara keseluruhan komponen ini tumbuh sebesar 48,38% dengan nilai total Rp199,19 miliar.

Komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaitu 261,17%, diikuti Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah yang tumbuh sebesar 79,08%. Sedangkan komponen yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan nilai Rp166,40 miliar atau sebesar 83,54%.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama meliputi: 1) Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Nilai Dana Perimbangan Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp682,31 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp992,58 miliar pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,61%. Komponen dana perimbangan dengan pertumbuhan tertinggi adalah DAK, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 53,88%. Sedangkan DAU hanya tumbuh sebesar 3,48%

dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami pertumbuhan (0,65%).

Tabel 3.8.
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

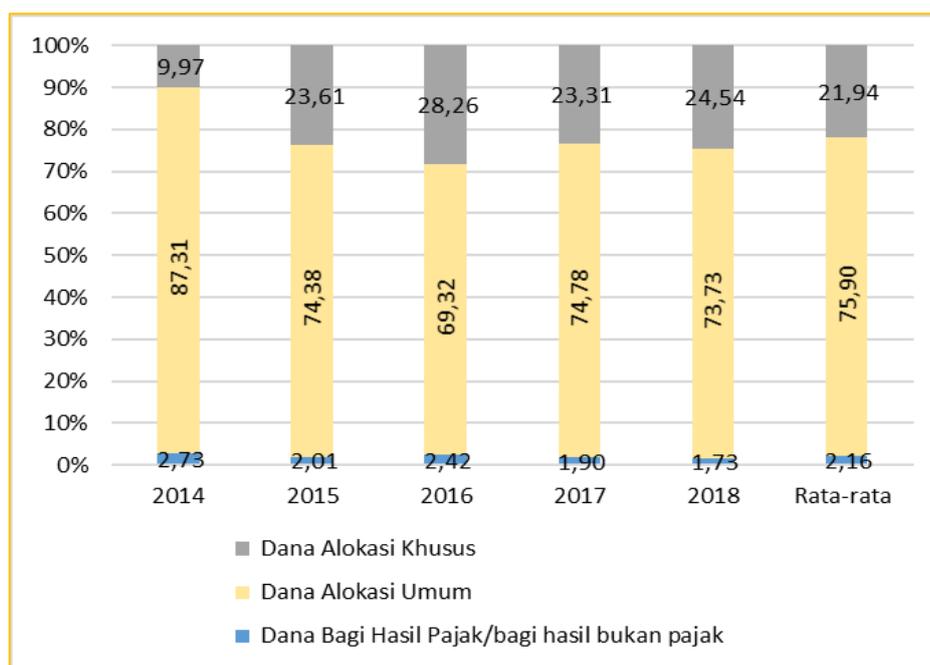
(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	18.604,15	16.884,09	24.007,46	17.232,16	15.973,08	-0,65
Dana Alokasi Umum	595.699,15	624.131,62	689.096,79	676.991,58	680.212,38	3,48
Dana Alokasi Khusus	68.010,32	198.123,59	280.963,06	211.037,55	226.393,26	53,88
Total	682.313,62	839.139,30	994.067,31	905.261,28	922.578,72	
Pertumbuhan (%)		22,98	18,46	-8,93	1,91	8,61

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

Selama periode tahun 2014-2018, kontribusi masing-masing komponen terhadap total dana perimbangan mengalami fluktuasi. Komponen yang paling besar memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan adalah DAU dengan rata-rata kontribusi sebesar 75,90%, sedangkan komponen yang memberikan kontribusi paling rendah adalah Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 2,16%.

Gambar 3.3.
Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Selama periode tahun 2014-2018, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Luwu dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuasi,

Meskipun mengalami fluktuasi, Pendapatan Daerah yang Sah ditunjukkan pada Tabel 3.9 Dapat dilihat terjadi perubahan nilai nominal yang signifikan pada Dana Hibah periode 2014-2015, dimana pada tahun 2014 penerimaan sejumlah Rp. 2.937,65 (miliar) naik menjadi Rp. 25.159,14 (Miliar) pada tahun 2015, kemudian tahun 2017 turun menjadi 9.647,77 Miliar kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan hingga realisasi penerimaan sebesar Rp. 51.717,05 Miliar, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 Kabupaten Luwu melaksanakan pilkada serentak dan pemilihan presiden dan legislatif.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya meskipun memenuhi target namun secara pertumbuhan memiliki rata-rata pertumbuhan bernilai negative, yang berarti bahwa jumlahnya cenderung menurun setiap tahunnya. Sedangkan untuk Pendapatan Lainnya hanya terdapat pada tahun 2015.

Tabel 3.9.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2014-2018

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
Hibah	2.937,65	25.159,14	6.504,63	9.647,77	51.717,05	291,67
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.058,07	32.276,15	45.089,35	43.883,98	42.812,90	8,82
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	139.113,89	242.479,97	241.007,23	218.126,53	192.040,06	13,06
Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	18.589,40	15.817,28	15.051,80	6.490,75	7.107,41	-16,78
Pendapatan Lainnya	-	379,01	-	-	-	-
Total	192.699,00	316.111,55	307.653,01	278.149,02	293.677,43	
Pertumbuhan (%)		64,04	-2,68	-9,59	5,58	14,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditunjukkan pada table 3.10 dapat dilihat bahwa yang paling dominan yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sementara Pendapatan Lainnya hanya terdapat pada tahun 2015.

Tabel 3.10.
Struktur Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Hibah	1,52	7,96	2,11	3,47	17,61
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16,64	10,21	14,66	15,78	14,58
Dana Penyesuaian dan Otonormi khusus	72,19	76,71	78,34	78,42	65,39
Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	9,65	5,00	4,89	2,33	2,42
Pendapatan Lainnya		0,12			
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

3.1.1.2 Belanja Daerah

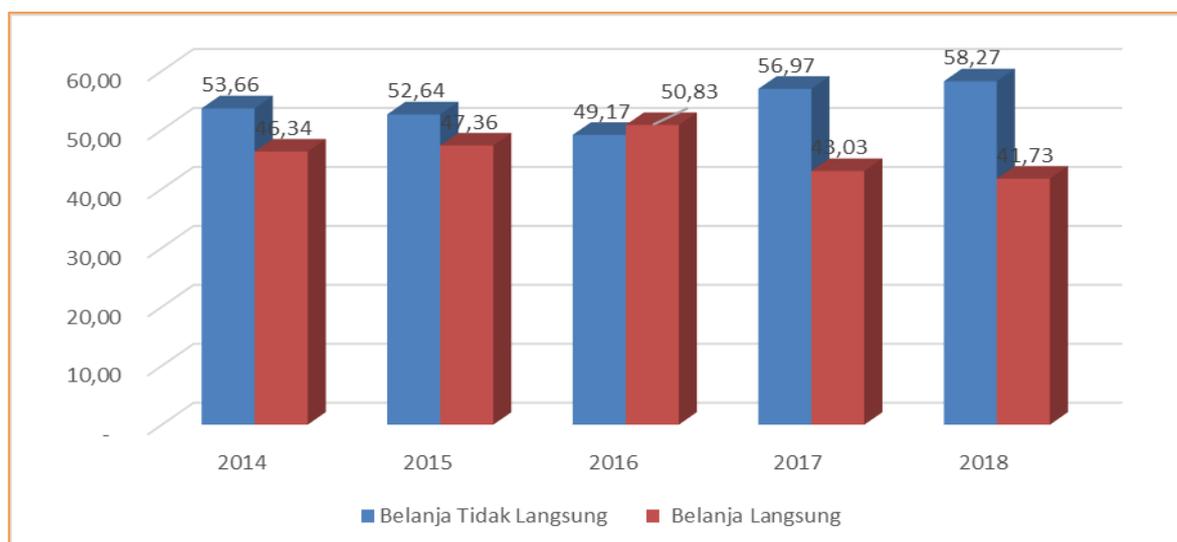
Defenisi Belanja Daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2014-2018, disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2014-2018 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan umum anggaran serta realisasi penggunaan anggaran, maka diperoleh perbandingan belanja daerah seperti yang disajikan pada grafik di bawah.

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa selama periode tahun 2014-2018 anggaran belanja daerah yang disediakan untuk belanja tidak langsung adalah di atas 50% yang diperuntukkan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan untuk belanja langsung di atas 40% yang diperuntukkan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal

Gambar 3.4.
Grafik Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

Selama periode 2014 sampai 2016, belanja tidak langsung tercatat terus mengalami peningkatan baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi, sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan dan untuk tahun 2018 kembali meningkat. Pada tahun 2014, realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp492,27 Miliar dari anggaran Rp512,83 Miliar dan mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp728,18 Miliar dari anggaran Rp745,82 Miliar, pada tahun 2017 anggaran belanja tidak langsung turun menjadi Rp741,46 Miliar dengan realisasi sebesar Rp731,11 Miliar, kemudian meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah anggaran Rp784,39 yang terealisasi sebesar Rp777,19 miliar.

Sama halnya dengan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung dari tahun 2014 sampai 2016, juga mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat. Pada tahun 2014 realisasi belanja langsung sebesar Rp425,09 Miliar dari anggaran Rp443,41 Miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp806,89 Miliar terealisasi sebesar Rp752,91 Miliar. Pada tahun 2017 anggaran belanja langsung turun menjadi Rp567,16 Miliar dengan realisasi sebesar

Rp552,31 Miliar dan pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp584,90 Miliar dengan realisasi Rp556,67 Miliar.

Selama kurun waktu tahun 2014-2018 secara proporsi realisasi terhadap anggaran menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja langsung, hal ini dikarenakan belanja langsung tidak sepenuhnya diserap yang disebabkan adanya hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa serta pengadaan belanja modal. Sedangkan dari sisi pertumbuhan realisasi, belanja daerah memiliki pertumbuhan sebesar 11,19% pertahun. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja tidak langsung sebesar 12,49% pertahun sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 10,14% sebagaimana ditunjukkan dalam proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja berikut.

Tabel 3.11.
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2014-2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2014			2015			2016			2017			2018			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggarans	Realisasi	%	
Belanja	956.235,07	917.358,82	95,93	1.305.261,01	1.145.226,04	87,74	1.552.714,50	1.481.088,37	95,39	1.308.621,22	1.283.421,69	98,07	1.369.283,20	1.333.858,53	97,41	11,19
Belanja Tidak Langsung	512.829,21	492.272,86	95,99	644.727,71	602.813,08	93,50	745.822,82	728.180,28	97,63	741.457,48	731.112,09	98,60	784.385,20	777.190,41	99,08	12,49
Belanja Pegawai	446.836,17	429.858,13	96,20	509.931,42	471.593,01	92,48	531.845,46	517.105,81	97,23	478.954,91	472.020,21	98,55	496.689,29	489.997,52	98,65	3,61
Belanja Hibah	25.933,18	24.988,16	96,36	4.698,00	4.299,50	91,52	6.668,30	6.170,30	92,53	22.860,87	21.977,27	96,13	45.761,69	45.452,08	99,32	80,93
Belanja Bantuan Sosial	5.542,74	4.952,76	89,36	547,05	411,00	75,13	292,40	226,65	77,51	492,00	371,75	75,56	436,38	382,70	87,70	-17,40
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	33.926,18	32.223,81	94,98	3.974,27	3.788,95	95,34	6.592,69	5.061,16	76,77	3.159,75	2.586,25	81,85	2.881,32	2.881,32	100,00	-23,04
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa	250,00	250,00	100,00	122.726,97	122.425,54	99,75	199.423,97	199.423,57	100,00	234.989,96	233.989,95	99,57	238.416,52	238.416,52	100,00	12238,08
Belanja tidak terduga	340,94	-	-	2.850,00	295,09	10,35	1.000,00	192,80	19,28	1.000,00	166,67	16,67	200,00	60,27	30,13	-28,01
Belanja Langsung	443.405,86	425.085,97	95,87	660.533,30	542.412,95	82,12	806.891,67	752.908,09	93,31	567.163,74	552.309,59	97,38	584.897,99	556.668,12	95,17	10,14
Belanja Pegawai	17.377,32	16.378,67	94,25	16.616,39	15.556,00	93,62	18.937,98	17.647,72	93,19	20.506,72	19.390,79	94,56	10.807,39	10.344,14	95,71	-7,09
Belanja Barang dan Jasa	248.736,29	244.385,81	98,25	312.468,37	303.474,09	97,12	357.713,60	349.739,39	97,77	323.373,33	311.756,29	96,41	370.229,38	346.509,58	93,59	9,93
Belanja Modal	177.292,25	164.321,48	92,68	331.448,54	223.382,86	67,40	430.240,09	385.520,98	89,61	223.283,68	221.162,52	99,05	203.861,22	199.814,40	98,01	14,06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur Pembiayaan terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Komponen Penerimaan Daerah meliputi 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; 2) Pencairan Dana Cadangan; 3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan; 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 6) Penerimaan Piutang Daerah; dan 7) Penerimaan Pihak Ketiga. Sedangkan komponen Pengeluaran Daerah meliputi: 1) Pembentukan Dana Cadangan; 2) Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 3) Pembayaran Pokok Utang; 4) Pemberiaan Pinjaman Daerah; 5) Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan; dan 6) Pengeluaran Pihak Ketiga.

Secara garis besar analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defesit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah

Tabel 3.12.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu
Periode Tahun 2014-2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2014			2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pembiayaan Daerah	49.719,51	52.820,31	106,24	64.419,39	64.911,28	100,76	145.580,30	145.477,65	99,93	25.221,68	25.111,52	99,56	28.772,91	28.736,15	99,87
Penerimaan Pembiayaan	54.851,70	54.880,50	100,05	74.419,39	74.911,28	100,66	153.494,39	153.171,14	99,79	61.673,90	61.676,00	100,00	34.272,91	34.253,77	99,94
Pengeluaran Pembiayaan	5.132,19	2.060,20	40,14	10.000,00	10.000,00	100,00	7.914,09	7.693,49	97,21	36.452,22	36.564,48	100,31	5.500,00	5.517,62	100,32

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun 2014, 2015 dan 2017 rata-rata sebesar 100,00% dari total anggaran, sedangkan untuk tahun 2016 dan 2018 rata-rata hanya mencapai 99,00%. Dengan melihat kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu selama periode tahun 2014 sampai 2018, secara proporsi rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel 3.13. baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi pertumbuhan realisasi pendapatan daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 9,8% per tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah terbesar bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 14,34% per tahun, diikuti rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,16% per tahun kemudian Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,61% per tahun.

Sedangkan dari segi pertumbuhan realisasi belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,19% per tahun. Pertumbuhan belanja daerah terbesar yaitu belanja langsung sebesar 12,49% per tahun, kemudian belanja tidak langsung sebesar 10,14 % per tahun. Untuk pembiayaan daerah selama periode 2014 sampai 2018 rata-rata pertumbuhannya sebesar 19,68% per tahun.

Tabel 3.13.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	938.957.904.123,44	1.233.809.148.166,18	1.397.284.611.385,39	1.292.583.077.131,60	1.323.121.884.246,45	9,88
1.1	Pendapatan Asli Daerah	63.945.274.905,56	78.558.298.846,94	95.564.293.748,99	109.172.771.922,60	106.865.737.219,45	14,16
	Pajak Daerah	13.488.085.012,83	15.996.577.335,75	18.990.358.154,00	24.970.796.171,58	23.225.730.202,36	15,45
	Retribusi Daerah	28.600.031.908,00	28.799.238.479,31	43.080.541.420,77	7.281.449.374,00	8.262.082.267,00	-4,84
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.563.650.428,00	4.370.490.780,86	4.991.723.746,00	5.855.148.706,70	5.146.303.141,00	10,51
	Lain-lain PAD yang Sah	18.293.507.556,73	29.391.992.251,02	28.501.670.428,22	71.065.377.670,32	70.231.621.609,09	51,45
1.2	Dana Perimbangan	682.313.624.340,00	839.139.299.421,00	994.067.307.808,00	905.261.283.912,00	922.578.716.117,00	8,61
	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	18.604.154.340,00	16.884.086.421,00	24.007.459.392,00	17.232.157.092,00	15.973.075.808,00	-0,65
	Dana Alokasi Umum	595.699.150.000,00	624.131.623.000,00	689.096.791.000,00	676.991.576.000,00	680.212.384.000,00	3,48
	Dana Alokasi Khusus	68.010.320.000,00	198.123.590.000,00	280.963.057.416,00	211.037.550.820,00	226.393.256.309,00	53,88
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192.699.004.877,88	316.111.549.898,24	307.653.009.828,40	278.149.021.297,00	293.677.430.910,00	14,34
	Hibah	2.937.651.100,00	25.159.139.550,00	6.504.626.849,00	9.647.766.031,00	51.717.052.400,00	291,67
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.058.067.927,88	32.276.149.674,24	45.089.350.771,40	43.883.977.566,00	42.812.904.477,00	8,82
	Dana Penyesuaian dan OtoNomormi khusus	139.113.886.850,00	242.479.965.778,00	241.007.229.074,00	218.126.530.500,00	192.040.061.000,00	13,06
	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	18.589.399.000,00	15.817.284.000,00	15.051.803.134,00	6.490.747.200,00	7.107.413.033,00	-16,78
	Pendapatan Lainnya	-	379.010.896,00	-	-	-	

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja	917.358.824.487,07	1.145.226.037.422,00	1.481.088.366.252,00	1.283.421.687.609,00	1.333.858.528.125,39	11,19
2.1	Belanja Tidak Langsung	492.272.859.393,00	602.813.083.620,00	728.180.279.770,00	731.112.093.783,00	777.190.411.147,00	12,49
	Belanja Pegawai	429.858.129.605,00	471.593.013.717,00	517.105.808.377,00	472.020.209.173,00	489.997.519.345,00	3,61
	Belanja Hibah	24.988.162.707,00	4.299.500.000,00	6.170.300.000,00	21.977.265.300,00	45.452.078.418,00	80,93
	Belanja Bantuan Sosial	4.952.756.796,00	411.000.000,00	226.650.000,00	371.750.000,00	382.700.000,00	-17,40
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	32.223.810.285,00	3.788.949.403,00	5.061.158.638,00	2.586.252.888,00	2.881.319.358,00	-23,04
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	250.000.000,00	122.425.535.000,00	199.423.567.320,00	233.989.947.320,00	238.416.524.776,00	12238,08
	Belanja tidak terduga	-	295.085.500,00	192.795.435,00	166.669.102,00	60.269.250,00	-28,01
2.2	Belanja Langsung	425.085.965.094,07	542.412.953.802,00	752.908.086.482,00	552.309.593.826,00	556.668.116.978,39	10,14
	Belanja Pegawai	16.378.673.068,00	15.556.000.600,00	17.647.715.177,00	19.390.785.500,00	10.344.141.069,00	-7,09
	Belanja Barang dan Jasa	244.385.812.273,00	303.474.093.771,00	349.739.393.906,00	311.756.289.941,00	346.509.575.042,39	9,93
	Belanja Modal	164.321.479.753,07	223.382.859.431,00	385.520.977.399,00	221.162.518.385,00	199.814.400.867,00	14,06
3	Pembiayaan Daerah	52.820.309.929,55	64.911.277.046,92	145.477.650.983,10	25.111.524.602,49	28.736.151.032,09	19,68
	Penerimaan Pembiayaan	54.880.504.979,55	74.911.277.046,92	153.171.142.869,10	61.676.004.516,49	34.253.771.032,09	9,19
	Pengeluaran Pembiayaan	2.060.195.050,00	10.000.000.000,00	7.693.491.886,00	36.564.479.914,00	5.517.620.000,00	163,17

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

1.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legeslatif daerah maupun para pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancer (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: rasio total hutang terhadap total asset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Luwu serta rata-rata pertumbuhannya secara rinci ditunjukkan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR	101.683.471.944,92	167.577.146.324,30	83.461.092.934,07	68.482.513.858,24	59.189.962.307,86	-4,22
	Kas	77.702.756.842,92	154.055.613.953,22	62.067.984.388,49	34.659.325.761,09	18.390.249.700,15	-13,14
	Piutang	16.391.574.580,00	6.629.714.423,47	9.760.907.786,95	20.900.318.427,74	31.039.150.525,45	37,58
	Beban Dibayar Dimuka		129.045.885,61	32.536.898,63	46.206.220,30	27.668.151,88	-24,30
	Persediaan	7.589.140.522,00	6.762.772.062,00	11.576.620.860,00	12.876.663.449,11	9.732.893.930,38	11,78
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	13.450.319.589,85	41.956.092.748,60	46.087.902.689,00	50.164.313.810,00	52.247.608.635,00	58,69
	Investasi Non Permanen	1.778.319.588,85	1.544.017.769,60	1.260.219.415,00	1.025.858.590,00	746.036.220,00	-19,36
	Investasi Permanen	11.672.000.001,00	40.412.074.979,00	44.827.683.274,00	49.138.455.220,00	51.501.572.415,00	67,90
1.3	ASET TETAP	1.402.561.523.363,00	1.293.383.681.022,46	1.884.427.885.946,16	1.931.578.718.102,46	1.997.487.381.922,10	10,96
	Tanah	176.170.338.594,00	185.039.073.694,00	413.996.184.740,50	400.576.134.240,00	405.755.027.640,00	31,70
	Peralatan dan Mesin	213.419.941.998,00	218.527.390.259,05	274.441.960.861,94	340.062.601.339,13	383.986.760.730,52	16,20
	Gedung dan Bangunan	480.601.224.361,07	555.188.982.151,00	642.717.236.275,98	657.911.372.388,39	715.286.124.498,84	10,59
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	461.624.541.881,93	598.086.144.777,32	852.589.184.172,80	1.025.948.372.911,80	117.954.658.281,76	25,35
	Aset Tetap Lainnya	54.566.996.512,00	58.033.235.771,30	63.528.130.405,00	61.343.154.003,20	70.983.655.954,20	7,02
	Konstruksi dalam Pekerjaan	16.178.480.016,00	3.584.370.892,00	38.816.649.964,22	4.737.007.010,00	40.000.124.119,75	390,43
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(325.075.516.522,21)	(401.661.460.474,28)	(558.999.923.790,06)	(736.478.969.302,97)	31,49
1.4	ASET LAINNYA	33.539.971.073,50	66.309.961.435,32	35.761.557.937,50	50.360.673.670,00	46.116.441.255,07	21,01
	Tagihan Penjualan Angsuran	318.417.093,50					-100,00
	Tagihan Jangka Panjang		242.335.759,50	195.176.109,0	139.549.310,00	139.549.310,00	-15,99
	Aset Tak Berwujud	729.926.600,00	15.321.794.880,00	18.949.371.664,00	11.455.278.590,00	20.369.528.728,00	515,26
	Aset Lain-lain	32.491.627.380,00	50.745.830.795,82	16.617.010.164,00	38.765.845.770,00	25.607.363.217,07	22,07
	JUMLAH ASET DAERAH	1.551.235.285.971,27	1.569.226.881.530,68	2.049.738.439.506,73	2.100.586.219.440,70	2.155.041.394.120,03	9,21

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.886.652.463,45	10.029.263.227,67	37.829.323.141,12	10.879.043.867,40	12.322.729.007,57	72,40
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	867.325.025,00	390.706.927,00	394.088.272,00	390.306.729,00	390.742.547,00	-13,73
	Pendapatan Diterima DiMuka		431.639.341,22	745.264.211,67	565.285.175,95	511.946.825,12	13,02
	Utang Beban		364.374.299,00	475.277.429,00	8.467.533.488,00	10.296.788.918,00	577,88
	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.950.037.138,45	8.633.752.360,45	6.558.164.937,45	1.386.628.173,45	1.049.319.417,45	-13,20
	Utang Kepada Pihak Ketiga	69.290.300,00	208.790.300,00	29.656.528.291,00	69.290.301,00	73.931.300,00	3/553,06
3	EKUITAS	1.545.348.633.507,82	1.559.197.618.303,01	2.011.909.116.365,61	2.089.707.175.573,30	2.142.718.665.112,46	9,08
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.551.235.285.971,27	1.569.226.881.530,68	2.049.738.439.506,73	2.100.586.219.440,70	2.155.041.394.120,03	9,21

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan perkembangan pengelolaan neraca daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut.

1. Aset

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara umum asset terbagi atas asset lancar, surat berharga baik berupa investasi jangka panjang maupun jangka pendek, asset tetap dan asset lainnya.

Selama periode 2014-2018 rata-rata pertumbuhan asset Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar 9,21% per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis asset antara lain asset lancar, dimana asset ini setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhannya 4,22% per tahun, investasi jangka panjang naik sebesar 58,69% per tahun, asset tetap rata-rata naik sebesar 10,98% per tahun dan asset lainnya rata-rata naik sebesar 21,01% per tahun.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu meliputi: 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga; 2) Pendapatan diterima di muka; 3) Utang beban; 4) Utang Jangka Pendek Lainnya; dan 5) Utang pada Pihak Ketiga, dimana kewajiban ini termasuk kedalam kewajiban jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 berfluktuatif, dimana antara tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2017 turun dan pada tahun 2018 kembali naik, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 72,40% per tahun. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, sampai akhir tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu tidak memiliki kewajiban.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 tumbuh rata-rata sebesar 9,08% setiap tahunnya. Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.15.
Analisi Rasio Keuangan Kabupaten Luwu
Tahun 2014 s/d 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Likuiditas					
	- Rasio Lancar	17,27	16,71	2,21	6,29	4,80
	- Rasio Cepat	15,98	16,03	1,90	5,11	4,01
	- Rasio Kas	13,25	15,38	1,65	3,20	1,50
2	Rasio Solvabilitas					
	-Rasio Total Utang terhadap Modal	0,08	0,07	1,56	0,46	0,24
	- Rasio Total Hutang terhadap Aset	0,0038	0,0064	0,0185	0,0052	0,0057
3	Rasio Aktivitas					
	- Rata-rata Umur Piutang					
	- Rata-rata umur persediaan					

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. PAD yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
 - a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan Non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

- c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;
 - d. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - e. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan, yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), dan PPh Pasal 21;
 - b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan dana perimbangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap

perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak

tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10%, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja Non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	382.297.069.555,00	423.127.516.476,00	391.307.199.973,00	407.849.325.585,00	2,46
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	369.542.617.397,00	395.163.624.976,00	361.129.918.265,00	365.892.837.648,00	(0,12)
2	Belanja Tambahan Penghasilan	9.930.250.540,00	25.016.141.500,00	25.958.406.708,00	40.534.262.937,00	70,61
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.164.000.000,00	2.143.000.000,00	3.193.000.000,00	400.000.000,00	(13,15)
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	660.201.618,00	804.750.000,00	1.025.875.000,00	1.022.225.000,00	16,34
B	Belanja Langsung	76.508.068.950,00	102.007.829.039,00	100.149.468.958,00	122.909.057.064,00	18,08
1	Belanja Honorarium PNS	14.100.588.000,00	15.710.612.177,00	17.486.239.500,00	7.914.239.000,00	(10,67)
2	Belanja Uang Lembur	1.401.452.600,00	1.788.903.000,00	1.904.546.000,00	2.429.902.069,00	20,57
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	143.400.000,00	91.700.000,00	30.000.000,00	63.750.000,00	3,05
4	Belanja Kursu, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.342.437.190,00	3.930.669.000,00	1.935.207.750,00	1.854.285.700,00	(21,48)
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.127.319.180,00	14.646.750.100,00	16.561.465.290,00	26.503.113.818,00	220,54
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	-	-	-	-	-
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	818.678.900,00	1.268.354.600,00	1.107.171.500,00	1.196.349.882,00	16,76
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	614.935.000,00	726.201.850,00	1.015.315.400,00	1.121.737.636,00	22,80
9	Belanja Perjalanan Dinas	32.704.206.483,00	40.492.772.533,00	48.055.467.818,00	57.415.933.915,00	20,66
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)	20.255.051.597,00	23.351.865.779,00	12.054.055.700,00	24.409.745.044,00	23,14
TOTAL		458.805.138.505,000	525.135.345.515,000	491.456.668.931,000	530.758.382.649,000	5,35

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2015 sampai dengan 2018 berfluktuatif baik dari sisi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Rata-rata pertumbuhan untuk belanja tidak langsung lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja langsung dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar 2,46% per tahun dan 18,08% per tahun

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 4 (lima) tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Tahun 2016-2018

No	Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (a/b)*100
		(a)	(b)	©
1	2015	458.805.138.505,00	1.155.226.037.422,00	39,72
2	2016	525.135.345.515,000	1.488.781.858.138,00	35,27
3	2017	491.456.668.931,000	1.319.986.167.523,00	37,23
4	2018	530.758.382.649,000	1.339.376.148.125,39	39,63

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu(diolah)

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Selain analisis tentang pemenuhan kebutuhan aparatur juga perlu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Luwu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18.
Analisis terhadap Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Tahun 2015-2018

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	Rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	502.631,60	608.188,30	623.248,13	653.425,46	9,44
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	369.542,62	395.163,62	361.129,92	365.892,84	-0,12
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.164,00	2.143,00	3.193,00	400,00	-13,15
3	Belanja Hibah	4.299,50	6.170,30	21.977,27	45.452,08	135,50
4	Belanja Bantuan Sosial	411,00	226,65	371,75	382,70	7,37
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.788,95	5.061,16	2.586,25	2.881,32	-1,30
6	Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	122.425,54	199.423,57	233.989,95	238.416,52	27,37
B	Pembiayaan Pengeluaran	10.000,00	7.693,49	36.564,48	5.517,62	89,10
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000,00	7.000,00	7.000,00	5.500,00	-17,14
2	Pembayaran Utang Pemda			29.445,13		-33,33
3	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		693,49	119,35	17,62	-56,01
TOTAL (A+B)		512.631,60	615.881,79	659.812,61	658.943,08	9,05

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Luwu berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Analisis pembiayaan daerah meliputi: a) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil; b) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA); dan d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk defisit riil anggaran. Perkembangan defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19.
Penutup Defesit Riil Anggaran
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.397.284.611.385,39	1.292.583.077.131,60	1.323.121.884.246,45
	Dikurangi			
2	Belanja Daerah	1.481.088.366.252,00	1.283.421.687.609,00	1.333.858.528.125,39
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.693.491.886,00	36.564.479.914,00	5.517.620.000,00
A	Defesit Riil	(91.497.246.752,61)	(27.403.090.391,40)	(16.254.263.878,94)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	153.165.357.869,10	61.673.896.116,49	34.252.571.032,09
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00		
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.785.000,00	2.108.400,00	1.200.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	153.171.142.869,10	61.676.004.516,49	34.253.771.032,09
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan	61.673.896.116,49	34.272.914.125,09	17.999.507.153,15

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2016-2018 APBD Kabupaten Luwu mengalami deficit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah.

Defesit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah, sehingga pada tahun 2016 sampai dengan 2018 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan masing-masing sebesar Rp61,67 miliar pada tahun 2016, Rp34,27 miliar pada tahun 2017 dan Rp17,99 miliar pada tahun 2018.

Komposisi penutup defesit riil anggaran (tabel 3.20) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 defesit riil tidak dapat ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar -1,67%, begitupun pada tahun 2017 sebesar -2,25% dan pada tahun 2018 sebesar -2,11%.

Tabel 3.20.
Komposisi Penutup Defesit Riil Anggaran
Tahun 2016-2018

No	Uraian	Proporsi dari Total defesit Riil		
		2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-1,67	-2,25	-2,11
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	(0,0000632)	(0,0000769)	(0,0000738)
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

Dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebagai akumulasi surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan.

b. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA tersebut dapat bermakna positif dan negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Perolehan SiLPA Kabupaten Luwu selama tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diperoleh dari sisa penghematan dan Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Luwu

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	61.673.896.116,49	100,00	34.272.914.125,09	100,00	17.999.507.153,15	100,00
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(4.034.726.380,01)	-6,54	2.374.833.922,60	6,93	(3.090.275.921,55)	-17,17
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(28.287.789.842,00)	-45,87	(8.468.207.088,000)	-24,71	(4.457.493.983,00)	-24,76
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	22.472.928.494,40	36,44	15.276.910.917,00	44,57	(9.840.630.090,00)	-54,67
4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	71.129.395.572,10	115,33	24.699.069.644,49	72,07	34.997.164.600,70	194,43
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	394.088.272,00	0,64	390.306.729,00	1,14	390.742.547,00	2,17
6	kegiatan lanjutan						

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

c. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 3.22.
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1	Saldo Kas Neraca Daerah	62.067.984.388,49	34.663.220.854,09	18.390.249.700,15
	dikurangi			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	394.088.272,00	390.306.729,00	390.742.547,00
3	Kegiatan Lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	61.673.896.116,49	34.272.914.125,09	17.999.507.153,15

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan awal yang

dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kebijakan Alokasi Anggaran secara umum diarahkan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah, baik melalui belanja langsung Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut:

- a. Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga PAD;
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di kabupaten Luwu;
- c. Identifikasi dan penggalan sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD;
- d. Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- f. Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- g. Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;

- h. Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- i. Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah terkait erat dengan kewajiban untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan daerah bergantung pada anggaran selama lima tahun kedepan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel proyeksi keuangan Kabupaten Luwu 2019-2024 ditunjukkan pada table 3.23 di bawah ini.

Tabel 3.23.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.463.900.946.470,00	1.505.698.566.788,14	1.546.828.945.559,98	1.588.534.060.290,60	1.631.391.899.064,43	1.675.435.432.075,53	2,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	109.652.921.139,00	114.806.478.378,87	119.144.549.122,13	123.651.086.771,40	128.332.836.004,80	133.196.820.373,35	3,97
1.1.1	Pajak Daerah	20.527.000.000,00	22.579.700.000,00	23.708.685.000,00	24.894.119.250,00	26.138.825.212,50	27.445.766.473,13	6,00
1.1.2	Retribusi Daerah	8.810.000.000,00	9.074.300.000,00	9.346.529.000,00	9.626.924.870,00	9.915.732.616,10	10.213.204.594,58	3,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.100.000.000,00	5.304.000.000,00	5.516.160.000,00	5.736.806.400,00	5.966.278.656,00	6.204.929.802,24	4,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	75.215.921.139,00	77.848.478.378,87	80.573.175.122,13	83.393.236.251,40	86.311.999.520,20	89.332.919.503,41	3,50
1.2	Dana Perimbangan	1.054.333.936.331,00	1.080.692.284.739,28	1.107.709.591.857,76	1.135.402.331.654,20	1.163.787.389.945,56	1.192.882.074.694,19	2,50
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	17.091.267.715,00	17.518.549.407,88	17.956.513.143,07	18.405.425.971,65	18.865.561.620,94	19.337.200.661,46	2,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	718.676.594.000,00	736.643.508.850,00	755.059.596.571,25	773.936.086.485,53	793.284.488.647,67	813.116.600.863,86	2,50
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	318.566.074.616,00	326.530.226.481,40	334.693.482.143,44	343.060.819.197,02	351.637.339.676,95	360.428.273.168,87	2,50
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	299.914.089.000,00	310.199.803.670,00	319.974.804.580,10	329.480.641.865,00	339.271.673.114,08	349.356.537.007,98	3,10
1.3.1	Hibah	54.070.000.000,00	55.962.450.000,00	57.921.135.750,00	59.369.164.143,75	60.853.393.247,34	62.374.728.078,53	2,90
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43.950.000.000,00	45.488.250.000,00	47.080.338.750,00	48.728.150.606,25	50.433.635.877,47	52.198.813.133,18	3,50
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	195.242.489.000,00	201.099.763.670,00	207.132.756.580,10	213.346.739.277,50	219.747.141.455,83	226.339.555.699,50	3,00
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	6.651.600.000,00	7.649.340.000,00	7.840.573.500,00	8.036.587.837,50	8.237.502.533,44	8.443.440.096,77	5,00
2	BELANJA	1.476.988.004.558,00	1.658.698.566.788,14	1.499.828.945.559,98	1.541.534.060.290,60	1.584.391.899.064,43	1.628.435.432.075,53	2,11
2.1	Belanja Tidak Langsung	819.688.005.937,00	836.685.095.329,91	852.030.164.141,36	869.731.793.383,13	925.838.778.787,63	903.120.936.208,76	2,00
2.1.1	Belanja Pegawai	533.999.193.161,00	547.349.172.990,03	561.032.902.314,78	575.058.724.872,65	589.435.192.994,46	604.171.072.819,32	2,50
2.1.2	Belanja Hibah	8.486.300.000,00	8.656.026.000,00	8.829.146.520,00	11.005.729.450,40	51.225.844.039,41	12.250.360.920,20	63,60
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.220.000.000,00	1.244.400.000,00	1.269.288.000,00	1.294.673.760,00	1.320.567.235,20	1.346.978.579,90	2,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada	2.935.700.000,00	3.038.449.500,00	3.144.795.232,50	3.254.863.065,64	3.368.783.272,93	3.486.690.687,49	3,50

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa							
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	270.046.812.776,00	271.397.046.839,88	272.754.032.074,08	274.117.802.234,45	275.488.391.245,62	276.865.833.201,85	0,50
2.1.6	Belanja tidak terduga	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	13,33
2.2	Belanja Langsung	657.299.998.621,00	822.013.471.458,24	647.798.781.418,63	671.802.266.907,47	658.553.120.276,81	725.314.495.866,77	2,69
2.2.1	Belanja Pegawai	9.788.172.150,00	9.886.053.871,50	9.984.914.410,22	10.084.763.554,32	10.185.611.189,86	10.287.467.301,76	1,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.170.838.469,00	250.743.876.214,53	262.856.630.618,42	276.333.988.280,50	252.269.534.320,84	307.918.170.546,13	1,22
2.2.3	Belanja Modal	298.340.988.002,00	561.383.541.372,21	374.957.236.390,00	385.383.515.072,65	396.097.974.766,11	407.108.858.018,88	10,81
3	PEMBIAYAAN	13.087.058.088,00	153.000.000.000,00	(47.000.000.000,00)	(47.000.000.000,00)	(47.000.000.000,00)	(47.000.000.000,00)	87,64
3.1	Penerimaan Pembiayaan	17.087.058.088,00	160.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	128,53
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	7.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	240,00
Pembiayaan Netto								
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Proyeksi

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dihitung dari hasil pengurangan total penerimaan daerah dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Luwu yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1.505.698,57	1.546.828,95	1.588.534,06	1.631.391,90	1.675.435,43
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pembiayaan	160.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total Penerimaan	1.665.698,57	1.551.828,95	1.593.534,06	1.636.391,90	1.680.435,43
	dikurangi					
5	Belanja Tidak Langsung	836.685,10	852.030,16	869.731,79	925.838,78	903.120,93
6	Pengeluaran Pembiayaan	7.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	822.013,47	647.798,78	671.802,27	658.553,12	725.314,50

Sumber : Hasil Proyeksi

Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke dalam tiga prioritas daerah. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, dan prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Dengan adanya pembagian alokasi tersebut, maka pagu indikatif berdasarkan proyeksi anggaran dan belanja daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah 33,78% untuk prioritas pertama, 49,71% untuk prioritas kedua, dan 16,51% untuk prioritas ketiga. Sedangkan untuk tahun 2021-2024 dialokasikan untuk prioritas pertama sebesar 45%, prioritas kedua sebesar 33%, dan prioritas

ketiga sebesar 22%, Pembagian alokasi anggaran tersebut diasumsikan sama selama lima tahun ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.25.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2020-2024

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	822.013,47	647.798,78	671.802,27	658.553,12	725.314,50
1	Prioritas I	33,78%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
		277.656,06	291.509,45	302.311,02	296.348,90	326.391,52
2	Prioritas II	49,71%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
		408.614,45	213.773,60	221.694,75	217.322,53	239.353,78
3	Prioritas III	16,51%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
		135.742,96	142.515,73	147.796,50	144.881,69	159.569,19

Sumber: Hasil Proyeksi

:

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Suatu perencanaan yang baik, adalah yang dapat merumuskan permasalahan dan dimana permasalahan itu berada dengan baik karena tujuan mendasar pembangunan daerah adalah untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan di daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan membuat masyarakat merasakan dampaknya, yaitu peningkatan kesejahteraan.

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pembangunan daerah pada periode yang lalu, serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Meskipun pada periode RPJMD yang lalu telah cukup membawa perubahan positif yang sangat signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Luwu, baik dari aspek infrastruktur, ekonomi maupun dari sosial dan kemasyarakatan, namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi kedepan.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan pembangunan, dilakukan kajian dan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Perumusan permasalahan pembangunan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan maupun kegagalan dalam kinerja pembangunan pada masa lalu, termasuk hubungan dengan kemampuan manajemen pemerintah dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan kepada seluruh bidang urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah maupun sekaligus terhadap beberapa urusan, yang bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis dan hasil evaluasi, serta memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bhakti Tahun 2019-2024, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Luwu adalah **“Pembangunan di Kabupaten Luwu belum optimal dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri dalam Nuansa Religi”**. Melihat gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi pembangunan daerah yang

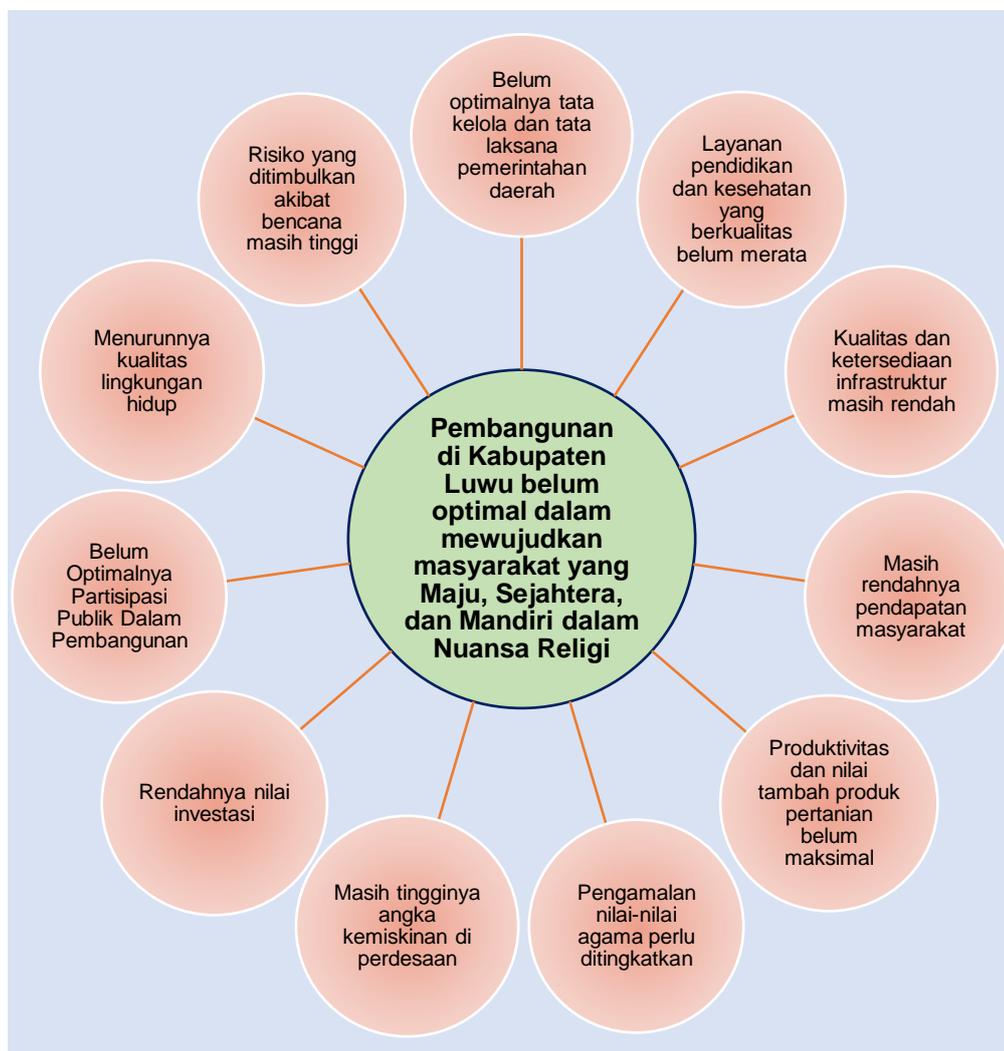
dihubungkan dengan rumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, dapat diidentifikasi lebih lanjut permasalahan pokok atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut.

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah;
2. Layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum merata;
3. Ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian masih rendah;
4. Masih rendahnya pendapatan masyarakat;
5. Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal;
6. Pengamalan nilai-nilai agama perlu ditingkatkan;
7. Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan;
8. Rendahnya nilai investasi;
9. Belum optimalnya partisipasi publik dalam pembangunan;
10. Kebijakan pengelolaan SDA masih kurang memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
11. Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi.

Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Luwu merupakan realisasi dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Oleh sebab itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Berikut ini pemetaan permasalahan-permasalahan pokok Kabupaten Luwu dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah.

Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu



Permasalahan pokok pembangunan daerah sebagaimana terlihat pada gambar di atas, akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mengaplikasikan prinsip-prinsip *clean and good governance*, dimana antara lain prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2017 masih mendapatkan nilai C atau predikat “kurang” dari Kementerian PAN dan RB, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja masih rendah. Belum maksimalnya nilai akuntabilitas ini

disebabkan kualitas laporan yang masih rendah, penyelesaian laporan yang belum tepat waktu, laporan yang belum taat azas dan indikator kinerja utama yang belum ditetapkan secara jelas dan terukur. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kualitas perencanaan belum baik, kemudian belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja, dan masih lemahnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

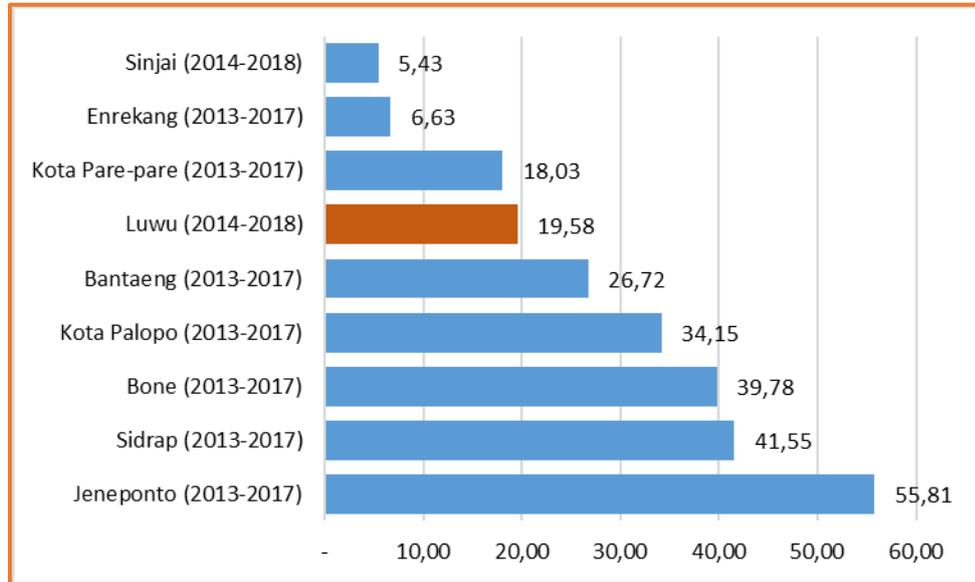
Sementara itu, sampai dengan tahun 2017 sistem perencanaan dan panganggaran belum menerapkan sistem elektronik berbasis *on-line*. Tahun 2018 kedua aplikasi tersebut sudah *on-line* tetapi belum terintegrasi. Penerapan sistem yang belum terintegrasi ini mengakibatkan sulitnya men-generate data pembangunan.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah belum dapat diukur karena survey terkait hal tersebut belum dilakukan secara ilmiah dengan sample yang sesuai. Perangkat daerah yang sudah melaksanakan survey secara mandiri adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan perolehan angka IKM sebesar 87,01.

Dibalik sebuah sistem tentu ada manusia yang harus menjalankan. Untuk Kabupaten Luwu, sistem merit belum maksimal dijalankan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. Hal ini menandakan masih rendahnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada publik. Aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal setiap tahunnya juga sedikit. Dari jumlah PNS yang mencapai \pm 5.000 orang, yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 100 orang setiap tahunnya. Dari aspek pejabat yang telah menduduki jabatan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatannya, tidak tersedia data. Selanjutnya, juga tidak diketahui seberapa besar kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pejabat dengan jabatan yang didudukinya.

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 adalah sebesar 14,16%, dengan nilai realisasi sebesar Rp63,95 milyar pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp106,87 milyar pada tahun 2018. Sedangkan rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada periode yang sama adalah 7,29%.

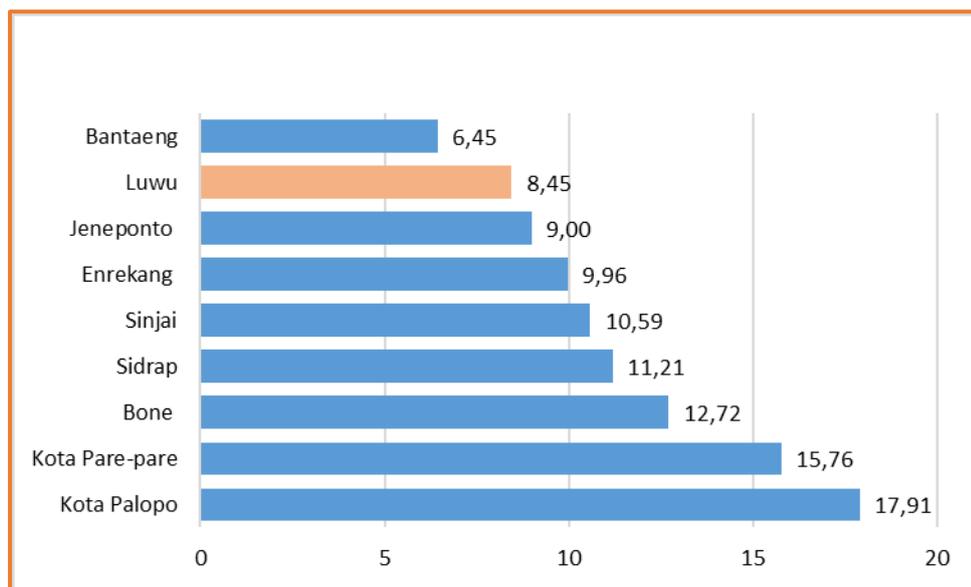
Gambar 4.2
Grafik Rata-rata Pertumbuhan PAD beberapa kabupaten/kota
di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Data diolah dari RPJMD kabupaten/kota bersangkutan.

Apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka terlihat bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Luwu sebagaimana terlihat pada tabel di atas maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah, masih dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Gambar 4.3
Grafik Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah beberapa kabupaten/kota
di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017



Sumber: Data diolah dari RPJMD kabupaten/kota bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
”Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana Pemerintahan Daerah”

Permasalahan	Akar masalah
Praktik pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	Lemahnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terlihat dari belum maksimalnya nilai SAKIP pemerintah daerah
	Belum diterapkannya <i>merit system</i> dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
Rendahnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, terlihat dari tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat
Indeks kepuasan masyarakat belum terukur dengan baik.	Lemahnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi terlihat dari belum adanya sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan tidak adanya sistem basis data pembangunan daerah yang terpusat.

2. Layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum merata

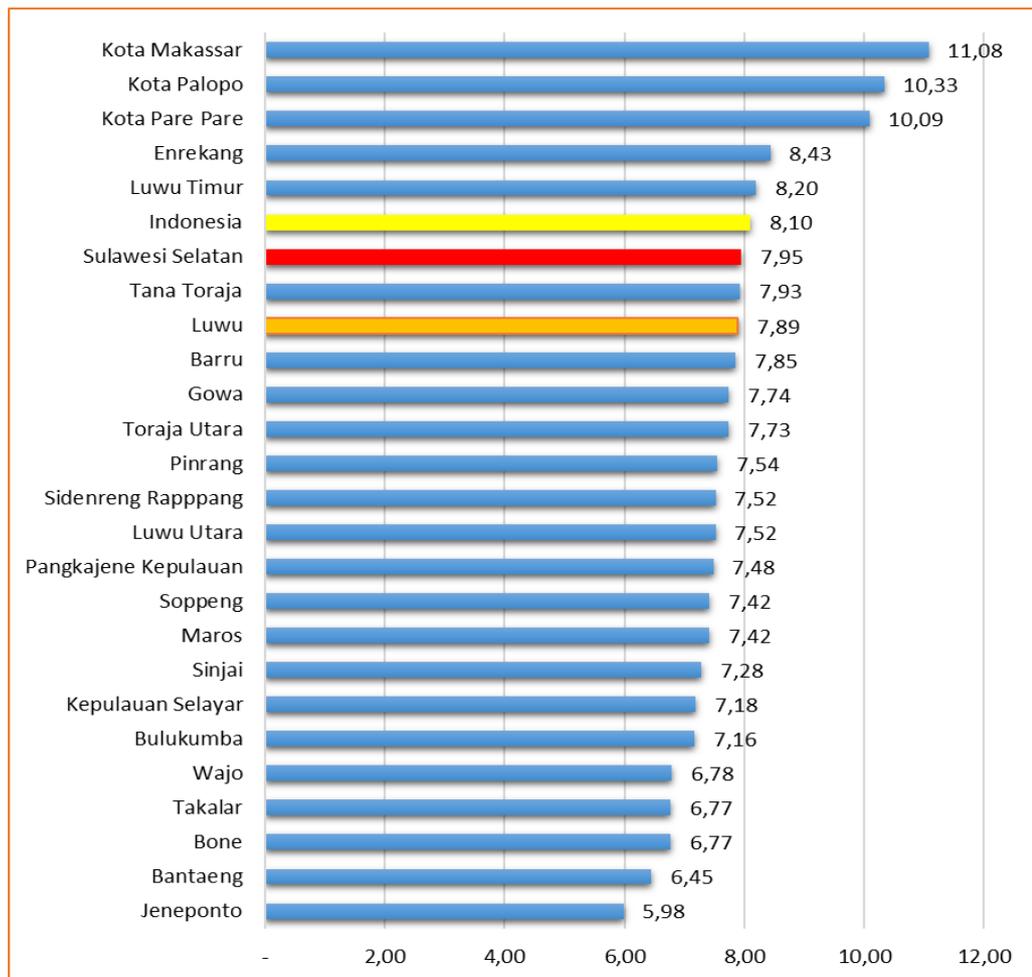
Sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai andil besar terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subjek

pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu dalam meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada aspek kehidupan. Daya saing sumber daya manusia menilai bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Luwu dapat berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Hal yang terpenting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan kesejahteraan masyarakat pada umumnya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan, diantaranya layanan pendidikan dan layanan kesehatan

Kesejahteraan masyarakat secara umum dihubungkan dengan bagaimana kualitas pendidikan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kabupaten Luwu, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dengan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang disebabkan belum optimalnya aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan, misalnya kondisi ruang kelas, partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak sesuai usia.

Gambar 4.4
Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017



Sumber: BPS Tahun 2018

RLS di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari 7,60 tahun di tahun 2014 menjadi 7,97 tahun pada tahun 2018, yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Luwu rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah sampai dengan kelas 2 SMP, masih jauh dari tercapainya program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, RLS Kabupaten Luwu masih berada di bawah.

Meskipun pada tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Luwu sedikit di atas Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,97 dan 7,95, tetapi pertumbuhan Kabupaten Luwu lebih lambat dibanding Provinsi Sulawesi Selatan. RLS Kabupaten Luwu yang lebih rendah dari rata-rata regional menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Luwu masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari kurang baiknya perkembangan beberapa indikator pendidikan.

Pada tahun 2018, APS PAUD baru mencapai 35,15% dari seluruh anak usia 4-6 tahun, APS pendidikan dasar baru mencapai 97,55% untuk SD/ sederajat dan

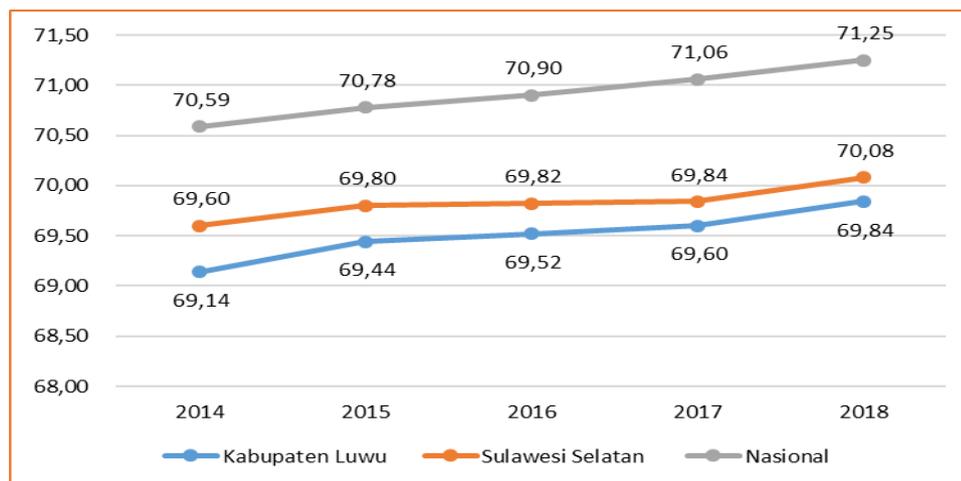
96,44% untuk SMP sederajat. Sedangkan APS untuk pendidikan menengah adalah 70,12%. Jika melihat data APK yang juga belum maksimal (97,78% untuk SD/sederajat, 98,32% untuk SMP/sederajat, dan 74,85% untuk SMA/ sederajat), dapat disimpulkan bahwa kondisi APS tersebut di atas menunjukkan bahwa kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan.

Terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Luwu juga perlu perhatian serius. Persentase ruang kelas SD/Mi kondisi bangunan baik pada tahun 2018 lebih rendah dibanding tahun 2014 yaitu 23,90% berbanding 26,47%. Ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 adalah sebesar 65,61 yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar, tersedia sejumlah 65 sampai dengan 66 unit sekolah. Sedangkan rasio guru/murid adalah 860,12 yang berarti setiap 10.000 murid terdapat 860 orang guru.

Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat masyarakat memerlukan kondisi tersebut agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat Kecamatan, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama pada sektor kesehatan.

Gambar 4.5
Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Tahun 2019

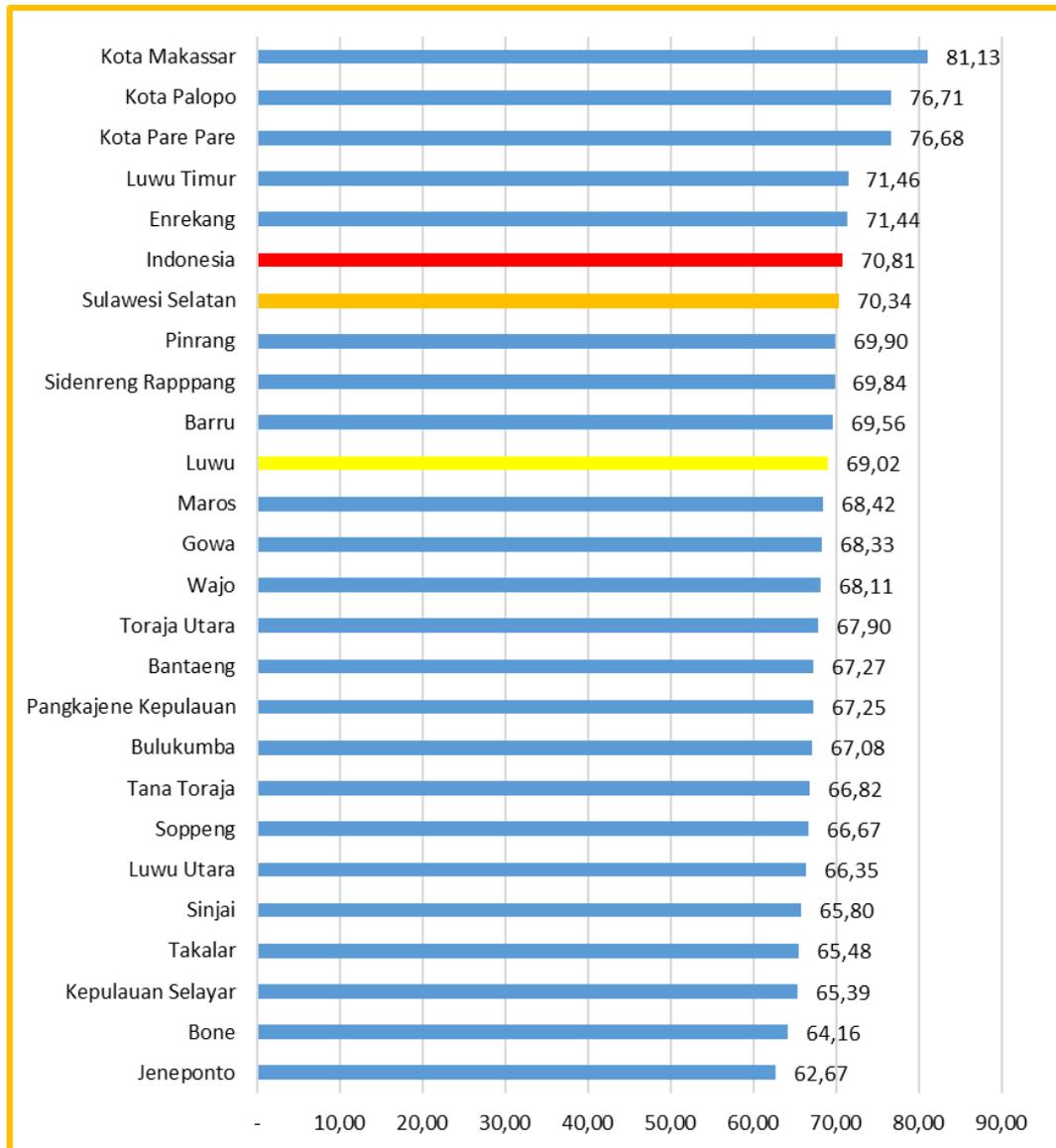
Angka harapan hidup di Kabupaten Luwu cenderung naik perlahan. Pada tahun 2014 sebesar 69,14 tahun, meningkat menjadi 69,84 tahun pada tahun 2018. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama yaitu 70,08 tahun dan capaian angka harapan hidup Indonesia yaitu 71,25 tahun.

Balita gizi kurang di Kabupaten Luwu masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang karena angkanya yang cenderung meningkat yaitu dari 2,06% pada tahun 2014 menjadi 6,50% pada tahun 2017, meskipun menurun pada tahun 2018 menjadi 5,90%. Angka kematian bayi periode tahun 2014-2018 adalah 66,60 kasus per tahun, sedangkan angka kematian ibu rata-rata 8 kasus per tahun. Dari sisi tenaga medis, 1 orang tenaga medis di Kabupaten Luwu melayani 7.484 orang. Indikator kesehatan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan kunjungan ibu hamil K4 yang baru mencapai 84,96%, cakupan pelayanan nifas 89,92%, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 58,25%, dan cakupan pelayanan anak balita yang baru mencapai 70,22%.

Dari aspek sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, meskipun telah ada Puskesmas di seluruh kecamatan, tetapi kualitas layanan masih belum merata. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan Jenis tenaga) yang tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan serta tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas, menjadi salah satu penyebab rendahnya layanan kesehatan.

Kondisi di atas mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 4.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia
Tahun 2017



Sumber: BPS Tahun 2018

IPM Kabupaten Luwu berada pada posisi ke-9 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, bahkan masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat angka IPM yang cukup rendah pada lingkup provinsi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum merata” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas Belum Merata”

Permasalahan	Akar masalah
Kurang berhasilnya peningkatan dan pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Rendahnya peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal yang terlihat dari rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang hanya sebesar 7,89 tahun di tahun 2018
	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang ditandai dengan APS PAUD sebesar 35,15%, rata-rata APS pendidikan dasar 97%, dan kondisi bangunan SD/ sederajat dalam kondisi baik sebesar 23,90%, serta rasio guru/murid pendidikan SD/ sederajat 65,61.
	Rendahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terlihat dari angka usia harapan hidup masih berada di bawah angka provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, balita gizi kurang mencapai 5,90%, angka kematian bayi rata-rata 66 kasus per tahun, sedangkan angka kematian ibu melahirkan rata-rata 8 kasus per tahun.

3. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah.

Untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang prima, pemerintah daerah harus mampu merumuskan program/kegiatan yang penunjang peningkatan kualitas infrastruktur maupun sumber daya manusia. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tidak dilihat dari sekadar berapa kuantitasnya, tetapi juga harus dijamin kualitasnya sesuai dengan standar dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pelayanan, menumbuhkan seluruh sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dibidang air minum, persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 baru mencapai 80%, sedangkan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan baru

mencapai 47,22%, sedangkan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 baru mencapai 75,45%.

Di bidang perumahan dan permukiman, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 setiap 1.000 penduduk baru sejumlah 204 orang yang menempati rumah layak huni, kemudian masih terdapat 206,36 ha permukiman kumuh dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari meningkatnya rumah tangga kumuh di perkotaan dari 1.328 pada tahun 2017 menjadi 1.339 pada tahun 2018.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu adalah 2.541,39 km, pada tahun 2018 jaringan jalan yang dalam kondisi baik hanya mencapai 538,02 km atau 21,17%, jauh dari angka provinsi Sulawesi Selatan yang di atas 80%. Hal ini tentu saja menyebabkan terganggunya aksesibilitas orang, barang maupun jasa di daerah ini.

Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lain terjadinya ketimpangan antar wilayah, disamping perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis di Kabupaten Luwu. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi penyelenggaraan infrastruktur perhubungan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Kualitas dan ketersediaan infrastruktur Masih Rendah”

Permasalahan	Akar masalah
Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Belum Optimal	Rendahnya kualitas jalan terlihat dari besarnya angka jaringan jalan dalam kondisi tidak baik (sedang/buruk)
	Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar terlihat dari rendahnya ketersediaan infrastruktur air minum dan jaringan irigasi.
	Rendahnya lingkungan kawasan permukiman yang tertata

4. Masih rendahnya pendapatan masyarakat.

Pemerataan kemakmuran rakyat merupakan salah satu tujuan pembangunan, yang antara lain dilakukan melalui koperasi. Pada tahun 2018, jumlah koperasi di Kabupaten Luwu adalah 424 unit, namun yang aktif hanya sejumlah 187 unit atau 44,10%. Hal ini tentunya perlu memperoleh perhatian pemerintah daerah agar koperasi sebagai soko guru pembangunan nasional dapat berperan lebih besar dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.

Secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Luwu mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan non-makanan sebesar Rp698.582,00 sebulan (Maret 2017). Angka ini lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan (Rp927.908,00). Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja, menjadi penyebab rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima oleh setiap pekerja.

Hal ini setidaknya ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi (pada tahun 2018 sebesar 4,47%), juga dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan di sisi lain (14,01% pada tahun 2017). Ini mengindikasikan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, balas jasa ekonomi yang diterima dari bekerja belum sanggup mengangkat taraf hidupnya di atas garis kemiskinan.

Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah

sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

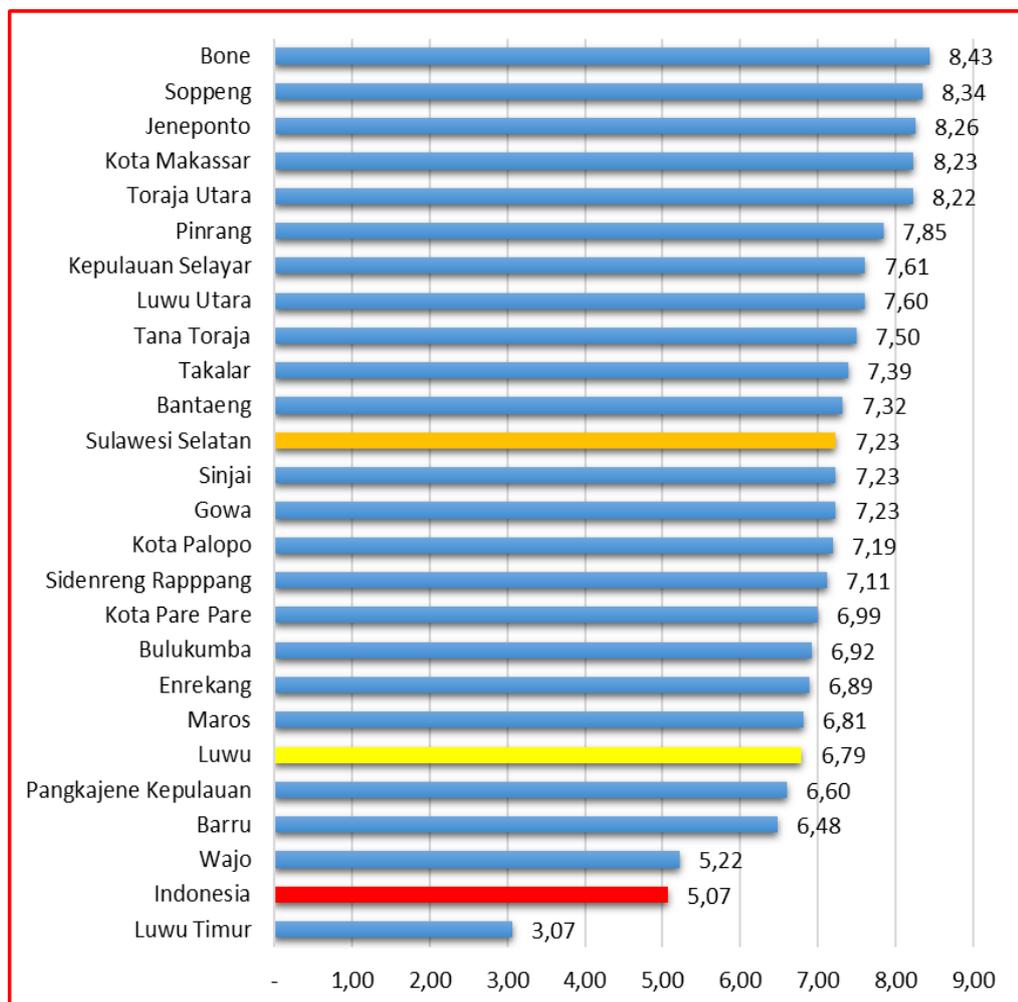
Periode tahun 2015-2018 terjadi peningkatan TPAK dari 60,78% pada tahun 2015 menjadi 64,89% pada tahun 2018, sebagai akibat adanya dana desa yang menyebabkan penduduk desa/penduduk lokal yang tadinya bukan termasuk golongan angkatan kerja menjadi golongan angkaran kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana desa. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2018 sebesar 20,01%, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 27,1%. Hal yang menyebabkan turunnya rasio tersebut karena turunnya jumlah PMA maupun PMDN di Kabupaten Luwu sehingga menyebabkan turunnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana rasionya adalah 22,01% dengan jumlah PMA/PMDN 263 perusahaan, rasio daya serap tetap menurun meskipun jumlah PMA/PMDN meningkat menjadi 264 perusahaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Luwu memang relatif rendah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada dasarnya diharapkan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi pada satu wilayah. Usaha kreatifitas dari masyarakat dalam pengembangan produk baru dan berdaya saing tinggi pada akhirnya dapat memajukan perekonomian mereka dan meningkatkan pendapatan yang dimilikinya. Jika melihat kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang stagnan pada 2 tahun terakhir (2017-2018) pada angka 4,52%, bahkan menurun jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang berada pada 4,56%, menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Luwu tidak berkembang bahkan cenderung melemah.

Adanya pengembangan wirausaha setidaknya membutuhkan bantuan permodalan dari sektor lembaga keuangan maupun dari pemerintah daerah setempat yang menginginkan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat. Sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017, akses UMKM terhadap layanan keuangan masih terbilang minim, faktor penyebabnya kurang adanya kepercayaan dari lembaga keuangan terhadap calon peminjam (wirausaha).

Namun hal ini kurang mendapat perhatian, terbukti dengan tidak tersedianya data terkait dengan bagaimana hubungan antara UMKM dengan lembaga keuangan, baik oleh BPS maupun oleh institusi terkait. Namun demikian, secara kasat mata dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu sebesar 6,79% memang masih lebih rendah dibandingkan dengan yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,23%.

Gambar 4.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017



Sumber: BPS Tahun 2018

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok "Masih rendahnya pendapatan masyarakat" sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Masih rendahnya pendapatan Masyarakat"

Permasalahan	Akar masalah
Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik	Pengelolaan koperasi belum profesional
	Masih rendahnya kemampuan UMKM terhadap akses permodalan dan layanan perbankan
Tingginya angka pengangguran	Rendahnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri

5. Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal.

Peningkatan produktivitas masyarakat melalui peningkatan potensi lahan yang luas, serta peningkatan kualitas produksi melalui pemanfaatan teknologi merupakan tujuan pembangunan dibidang pertanian. Untuk mendukung pertanian, Kabupaten Luwu memiliki jaringan irigasi dengan luas 8.904 Ha. Irigasi yang tersedia tersebut baru mencakup 59,94% dari lahan budidaya di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 hanya sebesar 36,33%.

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Selama 5 tahun terakhir rasio jaringan irigasi masih berada dibawah standar yang diharuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga perlu ada penambahan jaringan irigasi untuk menyesuaikan luas lahan pertanian.

Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Apabila dibandingkan antara tahun 2014 dan 2016, terlihat bahwa produksi pertanian pangan dan palawija mengalami penurunan dari 371.142,00 ton menjadi 349.454,90 ton. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan. Serangan hama dan bencana kekeringan yang semakin sering terjadi, juga menyumbang terhadap rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Luwu.

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2014-2017 mengalami peningkatan dari Rp901,23 miliar menjadi Rp1,09 trilliun. Namun demikian kontribusinya terhadap PDRB sektor

pertanian/perkebunan mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,43%, namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 26,61% dan 25,51%. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) kurang berkembang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal”

Permasalahan	Akar masalah
Belum terwujudnya kemandirian pangan dan perekonomian yang tangguh berbasis agribisnis	Produktivitas berbagai komoditi pertanian cenderung menurun/stagnan
	Belum maksimalnya pembinaan terhadap kelompok tani
	Nilai tambah produk pertanian masih rendah

6. Pengamalan nilai-nilai agama perlu ditingkatkan.

Kondisi kehidupan masyarakat yang religius dalam konsep dan praktik menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan lingkup daerah. Oleh karena itu pembangunan di berbagai aspek harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan budaya.

Penduduk Kabupaten Luwu mayoritas adalah pemeluk agama Islam, dengan jumlah sebesar 86,14%. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu sebagian besar penduduknya beragama Islam, bahkan ada yang mencapai 100% yaitu di Kecamatan Suli Barat. Disamping itu, Kabupaten Luwu adalah salah satu daerah yang terkenal akan karakter masyarakatnya yang keras. Oleh karena itu sangat berpotensi untuk meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Data BPS menunjukkan bahwa indeks kejahatan Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah 3,05 kasus per 10.000 penduduk. Angka ini meningkat menjadi 5,02

kasus pada tahun 2015 dan menurun menjadi 4,19 kasus pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Polres Luwu, pada periode tahun 2014-2016 terjadi 1.206 kasus kriminal. Diantara seluruh kasus tersebut, yang paling tinggi adalah pencurian kendaraan bermotor yang mencapai 365 kasus atau 30,27%, diikuti penggelapan sejumlah 170 kasus atau 14,10%, dan menerima suap yaitu 131 kasus atau 10,86%. Adapun urutan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah penipuan sejumlah 89 kasus atau 7,38%, pengeroyokan sejumlah 83 kasus atau 6,88%, pencurian dengan pemberatan sejumlah 67 kasus atau 5,56%, perjudian sejumlah 65 kasus atau 5,39%, dan kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 56 kasus atau 4,64%.

Munculnya pelanggaran hukum tersebut selain faktor ekonomi, juga karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, tingginya kasus-kasus suap, pengeroyokan, perjudian dan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan yang religius sudah semakin terdegradasi dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum seperti menerima suap, penipuan maupun gangguan keamanan dan ketertiban adalah kurangnya keteladanan dan hilangnya karakter yang merupakan jati diri suatu masyarakat. Karakter merupakan hal yang sangat penting untuk terus dibangun. Dengan sebuah karakter yang baik, maka masyarakat akan dipenuhi oleh orang-orang baik untuk memajukan daerahnya. Banyak metode yang dapat digunakan untuk membangun karakter seseorang agar lebih baik lagi. Salah satu metode yang dapat kita terapkan untuk membangun karakter adalah dengan keteladanan.

Keteladanan akan memberikan gambaran secara nyata bagaimana seseorang harus bertindak. Keteladanan berarti kesediaan setiap orang untuk menjadi contoh dan miniatur yang sesungguhnya dari sebuah perilaku. Keteladanan haruslah bermula dari diri sendiri. Keteladanan bukanlah hanya semata persoalan mempengaruhi orang lain dengan tindakan, melainkan keharusan untuk melakukan tindakan itu yang berhubungan langsung secara spiritual dengan sang pencipta. Setiap orang haruslah menjadi contoh yang baik bagi orang lain, khususnya bagi seorang pemimpin yang harus menunjukkan keteladanan dengan sikap dan tindakan. Keteladanan tidaklah harus sesuatu

perbuatan yang besar, tetapi bisa dimulai dengan tindakan-tindakan kecil, baik dilingkungan organisasi maupun di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks budaya Luwu, kehidupan yang berkualitas haruslah tercipta dan dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari makna keris dan payung pada logo Kabupaten Luwu. Keris mengandung makna kesiap-siagaan membela kehormatan, sedangkan payung mengandung makna mengayomi, melindungi kehidupan masyarakatnya, sehingga tercipta kehidupan yang makmur dan sejahtera, mampu menghidupi dirinya sendiri sebagaimana falsafah Luwu yaitu *wanua mappatuo naewai alena*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Pengamalan nilai-nilai agama perlu ditingkatkan” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
”Pengamalan nilai-nilai agama perlu Ditingkatkan”

Permasalahan	Akar masalah
Tingginya kasus menerima suap, penggelapan dan penipuan	Kurangnya keteladanan dalam perilaku dan tindakan untuk dicontoh masyarakat.
	Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya generasi muda terhadap nilai luhur budaya Luwu

7. Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah :

- a. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- b. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- c. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- f. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- g. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

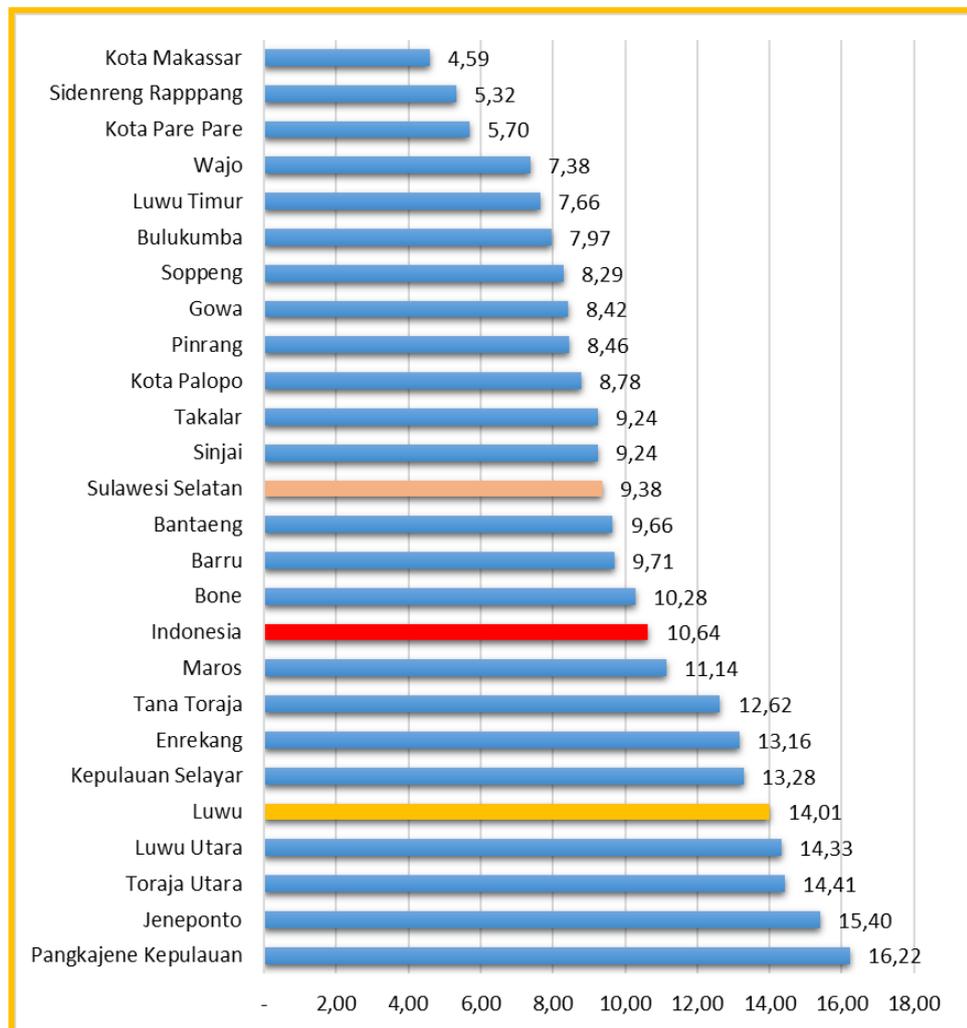
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Oleh karena itu, untuk terwujudnya desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan yang diharapkan, kompetensi aparatur desa menjadi kunci penting.

Kompetensi tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi melakukan apa yang diketahui, menyangkut tanggung jawab lahiriah dan bathiniah. Kompetensi dimaknai sebagai keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan kedalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, kontinyu sehingga membuat seseorang menjadi kompeten.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, rendahnya kompetensi ini sangat dirasakan dimasa kini. Bergulirnya dana desa sejak tahun 2016, tidaklah terlihat semakin meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, tetapi justru semakin pasif dan cenderung menunggu apa yang hendak dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kurangnya prestasi desa maupun desa yang berprestasi, baik secara regional maupun nasional.

Disisi lain, jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu yang mencapai 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018 sebagian besar adalah penduduk desa, mengingat di Kabupaten Luwu terdapat 207 desa dan 20 kelurahan. Oleh karena itu, jika angka kemiskinan Kabupaten Luwu, yang memiliki persentase terbesar ke-5 di Provinsi Sulawesi Selatan ingin diturunkan, maka peran pemerintahan desa yang aktif menjadi suatu keharusan. Pemerintahan desa harus mampu memberdayakan masyarakat desa dan meyakinkan masyarakat desa untuk bebas dari belenggu kemiskinan maupun golongan penduduk miskin.

Gambar 4.8
Grafik Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017



Sumber: BPS Tahun 2018

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
 Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
 “Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan”

Permasalahan	Akar masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya pemahaman perangkat desa atas peranannya dalam meningkatkan kualitas pembangunan
	Kurang berhasilnya implementasi kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa

8. Rendahnya nilai investasi.

Tumbuhnya perekonomian daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Kemampuan daerah dalam mengalokasikan factor-faktor produksi yang dimilikinya melalui pertambahan jumlah dan kualitas berakibat kepada penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi yang antara lain ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang handal, adanya kemudahan akses dalam memperoleh permodalan serta peran serta wirausaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai dari investasi dan mendorong masyarakat untuk mampu berusaha meningkatkan pendapatan harus dimaksimalkan melalui rumusan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan.

Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) antara tahun 2015 hingga tahun 2018 di Kabupaten Luwu mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2015, realisasi investasi mencapai Rp567,97 milyar, tetapi pada tahun 2018 hanya Rp16,69 milyar. Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Luwu maupun perhitungan perekonomian oleh berbagai kalangan, maka diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi di daerah ini.

Wirausaha dikalangan generasi muda juga belum berkembang, dimana pada tahun 2018 wirausaha muda hanya sebesar 0,50% dari jumlah penduduk. Hal ini juga mempengaruhi investasi dari luar karena investor membutuhkan tenaga-

tenaga yang memiliki kemampuan berusaha untuk memberikan keyakinan merealisasikan investasi.

Dalam kerangka peningkatan investasi, berbagai indikator yang perlu diperhatikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Indikator Perkembangan Investasi
Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	7	7	7	7	7
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	2	2	2	2	2
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel	10	13	14	14	14
Lama Proses perizinan	1-3 hari	1-3 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	3	3	4	4
Jumlah/ Macam Pajak	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
Jumlah/ Macam Retribusi	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Luwu

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Rendahnya nilai investasi” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Rendahnya Nilai Investasi”

Permasalahan	Akar masalah
Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya pemasaran investasi daerah terlihat dari menurunnya nilai riil investasi
	Rendahnya kemampuan ber-wirausaha dikalangan generasi muda

9. Belum Optimalnya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan.

Hakikat penegakan hukum antara lain adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintah daerah

memegang tanggung jawab atas tegaknya hukum di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah harus menjadi teladan dalam ketaatan maupun penegakan terhadap hukum.

Terdapat berbagai peraturan perundangan di tingkat daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah diberbagai bidang untuk ditegakkan. Tidak hanya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga pada aspek lain seperti perlindungan terhadap warga negara, tata ruang, lingkungan, perizinan, dan lain-lain. Tingkat penegakan hukum di Kabupaten Luwu saat ini kondisinya kurang dapat dijelaskan karena kurangnya data yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan pemenuhan hak azasi manusia, hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meskipun belum tersedia data yang lengkap, beberapa indikator dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan bahwa pemenuhan hak azasi manusia, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak menjadi suatu permasalahan pembangunan di Kabupaten Luwu. Rangkaian data tersebut antara lain adalah, indeks pemberdayaan perempuan Kabupaten Luwu pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 61,61 berbanding 71,74, bahkan angka tahun 2017 ini lebih rendah dari capaian pada tahun 2013 yang mencapai 63,05.

Data lainnya adalah kejahatan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak pada tahun 2014 dan 2015 mencapai 56 kasus, perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2018 mencapai 30 korban, sedangkan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mencapai 8 kasus, dan terdapat 31 perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Kabupaten Luwu.

Pembangunan daerah membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Luwu adalah meningkatkan partisipasi publik dibidang perencanaan, yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam perumusan kebijakan, misalnya dalam Musrenbang maupun forum perangkat daerah. Dalam kaitan itu, perangkat daerah ke depan harus mendata aspirasi masyarakat dan merumuskan formula untuk menentukan mana yang didahulukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap percaya bahwa forum partisipasi yang dilaksanakan adalah benar-benar dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam kaitan pengendalian dan evaluasi, partisipasi masyarakat ditunjukkan antara lain dengan adanya pengaduan ataupun keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan keterlibatan dibidang perencanaan, dari aspek pengendalian dan evaluasi ini juga perlu mendapat perhatian yang serius dengan memberikan tanggapan dan penyelesaian atas segala pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, agar tidak tumbuh rasa pesimis ataupun apatis dihati masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selain itu, kebutuhan akan regulasi sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah belum terpenuhi secara maksimal. Penyusunan regulasi di Kabupaten Luwu masih menghadapi kendala. Rancangan regulasi yang telah disusun perangkat daerah tidak dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya partisipasi publik dalam pembangunan” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Belum optimalnya partisipasi publik dalam Pembangunan”

Permasalahan	Akar masalah
Kurang optimalnya pengundangan dan penegakan produk hukum daerah	Ketersediaan aturan di tingkat daerah belum maksimal

	Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA
Rendahnya keberdayaan perempuan	Kurangnya kesempatan dan motivasi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

10. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Selain tanahnya yang subur, juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali untuk diolah. Potensi tambang emas, Batu Gamping, Granodiorit, Kuarsa, Batu Sabak, Andesit, Basalt, Gabro, Diorit, Monzonit, Besi, dan Lempung merupakan bahan galian yang terdapat di daerah ini. Kabupaten Luwu juga mempunyai potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu Galena, Hematit, Tembaga, Besimanganis dan Emas.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut di atas secara maksimal tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Luwu harus menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dalam memanfaatkan potensi tersebut. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung di-*overlay*-kan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Di samping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat

pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu selama periode tahun 2014-2018 belum maksimal. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten pada tahun 2018 baru mencapai 39,22%, menurun jauh dibandingkan angka pada tahun 2014 yang mencapai 100%. Demikian halnya dengan pengelolaan sampah, meskipun dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi masih belum maksimal, dimana pada tahun 2018 rata-rata penanganan sampah masih di bawah 84%.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Menurunnya kualitas lingkungan hidup” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Menurunnya kualitas lingkungan Hidup”

Permasalahan	Akar masalah
Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kurang maksimal	Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup terhadap berbagai kegiatan yang mengeksplorasi SDA
	Kurangnya pemahaman masyarakat atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

11. Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi.

Bencana alam atau musibah yang menimpa disuatu daerah dapat saja datang secara tiba-tiba, sehingga masyarakat yang berada di lokasi musibah bencana, tidak sempat melakukan antisipasi pencegahan terhadap musibah tersebut. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin topan dan kebakaran sering terjadi yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat. Dengan seringnya bencana alam yang terjadi, diperlukan manajemen risiko bencana (*disaster risk management*) yang baik untuk penanganan bantuan terhadap bencana secara lebih baik dan sistematis. Permasalahan yang timbul adalah

masih banyaknya warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang apa itu bencana, bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, sehingga risiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut seminimal mungkin, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana tersebut.

Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), terkait dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi manajemen puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengorganisasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*). Tujuan dari manajemen risiko bencana antara lain: (1) mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat; (2) mengurangi penderitaan korban bencana; (3) mempercepat pemulihan; dan (4) memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Potensi bencana di Kabupaten Luwu adalah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan abrasi pantai. Kejadian bencana pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu, Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jenis dan Lokasi Bencana (Kelurahan/Desa)		
		Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor
1	Larompong	Rante Belu	<ul style="list-style-type: none"> • Larompong • Rantebelu • Lumaring • Binturu • Riwang • Buntu Matabbing • Bilante 	Rante Belu
2	Larompong Selatan	Bone Pute		
3	Suli	Cimpu	<ul style="list-style-type: none"> • Suli • Cimpu • Botta • Lempopacci 	
4	Suli Barat		Lindajang	<ul style="list-style-type: none"> • Poringan • Kaladi Darussalam
5	Belopa	<ul style="list-style-type: none"> • Tanamanai • Senga Selatan 		

No.	Kecamatan	Jenis dan Lokasi Bencana (Kelurahan/Desa)		
		Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor
6	Kamanre	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga Eja • Cilallang • Salu Paremang 		
7	Belopa Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Lebani • Sabe 		
8	Bajo			
9	Bajo Barat		<ul style="list-style-type: none"> • Bonelemo • Kadong-Kadong 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampeang • Kadong-Kadong • Lemo Barat • Lemo Utara
10	Bassesangtempe			
11	Latimojong			<ul style="list-style-type: none"> • Balla • Tabang
12	Bassesangtempe Utara			
13	Bupon		Noling	Noling
14	Ponrang	<ul style="list-style-type: none"> • Padang Sappa • Padang Subur 		
15	Ponrang Selatan			
16	Bua	Barowa		Sakti
17	Walentrang			
18	Walentrang Timur			
19	Lamasi	Setiarejo		
20	Walentrang Utara	Bosso Timur		
21	Walentrang Barat	Lempe Pasang		Ilan Batu Uru
22	Lamasi Timur		<ul style="list-style-type: none"> • Pelalan • Bululondong • Salupao • Pompengan Pantai • Pompengan Tengah • Pompengan Induk • Pompengan Utara 	
Jumlah		15	15	11

Sumber: - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Pemadam Kebakaran

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jenis bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Luwu adalah kebakaran, banjir dan tanah longsor pada beberapa kelurahan dan desa, yang menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa. Disamping itu, juga terjadi bencana angin kencang/puting beliung yaitu di Kelurahan Bone Pute Kecamatan Larompong Selatan.

Pada tahun 2016, korban bencana merupakan yang paling tinggi selama periode tahun 2014-2018 yaitu mencapai 1.318 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 978 jiwa. Dalam hal penanganan korban bencana, pemerintah daerah Kabupaten Luwu masih belum mampu bekerja secara maksimal, terlihat dari korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana

tanggap darurat lengkap pada tahun 2018 hanya mencapai 3,23% dari 186 korban, sedangkan pada tahun 2017 baru mencapai 20,11% dan 30,04% pada tahun 2016.

Berfluktuasinya kemampuan penanganan bencana menunjukkan kurangnya kapasitas manajemen penanggulangan bencana. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih Tinggi”

Permasalahan	Akar masalah
Belum optimalnya manajemen penanggulangan bencana	Masih terbatasnya sarana prasarana dan kualitas aparatur penanggulangan bencana
	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Luwu.

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang pemenuhannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Pendidikan

- a. Angka melek huruf baru mencapai 93,14%.
- b. Rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,97 tahun;
- c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD baru mencapai 35,15%, SD/ sederajat 97,55%, SMP/ sederajat 96,44%, dan SMA/ sederajat 70,12%.

- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat baru mencapai 97,78%, SMP 98,32%, SMA/ sederajat 74,85%.
 - e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat baru mencapai 95,83%, SMP/ sederajat 81,60%, dan SMA/ sederajat tidak tersedia data.
 - f. Angka kelulusan SD/ sederajat baru mencapai 97,85%, SMP/ sederajat 95,80%, SMA/ sederajat 97,65% (2016).
 - g. Angka Melanjutkan jenjang pendidikan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat baru mencapai 95,29%, dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat baru mencapai 95,24%.
 - h. Persentase ruang kelas SD/ MI kondisi bangunan baik hanya 23,90% (2018), menurun dari 26,47% pada tahun 2014.
 - i. Rasio guru/ murid jenjang pendidikan dasar baru mencapai 860,12 per 10.000 murid.
 - j. Rasio guru/ murid perkelas rata-rata jenjang pendidikan dasar hanya 0,03 per 1.000 murid.
 - k. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV dari semua jenjang pendidikan baru mencapai 87,05%.
 - l. Tidak tersedia data Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT), Angka Putus Sekolah, persentase bangunan SD/ sederajat kondisi baik, persentase bangunan SMP/ sederajat kondisi baik, persentase ruang kelas SMP/ sederajat kondisi baik
 - m. Kurangnya ketersediaan guru dan murid pada jenjang pendidikan menengah dan khusus.
 - n. Distribusi guru belum merata.
 - o. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan.
 - p. Minimnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
2. Kesehatan
- a. Angka Harapan Hidup baru mencapai 69,84%.
 - b. Balita gizi buruk mencapai 0,03%.
 - c. Balita gizi kurang mencapai 5,90%.
 - d. Cakupan Puskesmas Pembantu baru mencapai 48,46%.
 - e. Jumlah kematian bayi mencapai 68 kasus, angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) baru mencapai 0,9893.

- f. Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup mencapai 10,86.
 - g. Rasio Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup mencapai 7,55.
 - h. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup mencapai 94,40.
 - i. Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk baru mencapai 0,0001.
 - j. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani baru mencapai 71,00%.
 - k. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 89,78%.
 - l. Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) baru mencapai 87,67%.
 - m. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA baru mencapai 43,48%.
 - n. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mencapai 0,18%.
 - o. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mencapai 0,005 (2017).
 - p. Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS baru mencapai 69,46%.
 - q. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi mencapai 0,005%.
 - r. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 baru mencapai 84,96%.
 - s. Cakupan pelayanan nifas baru mencapai 89,92%.
 - t. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani baru mencapai 58,25%.
 - u. Cakupan pelayanan anak balita baru mencapai 70,22%.
 - v. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat baru mencapai 89,79%.
 - w. Minimnya pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal.
 - x. Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan.
 - y. Minimnya pengetahuan pengembangan lingkungan sehat dan peningkatan pola hidup sehat.
 - z. Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian dan minimnya tenaga medis kesehatan yang mengerti di bidangnya.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
- a. Irigasi kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 36,33%.

- b. Penduduk berakses air minum baru mencapai 80%.
 - c. Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan baru mencapai 47,22%.
 - d. Rumah tinggal bersanitasi baru mencapai 75,45% (2017).
 - e. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 0,21.
 - f. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap hanya sebesar 0,24.
 - g. Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) baru mencapai 21,17%.
 - h. Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) baru mencapai 54,30%.
 - i. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah baru mencapai 16,40.
 - j. Belum tersedia data terkait dengan panjang jaringan tersier, luas lahan budidaya, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, panjang jalan yang memiliki trotoar, jasa konstruksi, penyelenggaraan RTRW, bangunan ber-IMB.
 - k. Belum optimalnya perintisan jalan produksi, perintisan jalan tani dan perintisan jalan tambak
 - l. Belum optimalnya penerapan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Luwu
 - m. Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi.
 - n. Belum optimalnya penyediaan air baku.
 - o. Belum optimalnya pengelolaan dan konservasi sungai, danau
4. Perumahan dan Pemukiman
- a. Rasio rumah layak huni baru mencapai 0,204.
 - b. Permukiman yang tertata baru mencapai 0,000359%.
 - c. Luas lingkungan pemukiman kumuh masih mencapai 206,36 Ha.
 - d. Luasan permukiman kumuh di perkotaan yang tertangani baru mencapai 0,06%.
 - e. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mencapai 0,0164.
 - f. Kurang optimalnya penanganan persampahan regional
 - g. Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (Rumah tangga) regional.
 - h. Masih kurang optimalnya penanganan air.

- i. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi Kabupaten serta lintas daerah kabupaten kota
 - j. Tingginya *backlog* (kepemilikan rumah) di Kabupaten Luwu.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun 2017 baru mencapai 0,52.
 - b. Cakupan pelayanan bencana kebakaran baru mencapai 0,001669.
 - c. Belum tersedia data terkait dengan penegakan Perda,
 - d. Kurangnya Kompetensi anggota dalam pelayanan
6. Sosial
- a. Masih tingginya jumlah PMKS
 - b. Belum efektifnya Penanganan korban bencana
 - c. Masih kurangnya bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan
 - d. Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
 - e. Belum optimalnya Bantuan Korban Bencana Alam
 - f. Minimnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial
 - g. Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat
 - h. Kurangnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dibina
 - i. Masih kurangnya Pemberdayaan Keluarga yang dibina
 - j. Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial.

4.1.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya bukan merupakan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

1. Tenaga Kerja
- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja baru mencapai 64,89%.
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 4,47%.
 - c. Rasio penduduk yang bekerja baru mencapai 95,53.

- d. PDB per tenaga kerja baru mencapai Rp59,99 juta.
 - e. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas baru mencapai 56,07.
 - f. Penduduk Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas, Pekerja Keluarga mencapai 52,74%.
 - g. Masih kurangnya hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja
 - h. Masih kurangnya pelatihan dan kompetensi kerja
 - i. Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - j. Kurangnya perlindungan kondisi lingkungan kerja
 - k. Belum optimalnya persiapan, pemetaan dan pengembangan permukiman transmigrasi
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu baru mencapai 92,52.
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu baru mencapai 61,61.
 - c. Belum terpenuhinya data terpilah gender dan anak
 - d. Belum efektifnya perencanaan responsif gender
 - e. Kurangnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah
 - f. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - g. Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
 - h. Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan
 - i. Kurangnya perlindungan khusus anak
 - j. Masih kurangnya pemenuhan hak anak
3. Pangan
- a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) baru mencapai 86,3.
 - b. Penanganan daerah rawan pangan masih berada pada 5 poin.
 - c. Kebutuhan energi dan protein masyarakat yang semakin meningkat membutuhkan stabilitas dalam jumlah dan mutu keamanan pangan
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat

- e. Distribusi pangan yang kurang merata dan harga pangan yang fluktuatif berakibat menurunnya akses pangan dan menimbulkan kerawanan pangan
 - f. Pola konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
 - g. Masih rendahnya cakupan pengawasan bahan pangan segar dan olahannya
 - h. Masih rendahnya Kapasitas peternak sebagai penghasil pangan dari segi pengetahuan, keterampilan dan permodalan
 - i. Belum tersedianya sarana promosi ternak dan produk pangan asal ternak
4. Pertanahan
- a. Luas lahan Pemda Kabupaten Luwu yang sudah bersertifikat baru mencapai 26 Ha.
 - b. Masih banyak aset Pemda Kabupaten Luwu yang belum lengkap status kepemilikannya.
5. Lingkungan Hidup
- a. Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air
 - b. Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara
 - c. Masih kurangnya luas area tutupan vegetasi
 - d. Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan
 - e. Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin
 - f. Masih kurangnya Ketaatan Industri Terhadap Baku Mutu Air Limbah dan Emisi Udara
 - g. Kurang tutupan vegetasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di lingkup pertamanan
 - h. Minimnya Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - i. Lemahnya pengelolaan data
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Rasio penduduk ber-KTP baru mencapai 0,88.
 - b. Rasio penduduk ber-KK baru mencapai 0,62.
 - c. Rasio bayi ber-akte kelahiran baru mencapai 0,81.
 - d. Rasio pasangan ber-akte nikah baru mencapai 0,15.
 - e. Cakupan penerbitan KTP baru mencapai 87,82%.
 - f. Cakupan penerbitan akte kelahiran baru mencapai 81,31%.

- g. Masih rendahnya kepemilikan akta kematian
 - h. Belum optimalnya profil kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Masih terdapat 9 desa yang belum memiliki kantor pemerintahan desa.
 - b. LSM aktif baru mencapai 20,34% dan belum ada yang berprestasi.
 - c. Masih banyaknya desa tertinggal
 - d. Belum meningkatnya jumlah desa mandiri
 - e. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa
 - f. Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa katagori baik
 - g. Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mencapai 44,45%.
 - b. Jumlah Kampung KB baru mencapai 59.
 - c. OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB baru mencapai 8,82%.
 - d. Ratio akseptor KB semakin menurun dan sebesar 76,22% pada tahun 2018, sedangkan tahun 2014 mencapai 88,72%.
 - e. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cenderung stagnan dan baru mencapai 64,96%.
 - f. Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) semakin meningkat dan mencapai 14,99% pada tahun 2018.
 - g. Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baru mencapai 22,10%.
 - h. Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi baru mencapai 85,23%.
 - i. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita baru mencapai 62,20%.
 - j. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB baru mencapai 51,44%
 - k. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB baru mencapai 35,63%.

- l. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan baru mencapai 9,09%.
 - m. Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan baru mencapai 43,75%.
 - n. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih tinggi yaitu 44,45%.
 - o. Kurangnya Peserta KB baru
9. Perhubungan
- a. Rasio ijin trayek baru mencapai 0,0013
 - b. Layanan angkutan darat baru mencapai 8,04%.
 - c. Kepemilikan KIR angkutan umum baru mencapai 35,60%.
 - d. Pemasangan rambu-rambu baru mencapai 14,43%.
 - e. Masih kurangnya keselamatan dan kenyamanan di jalan raya
 - f. Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengendalian angkutan darat.
 - g. Masih tingginya angka kecelakaan pada LLAJR di Ruas Jalan Kabupaten
 - h. Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah
 - i. Masih banyaknya kendaraan umum tidak layak jalan yang tetap beroperasi
10. Komunikasi dan informatika
- a. Belum optimalnya aksesibilitas serta kapasitas telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika.
 - b. Masih kurangnya ketersediaan perangkat teknologi informasi.
 - c. Belum optimalnya realisasi data Rencana Induk Komunikasi.
 - d. Masih kurangnya pelayanan dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a. Masih kurangnya realisasi koperasi aktif dan sehat dalam kewenangan Kabupaten
 - b. Masih minimnya realisasi usaha kecil yang menjadi usaha menengah
 - c. Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/UKSPPS.
 - d. Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas.

- e. Masih kurangnya realisasi kinerja koperasi binaan (volume usaha, kapasitas produksi, aset dan keuntungan).
- f. Masih rendahnya laju pertumbuhan omset UKM.

12. Penanaman Modal

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baru mencapai 87,01.
- b. Masih rendahnya realisasi PMA
- c. Masih kurangnya realisasi PMDN
- d. Masih kurangnya minat calon investor
- e. Masih kurangnya MOU kerjasama investasi
- f. Belum optimalnya sistem informasi penanaman modal daerah
- g. Kurang efektifnya pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- h. Belum tepatnya Penerbitan perizinan dan non perizinan

13. Olah Raga dan Kepemudaan

- a. Masih kurangnya Cabang Olahraga Berprestasi tingkat nasional
- b. Masih lemahnya pembinaan organisasi Kepemudaan
- c. Masih lemahnya pembinaan kepramukaan
- d. Masih kurangnya Penyelenggaraan event Olahraga prestasi
- e. Kurangnya Keikutsertaan Kabupaten Luwu pada event olahraga
- f. Masih kurang sarana dan prasarana olahraga
- g. Belum efektifnya pembinaan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda.

14. Statistik

- a. Belum meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan Statistik.
- b. Terbatasnya ketersediaan data statistik.

15. Persandian

- a. Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian.
- b. Belum baiknya kinerja persandian statistik dan layanan Pengadaan.

16. Kebudayaan

- a. Masih rendahnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah
- b. Masih kurangnya pelestarian event masyarakat adat

- c. Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya)

17. Perpustakaan

- a. Masih kurangnya kepuasan pengunjung perpustakaan Kabupaten.
- b. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah
- c. Masih kurangnya beberapa sarana prasarana di perpustakaan daerah

18. Kearsipan

- a. Belum optimalnya OPD kabupaten yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kearsipan
- c. Masih kurangnya khasanah arsip Statis di Depo Arsip Luwu

4.1.2.3 Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB baru mencapai Rp2,69 trilliun.
- b. Belum optimalnya pertumbuhan sektor perikanan
- c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan baik tangkap, budidaya dan garam
- d. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha perikanan
- e. Larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan
- f. SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang belum mandiri dan berdaya saing

2. Pariwisata

- a. Belum meningkatnya Kunjungan Wisatawan
- b. Belum bertambah dan berkembangnya destinasi daya tarik wisata
- c. Kurangnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri
- d. Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif
- e. Belum berkembangnya Industri pariwisata sebagai destinasi utama

- f. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM ekonomi kreatif
- g. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pariwisata untuk dapat bersaing

3. Pertanian

- a. Belum optimalnya pengelolaan potensi pertanian tanaman pangan (\pm 52.738 Ha) dan hortikultura (\pm 7.953 hektar).
- b. Belum optimalnya pengelolaan potensi perkebunan yaitu: Kakao (\pm 36.762 Ha), Kelapa (\pm 4.711 Ha), Cengkeh (\pm 14.280 Ha), Kopi (\pm 4.627 Ha), Lada (\pm 321 Ha), Sagu (\pm 1.462 Ha), komoditas lain-lain (\pm 2.833 Ha).
- c. Nilai kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB baru mencapai Rp4,25 triliun.
- d. Nilai kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB baru mencapai Rp1,09 triliun.
- e. Total produksi pertanian pangan dan palawija menurun dari 371.142,00 ton (2015) menjadi 349.454,90 ton (2017).
- f. Nilai kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB baru mencapai Rp2,62 triliun.
- g. Total produksi tanaman perkebunan menurun dari 65.455,06 ton (2015) menjadi 39.848,00 ton (2017).
- h. Nilai kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB belum dapat dihitung.
- i. Masih kurangnya penerapan Inovasi Teknologi Hortikultura
- j. Produksi dan produktivitas ternak lokal relatif rendah
- k. Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ternak unggul
- l. Masih kurangnya ketersediaan hijauan pakan ternak unggul yang tahan kekeringan
- m. Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan oleh masyarakat
- n. Adanya serangan bibit penyakit ternak yang cepat , sporadis dan mewabah terjadi secara tidak terduga
- o. Kurangnya Pengawasan terhadap Obat Hewan
- p. Mutu dan Keamanan Produk Pangan Asal Ternak belum sepenuhnya terjamin

4. Perdagangan

- a. Nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB baru mencapai Rp1,29 triliun.
- b. Masih lambatnya pertumbuhan dan rendahnya kinerja pengembangan usaha perdagangan.
- c. Belum efektifnya pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan
- d. Belum optimalnya pengawasan distribusi barang.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar.
- f. Belum optimalnya perlindungan konsumen, dan pengawasan barang beredar/jasa.
- g. Belum optimalnya pengamanan tata niaga komoditas penting.

5. Perindustrian

- a. Nilai kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB baru mencapai Rp541,30 milyar.
- b. Belum optimalnya pembangunan industri Kabupaten Luwu
- c. Masih rendahnya Kinerja pengembangan Industri
- d. Kurangnya penguatan Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah
- e. Masih minimnya Kerjasama SDM berkompetensi Industri
- f. Masih kurangnya Mutu/Daya Saing, Standarisasi dan Sertifikasi Produk
- g. Masih rendahnya SDM pelaku IKM
- h. Belum Optimalnya Promosi Produk Unggulan Daerah

4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan fungsi yang melekat pada pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

1. Perencanaan Pembangunan

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan tatacara perencanaan pembangunan daerah;
- b. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan;
- c. Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah;
- d. Lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
- e. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia.

2. Keuangan

- a. Belum baiknya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja daerah
- b. Kurangnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah
- d. Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia.
- e. Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/ data/ dokumen/ informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah.
- f. Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah
- g. Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak
- h. Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp106,874 miliar atau 8,08% dari total pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

- a. Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik.
- b. Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan.
- c. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.
- d. Kurangnya akurasi data kepegawaian.
- e. Masih rendahnya kepuasan penerima layanan diklat.
- f. Kurangnya Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat.
- b. Masih kurangnya peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik.
- c. Masih kurangnya peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih terbatas pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsionalrekaayasa dan fungsional analisis kebijakan publik yang mendukung pelaksanaan kelitbangan.
 - b. Belum optimalnya penguasaan metodologi dan analisis penelitian bagi Pejabat Fungsional Peneliti, Pejabat Fungsional Perekayasa dan staf Balitbangda Kabupaten Luwu yang mengacu pada Permendagri RI Nomor 17 Tahun 2016.
 - c. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi hasil-hasil penelitian dan dalam perencanaan, pelaksanaan danevaluasi kebijakan pemerintah Daerah.
 - d. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kelitbangan
6. Pengawasan
- a. Belum optimalnya tindak lanjut terhadap temuan BPK dan BPKP.
 - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan.
 - c. Belum efektifnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
7. Sekretariat DPRD
- a. Belum efektifnya penataan perundang undangan dan layanan aspirasi.
 - b. Belum tepatnya laporan akuntabilitas kegiatan.
 - c. Belum efektifnya layanan administrasi, pemeliharaan sarpras, Kapasitas SDM dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - d. Belum efektifnya pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
8. Administrasi Pemerintahan
- a. Masih rendahnya kinerja pelayanan pemerintahan
 - b. Masih kurangnya kinerja Pelayanan hukum yang ditangani
 - c. Belum lengkapnya dokumen peraturan perundang-undangan daerah dan kurangnya produk hukum yang terdokumentasikan.
 - d. Masih kurangnya dokumen kebijakan dan evaluasi.
 - e. Masih kurangnya pembinaan terhadap kelembagaan kelompok/badan/ lembaga/organisasi
 - f. Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah di berbagai bidang.

- g. Lemahnya kinerja pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- h. Belum optimalnya kinerja pengadaan barang/jasa.
- i. Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP).
- j. Masih kurangnya penerapan *E-GOVERNMENT*.
- k. Masih rendahnya kualitas dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan memperhatikan setiap isu strategis yang muncul, dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Luwu lebih signifikan dan memiliki keterkaitan dengan perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, maka akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan.

4.2.1 Penelaahan Isu Strategis Internasional

Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh negara untuk merubah paradigma pembangunannya, dari ekonomi-konvensional menjadi ekonomi-ekologis. Untuk itu telah dihasilkan 154 perjanjian internasional dan *multilateral agreement* yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan isu lingkungan global. Indonesia telah meratifikasi 14 perjanjian internasional di bidang lingkungan, tetapi sosialisasi, pelaksanaan dan penataan terhadap perjanjian internasional tersebut

kurang mendapat perhatian sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan nasional belum dirasakan secara maksimal. Selain itu, masukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai konvensi internasional juga masih terbatas mengingat lemahnya kapasitas institusi, sumber daya manusia, serta sistem perwakilan Indonesia di berbagai konvensi tersebut. Dengan aktifnya Indonesia pada perjanjian perdagangan baik regional seperti AFTA dan APEC atau global seperti WTO, maka pembangunan nasional dan daerah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan.

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs). Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik.

Selain SDGs, isu internasional juga berkisar dalam hal penerapan *green economic* global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, penerapan sumber energi alternatif, antisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global*

warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

Penerapan isu internasional dalam perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu sudah dilaksanakan sejak lama. Namun realisasi kebijakan pembangunan yang telah disusun masih memiliki beberapa kekurangan sehingga pencapaian target kinerja masih belum optimal. Penghapusan kemiskinan dan transformasi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan belum tercapai sepenuhnya sehingga perlu evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

4.2.2 Penelaahan Isu Strategis Nasional

Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa serta memperkuat daya saing antarbangsa khususnya menghadapi ekonomi ASEAN merupakan salah satu yang sedang diperjuangkan pencapaiannya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, beberapa isu strategis nasional yang perlu diperhatikan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Keadaan pada saat Rasio Ketergantungan semakin menurun hingga berada di bawah 50% disebut 'Jendela Kesempatan' yang hanya berlangsung satu kali dalam seluruh perjalanan kehidupan penduduk. Ledakan usia produktif yang akan dijangkau oleh Indonesia pada tahun 2020-2035 adalah sebuah peluang dan tantangan. Pada periode itu, setidaknya 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Namun, bukan semata peluang untuk bangkit, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga bisa menjadi awal keruntuhan sebuah bangsa.

Bonus demografi adalah peluang yang sangat strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia

produktif. Sebaliknya bonus demografi akan menjadi kejatuhan suatu bangsa atau daerah jika tidak dimanfaatkan dengan mempersiapkan diri dalam menyongsong era tersebut.

Pentingnya pembangunan generasi muda harus merupakan objek utama dari program penguatan pendidikan pemerintah saat ini. Perbaikan SDM pemuda perlu terus ditingkatkan agar cita-cita mencetak generasi kreatif dapat terwujud. Kehadiran bonus demografi menjadi suatu peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara baik agar memberikan keuntungan maksimal di masa mendatang. Agar bonus itu juga menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota yaitu terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan
- d. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- g. Pelayanan kesehatan balita
- h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
- m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
- s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. Pelayanan informasi rawan bencana;

- v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

3. Pencapaian Universal Access 100-0-100

Melalui gerakan Nasional 100-0-100 yang juga menjawab tantangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berupa 100% akses air minum (air bersih), 0 hektar permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi menjadi solusi peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. Gerakan tersebut dapat diwujudkan dengan peran serta ahli di berbagai aspek, khususnya ahli di bidang penyehatan lingkungan. Pemenuhan infrastruktur di bidang penyehatan lingkungan tentu dibutuhkan apabila Indonesia ingin mencapai target tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merumuskan langkah strategis pengadaan infrastruktur bidang penyehatan lingkungan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan tiga pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui tiga pendekatan tersebut, diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat tercapai.

Untuk dapat mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan pada RPJPN 2005-2025, perlu adanya dukungan penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya/Permukiman yang handal. Berdasarkan RPJPN, pembangunan Bidang Cipta Karya berperan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia antara lain: • Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan serta

mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat • Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.2.3 Penelaahan Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuously*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakatkan senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan RS Regional sehingga menjangkau pelayanan kesehatan antar wilayah Kabupaten/Kota, Ibu Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat

utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

3. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 Km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan.

4. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bias melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48% pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan SDM yang berkualitas. Sulawesi Selatan memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus

hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/diekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

7. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian "Peningkatan Nilai Tambah Industri Lokal untuk Mendongkrak Daya Saing Ekonomi", yang seharusnya lebih meningkat.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang pertama yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas

dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking), serta kelima adalah meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha.

Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi selatan dalam hal produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil.

4.2.4 Penelaahan RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025

Keadaan ideal yang ingin diwujudkan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 adalah kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam nuansa religi. Keinginan ini sangat berkontribusi bagi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu yang penekanannya pada keterampilan, kemandirian lokal dan keagamaan. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap keempat periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan

Kemajuan ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai indeks pembangunan manusia bidang pendidikan dan kesehatan yang secara kuantitatif tinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam daya saing serta mewujudkan tatanan (*choices dan voices*) yang beradab dan semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara umum.

2. Kemandirian

Kemandirian ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khususnya produk

derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahap ini kemandirian juga ditandai oleh pemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung. Keberdayaan masyarakat, dengan kelembagaan bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih terwujud.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan ditandai dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing, struktur perekonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial-politik yang semakin demokratis serta kebudayaan yang maju. Kesejahteraan ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang semakin tinggi dan merata, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka kemiskinan yang semakin rendah, transformasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan makin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perekonomian daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi tekanan pada RPJPN. Pada tahap ini, upaya pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global.

4. Nuansa religi yang semakin melandasi sendi-sendi kehidupan.

Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk mewujudkan kecerdasan spiritual masyarakat dimana ketertiban, keamanan, saling percaya dan kebajikan sosial terjemakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, kebudayaan daerah semakin memmanifestkan identitas daerah yang menunjukkan keunikan sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional dan global.

4.2.5 Penelaahan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Dalam perencanaan pembangunan daerah, pengaruh dari regional perbatasan wilayah sangat signifikan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah sekitarnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

akselerasi capaian kinerja pembangunan, maka keselarasan setiap rumusan kebijakan perlu diintegrasikan..

Kabupaten Luwu merupakan bagian wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di pesisir Teluk Bone, menghubungkan bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan bagian utara melalui jalan Trans Sulawesi hingga ke Sulawesi Tengah dan Tenggara. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan sinergi dengan pembangunan daerah sekitar. Oleh karena itu, penting dilakukan penelaahan RPJMD Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu. Berikut substansi RPJMD daerah kabupaten/kota sekitar Kabupaten Luwu, yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah pada periode pembangunan saat ini.

Tabel 4.14
Persandingan Substansi Utama RPJMD
Kabupaten Wajo (2018-2023), Kota Palopo (2018-2023) dan Kabupaten Luwu Utara (2016-2021)

Elemen	Kabupaten Wajo	Kota Palopo	Kabupaten Luwu Utara
Visi	Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera	Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023	Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah 2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman 3. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan; 2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrstruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau; 3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan; 4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampinagan bisnis; 5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya 2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni 3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata 5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup 6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah 7. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah 2. Meningkatkan kualitas manusia seutuhnya 3. Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah 4. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat 2. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas 3. Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani 4. Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah 5. Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religious 2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu 5. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat

Elemen	Kabupaten Wajo	Kota Palopo	Kabupaten Luwu Utara
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan 7. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya 8. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah 9. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa 10. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif 11. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan 12. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan 13. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan 14. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar 3. Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5. Terpeliharanya kehidupan religius masyarakat 6. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan 5. Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah 6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan 3. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan 4. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta

Elemen	Kabupaten Wajo	Kota Palopo	Kabupaten Luwu Utara
	<p>perempuan dalam pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatnya konektivitas wilayah 8. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah 9. Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi unggulan 10. Meningkatnya kualitas hidup lapisan masyarakat miskin 11. Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha 	<p>Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 9. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja 10. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas 11. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah 	<p>penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik 6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat 7. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan 8. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan 9. Meningkatnya ruang apreasi keragaman budaya dan kekayaan budaya 10. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 11. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM 12. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh 13. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa 14. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA 15. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata 16. Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan 17. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/ pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan 18. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat 19. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota 20. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan

Elemen	Kabupaten Wajo	Kota Palopo	Kabupaten Luwu Utara
			barang dan jasa 21. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industry 22. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industry 23. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat 24. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat 25. Menurunnya j 26. umlah pemakai narkoba 27. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana

4.2.6 Penelaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu yang diimplementasikan dari tahun 2011 hingga 2031, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Luwu yang memiliki daratan seluas 3.000,25 km² dan garis pantai sepanjang 139,92 km, memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

Penataan ruang Kabupaten Luwu bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berbasis pada pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten;
- c. pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah;
- e. pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budi daya;

- f. pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budi daya lainnya;
- g. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- h. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- i. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten;
- j. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung;
- k. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2.7 Isu Strategis Kabupaten Luwu

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pemerintah harus menjamin penyelenggaraan pemerintahan hadir dengan semangat smart, professional, inovatif, unggul, responsif dan bersih. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan *core business* dalam mengimplementasikan

pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintah dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance*, yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

Terkait dengan hal ini, berbagai upaya terus dilakukan di Kabupaten Luwu, seiring dengan semakin kuatnya penekanan terhadap upaya membentuk birokrasi yang ideal serta kondusif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, banyak permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah antar lain: *pertama*, masih rendahnya profesionalisme aparatur daerah yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif. Hal ini di tandai dengan masih rendahnya indeks reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2017 hanya mendapatkan nilai “CC”. Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan.

Selain itu akuntabilitas, responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan standar kinerja birokrasi seperti yang diharapkan. Hal lainnya adalah masih belum tumbuhnya kesadaran yang tinggi untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Cara-cara lama masih berlangsung hingga kini, sejak penentuan program/kegiatan, indikator, target, hingga penetapan kerangka pendanaan yang belum berorientasi pada hasil menyebabkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan masih belum optimal serta ketersediaan data yang belum dapat diandalkan.

Kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik yang memperburuk citra birokrasi dan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Budaya birokrasi yang masih buruk serta birokrasi yang tambun berimplikasi pada kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. *Ketiga*, pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi, juga menjadi penyumbang terhadap masih terhambatnya kinerja birokrasi sehingga lemah dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang profesional, meliputi :
 - Integritas, yaitu ukuran kualitas moral aparat pajak yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
 - Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan petugas pajak terhadap setiap ketentuan yang berlaku;
 - Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
 - b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu setiap aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggung jawab dan bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Luwu harus memastikan layanan kesehatan dan pendidikan diberikan berdasarkan pada standar layanan minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuously*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila

dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Demikian halnya dengan layanan di bidang pendidikan, harus terus ditingkatkan agar SDM Kabupaten Luwu memiliki daya saing yang dibutuhkan dalam persaingan global. Beberapa indikator bidang pendidikan di Kabupaten Luwu menunjukkan perkembangan yang stagnan dan bahkan cenderung menurun. Hal ini harus diperbaiki dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang baik, yang sesuai kebutuhan dan kondisi, agar ketertinggalan dapat dikejar bahkan menjadi lebih baik dimasa depan.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Luwu harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Kabupaten Luwu yang strategis menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun demikian hal tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hanya akan menjadikan Kabupaten Luwu tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha.

Pemerintah Kabupaten Luwu juga harus menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, serta pengaktifan koperasi dan melahirkan wirausaha. Sebagai akumulasi dari terpenuhinya keseluruhan kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan dasarnya ialah pemerintah harus menjamin dan mengevaluasi tingkat kebahagiaan masyarakat.

Oleh karena itu, selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan per kapita warga Kabupaten Luwu saat ini memang sudah meningkat dan mencapai 40,16 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasakan oleh semua warga. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2018 Kabupaten Luwu memiliki ketimpangan pendapatan dengan kategori moderat (0,362). Selain itu, jumlah orang miskin di Kabupaten Luwu masih cukup tinggi yaitu 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan SDM yang berkualitas. Kabupaten Luwu telah memasuki bonus demografi, dimana mayoritas warga berada pada usia produktif. Pada tahun 2017, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) adalah 220.258 jiwa atau sebesar 61,83% dari total penduduk Kabupaten Luwu. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas SDM jika dibarengi dengan kualitas yang unggul. Namun IPM Kabupaten Luwu saat ini berada di angka 69,60, berada di peringkat 9 dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Luwu adalah 7,97 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Luwu hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan

pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Meskipun pemerintah desa adalah pelaku utama pemberdayaan masyarakat desa, namun tugas ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di pusat, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, forum musyawarah desa, BUM Desa, BKAD, forum kerja sama desa dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah:

- Membentuk desa sebagai masyarakat berpemerintahan yang utuh, demokratis dan kuat antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat.
- Membangun kepemimpinan desa yang maju, kuat dan merakyat melalui kaderisasi.
- Mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat desa dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, memastikan kebijakan dan program pembangunan desa berpihak pada warga miskin, serta melakukan pendampingan pada masyarakat desa secara berkelanjutan yang sesuai dengan prioritas, potensi, dan kearifan lokal.

Implementasi yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial dan ekonomi, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal.

Di bidang perlindungan sosial dan ekonomi, kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk menanggulangi masalah bencana alam, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bantuan kepada masyarakat

miskin, termasuk didalamnya fasilitas pembentukan BUMDes dan pengembangan kawasan perdesaan. Sementara di bidang peningkatan kapasitas, kebijakan pemberdayaan masyarakat desa harus menjawab masalah sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD, masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur pendukung. Untuk bidang peningkatan aksesibilitas, harus diarahkan untuk menyediakan akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pembiayaan.

Selanjutnya, di bidang pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana. Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat desa tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah.

5. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Iklim Investasi

Kabupaten Luwu memiliki luas 3.000,25 Km persegi, mencakup 22 kecamatan dan 207 desa. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Meskipun seluruh desa sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, namun kualitas infrastruktur jalan masih banyak yang sangat buruk. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Luwu sampai saat ini masih menjadi daerah yang rawan terdampak bencana banjir. Untuk mendukung pemenuhan hak-hak dari masyarakat, maka dibutuhkan pengintegrasian, pemerataan dan peningkatan infrastruktur bersamaan dengan pengendalian dan pengawasan agar pembangunan terwujud secara berkelanjutan.

Terkait dengan peningkatan jalan, masih terdapat 77 ruas jalan sepanjang 344,48 km yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya. Data ruas dan panjang jalan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15
Prioritas Penanganan Jalan di Kabupaten Luwu

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)	Rencana Peningkatan (km)	Lokasi (Kecamatan)
1	Temboe - Laloa	6.56	3.56	Larompong Selatan
2	Sampano - Malewong	5.85	3.45	Larompong Selatan
3	Bonepute - Ponnori	1.92	1.92	Larompong Selatan
4	Jalan dalam Kota Bonepute	2.00	1.85	Larompong Selatan
5	Dadeko - Pelabuhan	2.36	2.36	Larompong Selatan
6	Komba - Binturu	8.91	7.31	Larompong
7	Keppe - Buntu Matabing	4.70	1.50	Larompong
8	Keppe - Lalento	4.57	3,17	Larompong
9	Komba - Lewong	4.69	4.29	Larompong
10	Larompong - Lumaring	6.00	3.80	Larompong
11	Murante - Buntu Barana	2.88	1.88	Suli
12	Suli - Pelabuhan	2.64	2.44	Suli
13	Kasiwiang - Cakkeawo	1.64	1.44	Suli
14	Botta - Buntu Kunyi	3.27	2.27	Suli
15	Cimpu - Malela	1.36	1.36	Suli
16	Papakayu - Kaili	5.48	1,36	Suli Barat
17	Lindajang - Salubua	4.51	2.71	Suli Barat
18	Muhajirin - Salu Lompo	4.12	4.12	Suli Barat
19	Suli - Lindajang	8.34	2.60	Suli Barat
20	Jalan dalam Kota Lindajang	1.97	1,17	Suli Barat
21	Kalobang - Walenna	2.86	1.86	Belopa
22	Jl. Dlm Kota Belopa	5.66	2.66	Belopa
23	Jl. BWK D	3.00	3.00	Belopa
24	Seppong - Lonnyi	5.60	3.50	Belopa Utara
25	Barana Pance - Pacoci	3.18	2.38	Belopa Utara
26	Jl. BWK C	4.00	4.00	Belopa Utara
27	Cilallang - Kampung Wara	5.26	4.26	Kamanre
28	Jalan dalam Kota Cilallang	2.04	1.64	Kamanre
29	Cilallang - Sumabu	6.87	6.07	Kamanre
30.	Kariako - Paccerrakkang	4.51	3.11	Ponrang Selatan
31	Olang - Bassiang	5.38	3.78	Ponrang Selatan
32	Olang - Paccerrakkang	3.49	3.49	Ponrang Selatan
33	Lanipa - Lampuara	4.59	1.99	Ponrang Selatan
34	Jalan dalam Kota Ponrang	4.15	2.00	Ponrang
35	Parekaju - Tampumia	10.10	9.90	Ponrang
36	Padang Sappa - Loa	5.44	4.00	Ponrang
37	Lumi - Labembe	4.57	0.80	Ponrang
38	Noling - Kamburi	4.22	3.02	Bupon
39	Noling - Tampumia	9.11	7.11	Bupon
40	Tanjung - Padang Ma'bud	5.70	5.70	Bupon
41	Bua - Sappang	19.83	13.83	Bua
42	Lare lare - Tampa	4.38	3.58	Bua
43	Lamone - Bukit Harapan	7.75	4.75	Bua
44	Jambu - Langkidi	3.56	1.76	Bajo
45	Rumaju - Saga	6.67	6.47	Bajo

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)	Rencana Peningkatan (km)	Lokasi (Kecamatan)
46	Tallang bulawang - Pandoso	2.96	2.96	Bajo
47	Bajo - Kadundung	20.41	3.50	Bajo Barat
48	Sampeang - Lekkopini	5.66	2.86	Bajo Barat
49	Kadundung - Rante Balla	8.06	8.06	Latimojong
50	Kadundung - Pajang	8.03	5.00	Latimojong
51	Rante Balla - Ulsalu	12.9	12.50	Latimojong
52	Rante Balla - Beuma	23.93	22.43	Latimojong/Bastem
53	Bonglo - Karatuan	2.06	2.06	Bastem Utara
54	B.Sitanduk - Tombang	6.38	3.00	Walenrang
55	Bulo - Saragi	3.71	3.71	Walenrang
56	Jl. Dlm Kota Walenrang	4.88	2.00	Walenrang
57	Batu Sitanduk - Rante Damai	8.70	3.10	Walenrang/Walenrang Timur
58	Rante Damai - Lamasi Pantai	11.21	8.50	Walenrang Timur
59	Rante Damai - Pollo Padang	11.82	11.02	Walenrang Timur
60	Taba - Kendekan	4.48	4.48	Walenrang Timur
61	Bosso - Kondo	7.31	6.51	Walenrang Utara
62	Bolong - Santandung	8.83	8.00	Walenrang Utara
63	Salu Ampak - Pongsoe	3.33	2.73	Walenrang Utara
64	Marabuana - Siteba	9.77	8.00	Walenrang Utara
65	Salulino - Buntu Mu'den	3.50	2.80	Walenrang Utara
66	Pongko - To'bakung	2.49	2.09	Walenrang Utara
67	Ilanbatu Uru - Lempe Pasang	16.00	15.00	Walenrang Barat
68	Lempe Pasang - Lewandi	6.76	6.76	Walenrang Barat
69	Ilanbatu - Simbuang Atas	5.57	4.50	Walenrang Barat
70	Lamasi - Kondo	4.51	3.91	Lamasi
71	Jl. Dlm Kota Lamasi	7.12	5.00	Lamasi
72	Awo Gading - To'pongo	3.69	2.00	Lamasi
73	Awo Gading - Dermaga	13.87	10	Lamasi
74	Lamasi - Tolemo	7.68	3.00	Lamasi Timur
75	Seriti - Salupao	4.54	1.94	Lamasi Timur
76	To'lemo - Bululondong	2.58	1.58	Lamasi Timur
77	To'lemo - Pompengan Pantai	8.69	6.26	Lamasi Timur
Jumlah		477,12	344,48	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Luwu, 2019.

Sedangkan untuk pembangunan jembatan masih dibutuhkan 9 unit jembatan dengan lokasi dan panjang bentang jembatan sebagai berikut:

1. Jembatan Ruas Salubua – Kaili (60 m) Rp.
2. Jembatan Ruas Rambu – Bela Sappa (45 m)
3. Jembatan Ruas Noling – Kamburi (70 m)
4. Jembatan Ruas Bajo – Kadundung (30 m)

5. Jembatan Ruas Pelabuhan Belopa – TPI Ulo-Ulo (200 m)
6. Jembatan Ruas Seriti – Kendekan (60 m)
7. Jembatan Ruas Marabuana – Siteba (40 m)
8. Jembatan Ruas Bonelemo – Balutan (30 m)

Untuk penanganan irigasi dalam rangka meningkatkan produksi pertanian difokuskan pada lokasi sebagai berikut :

1. D. I. Padang Tujuh Kecamatan Bupon
 2. D.I. Tomonto Kecamatan Walenrang Utara
 3. D.I. To'bakun Kecamatan Walenrang Utara
 4. D.I. Bangkoran Kecamatan Bupon
 5. D.I. Bakka Kecamatan Bua
 6. D.I. Tallang Bulawang Kec. Bajo
 7. D.I. Lumaring Hulu Kec. Larompong
 8. D.I. Dadeko Kec. Larompong Selatan
 9. D.I. Tabi Kecamatan Bastem
 10. D.I. Malairo Kecamatan Bastem Utara
 11. D.I. Ulu Salu Kecamatan Latimojong
 12. D.I. Mamara Kecamatan Suli
 13. D.I. Bonelemo Kecamatan Bajo Barat
 14. D.I. Salu Banga Kecamatan Suli Barat
 15. D.I. Tombang Kecamatan Walenrang
6. Memperteguh Kondisi Masyarakat Yang Religius

Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan kehidupan masyarakat dewasa ini, masyarakat yang religius perlu diteguhkan kembali. Religius dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, toleran kepada penganut agama lainnya dan mampu hidup dengan rukun. Karakter religius ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini masyarakat diharapkan memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Kondisi masyarakat yang religius dalam konsep dan praktik diyakini akan dapat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang mampu membuat sesuatu keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang dibuatnya. Pendidikan karakter adalah gerakan menciptakan masyarakat yang beretika, bertanggung jawab dan membangun generasi muda yang memahami nilai-nilai universal. Hal inilah yang perlu dirumuskan menjadi suatu kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu, agar dapat mewariskan pemerintahan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mudah bagi masyarakat Kabupaten Luwu di masa depan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperteguh kondisi masyarakat yang religius sebagaimana diuraikan di atas adalah melalui penyebaran ajaran agama. Penyebarluasan ajaran agama sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas mubaligh/mubalighah. Salah satu permasalahan dakwah di Kabupaten Luwu saat ini adalah rendahnya jumlah mubaligh dan mubalighah. Hal ini disebabkan belum efektifnya sistem kaderisasi di kalangan muda untuk menjadi mubaligh/ mubalighah. Oleh karena itu, harus ditingkatkan volume dan mutu kaderisasi dikalangan muda untuk dipersiapkan menjadi mubaligh dan mubalighah yang andal dan kompeten.

Jumlah mubaligh dan mubalighah perlu ditingkatkan sehingga dakwah ajaran agama kian menyebar luas. Untuk itu, perlu langkah-langkah strategis dalam memenuhi kekurangan mubaligh dan mubalighah. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu harus memberikan perhatian khusus agar dakwah tidak terhenti di wilayah kota, tapi mampu menjangkau wilayah terpencil, terluar, dan terjauh.

Terkait dengan kualitas, terdapat sejumlah prinsip yang mesti dimiliki seorang pendakwah yaitu efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, para da'i juga harus memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan profesionalitas, serta menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat.

Tabel 4.16
Jumlah Penduduk, Tempat Ibadan dan Pendakwah
Menurut Kecamatan, Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat Ibadan	Pendakwah
1	Larompong	21.250	47	12

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat Ibadah	Pendakwah
2	Larompong Selatan	17.776	54	8
3	Suli	21.065	51	6
4	Suli Barat	10.400	46	5
5	Belopa	17.610	41	7
6	Kamanre	12.391	30	9
7	Belopa Utara	17.864	47	9
8	Bajo	15.871	59	6
9	Bajo Barat	10.285	26	6
10	Bastem	5.649	23	6
11	Latimojong	5.611	30	5
12	Bastem Utara	3.645	13	0
13	Bupon	14.464	48	7
14	Ponrang	21.269	43	12
15	Ponrang Selatan	25.257	44	0
16	Bua	29.799	54	12
17	Walenrang	14.021	29	8
18	Walenrang Timur	11.463	27	6
19	Lamasi	17.050	50	7
20	Walenrang Utara	19.624	54	7
21	Walenrang Barat	3.895	20	6
22	Lamasi Timur	6.321	21	6
Jumlah		322.580	857	150

Sumber: BPS, Tahun 2018

7. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Keberlanjutan

Keberadaan Sumber Daya Alam belum dimanfaatkan secara baik dan belum didasarkan pada pemanfaatan berbasis pada pembangunan keberlanjutan. Kabupaten Luwu diberkahi dengan sumber daya alam yang berlimpah. Kabupaten Luwu merupakan penghasil beras, sagu, dan cengkeh yang potensial sejak dulu. Di samping itu juga terdapat potensi pertambangan yaitu emas dan marmer. Namun, sumber daya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dengan baik. Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Kabupaten Luwu adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk

meningkatkan daya saing industri, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian peningkatan nilai tambah produk lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi harus dilakukan.

4.3 Permasalahan dan Isu Strategis Kajian TPB Berdasarkan KLHS

Pelaksanaan TPB ditingkat daerah ditentukan oleh tingkat capaian pelaksanaan indikator TPB terhadap target yang telah ditentukan baik target daerah maupun target nasional yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD.

Sesuai dengan kewenangan, Kabupaten Luwu melaksanakan indikator TPB meliputi 13 tujuan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan

No. TPB	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target RPJMN 2019	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target RPJMN 2019	Total Indikator yang sudah dilaksanakan
1	3	9	12
2	2	3	5
3	8	11	19
4	2	6	8
5	1	3	4
6	2	4	6
8	3	2	5
9	1	0	1
10	0	2	2
11	1	1	2
12	1	0	1
16	4	5	9
17	5	2	7
Total	33	48	81

Sumber Data : Dokumen KLHS 2019

Penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan dengan

mengelompokkan indikator TPB berdasarkan katagori analisis data yang terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)
2. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)
3. Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)
4. Indikator Belum Memiliki Data (NA)

Pengelompokkan indikator ini didasarkan pada tingkat capaian indikator terhadap target yang telah ditentukan. Pengelompokkan indikator ini dilakukan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang dipilih menjadi isu strategis dalam RPJMD.

Tabel 4.18
Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu

No.	Indikator	Jumlah Indikator	%
1	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)	33	16,34
2	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)	48	23,76
3	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)	25	12,38
4	Indikator Belum Memiliki Data (NA)	96	47,52
Total Indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu		202	100

Sumber Data : Dokumen KLHS 2019

Indikator yang dianalisis lebih lanjut dan menjadi isu strategis adalah khususnya indikator-indikator yang masuk dalam indikator kelompok 2 (SB) karena diharapkan melalui RPJMD, indikator-indikator TPB yang belum mencapai target ini dapat diakomodir ke dalam kebijakan, rencana dan program yang dapat merealisasikan capaian indikator tersebut.

Kabupaten Luwu telah melaksanakan indikator TPB sebanyak 81 indikator yang tersebar pada 12 tujuan. Secara rinci indikator TPB di Kabupaten Luwu yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.19
Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB

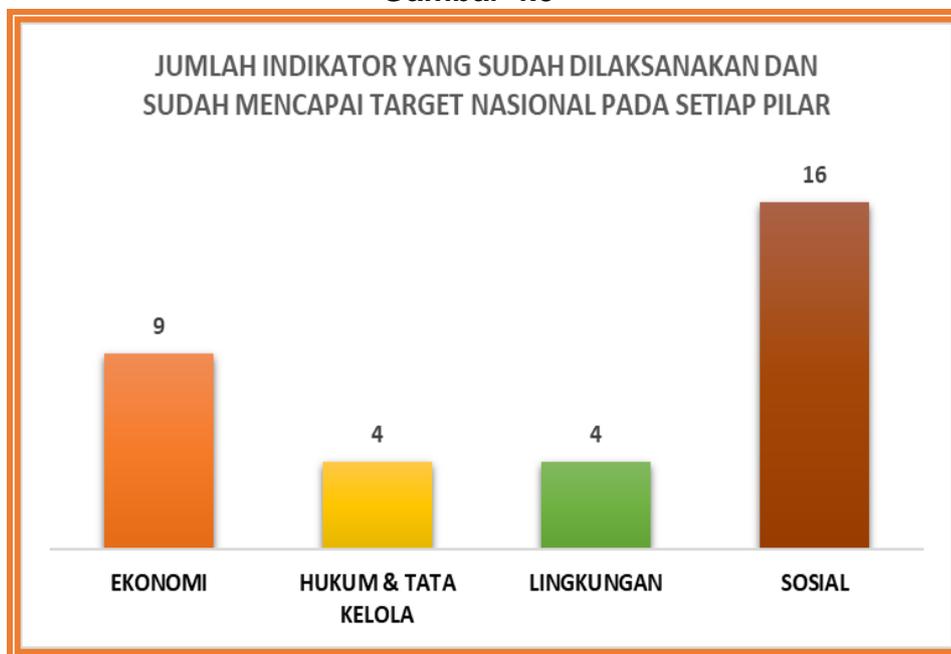
No.	Tujuan TPB	Indikator SS	Indikator SB	Total Indikator Yang Sudah Dilaksanakan
1.	Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada	3	9	12
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	2	3	5
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	8	11	19
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta	2	6	8

No.	Tujuan TPB	Indikator SS	Indikator SB	Total Indikator Yang Sudah Dilaksanakan
	meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua			
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1	3	4
6.	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua	2	4	6
7.	Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan			
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan	3	2	5
9.	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh	1		1
10.	Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara		2	2
11.	Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1	1	2
12.	Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan	1		1
13.	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya			
14.	Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan			
15.	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati			
16.	Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	4	5	9
17.	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	5	2	7
Total		33	48	81

Sumber Data : Dokumen KLHS 2019

Kategori indikator TPB sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Luwu telah mencapai 33 (tiga puluh tiga) indikator (16,34%) dari total 202 indikator. Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional terdapat di pilar sosial sebesar 16 indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional adalah pilar hukum dan tata kelola serta pilar lingkungan sebesar 4 indikator. Untuk lebih jelas jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.9



Sumber Data : Dokumen KLHS 2019

Kategori indikator TPB sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Luwu telah mencapai 48 (empat puluh delapan) indikator (23,76%) dari total 202 indikator.

Gambar 4.10

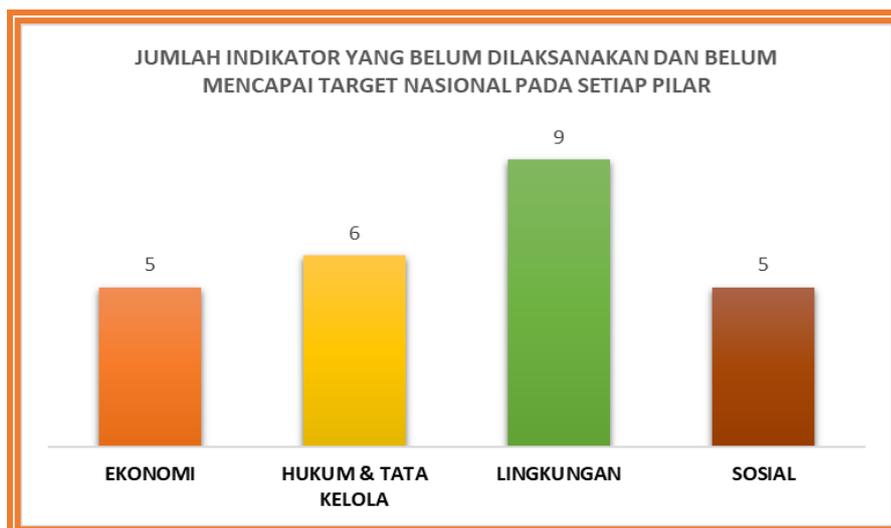


Sumber Data : Dokumen KLHS 2019

Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional terdapat di pilar sosial sebesar 32 indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional adalah pilar hukum dan tata kelola serta pilar lingkungan sebesar 5 (lima) indikator. Untuk lebih jelas jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan tidak mencapai target nasional di Kabupaten Luwu adalah 25 indikator (12,38%) dari total 202 indikator. Indikator TPB terbanyak belum dilaksanakan dan tidak mencapai target nasional terdapat pada pilar lingkungan sebesar 9 (sembilan) indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang belum dilaksanakan dan tidak mencapai target nasional adalah pilar ekonomi dan sosial sebesar 5 (lima) indikator. Untuk lebih jelas jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan tidak mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

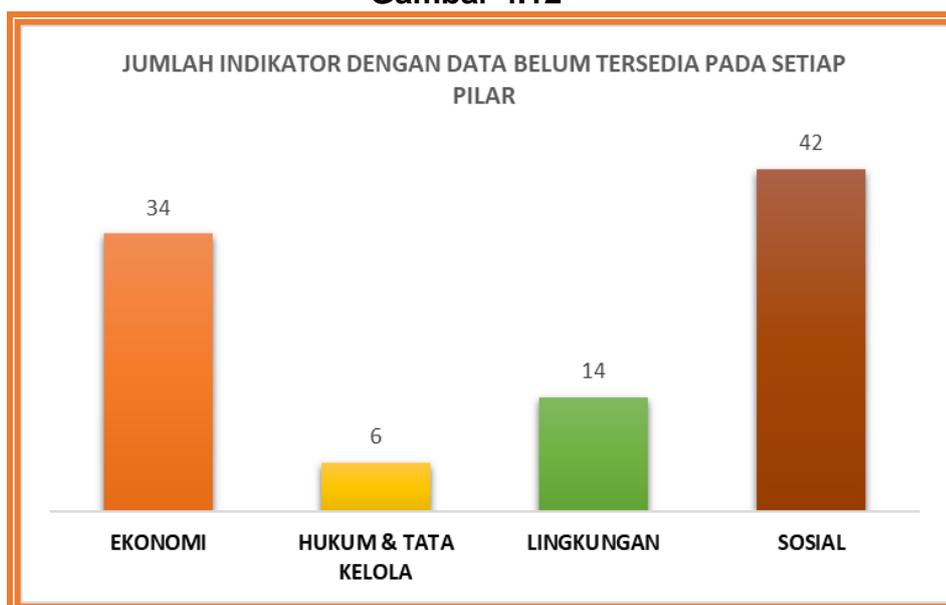
Gambar 4.11



Sumber Data : Dokumen KLHS 2019

Kategori indikator TPB yang belum ada data di Kabupaten Luwu adalah 96 indikator (47,52%) dari total 202 indikator. Indikator TPB terbanyak belum ada data terdapat pada pilar sosial sebesar 42 (empat puluh dua) indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang belum ada data adalah pilar hukum dan tata kelola sebesar 6 (enam) indikator. Untuk lebih jelas jumlah indikator yang belum ada data dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.12



Sumber Data : Dokumen KLHS 2019

Tujuan pembangunan berkelanjutan diatas yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Luwu, selanjutnya dijabarkan dalam 26 isu dan sasaran strategis berdasarkan sasaran dari TPB sesuai Perpres 59 Tahun 2017. Adapun isu dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Isu dan Sasaran Strategis Pembangunan Berkelanjutan

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1	Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan belum tercapainya cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
2	Belum terjaminnya bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
3	Belum terbangunnya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
4	Masih terjadinya kasus kelaparan dan belum terjaminnya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
5	Masih terjadinya kasus kekurangan gizi, dan belum terpenuhinya kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
6	Masih terjadinya kasus kematian bayi baru lahir dan balita.	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
7	Masih terjadinya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
8	Belum berkurangnya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan.	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
9	Belum berkurangnya rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
10	Belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
11	Masih terjadinya disparitas gender dalam pendidikan, dan belum terjaminnya akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
	masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli,	rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli,
12	Belum meningkatnya secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
13	Belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
14	Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
15	Belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
16	Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
17	Belum bertahannya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
18	Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
19	Belum meningkatnya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
20	Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
21	Belum berkurangnya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk masih kurangnya perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
22	Masih terjadinya perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.
23	Belum terjaminnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
24	Belum diberikannya identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
25	Belum berkurangnya segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
26	Belum meningkatnya dukungan pengembangan kapasitas untuk daerah berkembang, termasuk daerah kurang berkembang dan daerah berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan	Meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk daerah berkembang, termasuk daerah kurang berkembang dan daerah berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
	data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Sumber: *Dokumen KLHS 2019*

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019–2024 adalah:

**“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri
Dalam Nuansa Religi”**

Rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 tersebut di atas, mengandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

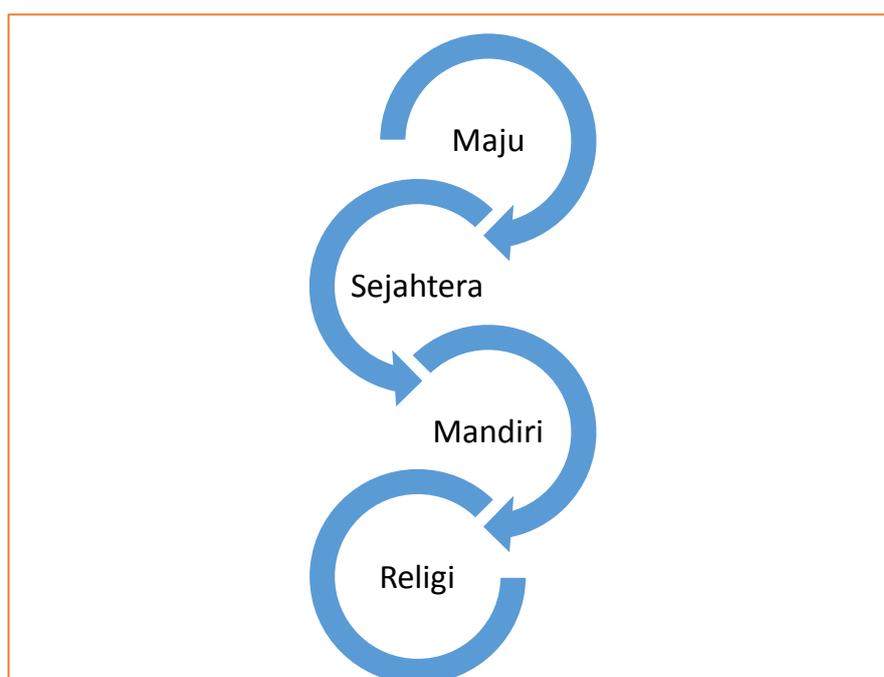
- Maju** : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- Sejahtera** : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.

Mandiri : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Berdasarkan pernyataan visi diatas dengan beberapa elemen pokok visi yang terkait maka dapat digambarkan hubungan antar elemen visi yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi



Elemen visi Kabupaten Luwu merupakan kondisi masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi, yaitu kehidupan yang cerdas dan sejahtera. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya. Daerah yang maju ditopang oleh kecerdasan manusia, dan kecerdasaran ini akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan didukung pengelolaan potensi sumber daya alam yang maksimal, maka akan terwujud daerah yang mandiri. Selanjutnya kemajuan, kesejahteraan, kemandirian, akan meneguhkan kehidupan masyarakat yang religius.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.

Tata kelola pemerintahan bersih pada prinsipnya adalah sebuah model penyelenggaraan pemerintahan yang paling diminati bahkan dijadikan nilai kerja untuk memperoleh kepercayaan publik. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Luwu melalui misi ini tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai narasi melainkan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih salah satu hal yang paling esensial adalah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.

Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi ini antara lain adalah peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penerapan *merit system* dalam pengisian jabatan, pembinaan dan pengawasan melekat, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan regulasi, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pelaksanaan misi ini, akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan transparan, yang memuaskan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga terwujud pemerintahan yang berwibawa.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.

Misi kedua merupakan misi yang essential dalam pencapaian Visi Luwu yang Maju. Pada pokoknya misi ini adalah upaya pemerintah menghadirkan pelayanan secara maksimal agar masyarakat Luwu dapat menikmati pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Misi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dasar yang inklusif. Secara umum misi kedua ini diarahkan untuk mencapai tujuan terciptanya suatu kondisi masyarakat Luwu yang cerdas, adaptif, dan kompetitif dengan derajat pengetahuan yang maju serta menguasai perkembangan teknologi. Melalui misi ini peran manajemen pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama, peningkatan kualitas ini diharapkan akan memberikan pelayanan pendidikan sesuai SPM.

Selain ditandai dengan masyarakat yang cerdas, Luwu yang maju juga diarahkan untuk mencapai derajat masyarakat yang sehat. Upaya peningkatan derajat kesehatan yang berkualitas diharapkan terwujud melalui manajemen kesehatan yang berkualitas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah.

3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Melalui misi ini akan menjawab kebutuhan beberapa daerah yang masih terisolir disebabkan belum adanya pembangunan infrastruktur yang representatif, terintegrasi dan berkeadilan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahkan juga diarahkan untuk pertumbuhan wilayah ekonomi baru guna menghindari kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Sehubungan dengan itu, berbagai infrastruktur yang diprioritaskan melalui misi ini adalah:

- a. Infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik antara lain jalan raya, saluran irigasi, dan lain-lain.
- b. Infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik, antara lain: pengadaan air bersih, penyediaan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain.

- c. Infrastruktur yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik, yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, antara lain: etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, peraturan perundangan, dan lain-lain.

Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Beberapa komponen infrastruktur tersebut antara lain adalah: perencanaan kota, jaalan kota, ir minum, drainase, air limbah, persampahan, pengendalian banjir, perumahan, perbaikan kampung, perbaikan prasarana kawasan pasar, dan lain-lain.

Percepatan pembagunan infrastruktur secara substansial adalah bagian perwujudan perlakuan adil bagi seluruh masyarakat Luwu. Pengembangan dan percepatan pembagunan infrastruktur berpedoman pada tata ruang dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.

Pada misi keempat ini diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengaktifkan kembali koperasi sebagai dasar ekonomi kerakyatan. Selain itu misi ini juga merespon perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah, promosi dan perluasan pasar bagi produk unggulan daerah. Diharapkan melalui misi ini mampu menciptakan lapangan kerja.

5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.

Amanah yang terkandung pada misi kelima adalah Kabupaten Luwu yang memiliki ketahanan pangan yang tangguh dan agribisnis yang tumbuh dengan baik, sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian. Untuk meningkatkan produksi dilakukan dengan peningkatan jaringan irigasi dan ekstensifikasi dengan pembukaan lahan baru, sementara intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan fungsi penyuluh pertanian.

Sedangkan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dilakukan dengan pengembangan inovasi pada sektor-sektor unggulan daerah dan juga pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal. Kabupaten Luwu memiliki berbagai jenis produk olahan makanan yang sudah dikenal masyarakat luas, baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang taat dan taqwa kepada Tuhan YME sebagai cerminan dari pengamalan nilai-nilai agama, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang religius. Ukuran yang dapat digunakan untuk hal ini antara lain adalah kondisi ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dapat berbentuk fisik maupun non fisik seperti fasilitasi terhadap pembangunan/pemeliharaan sarana peribadatan maupun pihak-pihak yang terkait, peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, penegakan hukum dan lain-lain.

Melalui misi ini, manusia yang berakhlak secara terus-menerus dibangun sejak usia dini. Disamping itu, ditumbuhkembangkan rasa saling percaya, kemauan untuk saling nasehat menasehati, serta kesadaran untuk menjadi teladan bagi masyarakat disekitarnya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat yang religius menjadi penopang dalam mewujudkan kondisi Luwu yang kodusif dan harmonis.

7. Optimalisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Arah dari misi ialah memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memperkuat berbagai bentuk partisipasi masyarakat desa. Mengingat bahwa pengertian otonomi desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Untuk mendukung capaian arah misi tersebut dibutuhkan kolaborasi, melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya, dan juga inovasi masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda desa. Kolaborasi ini akan diproyeksikan tidak

hanya sekedar melibatkan masyarakat saja, tetapi partisipasi dengan kolaborasi akan menghasilkan suatu tindakan maupun kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.

Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan meningkatnya investasi, baik asing/PMA maupun domestik/PMDN, maka diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.

Misi ini merupakan rumusan kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tetapi daya dukung lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu dengan memaksimalkan kondisi yang mendukung iklim investasi.

Menurut Asian Development Bank (2005), terdapat tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup: (1) Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik; (2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; (3) Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selanjutnya menurut KPPOD dan Asia Foundation (2009), terkait dengan daya tarik investasi di suatu daerah, ada beberapa faktor dan variabel penentu daya tarik tersebut. Faktor dan variabel tersebut adalah: (1) Faktor kelembagaan (variabel kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur, perda); (2) Faktor sosial politik (variabel stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, keamanan, dan budaya); (3) Faktor ekonomi daerah (variabel potensi ekonomi dan struktur ekonomi); (4) Faktor tenaga kerja dan produktivitas (variabel biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga

kerja); dan (5) Faktor infrastruktur fisik (variabel ketersediaan dan kualitas pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon, dan listrik).

9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.

Misi kesembilan secara spesifik adalah perwujudan dari target pembangunan berkelanjutan terutama tentang penegakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Selain itu misi ini diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga akan menstimulus keterlibatan masyarakat dalam membangun daerah.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partispasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah.

10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

Misi kesepuluh ini pada prinsipnya mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Luwu. Dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kaidah-kaidah hasil kajian lingkungan hidup, selain itu merupakan keniscayaan dalam konteks pengambilan kebijakan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam harus mempedomani rencana pembangunan berkelanjutan dengan

tujuan untuk tetap menjaga keseimbangan alam guna mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana alam.

Berdasarkan Visi dan Misi serta penjelasannya sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Antara Misi dengan Pokok Visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Maju
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Menyelenggarakan penataan manajemen pendidikan dan kesehatan, memenuhi peningkatan SDM aparatur dan jumlah tenaga pendidik dan kesehatan, serta menjamin akses layanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Sejahtera
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Membangun infrastruktur berkeadilan yang menghubungkan antar lapisan wilayah (pelosok dan terisolir) guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan penunjang pemberian layanan yang reponsif	Maju
4	Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja	Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera, melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan kerja dengan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah	Mandiri dan Sejahtera
5	Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis	Mengembangkan inovasi pada pengelolaan pangan dari hulu hingga hilir berbasis agribisnis guna meningkatkan daya saing produktivitas perekonomian Luwu.	Mandiri
6	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius	Mengarahkan kehidupan beragama masyarakat Luwu mencerminkan pengamalan nilai-nilai agama untuk melahirkan manusia berakhlak	Religi
7	Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Memperkuat bentuk partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran dana desa hingga. Kolaborasi yang melahirkan inovasi-inovasi masyarakat desa, terutama pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda di desa.	Mandiri
8	Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan	Meningkatnya nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan daerah untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Luwu.	Sejahtera
9	Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan terutama penegakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kepercayaan publik untuk turut berpartisipasi	Maju

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
10	Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana	Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan lingkungan hidup dengan maksud mencegah terjadinya bencana alam.	Sejahtera

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagai langkah baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu yang lebih maju, sejahtera, mandiri dan religius. Keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Luwu ini digambarkan dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, daya saing dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Indikator makro pembangunan daerah ini menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu.

Tabel 5.2.
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,60	n.a	70,40	70,87	71,34	71,98	72,51
2.	Pertumbuhan Ekonomi	7,59	n.a	7,21	7,30	7,65	7,80	7,85
3.	Inflasi	3,95	n.a	3,86	3,76	3,57	3,39	3,39
4.	Tingkat Pengangguran	4,47	n.a	4,36	4,25	4,14	4,04	3,94
5.	PDRB per Kapita	39,20	n.a	42,02	45,30	48,05	51,20	54,05
6.	Tingkat Kemiskinan	13,36	n.a	13,30	13,22	12,53	12,44	12,00
7.	Indeks Ketimpangan Williamson	<i>Tidak diperoleh angka karena BPS tidak melakukan perhitungan PDRB per kecamatan</i>						
8.	Gini Ratio	0,362	n.a	0,360	0,358	0,342	0,335	0,320

Sumber: - BPS
- Proyeksi

5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025

Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan turunan dan penjabaran dari Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Luwu 2005-2025. Visi jangka panjang Kabupaten Luwu dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah **“LUWU YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA**

RELIGI". Dengan Visi tersebut diharapkan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 mendatang terwujud menjadi:

Maju adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang berposisi terkemuka di Sulawesi Selatan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam peningkatan kualitas manusia. Kemajuan tersebut khususnya ditandai oleh kualitas manusia yang tinggi dilihat dari indeks pembangunan manusia, mencakup penguasaan pengetahuan (pendidikan: melek huruf dan rata-rata lama sekolah), derajat kesehatan (kesehatan: angka harapan hidup) dan perekonomian (daya beli masyarakat).

Mandiri adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang eksis sebagai daerah otonom; mampu mengelola potensinya dengan mengandalkan kemampuan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah secara sinergis tanpa terlepas dari interkoneksi dengan daerah lain terutama pada kawasan Luwu Raya; serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintahnya memiliki etos kemandirian dan daya saing yang tinggi. Kondisi ini ditandai dengan berkembangnya proses pemanfaatan potensi/sumberdaya secara produktif, efektif, efisien dengan berbasis pada kualitas teknostruktur masyarakat yang senantiasa berkembang, serta melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat.

Sejahtera adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang masyarakatnya selain semakin mantap memenuhi kebutuhan dasarnya terutama ketahanan pangan, pemenuhan sandang dan kelayakan perumahan serta kondisi aman dan tertib sehingga kemiskinan bisa direduksi; juga semakin berkembang pemenuhan kebutuhan sosial dan aktualisasi dirinya dalam dukungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang lestari. Kondisi ini ditunjang oleh pencapaian transformasi perekonomian dimana kontribusi nilai dan penyerapan tenaga kerja dalam struktur PDRB sudah nyata diperankan oleh sektor sekunder dan tersier. Selain itu, kondisi-kondisi ini terkait dengan berkembangnya kehidupan sosial-budaya yang harmonis dan dinamis, dan berkembangnya kegiatan pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial.

Bernuansa religi adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 dimana kehidupan keagamaan masyarakat semakin mantap sebagai manifestasi atas

penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang didorong secara bersama oleh seluruh komponen daerah semuanya berbasis pada nuansa religius. Perwujudan nuansa religi tersebut bukan hanya ditandai oleh semakin mantapnya pemahaman dan pengamalan agama secara ritual; tetapi juga pada semakin fungsionalnya ajaran dan ritual agama dalam memanifestasikan etos dan budaya kerja yang mengakselerasi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan; serta mengkondisikan manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradab dalam kehidupan yang berbahagia.

Agar Visi jangka panjang Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh Misi RPJPD sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi

Kualitas manusia yang tinggi merupakan indikator penting dari kemajuan daerah. Tingginya kualitas manusia, dalam arti pengetahuan yang luas sebagai hasil dari kemajuan pendidikan, angka harapan hidup yang tinggi sebagai hasil dari kemajuan kesehatan, dan daya beli yang tinggi sebagai hasil kemajuan perekonomian; bukan hanya menggambarkan kemajuan daerah tetapi sekaligus menggambarkan kapasitas daerah untuk memberlanjutkan kemajuannya, karena kualitas manusia yang tinggi adalah jaminan bagi kapasitas untuk memberlanjutkan kemajuan.

2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah

Potensi daerah dalam bentuk sumberdaya alam, manusia, finansial, sarana dan prasarana merupakan modal dasar bagi kemandirian daerah yang pengelolaannya harus secara mandiri pula agar azas kemanfaatan bersama bisa optimal. Karena itu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah tidak hanya terniscayakan untuk memiliki kapasitas dalam mengelola potensi daerah tetapi lebih penting lagi adalah etos dan kerja keras untuk secara mandiri mengelola efektif, efisien dan berkelanjutan berbagai potensi demi otonomi daerah. Namun demikian, kemandirian pengelolaan potensi daerah tidak bisa sepenuhnya otonom, karena skala ekonomi dan sosiogeografis suatu potensi sering menembus batas-batas administratif, maka interkoneksi dengan daerah lain khususnya dalam lingkup Luwu Raya menjadi konteks lebih luas dari kemandirian tersebut.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak dan merata

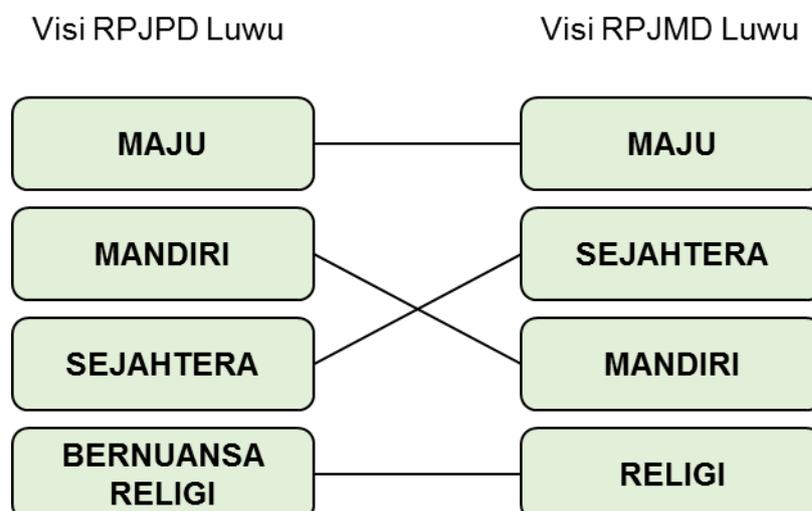
Kesejahteraan merupakan cita-cita ideal dari setiap tatanan, begitu pula dengan Kabupaten Luwu sebagai bagian dari entitas negara-bangsa Indonesia. Tanpa perwujudan kesejahteraan dalam arti luas maka tujuan luhur dari otonomi daerah tidak tercapai. Karena itu, upaya-upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga kemiskinan bisa direduksi, begitu pula pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan sosial dan aktualisasi diri sehingga kemakmuran bisa dihindari, serta secara struktural perekonomian daerah bisa bertransformasi kearah peran sektor industri dan jasa yang lebih dominan, merupakan keniscayaan.

4. Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah

Nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah merupakan manifestasi dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimana pada sila pertama begitu pula pada sila-sila lainnya terkandung substansi yang terkait dengan nuansa religiusitas dan kebudayaan yang luhur. Upaya untuk melahirkan secara terus menerus manusia yang berakhlak mulia dan beretika serta menjadikan agama fungsional dalam aktivitas pembangunan merupakan bagian dari pembangunan peradaban.

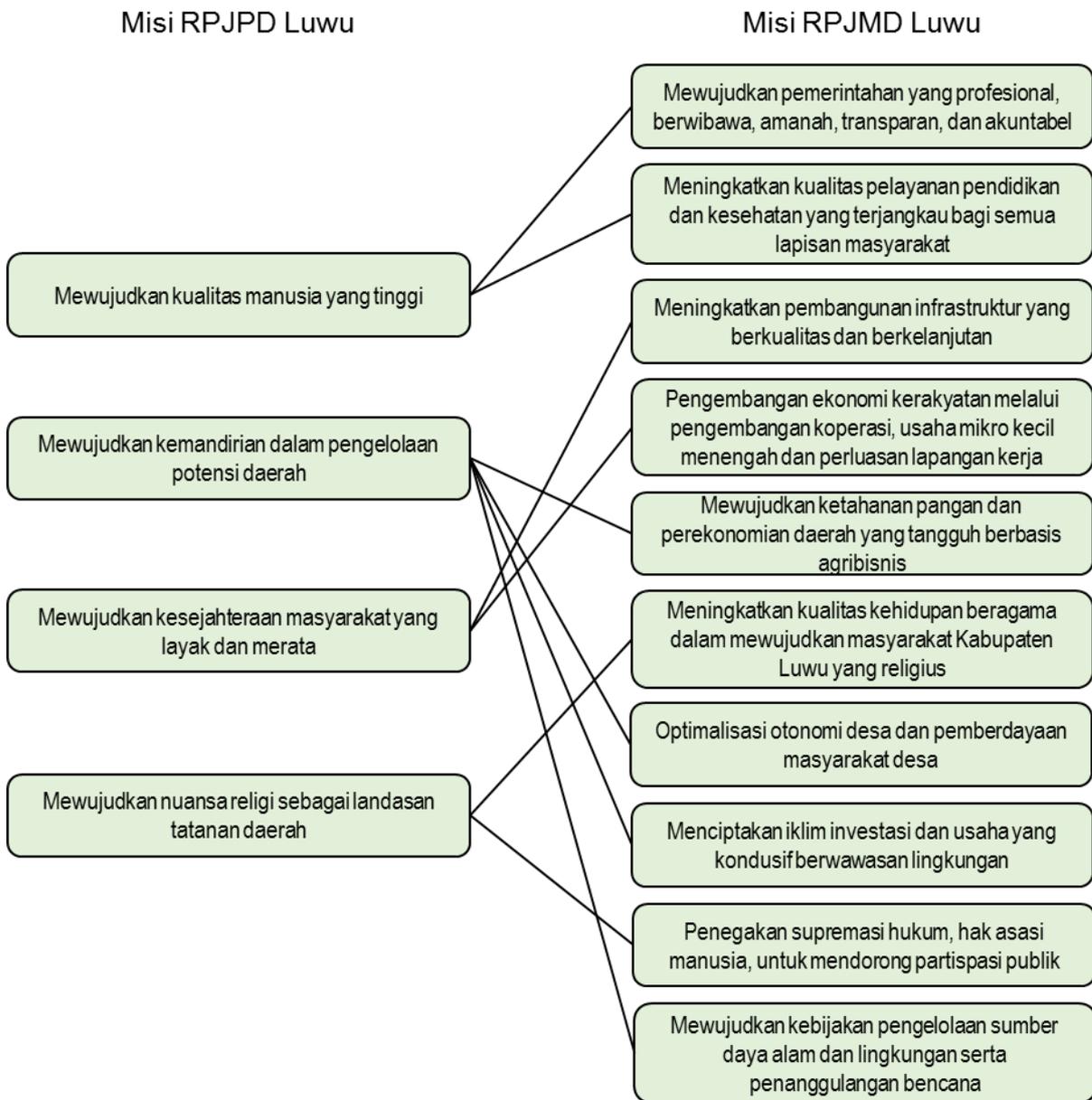
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.2
Keselarasan Visi RPJPD dengan Visi RPJMD



Sedangkan keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.3
Keselarasan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu



Bertolak dari uraian analisis di atas nampak, rumusan dari Visi jangka panjang Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025

adalah relevan atau saling memiliki keterkaitan dengan rumusan visi jangka menengah daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Demikian halnya dengan misi RPJPD dan RPJMD, saling terkait dan memiliki keterkaitan makna yang sangat jelas.

5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan, Visi jangka menengah Kabupaten Luwu harus tetap selaras dengan Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2028, Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah “**Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**”. Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai berikut:

- ❖ **Inovatif**, dimaknai sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”
- ❖ **Produktif**, mengandung makna kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.
- ❖ **Kompetitif**, mengandung makna kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
- ❖ **Inklusif**, dimaknai sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta

ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

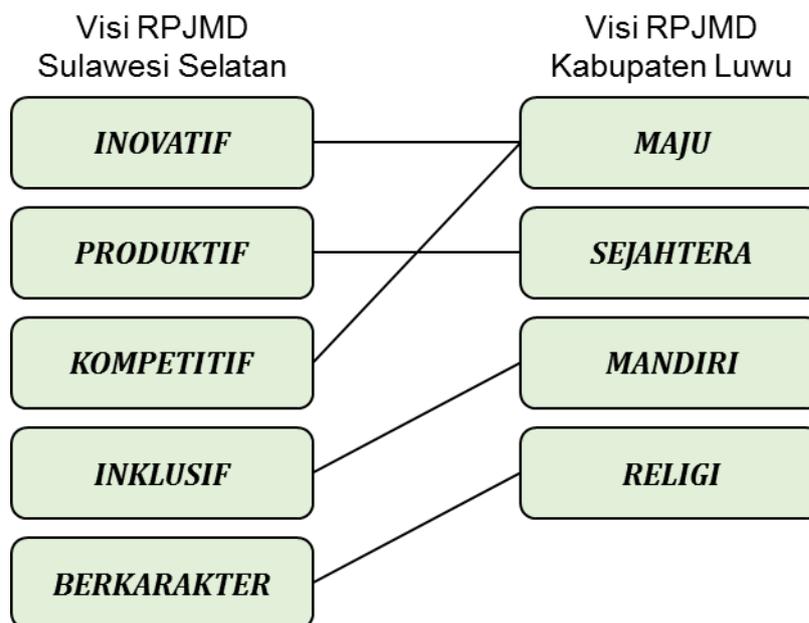
❖ **Berkarakter**, dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter; dan
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

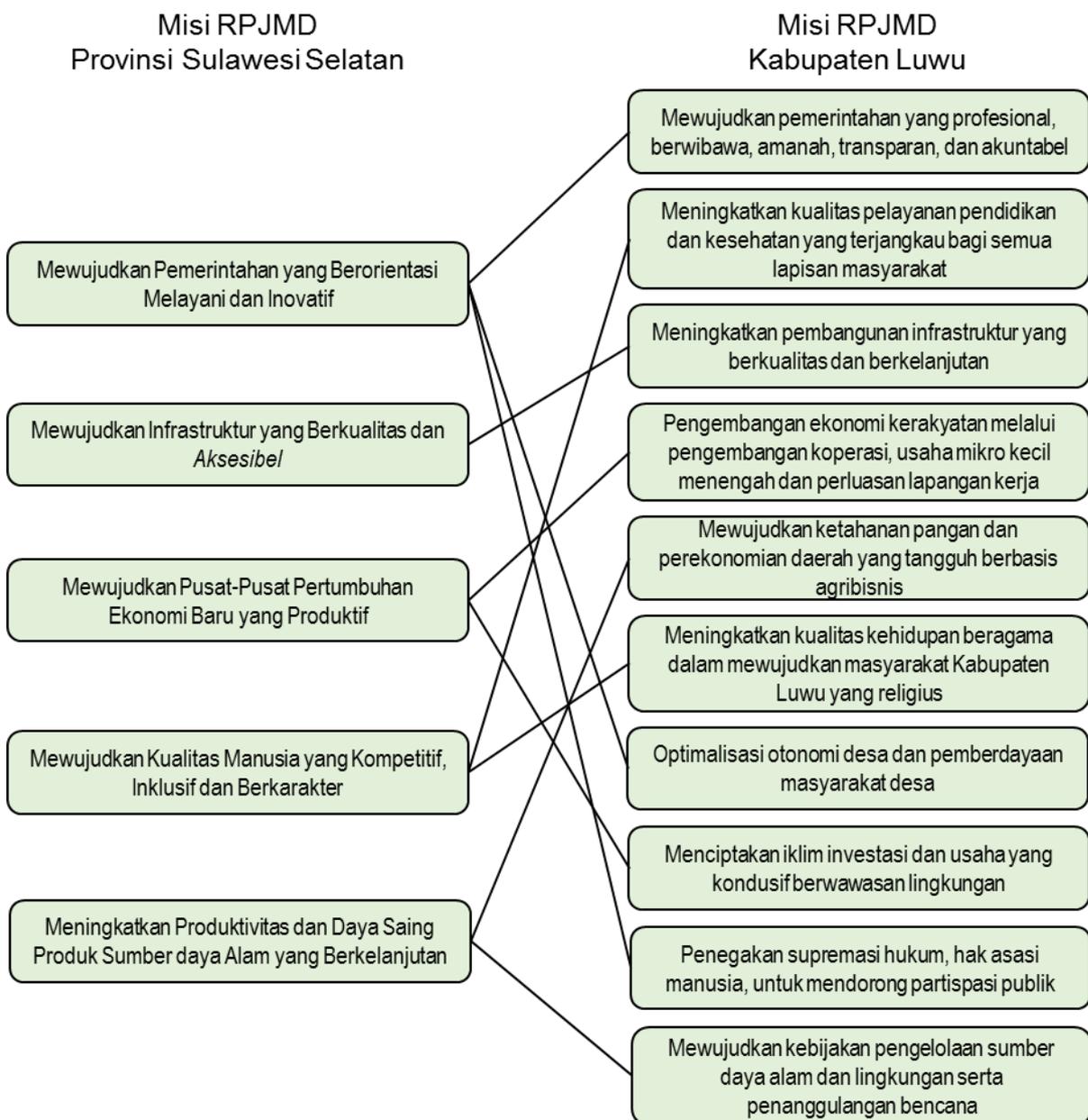
Gambar 5.4
Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024



Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.5

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024



Dari skema di atas nampak bahwa rumusan dari Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah relevan atau saling memiliki keterkaitan dengan rumusan visi jangka menengah daerah kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Demikian halnya dengan misi kedua dokumen rencana pembangunan, saling terkait dan bersinergi untuk mempercepat pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah.

5.5. Keterkaitan RPJPN, RPJPD dan RPJMD

Mengingat RPJMN Tahun 2019-2024 masih dalam proses penyusunan, maka keterkaitan antara rencana pembangunan daerah Kabupaten Luwu dengan rencana pembangunan nasional dilakukan dengan menunjukkan skema sebagai berikut:

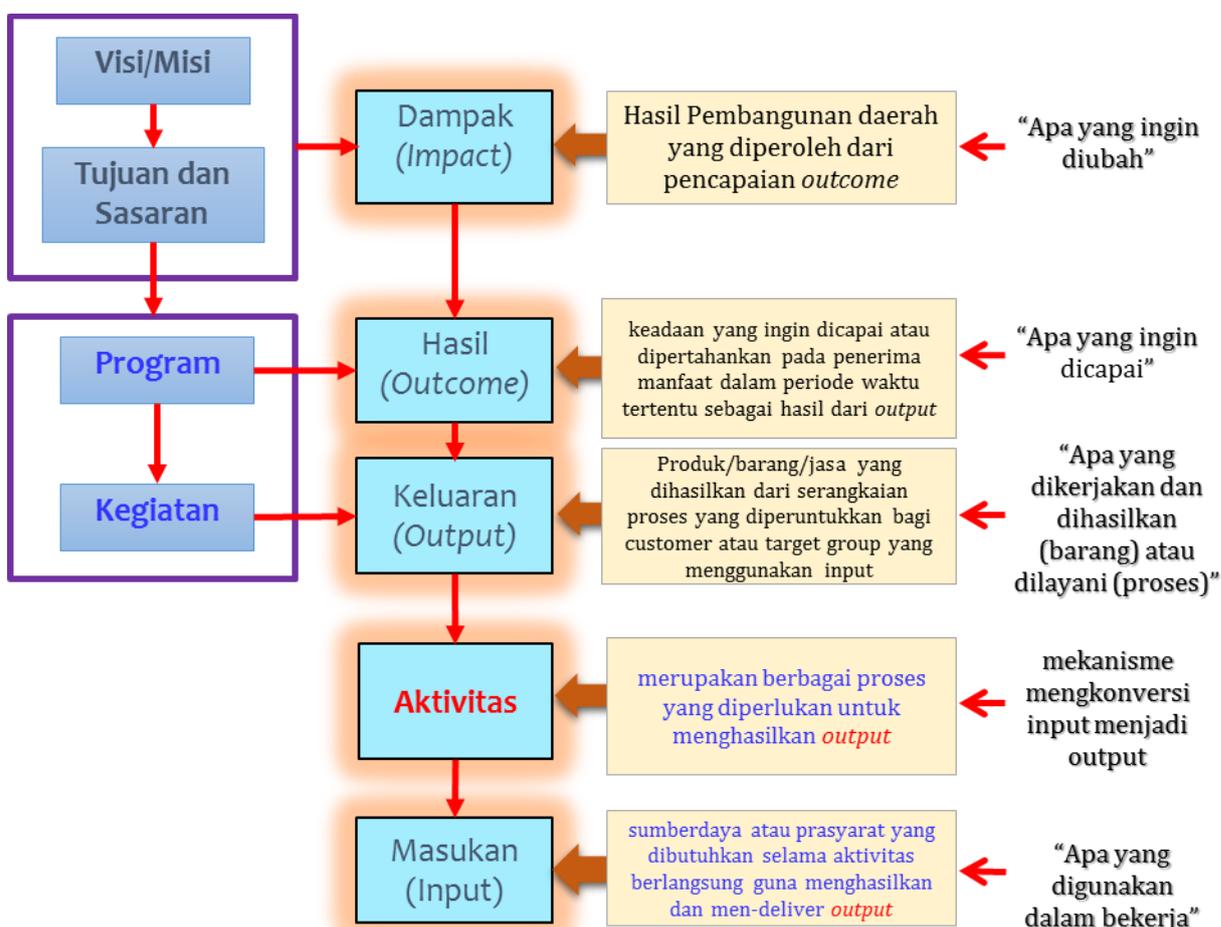


5.6. Tujuan dan Sasaran

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai sebagai rumusan strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Secara skematik, selain menerjemahkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, RPJMD memuat sasaran pokok RPJPD. Selain itu, dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD menjadi dokumen yang penting mengingat muatannya yang merupakan keseluruhan prioritas dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Gambar 5.7
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah atau tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Rumusan Tujuan, Indikator serta Target Pembangunan
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Visi :				
Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi				
Misi	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
M.1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel	T.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	Baik
M.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	T.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,37	78,49
M.3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T.3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Infrastruktur	n.a	Baik
M.4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	T.4. Meningkatnya perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	7,21	8,45
M.5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis	T.5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	76,27	85,32
M.6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius	T.6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	4,00	2,34

M.7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	T.7. Meningkatkan kemandirian Desa	Persentase desa berstatus mandiri	n.a	80,00
M.8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang kondusif Berwawasan Lingkungan	T.8. Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi PMA dan PMDN (Milyar Rp)	16,88	18,88
M.9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk mendorong Partispasi Publik	T.9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hukum (%)	n.a	100,00
M.10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Penanggulangan Bencana	T.10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	n.a	Sangat baik

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. T1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang akan diwujudkan adalah orientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya keberpihakan pada masyarakat yang lemah, memperteguh keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Selain itu juga ditekankan adanya partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas, didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Dibidang

keuangan, diupayakan untuk terus mengembangkan pengelolaan keuangan daerah sehingga semakin mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP.
- ✓ S1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Opini Laporan Keuangan.
- ✓ S1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua (*education for all*) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Bukan sekadar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya yang dilakukan antara lain gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu perluasan akses ke perguruan tinggi juga diupayakan dengan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik.

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga perlu mendapat prioritas melalui peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat desa, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan.

Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator Indeks Pendidikan.
- ✓ S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks Kesehatan.

3. T3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan

Infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada manfaat infrastruktur bagi masyarakat tersebut, karakteristik dari peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur diprioritaskan untuk yang menghasilkan masukan/input bagi masyarakat (sarana air bersih, jaringan irigasi), mengambil keluaran/output dari masyarakat (saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi), dan yang dapat memberikan input dan mengambil output dari masyarakat (jaringan komunikasi, jalan raya).

Tujuan meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S3.1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dengan indikator Persentasi Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap.
- ✓ S3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar, dengan indikator Persentase penduduk berakses air minum dan Rasio jaringan irigasi.
- ✓ S3.3. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

4. T4. Meningkatnya perekonomian daerah

Pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat, meskipun tidak berarti harus mengalami kenaikan terus-menerus (misalnya dalam keadaan bencana).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang

mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi.

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Tujuan meningkatnya perekonomian daerah, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S4.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dengan indikator PDRB Perkapita dan Indeks Gini.
- ✓ S4.2. Mengembangkan destinasi wisata, dengan indikator Jumlah obyek wisata yang dikembangkan.
- ✓ S4.3. Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

5. T5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat

Kemandirian pangan dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan dipengaruhi oleh hasil produksi dan selanjutnya kemandirian pangan juga merupakan penopang/ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Tujuan meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S5.1. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.

6. T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi merupakan salah satu ciri kehidupan yang religius.

Tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S6.1. Meningkatnya upaya penyebarluasan ajaran agama dengan indikator Jumlah kader mubaligh muda (orang) dan Presentase kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan.

7. T7. Meningkatkan kemandirian Desa

Setidaknya terdapat tiga dimensi untuk mengukur kemandirian desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya harus semakin kecil.

Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri.

Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda

dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat.

Tujuan meningkatkan kemandirian Desa, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S7.1. Berkembangnya Perekonomian Desa, dengan indikator Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional.

8. T8. Meningkatkan nilai investasi

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan investasi di suatu daerah adalah situasi yang kondusif, infrastruktur, dan jaminan berinvestasi.

Tujuan meningkatkan nilai investasi, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S8.1. Meningkatnya realisasi investasi, dengan indikator Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi dan Persentase wirausaha muda.

9. T9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum

Menanamkan kesadaran hukum pada warga masyarakat wajib dilakukan semua pihak agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur sebuah lembaga atau sebuah kelompok masyarakat tertentu. Hukum muncul untuk mengatur norma dan kehidupan masyarakatnya agar tercipta keharmonisan hidup. Hukum mengatur semua regulasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Hukum membuat suatu keadaan, baik politik, sosial, maupun ekonomi dan beberapa bidang yang lain menjadi lebih tertata dan lebih baik.

Hukum sejatinya tak akan pernah bisa terjadi bila tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan agar kesadaran hukum bisa tumbuh dan berlaku sebagaimana mestinya di tengah-tengah

masyarakat, yaitu: pengetahuan yang luas tentang apa itu hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum terhadap orang lain, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum.

Tujuan meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S9.1. Meningkatkan produk hukum daerah, dengan indikator Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)
- ✓ S9.2. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial, dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
- ✓ S9.3. Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender.

10. T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya konkrit untuk menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sebagai contoh, untuk menghindari bencana atau mengurangi resiko dan kerugian khususnya bencana banjir, diperlukan adanya pemahaman tentang pengelolaan sungai yang baik dengan kerja sama semua pihak.

Tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH.
- ✓ S10.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator diatas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel 5.4.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi									
Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun ...					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
M1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	T1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	S1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2. Nilai SAKIP	CC	CC	B	BB	BB	A	A
	S1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	3. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	S1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
M2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia	69,37	70,40	70,87	71,34	71,98	72,51	72,51
	S2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	6. Indeks Pendidikan	63,19	63,72	64,42	65,12	66,88	67,05	67,05
	S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	7. Indeks Kesehatan	76,31	76,55	76,64	76,71	76,84	76,90	76,90
M3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	8. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Na	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
	S3.1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	9. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	21,84	23,87	26,26	28,88	31,77	34,95	34,95
	S3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	10. Persentase penduduk berakses air minum	82,04	84,09	86,19	88,35	90,56	92,82	92,82
		11. Rasio jaringan irigasi	59,94	63,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
S3.3. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	12. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	75,45	76,00	77,10	78,05	79,00	81,00	81,00	

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun ...					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
M4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	T4. Meningkatkan perekonomian daerah	13. Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,21	7,30	7,65	7,80	7,80	7,85	7,85
	S4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat	14. PDRB Perkapita (Juta Rp.)	36,60	38,03	38,98	39,95	40,95	41,98	41,98
		15. Indeks Gini	0,362	0,360	0,358	0,342	0,335	0,320	0,320
	S4.2. Mengembangkan destinasi wisata daerah	16. Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	0	1	2	3	4	5	5
	S4.3. Menurunnya jumlah pengangguran	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,47	4,36	4,25	4,14	4,04	3,94	3,94
M5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	T5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	18. Skor Pola Pangan Harapan	9	9	8	7	6	5	5
	S5.1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis agribisnis	19. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	7,04	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60	7,60
M6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	20. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	4,00	3,20	2,80	2,43	2,38	2,34	2,34
	S6.1. Meningkatkan upaya penyebarluasan ajaran agama	21. Jumlah kader mubaligh muda (orang)	0	40	40	40	40	40	200
		22. Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	44,48 (2016)	27,50	25,00	23,00	21,00	20,00	20,00
M7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	T7. Meningkatkan kemandirian Desa	23. Persentase desa berstatus mandiri	0	40,00	60,00	65,00	70,00	80,00	80,00
	S7.1. Berkembangnya Perekonomian Desa	24. Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	0	0	0	1	2	5	5
M8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	T8. Meningkatkan nilai investasi	25. Nilai investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	16,69	17,11	17,53	17,97	18,42	18,88	18,88
	S8.1. Meningkatkan realisasi investasi	26. Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	13	13	13	14	14	14	14
		27. Persentase wirausaha muda	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun ...					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
M9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik	T9. Meningkatkan penegakan dan perlindungan hukum	28. Cakupan penegakan dan perlindungan hukum (%)	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	S9.1. Meningkatkan produk hukum daerah	29. Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	n.a	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
	S9.2. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	30. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	S9.3. Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	31. Indeks Pemberdayaan Gender	61,61	61,90	70,27	71,01	72,00	72,95	72,95
M10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	32. Indeks kualitas lingkungan hidup	Na	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik
	S10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	33. Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	39,22	50,00	60,00	75,00	87,50	100,00	100,00
	S10.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan bencana	34. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Na	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisikan tentang uraian strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan Luwu dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan uraian penjelasan tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Berdasar pada pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi tidak hanya menjadi metode untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, secara integratif strategi adalah sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja reformasi birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (added value) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD;

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu 2019-2024

Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan.
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan		
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman
	Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	
Misi 4 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;		
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengembangan koperasi dan UMKM
	Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis		
Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius		
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunnya kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya
Misi 7 : Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Meningkatkan Kemandirian Desa	Berkembangnya Perekonomian Desa	Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
Misi 8 : Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan		
Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik		
Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah
	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	Peningkatan perlindungan sosial
	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan

daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah. Adapun penjelasan rumusan strategi di atas adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1. Peningkatan kualitas tata kelola dan tata laksana pemerintahan.

Peningkatan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan atau reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menata, memperbaiki dan mengembangkan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi berarti pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan agar berkinerja lebih optimal. Reformasi birokrasi dilakukan pada seluruh aspek pemerintahan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan paradigma aparatur. Hal ini akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian dan pengelolaan aset daerah secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

2. Strategi 2. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Kabupaten Luwu. Pembangunan pendidikan dan kesehatan sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga harus dengan mutu yang sama bagi setiap anak bangsa, agar setiap anak memperoleh pendidikan dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

3. Strategi 3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang amat penting untuk segera diwujudkan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek teknis medis yang berhubungan langsung antara pelayanan medis dan pasien, atau mutu kesehatan dalam sudut pandang sosial dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk manajemen administrasi, keuangan, peralatan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pembangunan kesehatan.

Terkait dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, maka Pemerintah wajib meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Selain itu, kepada masyarakat juga terus diberikan pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat.

4. Strategi 4. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan akses ke kawasan terisolir seperti daerah tertinggal dan perbatasan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan/ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini akhirnya juga menyisakan banyak masalah pembangunan yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi “bom” yang meruntuhkan sendi-sendi pembangunan negara. Konsentrasi pembangunan di perkotaan akan memunculkan komplikasi pada

masalah lingkungan, ketersediaan pangan, kemiskinan, dan berbagai masalah politik dan sosial lainnya.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan sebagai bagian dari transportasi mempunyai peranan untuk sarana pendukung kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan memerlukan kerangka penanganannya yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam pencapaiannya, pembangunan daerah terpencil dan perbatasan perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten/kota, demi mengabdikan kepada bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Dalam perkembangannya, pembangunan infrastruktur yang terjadi tidaklah selalu harus sama jumlahnya di tiap daerah, dengan infrastruktur yang dianggap berkeadilan adalah infrastruktur yang mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia, sesuai dengan kebutuhan.

5. Strategi 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Rumah mempunyai fungsi yang multidimensi. Selain fungsi fisik, rumah juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yang dapat terlihat dari pemanfaatannya. Agar dapat berfungsi secara layak, rumah harus dilengkapi infrastruktur dasar seperti taman, ruang terbuka, jaringan jalan dan sistem transportasi, jaringan listrik dan air minum. Penyediaan tersebut harus sesuai dengan tata ruang yang ada sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi baik dalam skala lingkungan perumahan maupun kota.

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

6. Strategi 6. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah pendapatan riil per kapita. Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi, yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan. Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita berarti mencerminkan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, mengembangkan produk unggulan di setiap wilayah, menggalakkan program kerja dan transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Upaya pemerintah yang tidak kalah penting adalah pengembangan koperasi dan UMKM yang merupakan landasan utama perekonomian negara. Melalui pengelolaan koperasi dan UMKM secara profesional dan bantuan pemerintah terhadap akses permodalan, pemerataan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

7. Strategi 7. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian yang bertujuan untuk memajukan perekonomian daerah. Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Luwu berpendidikan rendah dengan pengalaman yang kurang memadai (minim), sehingga belum memiliki keterampilan dan keahlian yang baik serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran pemuda dan masyarakat untuk lebih meningkatkan keterampilan, juga keahlian diri, supaya daya saing tenaga kerja dan iklim wirausaha Kabupaten Luwu lebih berkualitas agar dapat menyerap tenaga kerja profesional dengan hasil *income* yang cukup untuk kebutuhan kehidupan layak.

Di samping itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan pencari kerja yang terus meningkat di setiap tahunnya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Sehingga lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal mampu menampung tenaga kerja di seluruh wilayah.

8. Strategi 8. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian

Peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Luwu sebagai bagian dari bangsa Indonesia merupakan hal yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan

kemampuan yang sudah ada menjadi lebih baik, dengan menggunakan metode, proses, program dan upaya yang digerakkan pihak yang berwenang (memiliki otoritas) sesuai dengan undang-undang demi mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih dari kondisi sebelumnya.

Bidang pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu karena keadaan wilayah yang merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Fasilitasi di bidang permodalan, peningkatan keahlian, dan akses pasar produk pertanian perlu ditingkatkan.

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penyediaan sumber daya produksi. Pemberdayaan masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin.

9. Strategi 9. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya

Agama dan budaya merupakan obyek dan indikator keberhasilan pembangunan daerah. Setiap orang Indonesia memiliki agama dan kepercayaan yang diyakini, serta memahmi budaya leluhur yang dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Namun demikian, pemahaman terhadap agama dan budaya masih belum menjadi perilaku yang mewarnai setiap gerak kehidupan, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam bermasyarakat.

Pembangunan agama dan budaya merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat.

Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, suap dan perjudian. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Budaya dan seni daerah merupakan kekayaan bangsa yang harus diperhatikan secara serius dan seksama, terutama dalam memasuki era otonomi daerah. Hal ini dikarenakan budaya daerah dapat memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa, terlebih untuk Kabupaten Luwu yang memiliki sejarah yang gemilang dimasa lalu. Pada masa sekarang ini seni budaya daerah sudah mulai terkikis dan tergerus oleh budaya luar.

Memasuki era otonomi daerah maka budaya daerah hendaknya menjadi sumber bagi pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa. Maka diharapkan untuk dapat kembali kepada akar budaya kita sendiri. Apabila tidak maka diprediksi sangat mungkin kita tidak akan memiliki jati diri yang benar-benar tumbuh.

Budaya daerah diharapkan menjadi fundamen utama dalam pembentukan jati diri bangsa karena jati diri merupakan karakteristik jiwa bangsa yang bersumber dari akar budaya daerah masing-masing. Maka dengan sendirinya akan memberi jati diri pada setiap generasi anak Bangsa Indonesia di Kabupaten Luwu.

10. Strategi 10. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat agar makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh

informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik, maka strategi untuk meningkatkan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa juga harus spesifik dan menurut kondisi lokal. Pemahaman ini harus diketahui oleh aparatur pemerintahan desa agar mereka mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif dalam memberdayakan masyarakat desa.

11. Strategi 11. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

Iklim investasi di Kabupaten Luwu masih belum kondusif mengingat infrastruktur perhubungan belum optimal dalam pengembangannya, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan. Hal ini menjadi ganjalan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu. Masih rendahnya kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu parameter minimnya investasi yang digelontorkan investor.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Semakin banyak dan tinggi nilai investasi, semakin besar pula dampak dan manfaat seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah. Selama lima tahun ke depan, penguatan investasi akan ditempuh oleh pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) melalui dua pilar kebijakan yaitu peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada pilar pertama, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Adapun pada pilar kedua, arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.

12. Strategi 12. Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah

Penyelenggaraan pembangunan daerah membutuhkan berbagai regulasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Regulasi secara umum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

Regulasi merupakan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan, sebagai pengatur, dan juga sebagai pengelola usaha untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi untuk menetapkan regulasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat serta penegakannya merupakan hal yang tepat.

13. Penerapan kebijakan berbasis gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik. Serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level. Segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan harus dihilangkan, melalui keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki. Pengarusutamaan yang sistematis dari perspektif gender di dalam implementasi agenda SDGs sangat penting.

Apabila tidak ada *mainstreaming* gender, khususnya perempuan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang memadai, akan berpengaruh pada kualitas bangsa di masa depan. Perempuan harus mendapatkan layanan yang baik mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, sampai nifas. Apabila pemerintah tidak *mainstream*-kan kesehatan reproduksi perempuan, kualitas generasi mendatang yang lahir dari perempuan akan terpengaruh.

Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa meningkatnya taraf hidup perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang teramat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Oleh sebab itu, salah satu strategi yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah meningkatkan taraf hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

14. Strategi 13. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup

Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ekosistem lingkungan tercemar dan rusak maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk memelihara kualitas lingkungan dengan cara mengelola sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memerhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Pengelolaan sumber daya

alam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, namun masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

15. Strategi 14. Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana

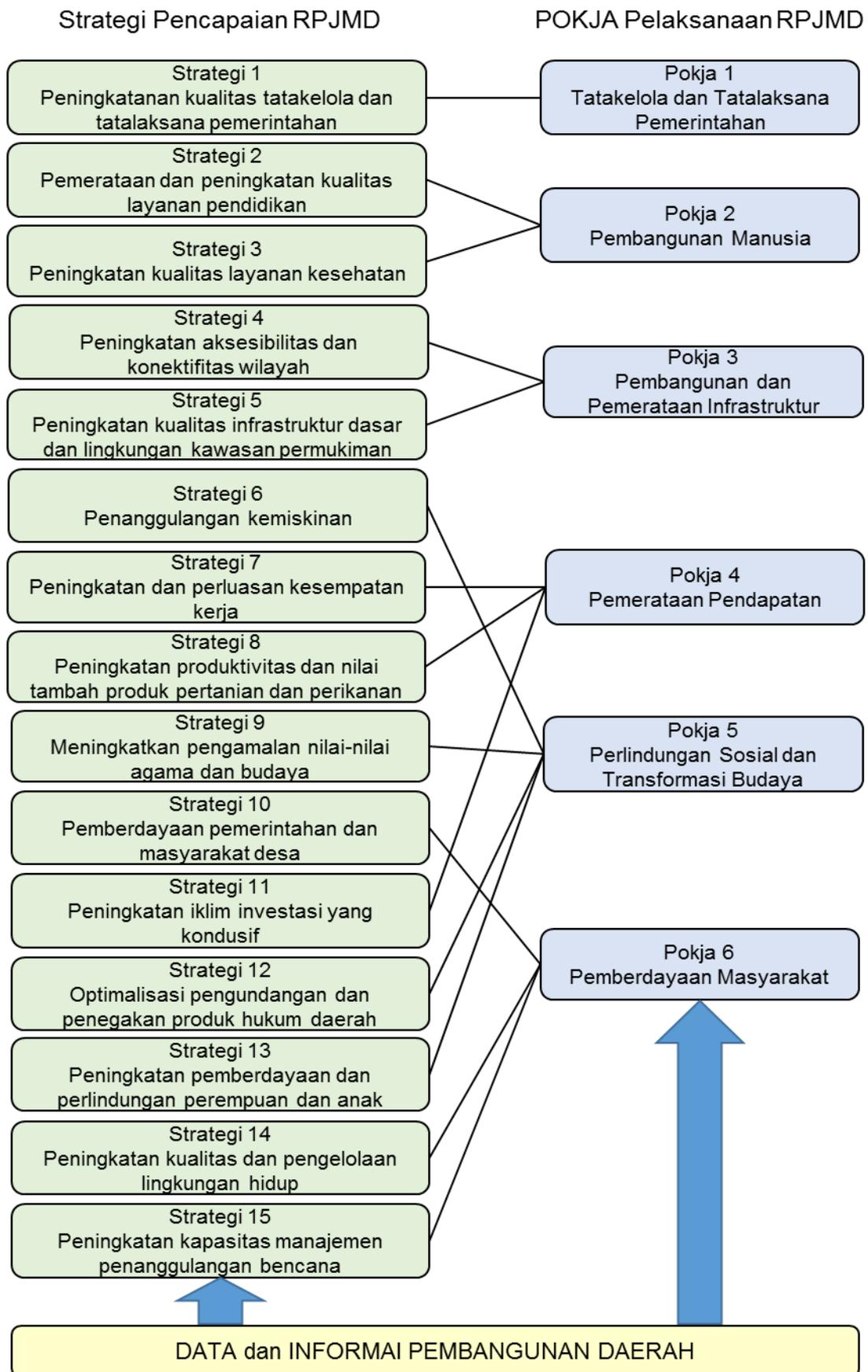
Kabupaten Luwu tergolong wilayah yang rawan bencana, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan langkah-langkah tertentu dalam melakukan penanggulangan bencana. Langkah pertama adalah membuat perencanaan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan informasi akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi oleh daerah yakni risiko bencana. Guna mengetahui risiko tersebut, maka dilakukan kajian risiko bencana.

Setelah mengetahui risiko bencana, maka langkah selanjutnya dalam penanggulangan bencana adalah melakukan pengelolaan risiko bencana tersebut. Kegiatan ini intinya adalah menentukan langkah, program, dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi risiko bencana. Kemudian langkah terakhir adalah membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk respons yang lebih baik. Setelah mengetahui risiko bencana, menyusun upaya pengelolaan risiko bencana, dan melakukan investasi, maka berbagai pengetahuan tersebut perlu menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan geladi atau latihan kesiapsiagaan.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui strategi sebagaimana diuraikan di atas perlu dikoordinasikan dengan baik agar tidak tumpang tindih tetapi bersinergi dengan baik. Oleh karena itu dibentuk kelompok kerja (POKJA) yang menyusun kerangka kerja (siapa melakukan apa) serta target-target yang harus dicapai pada waktu tertentu (*milestone*).

Dari 15 (empat belas) strategi yang ditetapkan, disusun 5 (lima) POKJA yaitu: (1) Tatakelola dan tatalaksana pemerintahan; (2) Pembangunan manusia; (3) Pembangunan dan pemerataan infrastruktur; (4) Pemerataan pendapatan masyarakat; dan (5) Pemberdayaan masyarakat. Keterkaitan/hubungan antara strategi dan POKJA dapat dilihat pada skema berikut ini.

Gambar 6.1
Skema Keterkaitan Strategi dan POKJA Pelaksanaan RPJMD



6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana ditetapkan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode keperiode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan limatahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional perangkat daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Gambar 6.2
Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan

pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Fokus atau tema pembangunan pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 dijabarkan tahapannya sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2020)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2020 menjadi dasar bagi penyesuaian kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu.

Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Luwu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah "OPTIMALISASI SUMBER DAYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENDAPATAN DAERAH". Dengan tema ini fokus pembangunan daerah pada optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan daya saing daerah yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat, peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan berbasis pembangunan pedesaan, optimalisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2021)

Pada tahun 2021 ini pembangunan mengarah pada pembangunan infrastruktur, penguatan tatakelola dan tatalaksana pemerintahan serta pengembangan perekonomian daerah. Sehingga tema pembangunan Kabupaten Luwu pada tahun 2021 adalah "PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAN PENGUATAN BIROKRASI YANG MELAYANI, TANGGUH DAN MANDIRI ". Sesuai tema di atas maka beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun ini adalah dengan pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Kabupaten Luwu terutama infrastruktur pembangunan jalan dan aksesibilitas masyarakat. Hal ini

dilakukan agar memberi kemudahan pada pendistribusian barang dan orang keseluruh wilayah. Dengan itu, diharapkan beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi) akan semakin meningkat. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur ini dapat dilakukan percepatan pembangunan. Disamping pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan maka perlu didukung birokrasi pemerintahan yang handal dan sadar melayani. Sehingga pada tahun ini dilakukan upaya-upaya untuk menata dan memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan agar birokrasi Kabupaten Luwu dapat berkinerja melayani masyarakat lebih optimal.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2022)

Pada tahun 2022 pembangunan Kabupaten Luwu menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Luwu pada tahun 2022 adalah "PENGUATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN AGROINDUSTRI YANG BERKELANJUTAN". Sesuai tema ini pembangunan dilakukan dengan menitikberatkan pembangunan pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini dilakukan untuk mendorong potensi-potensi unggulan daerah dalam bidang pertanian dalam arti luas. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan ketersediaan bahan baku untuk mendukung agroindustri. Agroindustri ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk melalui peningkatan nilai tambah suatu produk, sehingga harga jual meningkat dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas perdagangan, industri dan sektor jasa. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa upaya yang akan dilakukan yaitu pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif, pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat dan kondusif yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai, peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan potensi kepariwisataan daerah, peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2023)

Pada tahun 2023 pembangunan Kabupaten Luwu menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah yang lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah yang lain. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Luwu pada tahun 2023 adalah "PENGUATAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING". Dengan tema tersebut maka pembangunan pada tahun dilakukan upaya untuk pengembangan produk-produk unggulan daerah yang lebih berkualitas dan inovatif. Hal ini bertujuan untuk produk-produk daerah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah, sehingga diharapkan struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Luwu menjadi lebih kuat. Perekonomian yang berdaya saing menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat meningkat dan pendapatan asli daerah akan meningkat, hal ini dikarenakan dengan peningkatan perekonomian masyarakat menjadi pendorong dalam struktur ekonomi Kabupaten Luwu.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2024)

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Oleh karena itu fokus pembangunan pada tahun ini ditekankan pada penguatan struktur perekonomian dan mempersiapkan keberlanjutan pembangunan. Tema pembangunan pada tahun 2024 adalah "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT". Sesuai visi RPJMD yang ingin mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, maka pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dan merata menjadi satu kesatuan yang diarahkan mampu mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di Kabupaten Luwu. Salah satu prioritas pada tahun adalah penyelesaian prioritas kebijakan sebelumnya dan kemudian mempersiapkan arah kebijakan pembangunan pada periode berikutnya.

Menindaklanjuti tahapan dan fokus pembangunan diatas, maka arah kebijakan tiap tahun yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu disajikan dalam keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Strategi	Arah Kebijakan	2020	2021	2022	2023	2024	Program Pembangunan Daerah/ Program Perangkat Daerah	
S1. Peningkatan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah						1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
							2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
							3. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
							4. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	
							5. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	
							6. Program Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	
							7. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan	
							8. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	
							9. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perekonomian	
							10. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
							11. Program Pengembangan Sumber Daya dan Minat Baca	
							12. Program Penyelenggaraan Kearsipan	
							13. Program Penyelenggaraan Transmigrasi	
							14. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
							15. Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
		1. Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah						<i>P.1. Program Kelitbangan Daerah (Prioritas)</i>
								<i>P.2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</i>
							<i>P.3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</i>	
							16. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
							17. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	

Strategi	Arah Kebijakan	2020	2021	2022	2023	2024	Program Pembangunan Daerah/ Program Perangkat Daerah
							Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
							18. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
							19. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan
							20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi
							<i>P.4. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>
	2. Penerapan <i>merit system</i> dalam pembinaan dan pengembangan pegawai						<i>P.5. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur</i>
							21. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
							22. Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
	3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah						23. Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur
							<i>P.6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>
							<i>P.7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah</i>
							24. Program Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah
	4. Pembangunan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat						25. Program Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
							26. Program Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB
							<i>P.8. Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah</i>
							<i>P.9. Program Penyelenggaraan E-Government</i>
							27. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	5. Peningkatan kualitas pelayanan publik						28. Program Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informatika
							29. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)
							<i>P.10. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>
							30. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
							31. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
							32. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
							33. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Strategi	Arah Kebijakan	2020	2021	2022	2023	2024	Program Pembangunan Daerah/ Program Perangkat Daerah
							34. Program Deposit, Akusisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka
							35. Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
							36. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
							37. Program Pembinaan Usaha Perdagangan
							38. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
							39. Program Pembinaan dan Pengawasan Industri
S2. Pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan	6. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal						<i>P.11. Program Pengembangan Pendidikan Non Formal</i>
							40. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan
							<i>P.12. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>
							41. Program Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan
	7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan						42. Program Pengembangan Pemuda
							<i>P.13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</i>
S3. Peningkatan kesehatan masyarakat	8. Pemerataan layanan kesehatan						<i>P.14. Program Pembinaan Sekolah Dasar</i>
							<i>P.15. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</i>
							<i>P.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>
							43. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Manajemen dan Informasi Pelayanan Kesehatan
	9. Peningkatan kualitas layanan kesehatan						44. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
							45. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
							46. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD
							<i>P.17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</i>
S4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	10. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan						47. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
							48. Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
							<i>P.18. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</i>
							<i>P.19. Program pembangunan jalan dan jembatan</i>
						49. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	
						<i>P.20. Program Preservasi jalan dan jembatan</i>	

Strategi	Arah Kebijakan	2020	2021	2022	2023	2024	Program Pembangunan Daerah/ Program Perangkat Daerah
	11. Pengembangan aksesibilitas wilayah						50. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
							<i>P.21. Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara</i>
							51. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
S5. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman	12. Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi						52. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
							<i>P.22. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</i>
	13. Penataan lingkungan kawasan permukiman						<i>P.23. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum</i>
							<i>P.24. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman</i>
							53. Program Pengembangan Kota Hijau
							<i>P.25. Program Pengembangan Perumahan</i>
S6. Pengembangan koperasi dan UMKM	14. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM						54. Program Pembangunan, Peningkatan, Pengawasan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung
							55. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
	15. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan						<i>P.26. Program Pembangunan dan Penataan PSU</i>
							<i>P.27. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro</i>
							56. Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	16. Pengembangan pariwisata daerah						<i>P.28. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</i>
							<i>P.29. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</i>
							<i>P.30. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</i>
S7. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	17. Meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan tenaga kerja						<i>P.31. Program pengembangan Destinasi wisata</i>
							57. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	18. Peningkatan layanan jasa konstruksi						58. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
							<i>P.32. Program pengembangan Ekonomi Kreatif</i>
S8. Peningkatan produktivitas	19. Intensifikasi dan ekstensifikasi						<i>P.33. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>
							<i>P.34. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>
						<i>P.35. Program Pembinaan Jasa Konstruksi</i>	
						<i>P.36. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</i>	
						<i>P.37. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan</i>	

Strategi	Arah Kebijakan	2020	2021	2022	2023	2024	Program Pembangunan Daerah/ Program Perangkat Daerah	
dan nilai tambah produk unggulan daerah	lahan pertanian/ perkebunan						59. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	
							60. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura	
							61. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Komoditas Perkebunan	
							62. Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan	
							63. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
	20. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani/nelayan							64. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
								65. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
								<i>P.38. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian</i>
								66. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
								67. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
S9. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya	21. Pembentukan karakter dan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara						<i>P.39. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	
							69. Program Pembudayaan Olahraga	
							70. Program Peningkatan Prestasi Olahraga	
	22. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya Luwu							<i>P.40. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>
								<i>P.41. Program Pengelolaan Budaya Daerah</i>
								<i>P.42. Program Pembinaan Pemerintahan Desa</i>
S10. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa	23. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa						71. Program Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa	
							<i>P.43. Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa</i>	
	24. Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa						72. Program Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	
S11. Peningkatan iklim investasi yang kondusif	25. Mengurangi risiko investasi di Kabupaten Luwu						<i>P.44. Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan</i>	
							73. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	
	26. Meningkatkan promosi potensi investasi daerah							74. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
								<i>P.45. Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal</i>

Strategi	Arah Kebijakan	2020	2021	2022	2023	2024	Program Pembangunan Daerah/ Program Perangkat Daerah
S12. Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah	27. Penyusunan dan penetapan peraturan perundangan daerah						<i>P.46. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan</i>
							75. Program Bina Ideologi dan Pengembangan wawasan Kebangsaan
							<i>P.47. Program</i> peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
							76. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia
							77. Program Pembinaan Organisasi Sosial Politik
	28. Sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah						<i>P.48. Program</i> pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
							78. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
							<i>P.49. Program Peningkatan</i> Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
							79. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Linmas
							80. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
S13. Peningkatan perlindungan sosial	29. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Luwu						<i>P.50. Program</i> Penataan Pertanahan
							81. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
							<i>P.51. Program</i> Perlindungan dan Jaminan Sosial
							82. Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
							83. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
							84. Program Pemberdayaan Sosial
							85. Program Pengendalian Penduduk
S14. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	30. Peningkatan keberdayaan perempuan						86. Program Keluarga Berencana
							87. Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
							<i>P.52. Program</i> perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
	31. Peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan						88. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga
							<i>P.53. Program</i> Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
							89. Program Penguatan Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					90. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		
					<i>P.54. Program</i> pemenuhan Hak anak dan perlindungan khusus anak		

Strategi	Arah Kebijakan	2020	2021	2022	2023	2024	Program Pembangunan Daerah/ Program Perangkat Daerah
S15. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	32. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA						<i>P.55. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i>
							91. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
							92. Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
							93. Program Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
S16. Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana	33. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana						<i>P.56. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir</i>
							94. Program Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
							95. Program Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
	34. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana						<i>P.57. Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanganan Bahaya Kebakaran</i>
							<i>P.58. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana</i>
							96. Program Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana

6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena posisinya yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Adapun program pembangunan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4.
Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif
RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel																			
		Tujuan 1.																	
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>n.a</i>	Cukup	17.136.683	Baik	17.594.277	Baik	18.645.949	Baik	19.429.373	Baik	20.790.771	Baik	93.597.053			
		Sasaran 1.1.																	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	7.469.131	B	7.934.825	BB	8.593.754	BB	9.147.305	BB	10.305.024	BB	43.450.039			
4	02	01	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas)	Skor LPPD	Angka	2.771	2.885	4.365.000	2.983	4.807.966	3.126	5.285.389	3.185	5.785.257	3.200	6.343.931	3.200	26.587.542
4	02	01	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas)	Cakupan SDM Apartaur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor	%	0	100,00	800.000	100,00	879.412	100,00	969.717	100,00	1.063.992	100,00	1.170.835	100,00	4.883.956
4	03	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	%	100	100,00	1.434.909	100,00	1.462.109	100,00	1.582.818	100,00	1.582.718	100,00	1.952.836	100,00	8.015.390
4	03	01	15	Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Data dan informasi pencapaian sasaran RPJMD	dokumen	0	4	571.186	4	527.794	4	457.794	4	457.794	4	457.794	20	2.472.363
4	03	01	24	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	60,00	100,00	298.036	100,00	257.544	100,00	298.036	100,00	257.544	100,00	379.629	100,00	1.490.789
		Sasaran 1.2.																	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LKPD dari BPK RI	Jenis Opini	WTP	WTP	4.661.529	WTP	4.731.478	WTP	5.089.221	WTP	5.284.094	WTP	5.487.773	WTP	25.254.094		
0	04	05	40	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas)	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	0,00	100,00	1.961.974	100,00	2.095.383	100,00	2.257.376	100,00	2.416.231	100,00	2.738.474	100,00	11.469.438
	04	05	43	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas)	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	0,00	96,00	1.480.200	98,00	1.317.900	98,00	1.497.200	98,00	1.514.300	100,00	1.352.900	100,00	7.162.500
4	04	06	44	Program Peningkatan	Persentase Realisasi Pajak	%	97,19	98,99	1.219.355	98,99	1.318.195	98,99	1.334.645	98,99	1.353.563	98,99	1.396.399	98,99	6.622.156

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas)	Daerah terhadap target yang ditetapkan															
	Sasaran 1.3.																
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	5.006.023	Baik	4.927.974	Baik	4.962.974	Sangat Baik	4.997.974	Sangat Baik	4.997.974	Sangat Baik	24.892.920	
0 4 05 09	Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN	Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN	0	n.a	100	668.049	100	520.000	100	520.000	100	520.000	100,00	520.000	100,00	2.748.049	
0 4 05 09	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi	0	n.a	0	906.360	0	906.360	0	906.360	0	906.360	50,00	906.360	50,00	4.531.800	
0 4 05 09	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon	0	n.a	100	3.431.614	100	3.501.614	100	3.536.614	100	3.571.614	100,00	3.571.614	100,00	17.613.071	
Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat																	
	Tujuan 2.																
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,37	70,40	126.728.808	70,87	128.453.592	71,34	132.788.989	71,98	142.060.393	72,51	147.638.897	72,51	677.670.679	
	Sasaran 2.1.																
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	63,19	63,72	72.246.377	64,42	73.004.049	65,12	75.014.397	66,88	82.136.550	67,05	85.688.005	67,05	388.089.378	
1 01 01 15	Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	35,15	60,04	785.000	61,55	740.000	63,08	740.000	64,66	835.000	66,28	810.000	66,28	3.910.000	
1 01 01 16	Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas)	APM SD/MI/Paket A	%	95,51	98,23	54.610.000	100,00	55.105.000	100,00	55.886.250	100,00	57.380.690	100,00	59.729.455	100,00	282.711.395	
1 01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	Persen	87,05	89,23	13.381.427	91,46	13.625.349	93,74	14.078.759	96,09	14.599.431	98,49	15.197.454	98,49	70.882.420	
2 16 01 17	Program Pengelolaan Budaya Daerah (Prioritas)	Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah	kali	6	6,00	3.469.950	6	3.533.700	6	4.309.388	6	9.321.429	7	9.951.096	31	30.585.562	
	Sasaran 2.2.																
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Tahun	76,31	76,55	54.482.431	76,64	55.449.543	76,71	57.774.593	76,84	59.923.843	76,90	61.950.893	76,90	289.581.301	
1 02 01 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas)	Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan	%	69,84	85,00	52.184.121	85,00	53.175.633	85,00	55.500.683	85,00	57.649.933	85,00	59.676.983	85,00	278.187.351	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
##	02	01	16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0,00	80,00	2.298.310	80,00	2.273.910	80,00	2.273.910	80,00	2.273.910	80,00	2.273.910	80,00	11.393.950
Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan																			
Tujuan 3.																			
				Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		n.a	Cukup	187.620.946	Cukup	180.386.462	Baik	178.857.819	Baik	188.146.504	Baik	188.130.807	Baik	923.142.538
				Sasaran 3.1.															
				Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Persentase jalan kabutaen dalam kondisi mantap		21,84	23,87	100.299.550	26,26	109.184.650	28,88	107.835.350	31,77	113.530.750	34,95	117.260.150	34,95	548.110.450
1	03	01	14	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	58,11	61,83	85.125.000	64,23	94.312.500	66,64	97.987.500	69,05	103.500.000	71,45	107.175.000	71,45	488.100.000
1	03	01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,8638	0,8643	4.250.000	0,8650	5.000.000						0,8650	9.250.000	
1	03	01	18	Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,17	22,24	9.400.000	22,8	8.700.000	23,37	8.700.000	23,95	8.700.000	24,55	8.700.000	24,55	44.200.000
2	09	01	17	Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	411.055	415.055	1.524.550	421.300	1.172.150	433.050	1.147.850	440.055	1.330.750	451.055	1.385.150	451.055	6.560.450
				Sasaran 3.2.															
				Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase penduduk berakses air minum	<i>persen</i>	82,04	84,09	58.411.081	86,19	45.445.072	88,35	44.421.419	90,56	44.629.499	92,82	44.813.579	92,82	237.720.650
					Rasio jaringan irigasi	<i>persen</i>	59,94	63,00		65,00		70,00		75,00		80,00		80,00	
1	03	01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Persen	36,33	37,24	27.014.729	38,17	29.378.039	39,12	29.574.119	40,10	29.782.199	41,10	29.966.279	41,10	145.715.365
1	03	01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	%	80,04	80,96	31.396.352	81,85	16.067.033	82,73	14.847.300	83,6	14.847.300	84,45	14.847.300	84,45	92.005.285
				Sasaran 3.3.															

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	persen	75,45	76,00	28.910.315	77,10	25.756.740	78,05	26.601.050	79,00	29.986.255	81,00	26.057.078	81,00	137.311.438		
04	01	15	Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas)	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	%	0	15,85	9.290.700	21,63	5.962.900	27,33	4.657.210	42,28	7.042.415	49,92	6.813.238	49,92	33.766.463	
				Persentase lingkungan kawasan permukiman perdesaan yang tertata	%	0	4,83	-	9,66	-	14,49	-	19,32	-	24,15	-	24,15	-	
				Persentase lingkungan kawasan permukiman perkotaan yang tertata	%	0	20,00	-	40,00	-	60,00	-	80,00	-	100,00	-	100,00	-	
04	01	16	Program Pengembangan Perumahan (Prioritas)	Persentase rumah layak huni	%	20	20,54	8.722.115	20,84	9.046.340	30,15	10.046.340	30,76	11.046.340	40,01	7.646.340	40,01	46.507.475	
04	01	17	Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan PSU	Persen	n.a	100,00	10.897.500	100,00	10.747.500	100,00	11.897.500	100,00	11.897.500	100,00	11.597.500	100,00	57.037.500	
Misi 4 Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja																			
			Tujuan 4.																
			Meningkatnya perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	persen	7,21	7,30	13.913.310	7,65	14.816.455	7,80	13.828.905	7,80	11.883.120	7,85	11.432.700	7,85	65.874.490	
			Sasaran 4.1.																
			Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB perkapita	Juta Rp	13,97	29,87	-	32,11	-	34,52	-	37,11	-	38,00	-	38,00	-	
				Indeks Gini		0,362	0,360		0,358		0,342		0,335		0,320		0,320		
2	11	01	20	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas)	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,00	30,35	-	30,75	-	30,95	-	40,25	-	40,58	-	40,58	
2	11	01	19	Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
				Sasaran 4.2.															
				Mengembangkan destinasi wisata	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Obyek wisata	0	1	8.623.786	2	12.530.286	3	11.250.286	4	9.600.286	5	9.317.286	5	51.321.930
##	02	01	20	Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas)	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu	Destinasi	0	6	7.441.500	6	11.448.000	6	10.168.000	6	8.518.000	6	8.235.000	6	45.810.500
##	02	01	21	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	%	n.a	200	1.182.286	250	1.082.286	300	1.082.286	350	1.082.286	400	1.082.286	400	5.511.430

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Sasaran 4.3.																			
		Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,47	4,36	5.289.524	4,25	2.286.169	4,14	2.578.619	4,04	2.282.834	3,94	2.115.414	3,94	14.552.560		
1	03	01	33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	0	100,00	185.100	100,00	245.900	100,00	496.900	100,00	270.100	100,00	246.100	100,00	1.444.100
2	01	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)	Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	%	41,00	100,00	4.662.680	100,00	1.583.185	100,00	1.451.235	100,00	1.440.380	100,00	1.441.130	100,00	10.578.610
2	01	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas)	Perluasan Kesempatan kerja sektor formal maupun informal	%	4,04	3,70	214.079	3,91	214.079	4,13	416.379	4,35	330.849	100	214.079	100	1.389.465
2	01	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Prioritas)	Persentase Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha	%	100	100,00	227.665	100,00	243.005	100,00	214.105	100,00	241.505	100,00	214.105	100,00	1.140.385
Misi 5 Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis																			
Tujuan 5.																			
				Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka skor	76,27	77,29	23.087.250	79,23	14.888.750	81,21	19.788.750	83,24	13.268.750	85,32	14.553.750	85,32	85.587.250
Sasaran 5.1.																			
				Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	persen	7,04	7,20	23.087.250	7,30	14.888.750	7,40	19.788.750	7,50	13.268.750	7,60	14.553.750	7,60	85.587.250
3	03	01	25	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan (Prioritas)	Persentase kelompok tani yang memperoleh prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	%	0	0,00	20.140.750	0,00	13.242.250	0,00	16.842.250	0,00	11.622.250	0,00	11.622.250	0,00	73.469.750
3	03	01	30	Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas)	Persentase penyuluh yang meningkat kapasitasnya	%	0	20,00	2.946.500	20,00	1.646.500	20,00	2.946.500	20,00	1.646.500	18,00	2.931.500	18,00	12.117.500
Misi 6 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius																			
Tujuan 6.																			
				Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	persen	4,00	3,20	3.715.127	2,80	3.578.080	2,43	3.563.768	2,38	3.762.596	2,34	3.626.475	2,34	18.246.047
Sasaran 6.1.																			
				Menurunnya kasus menerima suap, penipuan	Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	persen	44,48 (2016)	27,50	3.715.127	25,00	3.578.080	23,00	3.563.768	21,00	3.762.596	20,00	3.626.475	20,00	18.246.047

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		dan penggelapan																	
1	05	02	23	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)	Persentase Penegakan PERDA	%	78,00	79,95	656.847	81,95	489.217	84,00	444.017	86,10	611.647	88,25	444.017	88,25	2.645.745
3	04	01	39	Program Peningkatan Kapasitas Legislati (Prioritas)	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100,00	100,00	3.058.280	100,00	3.088.863	100,00	3.119.751	100,00	3.150.949	100,00	3.182.458	100,00	15.600.302
3	03	01	29	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Misi 7 Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa																			
				Tujuan 7.															
				Meningkatkan kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	persen	n.a	40,00	2.951.578	60,00	4.483.404	65,00	3.001.444	70,00	3.573.322	80,00	2.740.846	80,00	16.750.594
				Sasaran 7.1.															
				Berkembangnya kemandirian desa	Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional	n.a	4	2.951.578	5	4.483.404	6	3.001.444	9	3.573.322	11	2.740.846	11	16.750.594	
##	07	01	23	Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas)	Jumlah BUMDes Bersama	4	0	5	1.758.543	6	1.702.243	7	1.707.803	8	1.707.803	9	1.381.919	9	8.258.311
2	07	01	20	Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)	Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib	%	n.a.	100	1.193.035	100	2.781.161	100	1.293.641	100	1.865.519	100	1.358.927	100	8.492.283
Misi 8 Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan																			
				Tujuan 8.															
				Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi PMA dan PMDN	Miliar Rp	16,69	17,11	4.232.772	17,53	4.588.998	17,97	4.513.210	18,42	4.554.082	18,88	4.525.124	18,88	22.414.186
				Sasaran 8.1.															
				Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi	Perusahaan	13	13	4.232.772	13	4.588.998	14	4.513.210	14	4.554.082	14	4.525.124	14	22.414.186
					Persentase wirausaha muda	Persen	0,50	1,00		1,50		2,00		2,50		3,00		3,0	
2	10	01	20	Program Penyelenggaraan E-Government (Prioritas)	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	%	100,00	0,00	3.543.003	0,00	3.938.762	0,00	3.771.974	0,00	3.721.847	0,00	3.691.888	0,00	18.667.474
2	12	01	20	Program Penyelenggaraan	Jumlah izin yang dikeluarkan	%	50,00	65,00	689.770	65,00	650.236	65,00	741.236	65,00	832.236	65,00	833.236	65,00	3.746.712

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas)	berdasarkan SOP															
Misi 9 Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong publikasi publik																	
	Tujuan 9.																
	Meningkatnya produk hukum daerah	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah	persen	n.a	80,00	11.355.035	81,00	10.524.102	82,00	10.906.294	83,00	12.082.866	84,00	11.407.136	84,00	56.275.432	
	Sasaran 9.1.																
	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hukum	persen	100,00	100,00	7.001.224	100,00	6.897.229	100,00	6.915.089	100,00	7.626.969	100,00	7.043.106	100,00	35.483.616	
##	05 02 23	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)	Persentase Penegakan PERDA	%	78,00	79,95	656.847	81,95	489.217	84,00	444.017	86,10	611.647	88,25	444.017	88,25	2.645.745
4	04 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	100,00	100,00	6.243.517	100,00	6.305.952	100,00	6.369.012	100,00	6.432.702	100,00	6.497.029	100,00	31.848.211
	05 02 24	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	100,00	100,00	100.860	100,00	102.060	100,00	102.060	100,00	582.620	100,00	102.060	100,00	989.660
		Sasaran 9.2.															
		Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	30. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00	100,00	1.976.721	100,00	1.685.895	100,00	1.756.232	100,00	2.432.573	100,00	2.025.786	100,00	9.877.206
	06 01 18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)	Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	0,00	100,00	1.976.721	100,00	1.685.895	100,00	1.756.232	100,00	2.432.573	100,00	2.025.786	500,00	9.877.206
		Sasaran 9.3.															
		Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka Indeks	61,61	61,90	2.377.090	70,27	1.940.978	71,01	2.234.974	72,00	2.023.324	72,95	2.338.244	72,95	10.914.610
2	02 01 20	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	n.a	50,00	994.112	71,43	956.926	57,14	1.021.112	57,14	896.626	78,57	1.104.612	78,57	4.973.388

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	(Rp)			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
02	01	21	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	0	80,00	1.382.978	50,00	984.052	72,50	1.213.862	50,00	1.126.698	72,50	1.233.632	72,50	5.941.222	
Misi 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana																			
Tujuan :																			
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	n.a	Cukup	4.816.524	Baik	4.816.524	Baik	4.816.524	Baik	4.816.524	Sangat Baik	4.816.524	Sangat Baik	24.082.619		
Sasaran 10.1.																			
			Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	persen	39,22	50,00	966.524	60,00	966.524	75,00	966.524	87,50	966.524	100,00	966.524	100,00	4.832.619	
##	05	01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	0	50	966.524	60	966.524	70	966.524	80	966.524	90	966.524	350	4.832.619
Sasaran 10.2.																			
			Meningkatnya kualitas menejemen pengelolaan bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka Indeks	n.a	30,00	3.850.000	30,00	3.850.000	30,00	3.850.000	30,00	3.850.000	30,00	3.850.000	30,00	19.250.000	
1	06	02	28	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas)	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	750.000
##	05	03	31	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas)	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang dilaporkan	%	0,00	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	11.000.000
1	03	01	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir	meter	1.445	700	1.500.000	700	1.500.000	700	1.500.000	700	1.500.000	700	1.500.000	5.185	7.500.000
JUMLAH									395.558.032		384.130.642		390.711.653		403.577.530		409.663.030		1.983.640.887

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun kedepan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan berapa anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan.

7.1.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020-2024. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 7.1
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Luwu 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,06	7,11	7,23	7,31	7,37	7,45
2	Tingkat Pengangguran (%)	4,36	4,1	3,77	3,39	3,04	2,78
3	Inflasi (%)	4,06	3,96	3,86	3,76	3,57	3,39
4	PDRB per Kapita (Rp Juta)	38,02	38,97	39,95	40,95	41,97	43,02
5	Tingkat Kemiskinan (%)	13,93	13,71	13,62	13,53	11,20	10,67
6	Indeks Pembangunan Manusia	69,71	70,4	70,87	71,34	71,98	72,51

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Luwu yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Luwu lima tahun kedepan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan dapat memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga Kabupaten Luwu diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian Provinsi dan Nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan secara konsisten terus meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Luwu akan terus membaik bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga peningkatannya secara regional dan nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang

tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Luwu juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kabupaten Luwu yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya baik di tataran regional dan nasional.

Selanjutnya, asumsi-asumsi pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 4,01 persen pertahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, dana perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 2,50 persen selama periode 2020-2024 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan DAU dan DAK yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Tabel 7.2
Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Kabupaten Luwu 2019-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan PAD	4,70%	3,78%	3,78%	3,79%	3,79%
2	Pertumbuhan Dana Perimbangan:	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
a	Pertumbuhan DBH	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
b	Pertumbuhan DAU	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
c	Pertumbuhan DAK	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

7.1.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determinan, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah; (2) kebijakan di bidang keuangan negara; (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah; serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap

obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu, pada analisis kebijakan. Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu untuk periode 2020-2024 yang akan datang.

Tabel 7.3
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.505.698.566.788,14	1.546.828.945.559,98	1.588.534.060.290,60	1.631.391.899.064,43	1.675.435.432.075,53
1.1	Pendapatan Asli Daerah	114.806.478.378,87	119.144.549.122,13	123.651.086.771,40	128.332.836.004,80	133.196.820.373,35
1.1.1	Pajak Daerah	22.579.700.000,00	23.708.685.000,00	24.894.119.250,00	26.138.825.212,50	27.445.766.473,13
1.1.2	Retribusi Daerah	9.074.300.000,00	9.346.529.000,00	9.626.924.870,00	9.915.732.616,10	10.213.204.594,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.304.000.000,00	5.516.160.000,00	5.736.806.400,00	5.966.278.656,00	6.204.929.802,24
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	77.848.478.378,87	80.573.175.122,13	83.393.236.251,40	86.311.999.520,20	89.332.919.503,41
1.2	Dana Perimbangan	1.080.692.284.739,28	1.107.709.591.857,76	1.135.402.331.654,20	1.163.787.389.945,56	1.192.882.074.694,19
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	17.518.549.407,88	17.956.513.143,07	18.405.425.971,65	18.865.561.620,94	19.337.200.661,46
1.2.2	Dana Alokasi Umum	736.643.508.850,00	755.059.596.571,25	773.936.086.485,53	793.284.488.647,67	813.116.600.863,86
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	326.530.226.481,40	334.693.482.143,44	343.060.819.197,02	351.637.339.676,95	360.428.273.168,87
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	310.199.803.670,00	319.974.804.580,10	329.480.641.865,00	339.271.673.114,08	349.356.537.007,98
1.3.1	Hibah	55.962.450.000,00	57.921.135.750,00	59.369.164.143,75	60.853.393.247,34	62.374.728.078,53
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.488.250.000,00	47.080.338.750,00	48.728.150.606,25	50.433.635.877,47	52.198.813.133,18
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	201.099.763.670,00	207.132.756.580,10	213.346.739.277,50	219.747.141.455,83	226.339.555.699,50
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	7.649.340.000,00	7.840.573.500,00	8.036.587.837,50	8.237.502.533,44	8.443.440.096,77
2	BELANJA	1.658.698.566.788,14	1.499.828.945.559,98	1.541.534.060.290,60	1.584.391.899.064,43	1.628.435.432.075,53
2.1	Belanja Tidak Langsung	836.685.095.329,91	852.030.164.141,36	869.731.793.383,13	925.838.778.787,63	903.120.936.208,76
2.1.1	Belanja Pegawai	547.349.172.990,03	561.032.902.314,78	575.058.724.872,65	589.435.192.994,46	604.171.072.819,32
2.1.2	Belanja Hibah	8.656.026.000,00	8.829.146.520,00	11.005.729.450,40	51.225.844.039,41	12.250.360.920,20
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.244.400.000,00	1.269.288.000,00	1.294.673.760,00	1.320.567.235,20	1.346.978.579,90

No	Uraian	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.038.449.500,00	3.144.795.232,50	3.254.863.065,64	3.368.783.272,93	3.486.690.687,49
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	271.397.046.839,88	272.754.032.074,08	274.117.802.234,45	275.488.391.245,62	276.865.833.201,85
2.1.6	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	822.013.471.458,24	647.798.781.418,63	671.802.266.907,47	658.553.120.276,81	725.314.495.866,77
2.2.1	Belanja Pegawai	9.886.053.871,50	9.984.914.410,22	10.084.763.554,32	10.185.611.189,86	10.287.467.301,76
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.743.876.214,53	262.856.630.618,42	276.333.988.280,50	252.269.534.320,84	307.918.170.546,13
2.2.3	Belanja Modal	561.383.541.372,21	374.957.236.390,00	385.383.515.072,65	396.097.974.766,11	407.108.858.018,88
3	PEMBIAYAAN	153.000.000.000,00	(47.000.000.000,00)	(47.000.000.000,00)	(47.000.000.000,00)	(47.000.000.000,00)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	160.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00
SILPA		-	-	-	-	-

Selama periode 2020-2024, pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp1,51 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,68 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah serta dari dana lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya. Sedangkan dana perimbangan meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil. Hal ini karena komponen dana perimbangan tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan komponen yang berasal dari luar daerah. Sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Kabupaten Luwu sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan kedepan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik.

Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan Negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Luwu yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat.

Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang diharapkan sebagian besar dikontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Luwu lima tahun kedepan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan akan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat. Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode lima tahun ke depan, berimplikasi pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan belanja daerah yang besar ini, mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat penganggaran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya kebijakan penganggaran daerah yang Defisit untuk lima tahun kedepan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada alokasi belanja langsung khususnya pada alokasi belanja modal, melebihi pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung.

7.1.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan ini memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024 yang akan datang.

Tabel 7.4
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu 2020-2024

No	Uraian	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendapatan	1.505.698.566.788,14	1.546.828.945.559,98	1.588.534.060.290,60	1.631.391.899.064,43	1.675.435.432.075,53
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pembiayaan	160.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.665.698.566.788,14	1.551.828.945.559,98	1.593.534.060.290,60	1.636.391.899.064,43	1.680.435.432.075,53
	Dikurangi					
5	Belanja Tidak Langsung	836.685.095.329,91	852.030.164.141,36	869.731.793.383,13	925.838.778.787,63	903.120.936.208,76
6	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00
6	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah	822.013.471.458,23	647.798.781.418,63	671.802.266.907,47	658.553.120.276,81	725.314.495.866,77

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu diharapkan meningkat menjadi Rp725,31 miliar pada tahun 2024. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/nonpajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 7.5
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Rill Kemampuan	822.013.471.458,23	647.798.781.418,63	671.802.266.907,47	658.553.120.276,81	725.314.495.866,77
Prioritas I	33,78	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Proporsi Priorotasi I	277.656.062.156,21	291.509.451.638,38	302.311.020.108,36	296.348.904.124,57	326.391.523.140,05
Prioritas II	49,71	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
Proporsi Prioritas II	408.614.445.581,21	213.773.597.868,15	221.694.748.079,47	217.322.529.691,35	239.353.783.636,03
Prioritas III	16,51	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Proporsi Prioritas III	135.742.963.720,81	142.515.731.912,10	147.796.498.719,64	144.881.686.460,90	159.569.189.090,69

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. **Prioritas I** ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. **Prioritas II** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan **prioritas III** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan fungsi penunjang urusan.

Untuk periode 2020-2024 yang akan datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Luwu akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

7.2 Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan Strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD kedalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyear*). Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat Daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan.

Tabel 7.6
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Luwu, Tahun 2020-2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1																	
1	01																
1	01	01															
1	01	01	01														
1	01	01	02														
1	01	01	07														
1	01	01	08														
1	01	01	15														
1	01	01	16														
1	01	01	17														
1	01	01	20														
1	01	01	22														
1	02																
1	02	01															
1	02	01	01														
1	02	01	02														
1	02	01	07														
1	02	01	08														
1	02	01	15														
1	02	01	16														
1	02	01	11														
1	02	01	12														
1	02	01	16														

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 02 02	RSUD Batara Guru					66.572.663		69.572.663		72.572.663		75.572.663		79.572.663		363.863.315
1 02 02 34	Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase peningkatan pelayanan dan kerjasama RS	%	0,00	45,00	19.572.663	50,00	19.572.663	50,00	19.572.663	50,00	19.572.663	55,00	19.572.663	55,00	97.863.315
1 02 02 35	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD	Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR)	%	76,00	80,00	47.000.000	85,00	50.000.000	85,00	53.000.000	90,00	56.000.000	95,00	60.000.000	95,00	266.000.000
1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					290.252.765		132.676.517		150.133.374		129.839.303		191.049.949	0,00	893.951.908
1 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	2.346.735	100,00	2.370.202	100,00	2.393.904	100,00	2.417.843	100,00	2.442.022	100,00	11.970.707
1 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	81,25	85,00	3.689.592	91,00	4.472.616	97,00	3.463.630	98,61	3.817.372	100,00	510.751	100,00	15.953.961
1 03 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	197.960	100,00	127.950	100,00	139.650	100,00	88.650	100,00	91.360	100,00	645.570
1 03 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	229.070	100,00	128.860	100,00	138.860	100,00	128.860	100,00	143.860	100,00	769.510
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	80,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
1 03 01 14	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	58,11	61,83	174.554.004	64,23	49.350.917	66,64	73.709.011	69,05	55.831.729	71,45	97.938.227	71,45	451.383.888
1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Tingkat mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,86	0,86	4.250.000	0,87	5.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,87	9.250.000
1 03 01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	km	1.380,00	1392,96	12.900.000	1398,46	6.550.000	1403,96	6.550.000	1409,46	6.550.000	1421,46	21.400.000	1.421,46	53.950.000
1 03 01 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir	meter	1.445,00	700,00	1.500.000	700,00	1.500.000	700,00	1.500.000	700,00	1.500.000	700,00	1.500.000	3.500,00	7.500.000
1 03 01 18	Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,17	22,24	9.400.000	22,80	8.700.000	23,37	8.700.000	23,95	8.700.000	24,55	8.700.000	24,55	44.200.000
1 03 01 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinarmargaan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	4.605.000	100,00	3.805.000	100,00	1.415.000	100,00	1.475.000	100,00	1.525.000	100,00	12.825.000
1 03 01 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Persen	36,33	37,24	27.014.729	38,17	29.378.039	39,12	29.574.119	40,10	29.782.199	41,10	29.966.279	41,10	145.715.365
1 03 01 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)	Persentase penduduk yang mengakses air minum berkelanjutan	%	80,04	80,96	31.396.352	81,85	16.067.033	82,73	14.847.300	83,60	14.847.300	84,45	14.847.300	84,45	92.005.285
1 03 01 31	Program Pengembangan Kota Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditata	Ha	26,47	34,31	8.454.223	49,02	2.500.000	63,73	2.525.000	68,63	2.550.250	73,53	8.109.050	73,53	24.138.523
1 03 01 32	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Titik	0,00	0,00	2.220.000	0,00	1.920.000	0,00	4.520.000	0,00	1.820.000	0,00	1.570.000	0,00	12.050.000
1 03 01 33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	0,00	100,00	185.100	100,00	245.900	100,00	496.900	100,00	270.100	100,00	246.100	100,00	1.444.100
1 03 01 34	Program Pembangunan, Peningkatan, Pengawasan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	unit	0,00	4,00	7.310.000	1,00	560.000	1,00	160.000	0,00	60.000	2,00	2.060.000	8,00	10.150.000
		Persentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1 04 01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					56.352.946		56.811.656		57.375.484		57.956.692		58.493.330	0,00	286.990.108
1 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.151.904	100,00	1.234.375	100,00	1.234.375	100,00	1.234.375	100,00	1.234.375	100,00	6.089.405

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	68,44	100,00	474.172	100,00	308.529	100,00	297.220	100,00	350.720	100,00	322.705	100,00	1.753.345
1 04 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	68.700	100,00	64.000	100,00	70.000	100,00	64.000	100,00	81.400	100,00	348.100
1 04 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	60,00	100,00	300.000	100,00	303.000	100,00	323.120	100,00	302.320	100,00	289.520	100,00	1.517.960
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1 04 01 15	Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas)	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	%	0,00	15,85	30.200.000	21,63	30.502.000	27,33	30.807.020	42,28	31.115.090	49,92	31.426.241	49,92	154.050.351
0 0 0 0		Persentase lingkungan kawasan permukiman perdesaan yang tertata	%	0,00	4,83		9,66		14,49		19,32		24,15		24,15	
0 0 0 0		Persentase lingkungan kawasan permukiman perkotaan yang tertata	%	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	
1 04 01 16	Program Pengembangan Perumahan (Prioritas)	Persentase rumah layak huni	%	20,04	20,54	8.634.420	20,84	8.720.764	30,15	8.807.972	30,76	8.896.052	40,01	8.985.012	40,01	44.044.220
1 04 01 17	Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan PSU	Persen	n.a	100,00	15.523.750	100,00	15.678.988	100,00	15.835.777	100,00	15.994.135	100,00	16.154.077	100,00	79.186.727
																-
1 05		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat														
1 05 01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pelindungan Masyarakat				2.162.078		2.131.008		1.825.048		2.168.627		1.839.043	0,00	10.125.804
1 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	0	0,00	100,00	1.047.270	100,00	1.059.170	100,00	1.071.960	100,00	1.085.729	100,00	1.085.575	100,00	5.349.704
1 05 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	0	0,00	65,00	35.000	70,00	38.000	80,00	42.000	90,00	45.000	90,00	48.000	90,00	208.000
1 05 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	131.260	100,00	38.600	100,00	38.600	100,00	114.760	100,00	38.600	100,00	361.820
1 05 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	0	0,00	100,00	121.578	100,00	29.468	100,00	30.968	100,00	32.468	100,00	33.468	100,00	247.950
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	0	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 05 01 15	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	0,00	100,00	408.700	100,00	408.700	100,00	408.700	100,00	408.700	100,00	408.700	100,00	2.043.500
1 05 01 17	Program Bina Ideologi dan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	0	0,00	100,00	207.450	100,00	399.200	100,00	76.500	100,00	304.750	100,00	76.500	100,00	1.064.400
1 05 01 22	Program Pembinaan Organisasi Sosial Politik	cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	0	0,00	100,00	210.820	100,00	157.870	100,00	156.320	100,00	177.220	100,00	148.200	100,00	850.430
1 05 02		Satuan Polisi Pamong Praja				3.797.468		3.657.122		3.741.901		4.304.392		3.876.722		19.377.605
1 05 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	996.529	100,00	1.006.494	100,00	1.016.559	100,00	1.026.724	100,00	1.036.992	100,00	5.083.297
1 05 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	64,87	85,52	368.100	91,23	371.781	94,11	375.499	97,73	379.254	99,43	383.046	99,43	1.877.680
1 05 02 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	141.350	100,00	138.450	100,00	235.150	100,00	143.450	100,00	240.150	100,00	898.550
1 05 02 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	75.000	100,00	75.750	100,00	80.512	100,00	57.712	100,00	80.512	100,00	369.486
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-
1 05 02 23	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)	Persentase Penegakan PERDA	%	78,00	79,95	656.847	81,95	489.217	84,00	444.017	86,10	611.647	88,25	444.017	88,25	2.645.745

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 05 02 24	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	100,00	100,00	100.860	100,00	102.060	100,00	102.060	100,00	582.620	100,00	102.060	100,00	989.660
1 05 02 25	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Linmas	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	0	0,00	108.727	0,00	109.814	0,00	110.912	0,00	112.021	0,00	185.071	0,00	626.544
1 05 02 26	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100,00	100,00	1.350.056	100,00	1.363.557	100,00	1.377.192	100,00	1.390.964	100,00	1.404.874	100,00	6.886.642
1 05 03	Dinas Pemadam Kebakaran					3.894.413		3.953.225		3.955.779		3.894.843		3.912.510	0,00	19.610.771
1 05 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	806.263	100,00	814.325	100,00	822.469	100,00	830.693	100,00	839.000	500,00	4.112.751
1 05 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	persen	0,00	85,00	274.000	87,00	274.000	90,00	274.000	92,00	274.000	95,00	274.000	449,00	1.370.000
1 05 03 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	45.190	100,00	119.940	100,00	91.550	100,00	45.190	100,00	31.750	500,00	333.620
1 05 03 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	48.960	100,00	44.960	100,00	67.760	100,00	44.960	100,00	67.760	500,00	274.400
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
1 05 03 30	Program Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0	0,00	0,00	420.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	2.020.000
1 05 03 31	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas)	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	%	0,00	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	500,00	11.000.000
0 0 0 0	Program Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	0	0,00	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	500.000
1 06	Sosial															
1 06 01	Dinas Sosial					3.161.459		3.122.018		3.062.243		3.106.370		3.152.945	0,00	15.605.035
1 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	807.041	100,00	815.111	100,00	823.262	100,00	831.495	100,00	839.810	100,00	4.116.718
1 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	285.950	0,00	255.200	0,00	172.500	0,00	206.500	0,00	215.000	0,00	1.135.150
1 06 01 07	Program peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	107.550	100,00	127.350	100,00	115.800	100,00	112.500	100,00	122.400	500,00	585.600
1 06 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	62.765	100,00	45.840	100,00	68.640	100,00	45.840	100,00	68.640	500,00	291.725
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 06 01 15	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	0,00	89,00	532.613	89,00	532.613	89,00	532.613	89,00	532.613	89,00	532.613	445,00	2.663.065
1 06 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	0	0	100	195.904	100	196.204	100	196.204	100	196.204	100	196.204	500,00	980.718
1 06 01 18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)	Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	0,00	100,00	1.114.872	100,00	1.094.936	100,00	1.098.460	100,00	1.126.454	100,00	1.123.514	500,00	5.558.235
1 06 01 21	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan	0	0,00	80,00	54.765	80,00	54.765	80,00	54.765	80,00	54.765	80,00	54.765	400,00	273.825
1 06 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					2.579.540		2.632.450		2.745.518		2.628.493		2.632.988	0,00	13.218.989
1 06 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	913.040	100,00	922.170	100,00	931.392	100,00	940.706	100,00	950.113	500,00	4.657.422
1 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	persen	0,00	0,00	182.500	0,00	220.380	0,00	315.216	0,00	197.887	0,00	211.965	0,00	1.127.948

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 06 02 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	45.190	100,00	55.090	100,00	41.300	100,00	55.090	100,00	13.300	100,00	209.970
1 06 02 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	41.560	100,00	37.560	100,00	60.360	100,00	37.560	100,00	60.360	100,00	237.400
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1 06 02 23	Program Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0,00	0,00	1.247.250	0,00	1.247.250	0,00	1.247.250	0,00	1.247.250	0,00	1.247.250	0,00	6.236.250
1 06 02 28	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas)	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	750.000
2	Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2 01	Tenaga Kerja															
2 01 01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi					1.919.372		2.143.955		1.966.267		1.943.848		1.760.237	0,00	9.733.678
2 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	642.764	100,00	649.192	100,00	655.684	100,00	662.240	100,00	668.863	100,00	3.278.742
2 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100,00	100,00	260.500	100,00	302.000	134,00	187.000	100,00	167.300	100,00	142.000	100,00	1.058.800
2 01 01 07	Program peningkatan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	60,00	32,00	123.384	140,00	182.884	0,00	123.384	140,00	129.964	0,00	49.464	0,00	609.080
2 01 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	33.400	100,00	33.400	100,00	33.400	100,00	33.400	100,00	33.400	100,00	216.376
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2 01 01 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)	Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	%	41,00	100,00	485.780	100,00	587.595	100,00	465.255	100,00	446.790	100,00	457.150	100,00	2.442.570
2 01 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas)	Perluasan Kesempatan kerja sektor formal maupun informal	%	4,04	3,70	214.079	3,91	214.079	4,13	355.639	4,35	330.849	100,00	214.079	100,00	1.328.725
2 01 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha	%	100,00	100,00	159.465	100,00	174.805	100,00	145.905	100,00	173.305	100,00	145.905	100,00	799.385
2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2 02 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1.221.985		1.253.879		1.230.484		1.292.820		1.261.529	0,00	6.260.697
2 02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	579.134	100,00	584.925	100,00	590.775	100,00	596.682	100,00	602.649	100,00	2.954.165
2 02 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	70,00	100.000	75,00	100.000	80,00	100.000	82,00	118.550	84,00	118.150	84,00	536.700
2 02 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	64.190	100,00	90.040	100,00	33.700	100,00	90.040	100,00	26.000	100,00	303.970
3 02 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	0,00	53.360	0,00	49.360	0,00	72.160	0,00	49.360	0,00	72.160	0,00	296.400
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2 02 01 20	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	n.a	35,71	173.139	71,43	174.871	57,14	176.619	50,00	178.386	71,43	180.169	71,43	883.184
2 02 01 21	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	0,00	52,50	100.000	40,00	101.000	50,00	102.010	37,50	103.030	57,50	104.060	57,50	510.101

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2	02	02	22	Program Penguatan Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu	0	0,00	100,00	152.162	100,00	153.683	100,00	155.220	100,00	156.772	100,00	158.340	100,00	776.177
2	03			Pangan															
2	03	01		Dinas Ketahanan Pangan					1.855.399		1.873.953		1.892.693		1.911.620		1.930.736	0,00	9.464.401
2	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	815.950	100,00	824.109	100,00	832.351	100,00	840.674	100,00	849.081	100,00	4.162.165
2	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	59,50	68,25	128.792	83,66	130.080	93,63	131.381	97,85	132.695	100,00	134.022	100,00	656.969
2	03	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	79.790	100,00	80.588	100,00	81.394	100,00	82.208	100,00	83.030	100,00	407.009
2	03	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	108.858	100,00	109.946	100,00	111.046	100,00	112.156	100,00	113.278	100,00	555.283
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	03	01	15	Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Angka Ketersediaan Energi	Kalori/Perkapita/Perhari	0,00	3.400,00	257.861	3.425,00	260.439	3.450,00	263.044	3.475,00	265.674	3.500,00	268.331	3500,00	1.315.348
2	03	01	16	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	Pak	0,00	100,00	225.628	100,00	227.884	100,00	230.163	100,00	232.465	100,00	234.789	100,00	1.150.930
2	03	01	17	Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Tingkat Komsumsi Protein	Gr/ Kapita/Hari	0,00	65,00	238.521	66,00	240.906	67,00	243.315	68,00	245.748	69,00	248.206	69,00	1.216.697
2	04			Pertanahan															
2	04	01		Dinas Pertanahan					6.315.177		6.653.224		3.218.501		8.382.608		2.946.197	0,00	24.515.706
2	04	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	799.657	100,00	807.654	100,00	815.731	100,00	823.888	100,00	832.127	100,00	4.079.056
2	04	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	35,02	62,99	200.000	70,28	200.000	77,89	200.000	87,17	200.000	88,04	200.000	88,04	1.000.000
2	04	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	500.000
2	04	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	74.600	100,00	74.600	100,00	74.600	100,00	74.600	100,00	74.600	100,00	373.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	04	01	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan	Konflik	100,00	100,00	280.750	100,00	295.800	100,00	303.000	100,00	308.950	100,00	314.300	500,00	1.502.800
2	04	01	19	Program Penataan Pertanahan (Prioritas)	Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	%	0,00	100,00	4.860.170	100,00	2.175.170	100,00	1.725.170	100,00	6.875.170	100,00	1.425.170	500,00	17.060.850
2	05			Lingkungan Hidup															
2	05	01		Dinas Lingkungan Hidup					3.991.866		4.002.995		4.014.235		4.025.587		4.037.053	0,00	20.071.736
2	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	560.166	100,00	565.768	100,00	571.426	100,00	577.140	100,00	582.911	100,00	2.857.411
2	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	60,00	229.000	70,00	229.000	80,00	229.000	90,00	229.000	95,00	229.000	95,00	1.145.000
2	05	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	500,00	250.000
2	05	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	500.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2 05 01 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	0,00	50,00	300.000	60,00	303.000	70,00	306.030	80,00	309.090	90,00	312.181	350,00	1.530.302
2 05 01 25	Program Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Cakupan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0,00	0,00	252.700	0,00	255.227	0,00	257.779	0,00	260.357	0,00	262.961	0,00	1.289.024
2 05 01 26	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,84	87,99	2.500.000	90,19	2.500.000	92,44	2.500.000	94,76	2.500.000	97,13	2.500.000	462,51	12.500.000
2 06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2 06 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.883.623		3.112.796		3.085.905		3.174.704		2.923.242		15.180.270	
2 06 01 0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	541.158	100,00	546.570	100,00	552.035	100,00	557.556	100,00	563.131	100,00	2.760.450
2 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	59,01	65,00	239.200	70,00	472.200	75,00	412.950	78,00	473.700	80,00	179.000	80,00	1.777.050
2 06 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	74.000	100,00	51.500	100,00	65.000	100,00	74.000	100,00	51.500	100,00	316.000
2 06 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	28.800	100,00	28.800	100,00	28.800	100,00	28.800	100,00	75.300	100,00	190.500
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2 06 01 16	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber KK	%	0,62	0,65	1.326.130	0,70	1.339.391	0,75	1.352.785	0,80	1.366.313	0,85	1.379.976	0,85	6.764.596
2 06 01 17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,15	0,20	47.000	0,35	47.000	0,45	47.000	0,50	47.000	0,65	47.000	0,65	235.000
2 06 01 18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah kedalam database	%	100,00	100,00	384.165	100,00	384.165	100,00	384.165	100,00	384.165	100,00	384.165	100,00	1.920.825
2 06 01 19	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	0	0,00	100,00	243.170	100,00	243.170	100,00	243.170	100,00	243.170	100,00	243.170	500,00	1.215.850
2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.226.824		3.241.537		3.296.658		3.320.189		3.300.722	0,00	16.385.930	
2 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.450.334	100,00	1.460.284	100,00	1.472.114	100,00	1.484.004	100,00	1.494.154	100,00	7.360.890
2 07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	68,94	78,11	131.300	84,94	132.613	88,28	133.939	88,78	135.279	91,80	136.631	91,80	669.762
2 07 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	95.190	100,00	83.140	100,00	109.450	100,00	103.940	100,00	57.000	100,00	448.720
2 07 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	50.000	100,00	50.500	100,00	51.005	100,00	51.515	100,00	52.030	100,00	255.050
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
2 07 01 20	Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)	Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib	%	n.a.	100,00	500.000	100,00	505.000	100,00	510.050	100,00	515.151	100,00	520.302	100,00	2.550.503
2 07 01 21	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa	Skor rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	n.a	0,00	300.000	0,00	303.000	0,00	306.030	0,00	309.090	0,00	312.181	0,00	1.530.302
2 07 01 22	Program Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Persentase LPM yang mandiri	%	0,00	0,00	300.000	0,00	303.000	0,00	306.030	0,00	309.090	0,00	312.181	0,00	1.530.302
2 07 01 23	Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas)	Jumlah BUMDes Bersama	4	0,00	5,00	400.000	6,00	404.000	7,00	408.040	8,00	412.120	9,00	416.242	9,00	2.040.402
2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2 08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				7.097.368		7.461.929		7.233.854		7.256.495		7.428.492	0,00	36.478.138	
2 08 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	708.873	100,00	715.962	100,00	723.121	100,00	730.353	100,00	737.656	100,00	3.615.965

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2 08 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	69,31	79,75	191.500	84,54	485.500	90,22	186.000	94,42	134.000	99,14	180.000	99,14	1.177.000	
2 08 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	17.500	100,00	19.250	100,00	21.175	100,00	25.622	100,00	25.622	100,00	109.169	
2 08 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	7.211	100,00	7.211	100,00	7.211	100,00	7.211	100,00	62.311	100,00	91.155	
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 08 01 15	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	0	0,00	100,00	2.480.212	100,00	2.505.014	100,00	2.530.064	100,00	2.555.365	100,00	2.580.918	100,00	12.651.572	
2 08 01 16	Program Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0,00	22,35	2.471.983	22,75	2.496.703	23,05	2.521.670	23,60	2.546.887	23,95	2.572.356	23,95	12.609.600	
2 08 01 0	Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0,00	18,00	1.220.088	27,00	1.232.289	36,00	1.244.612	45,00	1.257.058	55,00	1.269.629	55,00	6.223.677	
2 09 0	Perhubungan																
2 09 01	Dinas Perhubungan					2.093.398		2.124.031		2.154.872		2.184.921		2.263.180	0,00	10.820.401	
2 09 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100,00	100,00	812.293	100,00	820.415	100,00	828.620	100,00	836.906	100,00	845.275	100,00	4.143.508	
2 09 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	318.150	0,00	321.332	0,00	324.545	0,00	327.790	0,00	331.068	0,00	1.622.885	
2 09 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	64.640	100,00	65.286	100,00	65.939	100,00	66.599	100,00	67.265	100,00	329.729	
2 09 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	30.000	100,00	40.000	100,00	50.000	100,00	59.000	100,00	116.000	100,00	295.000	
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 09 01 19	Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas	0	0,00	75,00	242.100	78,00	244.521	83,00	246.966	87,00	249.436	90,00	251.930	90,00	1.234.953	
2 09 01 17	Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	411.055	415.055	376.215	421.300	379.777	433.050	383.777	440.055	387.615	451.055	391.491	451.055	1.919.075	
2 09 01 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan Pengembangann sarana dan Prasarana Transportasi	0	0,00	80,00	250.000	82,00	252.500	84,00	255.025	86,00	257.575	87,00	260.151	87,00	1.275.251	
2 10	Komunikasi dan Informatika																
2 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian					2.903.283		2.927.820		2.979.441		2.985.751		2.826.459	0,00	14.622.755	
2 10 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	627.846	100,00	634.125	100,00	640.466	100,00	646.871	100,00	653.339	100,00	3.202.647	
2 10 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	%	37,58	73,04	305.778	88,63	308.835	94,48	311.924	96,47	315.043	97,21	106.700	97,21	1.348.279	
2 10 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	75.000	100,00	75.750	100,00	76.508	100,00	77.273	100,00	78.045	100,00	382.575	
2 10 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	49.643	100,00	45.643	100,00	68.443	100,00	45.643	100,00	68.443	100,00	277.817	
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 10 01 19	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		0	0	0,00	0,00	101.280	0,00	102.293	0,00	103.316	0,00	104.349	0,00	105.392	0,00	516.630

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2	10	01	20	Program Penyelenggaraan E-Government (Prioritas)	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	%	100,00	0,00	1.337.716	0,00	1.351.093	0,00	1.364.604	0,00	1.378.250	0,00	1.392.033	0,00	6.823.696
2	10	01	21	Program Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informatika		0	0,00	406.020	0,00	410.080	0,00	414.181	0,00	418.323	0,00	422.506	0,00	2.071.110	
2	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
2	11	01		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian				1.349.567		1.362.563		1.375.688		1.388.945		1.402.335	0,00	6.879.098	
2	11	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	634.179	100,00	640.521	100,00	646.926	100,00	653.395	100,00	659.929	100,00	3.234.950
2	11	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0	0,00	44.440	0,00	44.884	0,00	45.333	0,00	45.787	0,00	46.244	0,00	226.689
2	11	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	47.470	100,00	47.945	100,00	48.424	100,00	48.908	100,00	49.397	100,00	242.145
2	11	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	250.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	11	01	19	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	0,00	0,00	144.885	0,00	146.333	0,00	147.797	0,00	149.275	0,00	150.767	0,00	739.057
2	11	01	20	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas)	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,00	30,35	428.594	30,75	432.879	30,95	437.208	40,25	441.580	40,58	445.996	40,58	2.186.258
				Penanaman Modal															
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				1.678.474		1.742.882		1.707.435		1.772.133		1.815.778	0,00	8.716.700	
2	12	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	795.534	100,00	803.489	100,00	811.524	100,00	819.639	100,00	827.835	100,00	4.058.021
2	12	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	58,24	72,42	76.300	96,76	76.300	99,44	76.300	100,00	76.300	100,00	105.100	100,00	410.300
2	12	01	07	Program peningkatan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	112.500	100,00	162.500	100,00	112.500	100,00	162.500	100,00	162.500	100,00	712.500
2	12	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	48.828	100,00	48.828	100,00	48.828	100,00	48.828	100,00	48.828	100,00	244.140
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	12	01	18	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal (Prioritas)	Jumlah kegiatan Promosi dan Kerja Sama	%	0,00	85,00	152.000	85,00	153.520	85,00	155.055	85,00	156.606	85,00	158.172	85,00	775.353
2	12	01	19	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	investor	13,00	13,00	84.000	13,00	84.840	14,00	85.688	14,00	86.545	15,00	87.411	15,00	428.484
2	12	01	20	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas)	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP	%	50,00	65,00	273.480	65,00	276.215	65,00	278.977	65,00	281.767	65,00	284.584	65,00	1.395.023
2	12	01	0	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	%	0,00	75,00	135.832	75,00	137.190	75,00	138.562	75,00	139.948	75,00	141.347	75,00	692.880
2	13	0		Kepemudaan dan Olahraga														0,00	-
2	13	01		Dinas Kepemudaan dan Olahraga				1.673.115		1.681.374		1.693.794		1.721.744		1.767.657	0,00	8.537.684	
2	13	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	819.565	100,00	827.760	100,00	836.038	100,00	844.398	100,00	852.842	100,00	4.180.603
2	13	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	75.000	0,00	80.000	0,00	85.000	0,00	90.000	0,00	90.000	0,00	420.000
2	13	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	52.890	100,00	45.190	100,00	14.700	100,00	45.190	100,00	52.890	100,00	210.860

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					100.000		101.000		102.010		103.030		104.060		510.101			
2	17	01	19	Program Pembinaan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan	Presentase Sistem Administrasi Kearsipan yang Memiliki Predikat yang Baik	0	0,00	0,00	100,00	0,00	102,010	0,00	103,030	0,00	104,060	0,00	510.101		
				Urusan Pilihan															
				Kelautan dan Perikanan															
				Dinas Perikanan			3.358.930	3.392.520		3.426.445		3.460.709		3.495.317		17.133.921			
3	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	861.932	100,00	870.551	100,00	879.257	100,00	888.049	100,00	896.930	100,00	4.396.719
3	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	92,96	96,98	172.761	97,76	174.488	97,83	176.233	99,64	177.995	99,64	179.775	99,64	881.252
3	01	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	39.592	100,00	39.988	100,00	40.388	100,00	40.792	100,00	41.200	100,00	201.959
3	01	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	70.551	100,00	71.256	100,00	71.969	100,00	72.688	100,00	73.415	100,00	359.879
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	01	01	20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N.A	0,00	1.250.000	0,00	1.262.500	0,00	1.275.125	0,00	1.287.876	0,00	1.300.755	0,00	6.376.256
3	01	01	21	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	10,68	11,00	964.096	12,00	973.736	13,00	983.474	14,00	993.309	15,00	1.003.242	15,00	4.917.856
3	01	01	25	Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok nelayan yang berhasil diberdayakan	0	0,00	0,00	200.000	0,00	202.000	0,00	204.020	0,00	206.060	0,00	208.121	0,00	1.020.201
3	02			Pariwisata															
3	02	01		Dinas Pariwisata				2.023.595	2.072.386		1.988.184		1.987.681		3.930.452		12.002.298		
3	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	784.619	100,00	792.465	100,00	800.389	100,00	808.393	100,00	816.477	100,00	4.002.343
3	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	53,88	72,55	233.243	78,36	233.243	85,39	200.000	91,49	169.964	95,39	2.115.135	95,39	2.951.585
3	02	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100	100	54.934	100	87.184	100	54.934	100	87.184	100	47.934	100,00	332.170
3	02	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	100.000	100,00	100.186	100,00	64.960	100,00	45.560	100,00	65.560	100,00	376.266
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		-	
3	02	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	12.573	13.206	104.737	13.216	105.784	13.265	106.842	13.315	107.911	13.330	108.990	13.330	534.264
3	02	01	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Tingkat kepuasan pengunjung atas ketersediaan sarana prasarana obyek wisata	lingkat kepuasan	n.a	cukup	344.063	baik	347.503	baik	350.978	baik	354.488	sangat baik	358.033	sangat baik	1.755.066
3	02	01	20	Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas)	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu	Destinasi	0	6	200.000	6	202.000	6	204.020	6	206.060	6	208.121	6,00	1.020.201
3	02	01	21	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	%	n.a	200	202.000	250	204.020	300	206.060	350	208.121	400	210.202	400,00	1.030.403
				Pertanian				6.000											
				Dinas Pertanian		0		8.256.044	8.338.604		8.445.183		8.528.638		8.612.927		42.181.396		
3	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	865.197	100,00	873.849	100,00	882.587	100,00	891.413	100,00	900.327	100,00	4.413.374
3	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	71,62	74,33	155.904	78,45	157.463	79,34	159.037	80,85	160.628	82,96	162.234	82,96	795.265
3	03	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	75.000	100,00	75.750	100,00	76.508	100,00	77.273	100,00	78.045	100,00	382.575
3	03	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	75.000	100,00	75.750	100,00	99.700	100,00	99.700	100,00	99.700	100,00	449.850

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	03 01 25	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Prioritas)	%	0,00	0,00	2.726.532	0,00	2.753.797	0,00	2.781.335	0,00	2.809.149	0,00	2.837.240	0,00		13.908.053
3	03 01 26	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	0,00	%	3,00	1.593.971	3,00	1.609.911	3,00	1.626.010	3,00	1.642.270	3,00	1.658.693	3,00		8.130.856
3	03 01 27	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura	%	0,00	3,00	638.100	3,00	644.481	3,00	650.926	3,00	657.435	3,00	664.009	3,00		3.254.951
3	03 01 28	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Komoditas Perkebunan	%	0,00	3,00	650.000	3,00	656.500	3,00	663.065	3,00	669.696	3,00	676.393	3,00		3.315.653
3	03 01 29	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	0,00	3,00	450.000	3,00	454.500	3,00	459.045	3,00	463.635	3,00	468.272	3,00		2.295.452
3	03 01 30	Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas)	%	0,00	20,00	1.026.340	20,00	1.036.603	20,00	1.046.969	20,00	1.057.439	18,00	1.068.014	18,00		5.235.365
		Perdagangan															
		Dinas Perdagangan				3.813.161		3.878.580		3.898.293		3.891.550		4.269.687	0,00		19.751.272
3	06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	729.321	100,00	736.614	100,00	743.980	100,00	751.420	100,00	758.934	100,00		3.720.270
3	06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	86,62	92,52	147.885	94,00	149.364	95,52	161.920	96,47	90.284	96,98	492.695	96,98		1.042.148
3	06 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	60.190	100,00	88.640	100,00	39.150	100,00	88.640	100,00	7.000	100,00		283.620
3	06 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	%	100,00	100,00	56.040	100,00	56.040	100,00	76.840	100,00	56.040	100,00	76.840	100,00		321.800
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	06 01 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	%	75,00	100,00	115.360	100,00	116.514	100,00	117.679	100,00	118.856	100,00	120.044	100,00		588.452
3	06 01 18	Program Pembinaan Usaha Perdagangan	%	n.a	100,00	404.366	100,00	408.409	100,00	412.493	100,00	416.618	100,00	420.784	100,00		2.062.670
3	06 01 20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	%	79,16	82,00	2.300.000	84,00	2.323.000	86,00	2.346.230	88,00	2.369.692	90,00	2.393.389	90,00		11.732.312
		Perindustrian															
		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000			1.500.000
1	11 01 25	Program Pembinaan dan Pengawasan Industri	0	0,00	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00		
		Transmigrasi															
		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			500.000
2	01 01 18	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	%	85,00	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00		
4		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan															
4	03	Pemerintahan															
4	03 01	Sekretariat Daerah				34.240.873		21.171.036		21.382.747		21.596.574		21.812.540	0,00		120.203.770
4	03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	3.330.128	100,00	2.664.102	100,00	2.690.743	100,00	2.717.651	100,00	2.744.827	100,00		14.147.452
4	03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	0,00	15.283.100	0,00	5.444.818	0,00	5.911.266	0,00	5.978.379	0,00	6.046.163	0,00		43.063.726
4	03 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00		3.000.000
4	03 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	%	100,00	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00		1.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00															
4	03	01	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100,00	0,00	3.000.000	0,00	2.400.000	0,00	2.424.000	0,00	2.448.240	0,00	2.472.722	0,00	12.744.962	
4	03	01	28	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan otonomi daerah	%	100,00	0,00	900.000	0,00	720.000	0,00	727.200	0,00	734.472	0,00	741.817	0,00	3.823.489	
4	03	01	29	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	1.056.360	100,00	845.088	100,00	853.539	100,00	862.074	100,00	870.695	100,00	4.487.756	
4	03	01	30	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Keprotokoleraan dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	100,00	100,00	3.282.960	100,00	2.626.368	100,00	2.652.632	100,00	2.679.158	100,00	2.705.950	100,00	13.947.067	
4	03	01	31	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perekonomian	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perekonomian	0	100,00	100,00	800.670	100,00	640.536	100,00	646.941	100,00	653.411	100,00	659.945	100,00	3.401.503	
4	03	01	32	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	0	100,00	100,00	925.000	100,00	740.000	100,00	747.400	100,00	754.874	100,00	762.423	100,00	3.929.697	
4	03	01	34	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroperasi	%	80,00	83,00	975.000	85,00	780.000	87,00	787.800	88,00	795.678	90,00	803.635	90,00	4.142.113	
					Persentase penyelesaian tender Paket Pekerjaan Tepat waktu	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
4	03	01	35	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100,00	100,00	900.000	100,00	720.000	100,00	727.200	100,00	734.472	100,00	741.817	500,00	3.823.489	
4	03	01	36	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	0	0,00	100,00	750.000	100,00	600.000	100,00	606.000	100,00	612.060	100,00	618.181	500,00	3.186.241	
					Persentase ASN Sekretariat Daerah dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	500,00	-	
4	03	01	38	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Cakupan pelayanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	0	0,00	100,00	2.237.655	100,00	1.790.124	100,00	1.808.025	100,00	1.826.105	100,00	1.844.367	500,00	9.506.276	
																		0,00	-	
4	04	01	0	Sekretariat DPRD		0	0	0,00	0,00	14.318.443	0,00	14.461.627	0,00	14.606.243	0,00	14.752.306	0,00	14.899.829	0,00	73.038.447
4	04	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	2.789.751	100,00	2.817.649	100,00	2.845.825	100,00	2.874.283	100,00	2.903.026	100,00	14.230.534	
4	04	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	91,00	1.627.360	93,00	1.643.633	96,00	1.660.069	98,00	1.676.670	100,00	1.693.437	100,00	8.301.169	
4	04	01	07	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	1.076.367	100,00	1.087.131	100,00	1.098.002	100,00	1.108.982	100,00	1.120.072	100,00	5.490.554	
4	04	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	75.750	100,00	76.508	100,00	77.273	100,00	78.045	100,00	78.826	100,00	386.401	
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	
4	04	01	15	Program Peningkatan Kualitas Peraturan Daerah (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	100,00	100,00	5.872.615	100,00	5.931.341	100,00	5.990.655	100,00	6.050.561	100,00	6.111.067	100,00	29.956.239	
4	04	01	39	Program Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100,00	100,00	2.876.600	100,00	2.905.366	100,00	2.934.420	100,00	2.963.764	100,00	2.993.401	100,00	14.673.551	
				Kecamatan Bua				1.593.270		1.577.438		1.598.549		1.639.806		1.630.039	0,00	8.039.101		
4	01	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	251.207	100,00	253.719	100,00	256.256	100,00	258.819	100,00	261.407	100,00	1.281.409	
4	01	10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	%	0,00	0,00	35.754	0,00	36.112	0,00	36.473	0,00	36.837	0,00	37.206	0,00	182.381	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 01 10 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 10 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.700	100,00	17.700	100,00	19.300	100,00	17.700	100,00	19.300	100,00	91.700
4 01 10 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4 01 10 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	159.749	100,00	161.346	100,00	162.960	100,00	164.589	100,00	166.235	100,00	814.879
4 01 11	Kecamatan Bessesangtempe					430.800		403.346		412.718		442.119		420.378		2.109.360
4 01 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	160.085	100,00	161.686	100,00	163.303	100,00	164.936	100,00	166.585	100,00	816.594
4 01 11 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	17.675	0,00	17.852	0,00	18.030	0,00	18.211	0,00	18.393	0,00	90.160
4 01 10 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 10 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	90.500
4 01 10 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	195.790	100,00	197.748	100,00	199.725	100,00	201.723	100,00	203.740	100,00	998.726
4 01 12	Kecamatan Walenrang Timur					423.000		395.471		404.768		434.092		412.274		2.069.605
4 01 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	140.340	100,00	141.743	100,00	143.160	100,00	144.592	100,00	146.038	100,00	715.872
4 01 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	29.795	0,00	30.093	0,00	30.394	0,00	30.698	0,00	31.005	0,00	151.984
4 01 12 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 12 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	88.900
4 01 12 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	195.936	100,00	197.895	100,00	199.874	100,00	201.873	100,00	203.891	100,00	999.468
4 01 13	Kecamatan Lamasi Timur					377.000		349.010		357.842		386.696		364.403	0,00	1.834.951
4 01 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	131.906	100,00	133.225	100,00	134.557	100,00	135.903	100,00	137.262	100,00	672.853
4 01 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	52.924	0,00	53.453	0,00	53.988	0,00	54.528	0,00	55.073	0,00	269.966
4 01 13 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 13 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	89.300
4 01 13 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	135.160	100,00	136.512	100,00	137.877	100,00	139.255	100,00	140.648	100,00	689.452
4 01 14	Kecamatan Ponrang Selatan					1.545.270		1.528.959		1.549.588		1.590.356		1.580.096		7.794.269
4 01 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	193.900	100,00	195.839	100,00	197.797	100,00	199.775	100,00	201.773	100,00	989.084

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 01 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	36.360	0,00	36.724	0,00	37.091	0,00	37.462	0,00	37.836	0,00	185.473
4 01 13 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 14 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.540	100,00	17.540	100,00	19.140	100,00	17.540	100,00	19.140	100,00	90.900
4 01 14 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4 01 14 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	168.610	100,00	170.296	100,00	171.999	100,00	173.719	100,00	175.456	100,00	860.081
4 01 15	Kecamatan Bupon					1.527.270		1.510.782		1.531.231		1.571.818		1.561.375		7.702.476
4 01 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	127.058	100,00	128.329	100,00	129.612	100,00	130.908	100,00	132.217	100,00	648.123
4 01 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	96.758	0,00	97.726	0,00	98.703	0,00	99.690	0,00	100.687	0,00	493.563
4 01 15 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 15 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	89.700
4 01 15 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4 01 15 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	157.294	100,00	158.867	100,00	160.456	100,00	162.060	100,00	163.681	100,00	802.357
4 01 16	Kecamatan Walenrang Barat					350.600		322.348		330.916		359.503		336.941		1.700.308
4 01 16 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	145.036	100,00	146.486	100,00	147.951	100,00	149.431	100,00	150.925	100,00	739.829
4 01 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	44.036	0,00	44.476	0,00	44.921	0,00	45.370	0,00	45.824	0,00	224.628
4 01 16 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 16 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	16.980	100,00	16.980	100,00	18.580	100,00	16.980	100,00	18.580	100,00	88.100
4 01 16 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	104.758	100,00	105.806	100,00	106.864	100,00	107.932	100,00	109.012	100,00	534.371
4 01 17	Kecamatan Walenrang Utara					1.498.470		1.481.693		1.501.850		1.542.143		1.531.403		7.555.559
4 01 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	144.228	100,00	145.670	100,00	147.127	100,00	148.598	100,00	150.084	100,00	735.708
4 01 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	16.160	0,00	16.322	0,00	16.485	0,00	16.650	0,00	16.816	0,00	82.432
4 01 16 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 17 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.380	100,00	17.380	100,00	18.980	100,00	17.380	100,00	18.980	100,00	90.100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
4	01	17	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4	01	17	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	191.842	100,00	193.760	100,00	195.698	100,00	197.655	100,00	199.632	100,00	978.587
				Kecamatan Lamasi				1.542.470		1.526.134		1.546.736		1.587.478		1.577.192		7.780.011	
4	01	18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	201.243	100,00	203.255	100,00	205.287	100,00	207.340	100,00	209.414	100,00	1.026.539
4	01	18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	23.068	0,00	23.299	0,00	23.532	0,00	23.767	0,00	24.005	0,00	117.672
4	01	18	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4	01	18	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	89.700
4	01	18	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	0	%	100,00	1.089.870	100,00	1.100.769	100,00	1.111.776	100,00	1.122.894	100,00	1.134.123	100,00	5.559.432
4	01	18	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	171.199	100,00	172.911	100,00	174.640	100,00	176.387	100,00	178.150	100,00	873.287
				Kecamatan Kamanre				1.449.270		1.432.003		1.451.666		1.491.459		1.480.215		7.304.613	
4	01	19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	178.649	100,00	180.435	100,00	182.240	100,00	184.062	100,00	185.903	100,00	911.288
4	01	19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	19.190	0,00	19.382	0,00	19.576	0,00	19.771	0,00	19.969	0,00	97.888
4	01	19	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4	01	19	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	88.900
4	01	19	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4	01	19	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	105.431	100,00	106.486	100,00	107.550	100,00	108.626	100,00	109.712	100,00	537.805
				Kecamatan Bajo Barat				374.600		346.586		355.394		384.223		361.905		1.822.708	
4	01	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	172.245	100,00	173.968	100,00	175.708	100,00	177.465	100,00	179.239	100,00	878.625
4	01	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	29.290	0,00	29.583	0,00	29.879	0,00	30.178	0,00	30.479	0,00	149.408
4	01	20	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4	01	20	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	89.300

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
4	01	20	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	116.055	100,00	117.215	100,00	118.387	100,00	119.571	100,00	120.767	100,00	591.995
-																			
4	01	21		Kecamatan Belopa				4.802.880		4.819.149		4.872.682		4.946.685		4.969.991		24.411.387	
4	01	21	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	214.221	100,00	216.363	100,00	218.527	100,00	220.712	100,00	222.919	100,00	1.092.742
4	01	21	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	37.724	0,00	38.101	0,00	38.482	0,00	38.867	0,00	39.255	0,00	192.428
4	01	21	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	89.300
4	01	21	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4	01	21	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	4.356.280	100,00	4.399.843	100,00	4.443.841	100,00	4.488.280	100,00	4.533.162	100,00	22.221.406
4	01	21	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	137.646	100,00	139.022	100,00	140.412	100,00	141.816	100,00	143.234	100,00	702.130
-																			
4	01	22		Kecamatan Larompong Selatan				411.800		384.157		393.340		422.548		400.613	0,00	2.012.457	
4	01	22	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	170.180	100,00	171.882	100,00	173.601	100,00	175.337	100,00	177.090	100,00	868.089
4	01	22	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	40.304	0,00	40.707	0,00	41.114	0,00	41.525	0,00	41.941	0,00	205.591
4	01	22	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4	01	22	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	89.700
4	01	22	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	144.226	100,00	145.668	100,00	147.125	100,00	148.596	100,00	150.082	100,00	735.698
-																			
4	01	23		Kecamatan Larompong				2.675.140		2.670.128		2.702.168		2.754.462		2.755.844		13.557.742	
4	01	23	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	184.123	100,00	185.964	100,00	187.824	100,00	189.702	100,00	191.599	100,00	939.212
4	01	23	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	25.250	0,00	25.503	0,00	25.758	0,00	26.015	0,00	26.275	0,00	128.800
4	01	23	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4	01	23	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.540	100,00	17.540	100,00	19.140	100,00	17.540	100,00	19.140	100,00	90.900
4	01	23	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	2.178.140	100,00	2.199.921	100,00	2.221.921	100,00	2.244.140	100,00	2.266.581	100,00	11.110.703
4	01	23	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	230.297	100,00	232.600	100,00	234.926	100,00	237.275	100,00	239.648	100,00	1.174.746
-																			

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 01 24	Kecamatan Suli					1.463.670		1.446.543		1.466.347		1.506.284		1.495.183		7.378.027
4 01 24 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	160.590	100,00	162.196	100,00	163.818	100,00	165.456	100,00	167.111	100,00	819.170
4 01 24 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	35.350	0,00	35.704	0,00	36.061	0,00	36.421	0,00	36.785	0,00	180.321
4 01 24 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 24 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.540	100,00	17.540	100,00	19.140	100,00	17.540	100,00	19.140	100,00	90.900
4 01 24 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4 01 24 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	121.330	100,00	122.543	100,00	123.769	100,00	125.006	100,00	126.256	100,00	618.905
4 01 25	Kecamatan Suli Barat					1.463.670		1.446.547		1.466.355		1.506.296		1.495.199		7.378.068
4 01 25 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	161.509	100,00	163.124	100,00	164.755	100,00	166.403	100,00	168.067	100,00	823.859
4 01 25 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	33.027	0,00	33.357	0,00	33.691	0,00	34.028	0,00	34.368	0,00	168.471
4 01 25 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 25 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	88.900
4 01 25 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4 01 25 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	123.134	100,00	124.365	100,00	125.609	100,00	126.865	100,00	128.134	100,00	628.107
4 01 26	Kecamatan Belopa Utara					1.494.870		1.478.059		1.498.183		1.538.441		1.527.666		7.537.219
4 01 26 0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	230.654	100,00	232.960	100,00	235.290	100,00	237.643	100,00	240.019	100,00	1.176.566
4 01 26 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	19.695	0,00	19.892	0,00	20.091	0,00	20.292	0,00	20.495	0,00	100.464
4 01 26 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 26 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	17.140	100,00	18.740	100,00	88.900
4 01 26 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4 01 26 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	98.521	100,00	99.507	100,00	100.502	100,00	101.507	100,00	102.522	100,00	502.558
4 01 27	Kecamatan Bajo					2.570.740		2.564.685		2.595.671		2.646.901		2.647.208		13.025.205
4 01 27 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	156.752	100,00	158.320	100,00	159.903	100,00	161.502	100,00	163.117	100,00	799.593

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 01 27 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	24.240	0,00	24.482	0,00	24.727	0,00	24.974	0,00	25.224	0,00	123.648
4 01 27 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 27 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	90.500
4 01 27 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	2.178.140	100,00	2.199.921	100,00	2.221.921	100,00	2.244.140	100,00	2.266.581	100,00	11.110.703
4 01 26 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	154.358	100,00	155.902	100,00	157.461	100,00	159.035	100,00	160.626	100,00	787.381
4 01 28	Kecamatan Latimojong					389.000		361.128		370.078		399.052		376.880		1.896.138
4 01 28 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	114.130	100,00	115.271	100,00	116.424	100,00	117.588	100,00	118.764	100,00	582.178
4 01 28 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	42.420	0,00	42.844	0,00	43.273	0,00	43.705	0,00	44.142	0,00	216.385
4 01 28 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 28 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	90.500
4 01 28 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	175.200	100,00	176.952	100,00	178.722	100,00	180.509	100,00	182.314	100,00	893.696
4 01 29	Kecamatan Ponrang					2.615.140		2.609.531		2.640.967		2.692.651		2.693.417		13.251.706
4 01 29 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	170.357	100,00	172.060	100,00	173.781	100,00	175.519	100,00	177.274	100,00	868.990
4 01 29 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	56.560	0,00	57.126	0,00	57.697	0,00	58.274	0,00	58.857	0,00	288.513
4 01 29 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 29 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	17.300	100,00	18.900	100,00	89.700
4 01 29 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	2.178.140	100,00	2.199.921	100,00	2.221.921	100,00	2.244.140	100,00	2.266.581	100,00	11.110.703
4 01 29 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	152.993	100,00	154.523	100,00	156.068	100,00	157.629	100,00	159.205	100,00	780.420
4 01 30	Kecamatan Walenrang					1.516.270		1.499.673		1.520.011		1.560.487		1.549.932	0,00	7.646.373
4 01 30 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	158.570	100,00	160.156	100,00	161.757	100,00	163.375	100,00	165.009	100,00	808.866
4 01 30 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	42.420	0,00	42.844	0,00	43.273	0,00	43.705	0,00	44.142	0,00	216.385
4 01 30 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 01 30 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	17.220	100,00	18.820	100,00	89.300
4 01 30 50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	1.099.961	100,00	1.110.960	100,00	1.122.070	100,00	1.133.291	100,00	5.555.352
4 01 30 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	169.200	100,00	170.892	100,00	172.601	100,00	174.327	100,00	176.070	100,00	863.090
4 01 31	Kecamatan Basesangtempe Utara					367.200		339.110		347.840		376.592		354.195		1.784.937
4 01 31 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	156.550	100,00	158.116	100,00	159.697	100,00	161.294	100,00	162.907	100,00	798.562
4 01 31 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	81.628	0,00	82.444	0,00	83.269	0,00	84.102	0,00	84.943	0,00	416.386
4 01 31 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790	100,00	8.600	100,00	12.600	100,00	39.790	100,00	12.600	100,00	113.380
4 01 31 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	17.460	100,00	19.060	100,00	90.500
4 01 31 51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	71.772	100,00	72.490	100,00	73.214	100,00	73.947	100,00	74.686	100,00	366.108
4 02	Pengawasan															
4 02 01	Inspektorat Daerah					6.502.901		6.974.875		6.547.941		6.640.922		6.933.387		33.600.026
4 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	800.476	100,00	808.480	100,00	816.565	100,00	824.731	100,00	832.978	100,00	4.083.230
4 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%		97,00	800.425	98,00	808.429	98,00	315.250	100,00	341.375	100,00	228.013	100,00	2.493.492
4 02 01 07	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	37.000	100,00	42.000	100,00	47.000	100,00	52.000	100,00	57.000	500,00	235.000
4 02 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	52.480	100,00	52.480	100,00	73.280	100,00	52.480	100,00	73.280		304.000
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4 02 01 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas)	Skor LPPD	Angka	2.771	2.885	4.012.520	2.983	4.455.486	3.126	4.912.109	3.185	5.432.777	3.200	5.970.651	3.200	24.783.542
4 02 01 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas)	Cakupan SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor	%	0,00	100,00	800.000	100,00	808.000	100,00	816.080	100,00	824.241	100,00	1.170.835	100,00	4.419.155
4 03	Perencanaan Pembangunan															
4 03 01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah					5.514.371		5.307.952		5.514.306		5.474.752		6.039.995		27.851.376
4 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.234.492	100,00	1.246.837	100,00	1.259.305	100,00	1.271.898	100,00	1.284.617	100,00	6.297.150
4 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	92,81	97,43	150.000	98,02	151.500	98,13	153.015	100,00	154.545	100,00	156.091	100,00	765.151
4 03 01 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	105.490	100,00	113.090	100,00	67.300	100,00	113.090	100,00	105.490	100,00	504.460

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 03 01 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	75,00	100,00	123.400	100,00	52.000	100,00	74.800	100,00	52.000	100,00	74.800	100,00	377.000
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-
4 03 01 15	Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Data dan informasi pencapaian sasaran RPJMD	dokumen	0	4	547.186	4	503.794	4	433.794	4	433.794	4	433.794	20	2.352.363
4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd dan APBD	%	100,00	100,00	1.434.909	100,00	1.462.109	100,00	1.582.818	100,00	1.582.718	100,00	1.952.836	100,00	8.015.390
4 03 01 22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Ekonomi	%	n.a	100,00	361.726	100,00	361.726	100,00	399.526	100,00	361.726	100,00	399.526	100,00	1.884.230
4 03 01 23	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya	%	n.a	100,00	486.246	100,00	391.816	100,00	475.176	100,00	473.900	100,00	475.176	100,00	2.302.314
4 03 01 24	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	60,00	100,00	298.036	100,00	257.544	100,00	298.036	100,00	257.544	100,00	379.629	100,00	1.490.789
4 03 01 25	Program Kelitbangan Daerah (Prioritas)	Hasil kelitbangan utama	Rekomendasi	0,00	1	772.886	1	767.536	1	770.536	1	773.536	1	778.036	5	3.862.530
		Hasil kelitbangan pendukung	Rekomendasi	0,00	1		1		1		1		1		5	
4 04	Keuangan															
4 04 05	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					5.669.445		5.889.234		5.746.611		5.922.152		5.977.147		29.204.590
4 04 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.730.574	100,00	1.747.880	100,00	1.765.359	100,00	1.783.013	100,00	1.800.843	100,00	8.827.669
4 04 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	456.150	0,00	631.550	0,00	410.420	0,00	554.537	0,00	394.486	0,00	2.447.143
4 04 05 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	307.091	100,00	310.161	100,00	313.263	100,00	316.396	100,00	319.560	100,00	1.566.470
4 04 05 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	93.760	100,00	86.960	100,00	113.760	100,00	92.960	100,00	255.260	100,00	642.700
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-
4 04 05 40	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas)	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	0,00	100,00	1.487.124	100,00	1.501.995	100,00	1.517.015	100,00	1.532.185	100,00	1.547.507	100,00	7.585.827
4 04 05 41	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	85,00	90,00	342.087	95,00	345.508	95,00	348.963	100,00	352.453	100,00	355.977	100,00	1.744.988
4 04 05 42	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi	Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	%	0,00	96,00	739.522	98,00	746.917	98,00	754.386	100,00	761.930	100,00	769.550	100,00	3.772.305
4 04 05 43	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas)	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	0,00	96,00	513.131	98,00	518.262	98,00	523.444	98,00	528.679	100,00	533.966	100,00	2.617.481
						7										7
4 04 06	Badan Pendapatan Daerah					8.872.136		9.032.077		9.050.587		9.089.873		9.208.432		45.253.105
4 04 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	5.244.506	100,00	5.296.951	100,00	5.349.920	100,00	5.403.420	100,00	5.457.454	100,00	26.752.250
4 04 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	70,63	78,71	294.314	84,33	297.257	86,98	300.230	88,81	303.232	90,74	306.264	90,74	1.501.297
4 04 06 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	137.927	100,00	242.427	100,00	137.927	100,00	92.427	100,00	242.427	100,00	853.135
4 04 06 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	75,00	100,00	253.163	100,00	268.163	100,00	306.463	100,00	305.251	100,00	173.963	100,00	1.307.005
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 04 06 44	Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas)	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	97,19	98,99	1.060.076	98,99	1.070.677	98,99	1.081.383	98,99	1.092.197	98,99	1.103.119	98,99	5.407.452
4 04 06 45	Program Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	%	90,38	90,38	190.540	90,38	157.285	90,38	159.234	90,38	161.476	90,38	164.054	90,38	832.589
4 04 06 46	Program Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	%	90,00	90,00	215.960	90,00	208.910	90,00	210.118	90,00	211.506	90,00	225.583	90,00	1.072.077
4 04 06 47	Program Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB	Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	%	0,00	80,00	1.475.650	80,00	1.490.407	80,00	1.505.311	80,00	1.520.364	80,00	1.535.568	80,00	7.527.300
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan															
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					8.893.540		4.557.027		4.429.519		4.283.402		4.673.712		26.837.201
4 05 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.085.993	100,00	1.096.853	100,00	1.107.821	100,00	1.118.899	100,00	1.130.088	100,00	5.539.655
4 05 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	74,52	75,06	4.314.800	75,36	314.800	76,44	314.800	76,55	314.800	77,62	814.800	77,62	6.074.000
4 05 09 07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN perangkat daerah dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	58.490	100,00	43.850	100,00	45.190	100,00	57.150	100,00	45.190	100,00	249.870
4 05 09 08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	53.000	100,00	49.000	100,00	71.800	100,00	49.000	100,00	71.800	100,00	294.600
		Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4 05 09 18	Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN	Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN	%	n.a	100,00	668.049	100,00	520.000	100,00	520.000	100,00	520.000	100,00	520.000	100,00	2.748.049
4 05 09 19	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi	%	n.a	0,00	906.360	0,00	906.360	0,00	906.360	0,00	906.360	50,00	906.360	50,00	4.531.800
4 05 09 20	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon	%	n.a	100,00	1.806.849	100,00	1.626.164	100,00	1.463.548	100,00	1.317.193	100,00	1.185.474	100,00	7.399.227
Jumlah						822.013.472		647.798.781		671.802.267		658.553.120		725.314.496		3.525.482.136

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 yang tersaji pada tabel 8.1. sebagai berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Skor Indeks</i>	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
2. Nilai SAKIP	<i>Skor Indeks</i>	C	C	CC	B	BB	BB	BB
3. Opini LKPD dari BPK RI	<i>Opini</i>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4. Indeks Kepuasan Publik	<i>Skor Indeks</i>	na	Kurang Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5. Indeks Pembangunan Manusia	<i>Skor Indeks</i>	69,37	70,40	70,87	71,34	71,98	72,51	72,51
6. Indeks Pendidikan	<i>Skor Indeks</i>	63,19	63,72	64,42	65,12	66,88	67,05	67,05
7. Indeks Kesehatan	<i>Skor Indeks</i>	76,31	76,55	76,64	76,71	76,84	76,90	76,90
8. Indeks Layanan Infrastruktur	<i>Skor indeks</i>	n.a	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
9. Persentasi Jalan dalam kondisi mantap	%	21,84	23,87	26,26	28,88	31,77	34,95	34,95
10. Persentase penduduk berakses air minum	%	80,00	84,09	86,19	88,35	90,56	92,82	92,82
11. Rasio jaringan irigasi	<i>n.a</i>	59,94	63,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
12. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	75,45	76,00	77,10	78,05	79,00	81,00	81,00
13. Pertumbuhan Ekonomi	<i>Angka</i>	7,21	7,30	7,65	7,80	7,80	7,85	7,85
14. PDRB Perkapita	<i>Juta Rp</i>	13,97	29,87	32,11	34,52	37,11	37,11	37,11

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
15. Indeks Gini	Angka	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32
16. Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Obyek wisata	0	1	2	3	4	5	5
17. Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,47	4,36	4,25	4,14	4,04	3,94	3,94
18. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	9	9	8	7	6	5	5
19. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	7,04	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60	7,60
20. Angka kriminalitas	Per 10.000 penduduk	4,00	3,20	2,80	2,43	2,38	2,34	2,34
21. Jumlah Kader Muballiq Muda yang berhasil di bina	Org	0	40	40	40	40	40	200
22. Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	%	27,50	25,00	23,00	21,00	20,00	20,00	20,00
23. Persentase desa berstatus mandiri	%	40,00	60,00	65,00	70,00	80,00	80,00	80,00
24. Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional	Unit	n.a	4	5	6	9	11	11
25. Nilai investasi PMA dan PMDN	Miliar Rp	n.a	17,11	17,53	17,97	18,42	18,88	18,88
26. Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi	Perusahaan	n.a	13	13	14	14	14	14
27. Persentase wirausaha muda	% jumlah penduduk	0,5	1	1,5	2,00	2,50	3,00	3,00
28. Cakupan ketersediaan produk hukum daerah	n.a	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
29. Cakupan penegakan dan perlindungan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
30. Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,61 (2017)	61,95	62,05	62,45	62,60	62,75	62,75
31. Indeks kualitas lingkungan hidup	Skor indeks	Na	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik
32. Persentase Pembinaan dan Pengawasan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	%	39,22	50,00	60,00	75,00	87,50	100,00	100,00
33. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	%	NA	≤30,00	≤30,00	≤30,00	≤30,00	≤30,00	≤30,00

8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan suatu daerah digambarkan melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2014-2019 merupakan dasar penetapan target capaian pembangunan tahun 2019-2024. Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 diuraikan dalam Tabe 8.2. berikut ini.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Pertumbuhan PDRB	%	6,42	7,11	7,23	7,31	7,37	7,45	7,45
2.	Laju inflasi	%	3,50	3,96	3,86	3,76	3,57	3,39	3,39
3.	PDRB per kapita	Juta Rp	36,60 (2017)	38,03	38,98	39,95	40,95	41,98	41,98
4.	Indeks Gini	%	0,35	0,360	0,358	0,342	0,335	0,320	0,320
5.	Tingkat Kemiskinan	%	13,36	12,86	11,09	10,98	10,42	9,99	9,99
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	69,60	70,04	70,87	71,34	71,98	72,51	72,51
7.	Angka melek huruf	%	95,95	98,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,97	8,05	8,18	8,31	8,43	8,60	8,60
9.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,30	13,68	13,96	14,06	14,22	14,39	14,39
10.	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,84	69,98	70,09	70,18	70,36	70,43	70,43
11.	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12.	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,90	5,32	5,06	4,81	4,57	4,34	4,34
13.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
14.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,89	68,18	69,88	71,63	73,42	75,25	75,25
15.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,47	4,1	3,77	3,39	3,04	2,78	2,78
16.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	56,07	58,91	60,38	61,89	63,44	65,02	65,02
17.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	40,12	38,11	36,20	34,39	32,67	31,04
18.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,08	8,27	8,48	8,69	8,91	9,13	9,13
19.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Penguatan cadangan pangan		44,68	46,94	48,12	49,32	50,55	51,82	53,11
21.	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5	5	4	4	3	3
22.	Ketersediaan pangan utama	%	76,27	77,29	79,23	81,21	83,24	85,32	85,32

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
23.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,83	53,75	53,35	52,75	52,15	51,75	51,75
24.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,12	10,63	10,89	11,17	11,45	11,73	11,73
25.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,58	4,89	5,60	6,35	6,75	7,19	7,19
26.	Pertumbuhan Industri		6,13	6,28	6,44	6,6	6,77	6,94	6,94
II ASPEK DAYA SAING DAERAH									
2.1.	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	716,05	752,29	771,10	790,38	810,14	830,39	830,39
2.2.	Nilai tukar petani			-	-	-	-		0
2.3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	50,12	52,66	53,98	55,33	56,71	58,13	58,13
2.4.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	83,03	87,23	89,41	91,64	93,94	96,28	96,28
2.5.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi)		0,74	0,78	0,79	0,81	0,83	0,86	0,86
2.6.	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
2.7.	Rasio ketergantungan		61,38	61,32	61,33	61,32	61,33	61,34	61,35
III. ASPEK PELAYANAN UMUM									
A. URUSAN WAJIB DASAR									
1. PENDIDIKAN									
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	35,15	60,04	61,55	63,08	64,66	66,28	66,28
1.2.	Angka partisipasi kasar:								
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	97,78	99,425	100,00	100,00	100,00	102,5	102,50
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	98,32	98,85	100,00	100,00	100,00	102,50	102,50
1.2.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI		7.723	8.114	8.317	8.525	8.738	8.956	8.956
1.3.	Angka Partisipasi Murni :								
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95,83	98,23	100,00	100,00	100,00	102,50	102,50
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	81,60	83,64	85,73	87,87	90,07	92,32	92,32
1.4.	Angka partisipasi sekolah :								
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	102,50	100	100	100	100	102,50	102,50

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	71,87	71,87	73,67	75,51	77,4	79,34	79,34
1.5.	Angka Putus Sekolah:								
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0,00
1.6.	Angka Kelulusan:								
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	95,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,29	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.	Fasilitas Pendidikan:								
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	23,90	61,77	63,31	64,89	66,52	68,18	68,18
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	65,61	67,25	68,93	70,99	71,53	72,23	72,23
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 murid	860,12	860,12	870,00	870,00	871,00	871,00	871,00
1.13.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,80	98,81	98,81	98,82	98,82	98,83	98,83
1.14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,05	89,23	91,46	93,74	96,09	98,49	98,49
2.	KESEHATAN								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	0,0107	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	10,86	9,98	8,54	7,68	6,35	5,60	5,60
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	7,55	7,17	6,29	6,06	5,79	5,35	5,35
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	94,40	77,64	60,80	60,35	45,29	45,15	45,15
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita		0,0226	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,0006	0	0	0	0	0	0
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk		0,0001	0	0	0	0	0	0
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,0001	0	0	0	0	0	0
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	71,00	72,78	74,59	76,46	78,37	78,37	78,37
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,78	92,02	94,33	96,68	99,1	0,01	0,01
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	89,89	89,89	92,14	94,44	96,8	0,01	0,01
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)								0
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	103,2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%		-	-	-	-	0	0
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	43,48	45,70	46,84	48,02	57,25	65,45	65,45
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	n.a	0	0	0	0	0	0
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	98,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	69,46	94,61	96,97	99,40	99,57	99,97	99,97
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.26.	Angka kejadian Malaria			-	-	-	-		0
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0	0	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	na	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100	100	100	100	100	100	100
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.34.	Cakupan kunjungan bayi		106,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.35.	Cakupan puskesmas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	48,46	48,75	49,25	49,75	51,00	52,28	52,28
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,96	87,08	89,26	91,49	93,78	96,12	96,12
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	89,92	92,15	94,45	96,81	99,23	100,00	100,00
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	58,23	59,69	61,18	62,71	64,28	65,89	65,89
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	70,22	71,55	73,33	75,17	77,05	78,98	78,97
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	89,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.42.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	89,79	92,05	94,35	96,70	99,12	100,00	100,00
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28
3.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,17	22,24	22,8	23,37	23,95	24,55	24,55
3.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	NA	82,46	84,52	86,64	88,8	91,02	91,02
3.4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0	0	0	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	36,33	37,24	38,17	39,12	40,10	41,10	41,10
3.6.	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,00	82,04	84,09	86,19	88,35	90,56	90,56
3.7.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	47,22	48,69	49,9	51,15	52,43	53,74	53,74
3.8.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.10.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	16,40	16,81	17,23	17,66	18,1	18,55	18,55
3.11.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.12.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	NA	97,38	99,81	100,00	100,00	100,00	100,00
3.13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0	0	0	0	0
3.14.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan								
3.15.	Ketaatan terhadap RTRW	%							
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	20,04	20,54	20,84	30,15	30,76	40,01	40,01
4.2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0688	0,0685	0,0680	0,0675	0,0660	0,0645	0,0645
4.3.	Rasio permukiman layak huni	%	NA	-	-	-	-	-	-
4.4.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	-	-	-	-	-	-
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	-	-	-	-	-	-
4.6.	Persentase pemukiman yang tertata	%	NA	-	-	-	-	-	-
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	NA	-	-	-	-	-	-
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	NA	-	-	-	-	-	-
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	NA	-	-	-	-	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
4.10.	Jumlah kawasan kumuh Kabupaten yang ditata secara keseluruhan	%	NA	-	-	-	-	-	-
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	55,00	56,38	57,78	59,23	60,71	62,23	62,23
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	75,00	76,88	78,8	80,77	82,79	84,86	84,86
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80,00	82,00	84,05	86,15	88,31	90,52	90,52
5.4.	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	78,00	79,95	81,95	84,00	86,10	88,25	88,25
5.6.	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.7.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.8.	Cakupan Jumlah Konflik/Gangguan Keamanan Daerah yang tertangani	Persen	NA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5.9.	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	NA	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5.10.	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	NA	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
6.	SOSIAL								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	19,65	20,65	30,45	40,75	50,25	60,00	60,00
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	11,45	11,95	12,35	12,75	13,07	13,45	13,45
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,60	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68	0,68
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	3,23	3,31	3,39	3,48	3,57	3,66	3,66
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	65,79	67,43	69,12	70,85	72,62	74,44	74,44
6.10.	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	Na	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
1. TENAGA KERJA									
1.1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,21	2,67	2,94	3,24	3,56	3,92	3,92
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,57	11,41	12,55	13,80	15,18	16,70	16,70
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	5,21	6,31	6,94	7,63	8,40	9,24	9,24
2.4.	Rasio KDRT	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	29,27	35,42	38,96	42,86	47,14	51,86	51,86
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%		-	-	-	-		0
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%		-	-	-	-		0
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%		-	-	-	-		0
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	54,84	55,45	56,00	56,85	60,55	70,00	70,00
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	6,25	6,85	7,45	7,90	8,56	9,00	9,00
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.14.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	1,04 (2017)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
2.15.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	1,24 (2017)	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
2.16.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	1,03 (2017)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
2.17.	Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi	%	NA	-	-	-	-		0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.18.	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02 (2017)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	35,51	35,75	36,00	36,25	36,45	36,45	36,45
2.20.	Indeks Pembangunan Gender	%	92,52 (2017)	92,75	92,90	93,00	93,15	93,45	93,45
3. PANGAN									
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	62,16	77,29	79,23	81,21	83,24	83,75	83,75
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	3.294	2.440	2.510	2.560	2.630	2.785	2.785
		Protein per Kpt	69,00	61,99	63,54	65,12	66,75	67,45	67,45
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. PERTANAHAN									
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,0179	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. LINGKUNGAN HIDUP									
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		26,65 (2017)	-	-	-	-	-	-
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		89	-	-	-	-	-	-
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		NA	-	-	-	-	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
5.7.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten :								
5.8.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
5.9.	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standard Minimum	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
5.10.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
5.11.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
5.12.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
5.13.	Penetapan hak MHA	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
5.14.	Facilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	NA	-	-	-	-	-	-
5.15.	Facilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	NA	-	-	-	-	-	-
5.16.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
5.17.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.18.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.19.	Timbulan sampah yang ditangani	%	83,75 (2017)	84,50	85,01	85,75	86,35	86,90	86,90
5.20.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	16,27 (2017)	17,05	17,45	17,95	18,35	18,79	18,79
5.21.	Persentase cakupan area pelayanan	%	85,84	87,99	90,19	92,44	94,76	97,13	97,13
5.22.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,84	87,99	90,19	92,44	94,76	97,13	97,129
5.23.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	85,08	85,35	85,75	85,80	85,95	86,00	86,00
5.24.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.25.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,88	0,91	0,95	0,98	1,00	1,00	1,00
6.2.	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	0,62	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
6.3.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,81	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00
6.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,15	0,20	0,35	0,45	0,50	0,65	0,65
6.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	87,82	85,08	87,20	89,38	91,62	96,50	96,50
6.8.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	81,31	-					0
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	95,65	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Nilai	NA	-	-	-	-	-	-
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Nilai	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Persentase LSM aktif	%	20,34	20,84	21,36	21,89	22,44	23,50	23,50
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	0,00	-	-	-	-	-	-
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	NA	-	-	-	-	-	-
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,82	8,90	8,93	8,96	8,99	9,00	9,00
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	-	-	-	-	-	-
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
8.7.	Ratio Akseptor KB	Rasio	76,22	76,75	76,99	77,15	77,45	77,85	77,85
8.8.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	64,96	65,15	65,45	65,78	65,92	65,98	65,98
8.9.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
8.10.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,99	15,93	16,33	16,73	17,15	17,35	17,35
8.11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,10	22,35	22,75	23,05	23,60	23,95	23,95
8.12.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	85,23	86,52	88,68	90,90	93,17	94,00	94,00
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	62,20	63,15	63,89	64,56	65,15	65,86	65,86
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	51,44	51,95	52,35	52,89	53,35	53,90	53,90
8.15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	35,63	35,98	36,25	36,80	37,05	37,75	37,75
8.16.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	18,18	27,27	36,36	45,45	54,55	54,55
8.17.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	154,55	154,55	154,55	154,55	154,55	154,55	154,55
8.18.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.19.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	NA	-	-	-	-	-	-
8.20.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
8.21.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	125,22	125,22	125,22	125,22	125,22	125,22	125,22
8.22.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75	44,50	50,15	50,85	60,25	60,98	60,98
8.23.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	100,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.24.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	NA	-	-	-	-	-	-
8.25.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	NA	-	-	-	-	-	-
8.26.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	NA	-	-	-	-	-	-
8.27.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	NA	-	-	-	-	-	-
8.28.	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	NA	-	-	-	-	-	-
8.29.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah	85.994	-	-	-	-	-	-
8.30.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45
9. PERHUBUNGAN									
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	411.055	423.325	433.908	444.755	455.874	455.874	455.874
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0013	0,59	0,6	0,62	0,63	0,65	0,65
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1.878	1.924	1.973	2.022	2.072	2.172	2.172
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	1/1/0	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	8,04	8,54	8,75	8,97	9,19	9,35	9,35
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	35,60	36,49	37,4	38,34	39,30	39,45	39,45
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	14,43	20,17	20,67	21,19	21,72	22,35	22,35
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0618	0,0641	0,0657	0,0673	0,0690	0,070	0,070
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	Orang berjumlah 346.014 dan barang	Orang berjumlah 415.055 dan barang	Orang berjumlah 421300 dan barang	Orang berjumlah 433.0500 dan barang	Orang berjumlah 451.055 dan barang	Orang berjumlah 451.055 dan barang	Orang berjumlah 451.055 dan barang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
			berjumlah 204	berjumlah 530,60	berjumlah 575,60	berjumlah 620,60	berjumlah 590	berjumlah 590	berjumlah 590
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah	Orang berjumlah 411.055 dan barang berjumlah 518,6	Orang berjumlah 415.055 dan barang berjumlah 530,60	Orang berjumlah 421300 dan barang berjumlah 575,60	Orang berjumlah 433.050 dan barang berjumlah 620,60	Orang berjumlah 440.055 dan barang berjumlah 590	Orang berjumlah 451.055 dan barang berjumlah 590	Orang berjumlah 451.055 dan barang berjumlah 590
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	NA	-	-	-	-	-	-
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	NA	-	-	-	-	-	-
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	NA	-	-	-	-	-	-
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	-	-	-	-	-	-
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	NA	-	-	-	-	-	-
10.6.	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
10.7.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
10.8.	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	%	NA	-	-	-	-	-	-
10.9.	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	%	NA	-	-	-	-	-	-
10.10.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia/ Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10.11.	Persentase Website OPD	%	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	45,00
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	44,10	45,00	46,00	47,25	48,50	50,00	50,00
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	30,00	35,88	36,77	37,69	38,63	39,15	39,15
11.3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,00	30,35	30,75	30,95	40,25	40,58	40,58
11.5.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	18	20	22	22	22	22	22

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
12.	PENANAMAN MODAL								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13	13	13	14	14	15	15
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	16.689.711.214	17,11	17,53	17,97	18,42	18,75	18,75
12.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(juta rupiah)	16,88	17,25	17,56	17,89	17,97	18,21	18,21
12.4.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7
12.5.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
12.6.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	14	14	14	14	14	14	14
12.7.	Lama Proses Perizinan	hari	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15
12.8.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4
12.9.	Jumlah Macam Pajak	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7
12.10.	Jumlah Macam Retribusi	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3
12.11.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	20,31	20,75	20,96	21,35	21,78	21,95	21,95
12.12.	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,01	87,35	87,75	87,90	88,15	88,75	88,75
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	5,00	5,13	5,25	5,38	5,52	5,75	5,75
13.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7,00	7,18	7,35	7,54	7,73	7,79	7,79
13.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.5.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	11	11	11	11	12	12	12
13.6.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	11	11	11	11	12	12	12
13.7.	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	25	25	25	25	25	25	25
13.8.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	7	8	9	10	11	12	12
13.9.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	6	7	8	9	10	11	11
13.10.	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	15	15	15	15	15	15	15
13.11.	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00
13.12.	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
13.13.	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	1	2	3	4	5	6	6
13.14.	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	22	22	22	22	22	22	22
13.15.	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	Jumlah	1/229	1/229	1/229	1/229	1/229	1/229	1/229
13.16.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	11	-	-	-	-	-	-
14. STATISTIK									
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.4.	Buku "PDRB"	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
15. PERSANDIAN									
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	NA	-	-	-	-	-	-
15.2.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Sangat Kurang/Kurang/Cukup/Baik/Sangat Baik	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
16. KEBUDAYAAN									
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6	6	6	6	7	31
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	4	4	4	4	4	4	4
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	NA	-	-	-	-	-	-
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	4	4	4	4	4	4	4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
17.	PERPUSTAKAAN								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	4,22	4,75	5,15	5,75	6,04	6,65	6,65
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	49.746	51.250	52.531	53.844	55.190	55.210	55.210
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00146	0,00147	0,00147	0,00147	0,00147	0,00147	0,00147
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Jumlah	2.640	2.706	2.773	2.842	2.914	2.925	2.925
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	15.221	15.221	15.345	15.476	15.678	15.713	15.713
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.7.	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	111	111	111	111	111	111	111
17.8.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	1	1	2	2	2	2	2
17.9.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
18.	KEARSIPAN								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	35,08	35,25	35,75	40,00	40,50	50,00	50,00
18.2.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	7	8	9	10	10	10	10
18.3.	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
18.4.	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	13	13	13	13	13	13	13
C.	LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1.1.	Produksi perikanan	ton	628.748,61	684.720,68	701.838,70	719.384,66	737.369,28	775.312,00	775.312,00
1.2.	Konsumsi ikan	%	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53
1.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	3,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	10,68	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00
1.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	NA	-	-	-	-	-	-
1.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%	NA	-	-	-	-	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.	Nilai tukar nelayan		NA	-	-	-	-	-	-
2.	PARIWISATA								
2.1.	Kunjungan wisata	Jumlah	12.573	13.206	13.216	13.265	13.315	13.330	13.330
2.2.	Lama kunjungan Wisata	hari	NA	1	1	1	1	1	1
2.3.	PAD sektor pariwisata	%	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19
2.4.	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	10	10	10	10	10	10	10
2.5.	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27	27	27	27	27	27	27
2.6.	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	12	12	12	12	12	12	12
2.7.	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
2.8.	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		3	3	3	3	3	3	3
2.9.	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
2.10.	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3
2.12.	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
2.13.	Jumlah Objek wisata yang dikelola oleh Swasta	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3
3.	PERTANIAN								
3.1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.085.063,47 (2017)	1.125.325,00	1.130.415,00	1.132.435,00	1.134.115,00	1.150.315,00	1.150.315,00
3.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	25,51	26,52	26,53	26,54	26,55	26,56	26,56
3.3.	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.615.266,50	2.620.315,00	2.631.475,00	2.635.435,00	2.641.275,00	2.651.325,00	2.651.325,00
3.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	61,49	61,80	62,05	62,40	62,75	63,00	63,00
3.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	NA	-	-	-	-	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.6.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	58.066	-	-	-	-		0
3.7.	Cakupan bina kelompok petani	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	PERDAGANGAN								
6.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	NA	-	-	-	-	-	-
7.	PERINDUSTRIAN								
7.1.	Pertumbuhan Industri	%	6,09	7,10	7,95	8,25	8,89	9,35	9,35
7.2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	40,00
7.3.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	20	20	20	20	20	20	20
8.	TRANSMIGRASI								
8.1.	Persentase transmigran swakarsa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2.	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	100	125	150	200	225	250	250
8.3.	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	250	250	250	250	250	250	250
D.	PENUNJANG URUSAN								
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	NA	-	-	-	-	-	-
2	KEUANGAN								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,31	-	-	-	-	-	-
2.3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,20	-	-	-	-	-	-
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	26,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	14,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	58,03 /41,97	55,38/44,15	54,90/44,64	54,58/44,98	56,58/42,99	53,74/45,84	53,74/45,84
2.7.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.8.	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	11.356	17.601,78	18.041,82	18.492,87	18.955,19	19.429,07	19.429,07
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	NA	-	-	-	-	-	-
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	13,21	13,54	13,88	14,23	14,58	13,21	13,21
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	40	40	40	40	40	40	40
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
3.7.	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompetensi	%	NA					90,00	90,00
3.8.	Cakupan PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat managerial	%	NA	-	-	-	-	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.9.	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	NA	-	-	-	-	-	-
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	PENERAPAN SIDA :		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	PENGAWASAN								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4.	Persentase pelanggaran pegawai	%	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Jumlah temuan BPK	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-
6	SEKRETARIAT DEWAN								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
7	SEKRETARIAT DAERAH								
6.4.	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%							
6.5.	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	Jumlah	0	-	-	-	-	-	-
6.6.	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
6.7.	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	NA	-	-	-	-	-	-
6.8.	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.9.	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	80,00					89,00	89,00
6.10.	Persentase Besaran Efisiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	-						
6.11.	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	NA						
6.12.	Nilai LPPD	Nilai	2.771	2.885	2.983	3.126	3.185	3.200	3.200
6.13.	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%							
6.14.	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.15.	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%							
6.16.	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretariat daerah yang diverifikasi	%							
8	KECAMATAN								
6.1.	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80 %	jumlah	NA	22	22	22	22	22	22
6.2.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

8.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Stadar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI		TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	PENDIDIKAN											
1.1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	87,79	88,71	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	79,86	82,73	100	100	100	100	100	100	100
1.3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam	%	32,9	58,58	100	100	100	100	100	100	100
2.	KESEHATAN											
2.1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	88,39	84,96	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	94,27	89,78	100	100	100	100	100	100	100
2.3.	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,87	98,93	100	100	100	100	100	100	100
2.4.	Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	88,39	84,96	100	100	100	100	100	100	100
2.6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI		TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
3.	PEKRJAAN UMUM											
3.1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	PERUMAHAN RAKYAT											
4.1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
5.	TRANTIBUMLINMAS											

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI		TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
5.2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Perda dan perkara	%	42	47	100	100	100	100	100	100	100
5.3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
5.4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	22	100	100	100	100	100	100	100
5.5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
6.	SOSIAL											
6.1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
6.2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
6.3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
6.4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	n.a	100	100	100	100	100	100	100	100
6.5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100

8.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tatakelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (*human development*), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (*social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 8.4.
Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun									
1.1	Jumlah desa tertinggal	Desa	108,00		95,00	90,00	85,00	80,00	75,00	70,00
1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	14,01	13,36						
1.3	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas		60,00		45,00	41,00	38,00	34,00	32,00	30,00
1.4	Proporsipeserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.									
1.5	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Orang	9.903		18.267	21.007	24.158	27.782	31.949	34.994
1.6	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan									
1.7	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		93,57	89,9						
1.8	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap									
1.9	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		76,06		30,00	36,00	43,20	51,84	62,21	65,00
1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat									
1.11	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	55,26		8,00	8,48	8,99	9,53	10,10	11,00
1.12	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	55,26		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.13	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umum	%	6,00		8,00	8,40	8,82	9,26	9,72	11,00
1.14	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	%	21,43		65,00	70,85	77,23	84,18	91,75	100,00
1.15	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang									
1.16	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah									
1.17	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah									

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.18	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan									
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan									
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita									
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan									
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.									
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita									
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita									
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe									
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil		28,60		25,00	22,50	20,25	18,23	16,40	15,00
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	74,50		80,10	82,50	84,98	87,53	90,15	91,29
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan		87,8							
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia									
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)		106,08 per 100.000 penduduk							
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		93,57	89,9						
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan									
3.4	Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup		1;80	1;92	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
3.5	Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup		1;140	1;132	6,00	5,10	4,34	3,68	3,13	2,00
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup		0,0113 per kelahiran bayi	0,0107 per kelahiran bayi						

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.7	Prevalensi HIV pada populasi dewasa		0,009 dari total populasi	0,005 dari total populasi						
3.8	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		174,00		150,00	144,00	138,00	132,00	127,00	125,00
3.9	Kejadian Malaria per 1000 orang									
3.10	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria									
3.11	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B									
3.12	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Orang	29,00		20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00
3.13	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta									
3.14	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)									
3.15	Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun	%	5,90		5,00	4,85	4,70	4,56	4,43	4,00
3.16	Prevalensi tekanan darah tinggi									
3.17	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun									
3.18	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	4,00		2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
3.19	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan		85,00		77,00	75,46	73,95	72,47	71,02	70,00
3.20	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri									
3.21	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa kesehatan									
3.22	Prevalensi penyalahgunaan narkoba									
3.23	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern									
3.24	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		76,06 tingkat keberlangsungan	84,36 tingkat keberlangsungan						
3.25	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	13,00		19,00	19,95	20,95	21,99	23,09	23,50
3.26	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk		100	100						

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.27	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)									
3.28	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas									
3.29	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		1:7.580	1:7.484						
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua									
4.1	Persentase SD/MI berkreditasi minimal B	%	61,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	51,00		86,10	92,99	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	86,60		68,00	70,04	72,14	74,31	76,53	80,00
4.4	Angka partisipasisakar (APK) SD/MI/Sederajat	%	102,39		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Mts/ sederajat	%	96,50		99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat		96,5							
4.7	Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun									
4.8	Jumlah remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TiIK)	Orang	3697,00		4000,00	4080,00	4161,00	4244,00	4329,00	4500,00
4.9	Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/Mts/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) perguruan tinggi	%	95,51 SD/Sederajat at 80,07 SMP/Sederajat		29,00	33,35	38,35	44,11	50,72	52,00
4.10	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun		98,78%	98,80%						
4.11	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun									
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan									
5.1	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age Specific Fertility rate/ASFR)		472,00		300,00	225,00	180,00	144,00	115,20	100,00
5.2	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan									
5.3	Indikator total Fertility rate (TFR)		2,00		2,29	2,22	2,15	2,09	2,03	1,90
5.4	Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100		45,00	48,60	52,49	56,69	61,22	70,00

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	32,30		15,00	10,00	7,00	5,00	3,00	2,00
5.6	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	8,57		35,00	36,75	38,59	40,52	42,54	45,00
5.7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah									
5.8	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		8,57 tingkat DPRD Kabupaten	8,57 tingkat DPRD Kabupaten						
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan									
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	75,45		92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%	95,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	Kualitas Air Danau									
6.4	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku									
6.5	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi									
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua									
7.1	Rasio elektrifikasi									
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua									
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		6,79 PDRB/Kapita							
8.2	PDB per kapita		36603 PDRB/Kapita							
8.3	Persentase tenaga kerja formal	%	64,69%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	64,89%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	41,00	43,46	46,07	48,83	51,76	52,00
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian									

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan									
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur		4,784 dari total	3,892 dari total						
8.7	Tingkat setengah pengangguran									
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)									
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB									
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara		224 Skala Kabuapten	311 Skala Kabuapten						
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		12.477	12.573						
8.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja									
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit									
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi									
9.1	Panjang jalur kereta api									
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan									
9.3	Jumlah pelabuhan strategis		1	1						
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita									
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur									
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur									
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri									
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca									
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara									
10.1	Koefisien Gini		0,3593	0,362						
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		14,01%	13,36%						
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomidi daerah tertinggal									
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal									

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan									
11.1	Persentase pengguna modal di perkotaan									
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama									
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)									
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		5 Angin Putting Beliung 25 Longsor963 Banjir							
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)									
11.6	Persentase sampah perkotaan yang tertangani		83,75							
11.7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah									
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan									
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)									
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		83,75							
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya									
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah									
13.2	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)									
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan									
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi									
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati									
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan									
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati									
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan									

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui									
16.2	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)		81,94							
16.3	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan		100	100						
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan									
17.1	Total pendapatan pemerintah PDB sumbernya									
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan									
17.3	Jumlah metdata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik	Unit	30,00		35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
17.4	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik									
17.5	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama									
17.6	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi rujukan statistik									
17.7	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)									
17.8	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website									
17.9	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)									

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Luwu periode 2019-2024. Kerangka pendanaan jangka menengah yang ditetapkan pada RPJMD ini adalah sampai dengan tahun 2023, dan tahun 2024 merupakan tahun pertama RPJMD periode berikutnya. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025, namun merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2024-2029.

Program-program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multiyear* sehingga hasil dan dampaknya dapat dievaluasi pada akhir tahun perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun Renstra-PD Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ini. Renstra Perangkat Daerah

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

3. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan R-APBD.
4. Bupati/Wakil Bupati Luwu periode 2019-2024 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Luwu berkewajiban mengkoordinasikan penyelarasan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan Renstra-PD Tahun 2019-2024 dan penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ke dalam RKPD selama periode RPJMD.
6. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPELITBANGDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
7. RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.